



Katalog BPS: 4103008

STATISTIK PEMUDA INDONESIA

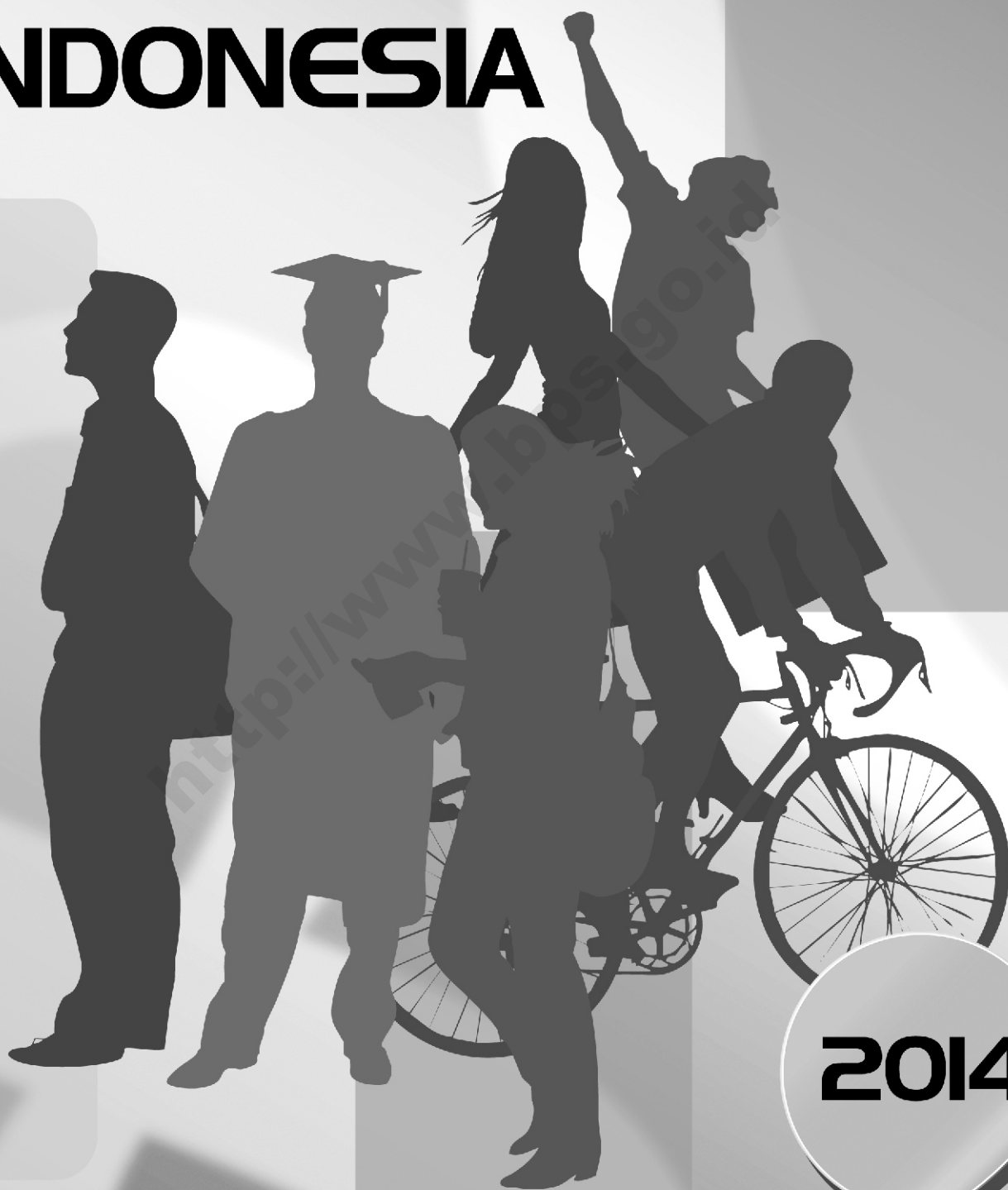


2014



BADAN PUSAT STATISTIK

STATISTIK PEMUDA INDONESIA



2014

STATISTIK PEMUDA INDONESIA 2014

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional

ISSN	: 2086-1028
Nomor Publikasi	: 04220.1501
Katalog BPS	: 4103008
Ukuran Buku	: 29,7 Cm x 21 cm
Jumlah Halaman	: xx + 215 halaman
Naskah	: Sub Direktorat Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial
Penanggung Jawab Umum	: Teguh Pramono, MA
Penanggung Jawab Teknis	: Ir. Meity Trisnowati, M.Si
Editor	: Dwi Susilo, M.Si Amiek Chamami, S.ST, M.Stat Nur Budi Handayani, S.ST, M.Si
Penulis Naskah	: Armadi Setiawan, S.Pi Karuniawati Dewi Ramadani S.Si Eko Budiatmodjo SST
Pengolah Data	: Eko Budiatmodjo SST
Gambar Kulit	: Sub Direktorat Publikasi dan Kompilasi Statistik
Diterbitkan oleh	: Badan Pusat Statistik, Jakarta – Indonesia
Dicetak oleh	:

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA PENGANTAR

Pemuda adalah seorang insan manusia yang mempunyai semangat tinggi dalam memperjuangkan peradaban bangsanya menuju ke arah yang lebih baik. Mereka juga merupakan sosok penting dalam setiap perubahan karena kaum muda bergerak atas nilai-nilai idealisme dan moralitas dalam melihat persoalan yang ada demi tercapainya kesejahteraan bangsa.

Oleh karenanya pembangunan di bidang kepemudaan memerlukan perencanaan program yang realistis dan terarah serta didukung oleh tersedianya data statistik mengenai pemuda. Publikasi Statistik Pemuda Indonesia 2014 adalah suatu publikasi yang secara khusus mengulas mengenai kondisi pemuda dan merupakan kelanjutan dari publikasi serupa yang diterbitkan secara berkala setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sumber data untuk publikasi ini berasal dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2014, sedangkan informasi terkait dengan ketenagakerjaan bersumber dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2014.

Publikasi ini menyajikan gambaran secara makro pemuda Indonesia mengenai profil demografi, pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan pemuda Indonesia pada tahun 2014. Publikasi ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan dalam memberikan rekomendasi terkait kebijakan dan strategi pembangunan di bidang kepemudaan.

Akhir kata, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak, terutama yang berkepentingan dalam pengembangan dan pembangunan di bidang kepemudaan. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan publikasi ini. Kritik dan saran membangun untuk perbaikan publikasi serupa di masa datang sangat diharapkan.

Jakarta, November 2015
Kepala Badan Pusat Statistik



Dr. Suryamin, M.Sc

Ringkasan Eksekutif

Pemuda sejatinya memiliki peran dan fungsi yang strategis dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara, karena peranannya sebagai aktor pembangunan. Apabila peran tersebut sudah mampu dijalankan dengan baik, penuh komitmen, senantiasa konsisten dalam melakukan perubahan dan perbaikan demi kesejahteraan masyarakat, serta didasari oleh ilmu dan nilai-nilai agama, maka proses pembangunan diharapkan akan berhasil mensejahterakan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan kepemudaan harus didukung oleh tersedianya data statistik yang akurat dan mutakhir sebagai bahan perencanaan, target/sasaran pembangunan, pengambilan kebijakan dan evaluasi pembangunan khususnya yang berkaitan dengan pemuda.

Jumlah pemuda di Indonesia sebanyak 61,83 juta jiwa atau sekitar 24,53 persen dari 252,04 juta jiwa penduduk Indonesia. Pemuda mempunyai jumlah yang paling kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berusia di bawah 16 tahun (76,68 juta) dan penduduk di atas 30 tahun (113,52 juta). Rasio jenis kelamin pemuda pada tahun 2014 sebesar 101,38 yang berarti bahwa dari setiap 100 orang pemuda perempuan, terdapat sekitar 101 orang pemuda laki-laki. Hal ini menunjukkan jumlah pemuda laki-laki lebih besar jika dibandingkan dengan perempuan. Jika dilihat menurut tipe daerah, proporsi pemuda di perkotaan (25,92 persen) lebih besar dibandingkan proporsi pemuda di perdesaan (23,14 persen).

Hampir seluruh pemuda telah mengakses pendidikan, diantaranya yaitu sebesar 23,52 persen pemuda berstatus masih bersekolah dan 75,43 persen tidak bersekolah lagi. Namun masih ada pemuda yang belum mengakses pendidikan (tidak pernah bersekolah), yaitu sebesar 1,05 persen. Perkembangan partisipasi pendidikan pemuda cenderung membaik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 persentase pemuda yang masih bersekolah sebesar 19,05 persen, naik menjadi 21,16 persen pada tahun 2013 dan naik kembali pada tahun 2014 menjadi 23,52 persen.

Pemuda Indonesia yang tidak bisa membaca dan menulis atau buta huruf sebesar 0,64 persen. Angka buta huruf pemuda di perdesaan sebesar 1,26 persen

lebih tinggi dibanding di perkotaan yang sebesar 0,10 persen. Rata-rata lama sekolah yang berhasil dicapai para pemuda secara keseluruhan adalah 10,01 tahun atau secara umum pemuda telah dapat menyelesaikan pendidikan hingga kelas 1 Sekolah Menengah (SM). Sebesar 43,78 persen pemuda di Indonesia berpendidikan SM ke atas, 31,99 persen tamat SMP/ sederajat, 18,51 persen tamat SD/ sederajat dan 4,67 persen tidak/ belum tamat SD.

Salah satu indikator untuk menentukan derajat kesehatan penduduk secara kasar adalah keluhan kesehatan. Sekitar 19,51 persen pemuda mengalami keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir. Pemuda perempuan yang mengalami keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir proporsinya lebih tinggi dibandingkan dengan pemuda laki-laki (20,84 persen berbanding 18,20 persen). Seseorang dikatakan sakit apabila keluhan kesehatan yang dialami mengganggu kegiatan/ aktivitas sehari-hari. Susenas 2014 mencatat sebesar 8,77 persen pemuda mengalami sakit dalam sebulan terakhir. Secara umum, lama sakit yang diderita oleh pemuda adalah kurang dari satu minggu (1-7 hari). Sebesar 63,76 persen pemuda menderita sakit selama 1-3 hari, 26,85 persen menderita sakit selama 4-7 hari, dan 9,38 persen lebih dari 7 hari.

Pengobatan modern lebih banyak dipilih oleh pemuda untuk mengobati keluhan kesehatannya. Persentase pemuda yang berobat sendiri dengan menggunakan obat modern mencapai 80,52 persen, obat tradisional sebesar 6,34 persen, dan obat lainnya sebesar 1,12 persen. Cara lain yang dapat digunakan oleh seseorang dalam mengobati sakit yang dideritanya selain mengobati sendiri adalah berobat ke tempat pelayanan kesehatan atau mendatangkan petugas kesehatan ke rumah. Tempat layanan kesehatan yang paling banyak dikunjungi oleh pemuda dalam upaya mengobati sakit yang diderita adalah praktek dokter (33,55 persen), praktek tenaga kesehatan (30,85 persen) dan puskesmas (27,57 persen).

Program Keluarga Berencana (KB) adalah salah satu usaha mencapai kesejahteraan keluarga. Pada tahun 2014, sebesar 60,19 persen pemuda perempuan pernah kawin sedang mengikuti program KB, sebesar 16,78 persen pernah ikut KB tetapi sekarang tidak lagi, dan sebesar 23,02 persen sama sekali tidak pernah mengikuti program KB. Jenis alat/cara ber-KB yang banyak digunakan pemuda perempuan pernah kawin adalah suntikan KB (69,78 persen) dan pil KB (18,70 persen). Alasan pemuda perempuan pernah kawin tidak menggunakan alat KB antara lain karena

baru melahirkan, menyusui, kesehatan, suami merantau dan lainnya (44,24 persen), alasan fertilitas (31,08 persen) dan takut efek samping alat KB (15,54 persen).

Pembangunan ketenagakerjaan tidak terlepas dari pembangunan kepemudaan. Pemuda memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan, termasuk diantaranya memasuki usia kerja. Berdasarkan data Sakernas 2014 sebesar 51,03 persen pemuda di Indonesia selama seminggu terakhir melakukan kegiatan bekerja. Apabila dilihat menurut jenis kelamin, persentase pemuda laki-laki yang bekerja lebih tinggi dibandingkan dengan pemuda perempuan (63,32 persen berbanding 38,50 persen).

Berdasarkan data Sakernas Agustus 2014, pemuda yang terlibat dalam kegiatan ekonomi cukup besar. Hal ini terlihat dari TPAK pemuda yang besarnya mencapai 60,01 persen. Angka ini menunjukkan bahwa dari 100 pemuda, sekitar 60 orang diantaranya aktif melakukan kegiatan ekonomi. TPAK pemuda laki-laki sebesar 74,13 persen, sedangkan TPAK pemuda perempuan sebesar 45,62 persen. Sektor pertanian masih memegang peran penting bagi ketenagakerjaan Indonesia. Hal ini terlihat dari besarnya (25,23 persen) pemuda Indonesia yang bekerja di lapangan usaha pertanian. Selain pertanian, lapangan usaha yang banyak menyerap tenaga kerja pemuda adalah sektor perdagangan (22,86 persen), industri (18,20 persen), dan jasa (16,97 persen). Distribusi pemuda yang bekerja menurut status pekerjaan memberikan gambaran tentang kedudukan seseorang dalam pekerjaan. Lebih dari separuh 53,77 persen pemuda di Indonesia yang bekerja berstatus sebagai buruh/karyawan, selebihnya berstatus sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar (19,15 persen) dan berusaha sendiri (10,67 persen).

Pemuda yang bekerja dengan jam kerja lebih dari 35 jam dalam seminggu sebesar 67,01 persen. TPT pemuda di Indonesia tercatat sebesar 14,97 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa secara rata-rata dari setiap 100 pemuda angkatan kerja sebanyak 14 sampai 15 pemuda belum mempunyai pekerjaan. Secara nasional persentase pemuda yang bekerja dengan pendapatan Rp 1.000.000,- keatas (55,31 persen) lebih tinggi dibandingkan dengan yang memiliki pendapatan kurang dari Rp 1.000.000.

Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Tabel Lampiran	xv
Daftar Tabel <i>Sampling Error</i>	xvii
Daftar Singkatan	xix
Bab I Pendahuluan	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Maksud dan Tujuan	5
1.3 Sistematika Penyajian	5
Bab II Metodologi	9
2.1 Sumber Data	9
2.1.1 Ruang Lingkup	10
2.1.2 Kerangka Sampel	11
2.1.3 Pemilihan Sampel	11
2.1.4 Metode Pengumpulan Data	11
2.2 Keterwakilan sampel	12
2.3 Konsep dan Definisi	13
2.4 Keterbatasan Data	19
2.5 Metode Estimasi	19
2.6 Metode Analisis	19
Bab III Profil Demografi	23
3.1 Jumlah Pemuda dan Jumlah Penduduk Indonesia	24
3.2 Pemuda menurut Jenis Kelamin	25
3.3 Pemuda menurut Wilayah	26
3.4 Pemuda menurut Kelompok Umur	28
3.5 Pemuda menurut Status Perkawinan	29

	Halaman
3.6 Pemuda sebagai Kepala Rumah Tangga	31
3.7 Pemuda menurut Status Tinggal Bersama dalam Rumah Tangga	34
Bab IV Pendidikan	39
4.1 Partisipasi Sekolah	40
4.2 Angka Buta Huruf	46
4.3 Rata-rata Lama Sekolah	49
4.4 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	52
4.5 Akses Internet	54
Bab V Kesehatan	59
5.1 Keluhan Kesehatan	61
5.2 Angka Kesakitan	64
5.3 Lama Sakit	67
5.4 Cara Berobat	69
5.5 Partisipasi Pemuda Perempuan dalam Program Keluarga Berencana (KB)	73
5.6 Umur Perkawinan Pertama Pemuda Perempuan	76
Bab VI Ketenagakerjaan	81
6.1 Partisipasi dalam Kegiatan Ekonomi	82
6.2 Lapangan Usaha	87
6.3 Status Pekerjaan	89
6.4 Jam Kerja	92
6.5 Tingkat Pengangguran Terbuka	94
6.6 Pendapatan/Upah/Gaji Bersih	98
Bab VII Program Pemberdayaan Pemuda	103
7.1 Program Penyadaran Pemuda	105
7.2 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda	106
7.3 Program Kepemudaan Lainnya	110
Daftar Pustaka	111
Lampiran Tabel	115
Penghitungan Tingkat Kesalahan Penarikan Sampel	197

Daftar Gambar

Gambar		Halaman
3.1	Persentase Pemuda Indonesia, 2010–2014	25
3.2	Persebaran Pemuda Indonesia menurut Pulau, 2014	27
3.3	Persentase Pemuda menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin, 2014	29
3.4	Persentase Pemuda menurut Status Perkawinan dan Tipe Daerah, 2014	30
3.5	Proporsi Pemuda Kepala Rumah Tangga menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014	32
4.1	Persentase Pemuda menurut Tipe Daerah dan Partisipasi Sekolah, 2014	41
4.2	Persentase Pemuda menurut Partisipasi Sekolah, 2012–2014	43
4.3	Angka Buta Huruf Pemuda menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2014	47
4.4	Angka Buta Huruf Pemuda menurut Provinsi, 2014	48
4.5	Rata-rata Lama Sekolah Pemuda menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014	49
4.6	Rata-rata Lama Sekolah Pemuda menurut Provinsi, 2014	51
5.1	Proporsi Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan Sebulan Terakhir menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014	62
5.2	Angka Kesakitan Pemuda menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014	65
5.3	Angka Kesakitan Pemuda menurut Provinsi, 2014	66
5.4	Persentase Pemuda yang Sakit menurut Lama Sakit dan Jenis Kelamin, 2014	68
5.5	Persentase Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Mengobati Sendiri menurut Tipe Daerah dan Jenis Obat/Pengobatan, 2014	71
5.6	Proporsi Pemuda Sakit yang Berobat Jalan menurut Tipe Daerah dan Tempat Berobat, 2014	72
5.7	Persentase Pemuda Perempuan yang Berstatus Pernah Kawin menurut Tipe Daerah dan Partisipasi KB, 2014	74

Gambar		Halaman
6.1	TPAK Pemuda menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014	85
6.2	TPAK Pemuda menurut Provinsi, 2014	86
6.3	Proporsi Pemuda Setengah Pengangguran menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014	94
6.4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014	95
6.5	Tingkat Pengangguran Terbuka (IPT) Pemuda menurut Provinsi, 2014	97

<http://www.bps.go.id>

Daftar Tabel

<i>Tabel</i>		<i>Halaman</i>
1	Keputusan mengenai Keakuratan Suatu Estimasi	13
3.1	Jumlah dan Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur dan Tipe Daerah, 2014	24
3.2	Rasio Jenis Kelamin Pemuda menurut Tipe Daerah, 2012–2014	26
3.3	Proporsi Pemuda menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014	27
3.4	Persentase Pemuda menurut Kelompok Umur dan Tipe Daerah, 2014	28
3.5	Proporsi Pemuda yang Pernah Kawin menurut Kelompok Umur, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2014	31
3.6	Proporsi Pemuda Kepala Rumah Tangga menurut Kelompok Umur, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2014	33
3.7	Persentase Pemuda menurut Jenis Kelamin dan Status Tinggal Bersama Dalam Rumah Tangga, 2014	35
4.1	Persentase Pemuda menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin, 2014	41
4.2	Persentase Pemuda menurut Kelompok Umur dan Partisipasi Sekolah, 2014	42
4.3	Persentase Pemuda Usia Sekolah (16–24 Tahun) menurut Jenis Kelamin dan Alasan Tidak Pernah Sekolah atau Tidak Bersekolah Lagi, 2014	44
4.4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pemuda menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Tipe Daerah, 2014	45
4.5	Angka Buta Huruf Pemuda menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2012–2014	46
4.6	Rata-rata Lama Sekolah Pemuda menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2012–2014	50
4.7	Persentase Pemuda menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2014	52
4.8	Proporsi Pemuda yang Mengakses Internet selama Tiga Bulan Terakhir menurut Jenis Kelamin, Partisipasi Sekolah, dan Tipe Daerah, 2014	55
5.1	Proporsi Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan Sebulan Terakhir menurut Status Tinggal Bersama dalam Rumah Tangga dan Jenis Kelamin, 2014	63

Tabel	Halaman
5.2 Proporsi Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Jenis Keluhan, 2014	64
5.3 Persentase Pemuda yang Sakit menurut Lamanya Sakit dan Tipe Daerah, 2014	67
5.4 Persentase Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Mengobati Sendiri menurut Jenis Obat/Pengobatan yang Digunakan dan Jenis Kelamin, 2014	70
5.5 Proporsi Pemuda Sakit yang Berobat Jalan menurut Jenis Kelamin dan Tempat Berobat, 2014	72
5.6 Proporsi Pemuda Sakit yang Berobat Jalan menurut Jenis Kegiatan dan Tempat Berobat, 2014	73
5.7 Persentase Pemuda Perempuan Pernah Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB menurut Alat/Cara KB yang Digunakan dan Tipe Daerah, 2014	75
5.8 Persentase Pemuda Perempuan Pernah Kawin yang Tidak Menggunakan Alat/Cara KB menurut Alasan Utama dan Tipe Daerah, 2014	76
5.9 Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Kawin menurut Tipe Daerah dan Kelompok Umur Perkawinan Pertama, 2014	78
6.1 Persentase Pemuda menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Kegiatan Seminggu Terakhir, 2014	83
6.2 Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2014	84
6.3 TPAK Pemuda menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, 2014	87
6.4 Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Lapangan Usaha dan Tipe Daerah, 2014	88
6.5 Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin, 2014	89
6.6 Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Tipe Daerah, 2014	89
6.7 Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin, 2014	90
6.8 Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2014	91
6.9 Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Jumlah Jam Kerja selama Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin, 2014	92
6.10 Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Jumlah Jam Kerja selama Seminggu Terakhir, 2014	93

<i>Tabel</i>		<i>Halaman</i>
6.11	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Tipe Daerah, 2014	96
6.12	Persentase Pemuda yang Bekerja dan Berusaha atau Dibayar menurut Tipe Daerah dan Pendapatan/Upah/Gaji Bersih Sebulan, 2014	98

<http://www.bps.go.id>

Daftar Tabel Lampiran

<i>Tabel</i>		<i>Halaman</i>
3.1.1–3.1.3	Perkiraan Jumlah Pemuda menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (ribuan), 2014	115–117
3.2	Rasio Jenis Kelamin Pemuda menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014	118
3.3.1–3.3.3	Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2014	119–121
3.4.1–3.4.3	Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2014	122–124
4.1.1–4.1.3	Persentase Pemuda menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur, dan Partisipasi Sekolah, 2014	125–127
4.2.1–4.2.3	Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Partisipasi Sekolah, 2014	128–130
4.3.1–4.3.3	Persentase Pemuda Masih Bersekolah menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2014	131–133
4.4	Persentase Pemuda yang Buta Huruf menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2014	134
4.5.1–4.5.3	Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2014	135–137
4.6.1–4.6.3	Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Alasan Tidak/Belum Pernah Sekolah atau Tidak Bersekolah Lagi, 2014	138–140
4.7	Proporsi Pemuda Masih Sekolah yang Mengakses Internet selama 3 Bulan Terakhir menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2014	141
5.1	Proporsi Pemuda yang Mempunyai Keluhan Kesehatan selama Sebulan Terakhir menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014	142
5.2.1–5.2.3	Proporsi Pemuda yang Mempunyai Keluhan Kesehatan selama Sebulan Terakhir menurut Provinsi dan Jenis Keluhan, 2014	143–145
5.3.1–5.3.3	Angka Kesakitan Pemuda menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2013	146–148
5.4.1–5.4.3	Persentase Pemuda yang Sakit selama Sebulan Terakhir menurut Provinsi dan Lamanya Sakit, 2014	149–151
5.5.1–5.5.3	Persentase Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Mengobati Sendiri menurut Provinsi dan Jenis Obat/Pengobatan yang Digunakan, 2014	152–154
5.6.1–5.6.3	Proporsi Pemuda Sakit yang Berobat Jalan menurut Provinsi dan Tempat Berobat, 2014	155–157

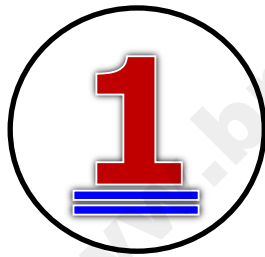
<i>Tabel</i>	<i>Halaman</i>	
5.7.1–5.7.3	Persentase Pemuda Perempuan Pernah Kawin menurut Provinsi dan Partisipasi dalam Program KB, 2014	158–160
5.8.1–5.8.3	Persentase Pemuda Perempuan Pernah Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB menurut Provinsi dan Jenis Alat/Cara KB yang Digunakan, 2014	161–163
5.9.1–5.9.3	Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Kawin menurut Provinsi dan Kelompok Umur saat Perkawinan Pertama, 2014	164–166
6.1.1–6.1.3	Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Kegiatan Utama selama Seminggu Terakhir, 2014	167–169
6.2.1–6.2.3	Persentase Angkatan Kerja Pemuda menurut Provinsi dan Kegiatan Utama selama Seminggu Terakhir, 2014	170–172
6.3.1–6.3.3	Persentase Pemuda Bukan Angkatan Kerja menurut Provinsi dan Kegiatan Utama selama Seminggu Terakhir, 2014	173–175
6.4.1–6.4.3	Persentase Pemuda yang Bekerja selama Seminggu Terakhir menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2014	176–178
6.5.1–6.5.3	Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Provinsi dan Lapangan Usaha, 2014	179–181
6.6.1–6.6.3	Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2014	182–184
6.7.1–6.7.3	Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja Seminggu Terakhir, 2014	185–187
6.8.1–6.8.3	Tingkat Pengangguran Terbuka Pemuda menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014	188–190
6.9.1–6.9.3	Persentase Pemuda yang Bekerja dan Berusaha atau Dibayar menurut Provinsi dan Pendapatan/Upah/Gaji Bersih Sebulan, 2014	191–193

Daftar Tabel *Sampling Error*

Tabel		Halaman
7.1	<i>Sampling Error</i> Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014	201
7.2	<i>Sampling Error</i> Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pemuda menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014	202
7.3	<i>Sampling Error</i> Angka Buta Huruf (ABH) Pemuda menurut Provinsi, 2014	203
7.4	<i>Sampling Error</i> Rata-rata Lama Sekolah (MYS) Pemuda Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014	204
7.5	<i>Sampling Error</i> Persentase Pemuda Pengguna Internet Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014	205
7.6	<i>Sampling Error</i> Persentase Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014	206
7.7	<i>Sampling Error</i> Angka Kesakitan Pemuda Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014	207
7.8	<i>Sampling Error</i> Persentase Pemuda Perempuan yang Menggunakan KB Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014	208
7.9	<i>Sampling Error</i> Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (IPAK) Pemuda menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014	209
7.10	<i>Sampling Error</i> Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014	210
7.11	<i>Sampling Error</i> Tingkat Pengangguran Terbuka (IPT) Pemuda menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014	211

Daftar Singkatan

APS	: Angka Partisipasi Sekolah
ART	: Anggota Rumah Tangga
BKKBN	: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
BKR	: Bina Keluarga Remaja
Genre	: <i>Generasi Berencana</i>
IPM	: Indek Pembangunan Manusia
JPI	: Jambore Pemuda Indonesia
KB	: Keluarga Berencana
Kemempora	: Kementerian Pemuda dan Olahraga
KF	: Keaksaraan Fungsional
KRT	: Kepala Rumah Tangga
KPN	: Kapal Pemuda Nusantara
KRI	: Kapal Republik Indonesia
KWP	: Kelompok Wirausaha Pemuda
LNRPB	: Lintas Nusantara Remaja dan Pemuda Bahari
MDGs	: Millennium Development Goals
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
Paskibraka	: Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
PIK R/M	: Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Mahasiswa
PLS	: Pendidikan Luar Sekolah
PSP3	: Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan
PT	: Perguruan Tinggi
PUP	: Pendewasaan Usia Perkawinan
RPJM	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Sakernas	: Survei Angkatan Kerja Nasional
SD	: Sekolah Dasar
SDM	: Sumber Daya Manusia
SLS	: Satuan Lingkungan Setempat
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SP	: Sensus Penduduk
Susenas	: Survei Sosial Ekonomi Nasional
TPAK	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka
UUD	: Undang-undang



PENDAHULUAN



Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pemuda sejatinya memiliki peran dan fungsi yang strategis dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara, karena peranannya sebagai aktor pembangunan. Menurut Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, yang dimaksud dengan pemuda adalah warga negara Indonesia yang berusia 16-30 tahun. Berbekal kemampuan dan kecakapannya, pemuda mampu menjadi bagian dalam proses pembangunan yang mandiri, kreatif dan berkomitmen. Apabila peran tersebut sudah mampu dijalankan dengan baik, yaitu penuh komitmen dan konsistensi untuk senantiasa melakukan perubahan dan perbaikan demi kesejahteraan masyarakat, serta derap langkah memainkan peran tersebut didasari ilmu dan nilai-nilai agama, maka menjadi harapan besar proses pembangunan akan berhasil mensejahterakan rakyat.

Dalam sejarah pergerakan dan perjuangan bangsa Indonesia, pemuda selalu mempunyai peran yang sangat penting atas setiap peristiwa yang terjadi. Peran penting

pemuda telah tercatat dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang dimulai dari pergerakan Budi Utomo tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, proklamasi kemerdekaan tahun 1945, pergerakan pemuda, pelajar, dan mahasiswa tahun 1966, sampai dengan pergerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang meruntuhkan kekuasaan Orde Baru selama 32 tahun sekaligus membawa bangsa Indonesia memasuki masa reformasi. Fakta historis ini menjadi salah satu bukti bahwa pemuda selama ini mampu berperan aktif sebagai pionir dalam proses perjuangan, pembaruan, dan pembangunan bangsa.

Dalam proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Hal ini sesuai dengan Bab II Pasal 3 Undang-Undang Kepemudaan yang menyebutkan bahwa pembangunan pemuda bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokrasi, bertanggung jawab, berdaya saing serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengingat demikian kompleksnya tujuan pembangunan pemuda tersebut, maka Kementerian Pemuda dan Olahraga yang mempunyai tanggung jawab dalam pemberdayaan dan pengembangan pemuda menuangkan tujuannya dalam Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), yang berbunyi “Mewujudkan Kepemudaan dan Keolahragaan yang Berdaya Saing”. Berdaya saing dalam lingkup kepemudaan mempunyai pengertian “memiliki kemampuan berkompetensi yang dihasilkan melalui pola pengkaderan dan peningkatan potensi pemuda secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan sesuai dengan metode pendidikan, pelatihan, pemagangan, pembimbingan, pendampingan, serta pemanfaatan kajian, kemitraan, dan sentra pemberdayaan pemuda” yang terus menerus dikembangkan sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dalam menciptakan nilai tambah kepemudaan di berbagai bidang pembangunan serta peningkatan akhlak mulia dan prestasi pemuda Indonesia dikancah kompetisi global. Di dalam visi tersebut, pemuda Indonesia harus diberdayakan menjadi pemuda yang cerdas, bermoral baik, berkarakter, dan mandiri serta memiliki kemampuan berkompetensi di era globalisasi.

Untuk mencapai tujuan pembangunan kepemudaan harus didukung oleh tersedianya data statistik yang akurat dan mutakhir sebagai bahan perencanaan, target/sasaran pembangunan, pengambilan kebijakan dan evaluasi pembangunan khususnya yang berkaitan dengan pemuda. Publikasi Statistik Pemuda Indonesia 2014 menyajikan gambaran makro mengenai kondisi dan situasi pemuda Indonesia baik tingkat nasional maupun provinsi pada tahun 2014.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan publikasi Statistik Pemuda Indonesia 2014 bertujuan untuk memperoleh gambaran rinci dan menyeluruh mengenai profil pemuda di Indonesia, baik tingkat nasional maupun provinsi. Profil pemuda dalam publikasi ini dilihat dari sisi demografi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan program pemberdayaan pemuda. Beberapa indikator penting yang disajikan dalam publikasi ini antara lain dalam aspek demografi menyangkut distribusi pemuda, rasio jenis kelamin, status perkawinan, keberadaan pemuda sebagai kepala rumah tangga. Aspek pendidikan mencakup partisipasi sekolah, angka buta huruf, rata-rata lama sekolah, tingkat pendidikan yang ditamatkan dan akses internet. Aspek kesehatan mencakup keluhan kesehatan, angka kesakitan, lama sakit, cara berobat, perkawinan pertama, dan partisipasi dalam program keluarga berencana. Aspek ketenagakerjaan menyajikan partisipasi dalam kegiatan ekonomi, lapangan usaha, status pekerjaan, jam kerja, tingkat pengangguran terbuka, dan pendapatan/upah/gaji bersih. Selanjutnya aspek program pemberdayaan pemuda menyajikan pembangunan kepemudaan yang dilaksanakan melalui berbagai macam program dan kegiatan yang meliputi penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda. Publikasi ini juga memberikan gambaran yang jelas mengenai kesenjangan potensi, kualitas, dan dinamika pemuda menurut wilayah (provinsi dan tipe daerah) serta jenis kelamin.

1.3. Sistematika Penyajian

Publikasi Statistik Pemuda Indonesia 2014 secara sistematis disajikan dalam tujuh bagian. Ringkasan eksekutif di bagian awal publikasi dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dari keseluruhan isi publikasi. Uraian yang

rinci disajikan dalam bab-bab sesuai tema bahasan dari publikasi. Bagian pertama (Bab I) menyajikan latar belakang penyusunan publikasi, tujuan, dan sistematika penyajian. Metodologi mencakup sumber data, ruang lingkup, metode pengumpulan data, petugas lapangan, serta konsep dan definisi disajikan pada bagian kedua (Bab II). Bagian berikutnya secara berturut-turut menyajikan gambaran pemuda dari aspek demografi (Bab III), pendidikan (Bab IV), kesehatan (Bab V), ketenagakerjaan (Bab VI), dan program pemberdayaan pemuda (Bab VII).

<http://www.bps.go.id>



METODOLOGI

<http://www.widjars.go.id>



Metodologi

2.1 Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan dalam publikasi Statistik Pemuda Indonesia Tahun 2014 ini adalah data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2014 dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2014. Jenis data yang digunakan adalah:

- a. Data Kor Susenas Tahun 2014, sebagai dasar untuk memperoleh gambaran makro mengenai kondisi dan potensi pemuda dari sisi demografi, pendidikan, dan kesehatan.
- b. Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2014 yang digunakan untuk melihat gambaran ketenagakerjaan pemuda.

Susenas merupakan survei yang dirancang untuk mengumpulkan data sosial kependudukan yang cakupannya relatif sangat luas, meliputi keseluruhan aspek sosial dan ekonomi penduduk. BPS melaksanakan Susenas sejak tahun 1963. Dalam dua

dekade terakhir sampai dengan tahun 2010, Susenas dilaksanakan setiap tahun. Tahun 2011-2014, Susenas dilaksanakan secara triwulanan (triwulan I–IV) yaitu pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Susenas mengumpulkan data kor (keterangan pokok) dan data modul (keterangan sasaran). Data kor dikumpulkan setiap tahun sedangkan data modul dikumpulkan secara bergiliran setiap 3 tahun sekali. Sedangkan mulai tahun 2015 Susenas akan dilaksanakan satu tahun dua kali yaitu pada bulan Maret dan September.

Data yang dikumpulkan melalui Susenas Kor antara lain keterangan umum anggota rumah tangga (anggota ruta), yaitu nama, hubungan dengan kepala rumah tangga, jenis kelamin, umur, dan status perkawinan; keterangan tentang kesehatan; keterangan pendidikan anggota ruta 5 tahun ke atas; keterangan kegiatan ketenagakerjaan anggota ruta 10 tahun ke atas; dan keterangan fertilitas untuk wanita pernah kawin. Selain itu Susenas Kor juga mengumpulkan data mengenai keterangan perumahan yang mencakup penguasaan tempat tinggal, luas lantai, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, sumber penerangan, dan bahan bakar/energi untuk memasak; dan keterangan sosial ekonomi lainnya, antara lain mencakup pemanfaatan fasilitas program pemberdayaan masyarakat miskin (raskin, kartu sehat, dan sejenisnya), pemanfaatan fasilitas kredit, ketersediaan jaminan kesehatan dan aset dan jaminan rumah tangga; dan keterangan teknologi komunikasi dan informasi.

2.1.1 Ruang Lingkup

Pelaksanaan Susenas Kor 2014 dilaksanakan dalam 3 triwulan, mencakup 225.000 rumah tangga sampel yang tersebar di seluruh provinsi dan 497 kabupaten/kota di Indonesia, dimana setiap triwulan akan didistribusikan sebanyak 75.000 rumah tangga. Data hasil pencacahan setiap triwulan dapat disajikan baik untuk tingkat nasional maupun provinsi, sedangkan dari kumulatif pelaksanaan pencacahan selama empat triwulan datanya dapat disajikan sampai dengan tingkat kabupaten/kota. Data yang digunakan dalam publikasi ini adalah data gabungan Susenas Kor 2014 Triwulan I-III dan Susenas Kor 2013 Triwulan IV.

2.1.2 Kerangka Sampel

Kerangka sampel yang digunakan terdiri dari tiga jenis, yaitu kerangka sampel untuk penarikan sampel tahap pertama, kerangka sampel untuk penarikan sampel tahap kedua, dan kerangka sampel untuk penarikan sampel tahap ketiga.

- Kerangka sampel tahap pertama adalah daftar wilayah pencacahan (wilcah) SP2010 yang disertai dengan informasi banyaknya rumah tangga hasil listing SP2010 (Daftar RBL1).
- Kerangka sampel tahap kedua adalah daftar blok sensus pada setiap wilcah terpilih.
- Kerangka sampel tahap ketiga adalah daftar rumah tangga biasa pada blok sensus terpilih yang telah dimutakhirkan menjelang pelaksanaan survei. Rumah tangga tidak termasuk rumah tangga khusus seperti panti asuhan, barak polisi/militer, dan penjara.

2.1.3 Pemilihan Sampel

Metode *sampling* yang digunakan yaitu penarikan sampel tiga tahap berstrata. Tahapan dari metode ini diuraikan sebagai berikut:

- Tahap pertama, memilih sampel wilcah secara *PPS (Probability Proportional to Size)* dengan *size* banyaknya rumah tangga SP2010. Kemudian wilcah terpilih tersebut dialokasikan secara acak ke dalam 4 (empat) triwulan. Keseluruhan sampel wilcah diambil sebanyak 30 ribu wilcah, masing-masing triwulan sebanyak 7,5 ribu wilcah.
- Tahap kedua, memilih BS pada setiap wilcah terpilih Susenas Triwulan I, II, III, dan IV.
- Tahap ketiga, dari setiap blok sensus terpilih Susenas yang sudah dilakukan pemutakhiran listing rumah tangga hasil Sensus Penduduk tahun 2010, dipilih sebanyak 10 rumah tangga secara sistematis. Pemilihan sampel rumah tangga di beberapa lokasi menggunakan program komputer yang telah disiapkan berdasarkan hasil pemutakhiran.

2.1.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data di setiap rumah tangga terpilih dilakukan wawancara langsung antara petugas pencacah dengan responden. Keterangan individu dikumpulkan melalui wawancara dengan individu yang bersangkutan, sedangkan

keterangan tentang rumah tangga dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala rumah tangga, suami/istri kepala rumah tangga, atau anggota rumah tangga lain yang mengetahui karakteristik yang ditanyakan.

2.2 Keterwakilan Sampel

Keterwakilan sampel dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu banyaknya sampel, kesalahan *sampling* (*sampling error*), dan kesalahan *non sampling* atau *human errors* (*non sampling error*). Keterwakilan sampel ini mempengaruhi estimasi hasil pendataan.

(1) Banyaknya sampel

Semakin banyak atau semakin besar jumlah sampel dalam suatu survei, maka estimasi yang dihasilkan akan semakin mendekati karakteristik populasinya.

(2) Kesalahan *non sampling* (*Non Sampling Error*)

Non sampling error merupakan kesalahan yang muncul pada saat pelaksanaan survei dan atau saat pengolahan data. Contoh kesalahan dalam pelaksanaan survei antara lain:

- i) Penggunaan konsep dan definisi yang salah oleh petugas akibat kesalahan penyampaian dari instruktur ke petugas pencacah maupun pengawas,
- ii) Tidak ditemukannya rumah tangga sampel,
- iii) Kesalahan pengertian antara responden dan petugas pencacah pada saat wawancara.

Sedangkan contoh kesalahan pada saat pengolahan antara lain:

- i) Kesalahan pada saat perekaman data (*entry data*),
- ii) Kesalahan *editing* dan *coding*.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan pendataan yang bertujuan untuk memperkecil jenis kesalahan ini, namun kesalahan *non sampling* tidak dapat dihilangkan sama sekali serta sulit untuk dievaluasi secara statistik.

(3) Kesalahan *sampling* (*Sampling Error*)

Sampling error merupakan kesalahan yang muncul akibat dari penggunaan teknik *sampling* dalam suatu survei. Estimasi yang dihasilkan dalam survei tidak terlepas dari *sampling variability*. Secara statistik, besarnya *sampling error* dapat ditunjukkan oleh besarnya angka galat baku (*Standard Error/SE*). Untuk mengukur

sejauh mana sampel yang digunakan sudah cukup menggambarkan keadaan parameter populasi digunakan *Relative Standard Error (RSE)*, yaitu hasil bagi SE dengan nilai estimasi suatu variabel yang dinyatakan dalam persentase (%).

Dalam publikasi ini penghitungan RSE menggunakan metode *Taylor Linearization* untuk mengestimasi nilai total maupun rata-ratanya. Namun tidak semua variabel hasil pendataan dihitung SE dan RSE, hanya beberapa variabel penting saja yang dihitung.

Menurut Aryago Mulia dkk (2008), kualitas hasil estimasi suatu survei bisa diamati dari RSE yang dihasilkan dimana keputusan mengenai keakuratan suatu estimasi bisa diamati dari hasil penghitungan RSE tersebut. Kesalahan *sampling* dari beberapa estimasi harus digunakan secara hati-hati. Untuk estimasi berdasarkan jumlah kasus yang kecil, kesalahan relatif cenderung sangat besar. Secara umum, besaran SE meningkat seiring dengan meningkatnya besaran estimasi. Sebaliknya, RSE menurun jika ukuran estimasi tersebut meningkat. Estimasi yang sangat kecil dengan demikian akan menghasilkan RSE yang tinggi sehingga nilainya menjadi tidak akurat. Nilai estimasi dengan $RSE \leq 25\%$ dianggap akurat, sedangkan nilai estimasi dengan $RSE > 25\%$ tetapi $\leq 50\%$ perlu hati-hati jika ingin digunakan, dan estimasi dengan $RSE > 50\%$ dianggap sangat tidak akurat dan seharusnya digabungkan dengan estimasi yang lain untuk memberikan estimasi dengan $RSE \leq 25\%$.

Tabel 1. Keputusan mengenai Keakuratan Suatu Estimasi

Kondisi	Perlakuan
$RSE \leq 25\%$	Akurat (bisa digunakan)
$25\% < RSE \leq 50\%$	Perlu hati-hati jika digunakan
$RSE > 50\%$	Dianggap tidak akurat (harus digabungkan dengan estimasi lain untuk memberikan estimasi dengan $RSE \leq 25\%$).

2.3 Konsep dan Definisi

- a. **Pemuda** adalah penduduk berumur 16-30 tahun.
- b. **Tipe Daerah** menggambarkan kelompok desa/kelurahan yang termasuk daerah perkotaan atau perdesaan. Penentuan suatu desa/kelurahan termasuk perkotaan atau perdesaan menggunakan suatu indikator komposit (indikator gabungan) yang

skor atau nilainya didasarkan pada skor atau nilai-nilai tiga buah variabel: kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan akses ke fasilitas perkotaan.

- c. **Rumah Tangga Biasa** adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami atau tinggal bersama di sebagian atau seluruh bangunan fisik/bangunan sensus dan biasanya makan dari satu dapur. Yang dimaksud satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola menjadi satu. Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam satu bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.

Rumah Tangga Khusus adalah orang yang tinggal di asrama seperti asrama perawat, asrama mahasiswa dan asrama TNI/Polisi, panti asuhan, panti jompo, dan sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) berjumlah 10 orang atau lebih.

- d. **Kepala Rumah Tangga** adalah salah seorang dari ART yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari di rumah tangga atau orang yang dituakan/dianggap/ditunjuk sebagai KRT.
- e. **Anggota Rumah Tangga** adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga baik yang pada waktu pencacahan berada di rumah tangga tersebut maupun yang sedang bepergian kurang dari 6 bulan dan tidak berniat pindah.

Tidak termasuk anggota rumah tangga yaitu orang yang telah bepergian selama 6 bulan atau lebih, atau kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah (akan meninggalkan rumah selama 6 bulan atau lebih).

Di sisi lain, orang yang telah 6 bulan atau lebih tinggal di rumah tangga yang sedang dicacah atau yang telah tinggal kurang dari 6 bulan tetapi berniat menetap **dianggap** sebagai anggota rumah tangga dari rumah tangga yang sedang dicacah tersebut.

- f. **Rasio jenis kelamin** adalah perbandingan antara penduduk laki-laki dan perempuan pada suatu daerah dan pada waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki per 100 perempuan.

- g. **Kawin** adalah mempunyai isteri (bagi pria) atau suami (bagi wanita) pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun tinggal terpisah. Dalam hal ini yang dicakup tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, negara dan sebagainya), tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami isteri.
- h. **Cerai Hidup** adalah berpisah sebagai suami-isteri karena bercerai dan belum kawin lagi. Dalam hal ini termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. Sebaliknya tidak termasuk mereka yang hanya hidup terpisah tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/isteri ditinggalkan oleh isteri/suami ke tempat lain karena sekolah, bekerja, mencari pekerjaan atau untuk keperluan lain. Wanita yang mengaku belum pernah kawin tetapi mengaku pernah hamil dianggap sebagai cerai hidup.
- i. **Cerai Mati** adalah ditinggal mati oleh suami atau isterinya dan belum kawin lagi.
- j. **Tidak/belum pernah sekolah** adalah tidak/belum pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan, termasuk mereka yang tamat taman kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke sekolah dasar.

Masih bersekolah adalah apabila terdaftar dan aktif mengikuti proses belajar di suatu jenjang pendidikan formal dan non formal (Paket A, Paket B dan Paket C), baik yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Kementerian Agama (Kemenag), Instansi Negeri lain maupun Instansi Swasta.

Tidak bersekolah lagi adalah pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun non formal (Paket A/B/C), tetapi pada saat pencacahan tidak lagi terdaftar dan tidak lagi aktif.

k. **Pendidikan:**

Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, meliputi SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, SM/MA/ sederajat, dan PT.

Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Meliputi pendidikan

kecakapan hidup (kursus), pendidikan anak usia dini (PAUD) atau prasekolah, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan (paket A, paket B, dan paket C) serta pendidikan lainnya yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

l. Tamat Sekolah adalah telah menyelesaikan pelajaran pada kelas/tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah. Seorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi jika ia mengikuti ujian dan lulus maka dianggap tamat.

m. Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan adalah jenjang pendidikan tertinggi yang sudah ditamatkan oleh seseorang yang sudah tidak sekolah lagi atau jenjang pendidikan tertinggi yang pernah diduduki dan ditamatkan oleh seseorang yang masih bersekolah.

Belum tamat SD adalah pernah/sedang bersekolah di SD atau yang sederajat tetapi tidak/belum tamat.

SD meliputi sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, dan sederajat.

SMP meliputi jenjang pendidikan SMP umum, madrasah tsanawiyah, SMP kejuruan, dan sederajat.

SM meliputi jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), madrasah aliyah, dan sederajat.

Diploma/Sarjana adalah program DI/DII/DIII atau mendapatkan gelar sarjana muda pada suatu akademi/perguruan tinggi yang menyelenggarakan program diploma/mengeluarkan gelar sarjana muda, program pendidikan diploma IV, sarjana pada suatu perguruan tinggi, program pendidikan pascasarjana (master atau doktor), spesialis 1 atau 2 pada suatu perguruan tinggi.

n. Dapat Membaca dan Menulis adalah kemampuan seseorang untuk bisa membaca dan menulis kata-kata/kalimat sederhana dalam huruf tertentu.

Buta Aksara/Huruf adalah tidak bisa membaca dan menulis kalimat sederhana dengan suatu aksara, termasuk huruf *Braille*. Orang cacat yang pernah dapat membaca dan menulis digolongkan tidak buta huruf.

- o. Keluhan kesehatan** adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan baik karena penyakit, kecelakaan, kriminal, dan lain lain.
- p. Sakit** adalah menderita penyakit baik akut maupun kronis atau gangguan kesehatan lainnya yang menyebabkan aktivitas kerja terganggu. Orang yang mempunyai keluhan kesehatan (misalnya masuk angin atau pilek) tetapi kegiatan sehari-harinya tidak terganggu dianggap tidak sakit.
- q. Angkatan Kerja Pemuda** adalah penduduk berumur 16–30 tahun yang selama seminggu sebelum pencacahan mempunyai pekerjaan, baik bekerja maupun sementara tidak bekerja, atau yang sedang mencari pekerjaan.

Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh/membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu sebelum pencacahan. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus (termasuk pekerja keluarga tanpa upah, yang membantu dalam kegiatan usaha/ekonomi).

Menganggur adalah mereka yang termasuk angkatan kerja tetapi tidak bekerja.

Mencari Pekerjaan adalah kegiatan dari mereka yang bekerja tetapi karena suatu hal masih mencari pekerjaan; atau mereka yang dibebastugaskan dan akan dipanggil kembali tetapi sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan; atau mereka yang pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan; atau mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.

Mempersiapkan suatu usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha yang baru, yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/karyawan/pegawai dibayar maupun tidak dibayar. Mempersiapkan suatu usaha yang dimaksud adalah apabila seseorang telah/sedang melakukan tindakan nyata seperti mengumpulkan modal atau alat, mencari lokasi, mengurus surat ijin usaha, dsb.

- r. Bukan Angkatan Kerja Pemuda** adalah penduduk berumur 16–30 tahun yang selama seminggu sebelum pencacahan hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, atau melakukan kegiatan lainnya. Dapat juga berarti tidak melakukan kegiatan yang

dapat dimasukkan dalam kategori bekerja, sementara tidak bekerja atau mencari pekerjaan.

- s. **Lapangan Usaha** adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/perusahaan/instansi tempat seseorang bekerja.
- t. **Status Pekerjaan** adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan, misalnya berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain, berusaha dibantu buruh tetap atau buruh/karyawan.
- u. **Jam Kerja** adalah jumlah waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja.
- v. **Angka Partisipasi Sekolah** adalah nilai perbandingan (dalam persen) banyaknya penduduk yang bersekolah terhadap total penduduk menurut batasan umur sekolah pada setiap jenjang pendidikan formal dan non formal (Paket A setara SD, Paket B setara SMP dan Paket C setara SM).
- w. **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)** adalah persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

TPAK dihitung dengan rumus:

$$TPAK = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100\%$$

Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas. Namun untuk publikasi ini umur dibatasi 16-30 tahun.

- x. **Tingkat Pengangguran Terbuka** adalah persentase angkatan kerja yang aktif mencari pekerjaan dan tidak sedang mempunyai pekerjaan.

TPT dihitung dengan rumus:

$$TPT = \frac{\text{Jumlah Orang yang Mencari Pekerjaan}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

- y. **Angka Ketergantungan Penduduk** adalah angka yang menunjukkan tingkat ketergantungan penduduk usia tidak produktif (usia < 15 tahun dan usia > 64 tahun) pada penduduk usia produktif (15–59 tahun).

2.4 Keterbatasan Data

Survei-survei dengan pendekatan rumah tangga yang diselenggarakan BPS, termasuk Susenas hanya mencakup populasi yang tinggal di suatu rumah tangga biasa. Penduduk yang tinggal di rumah tangga khusus, seperti asrama perawat, asrama mahasiswa, asrama TNI/Polisi, panti asuhan, panti jompo tidak dicakup dalam survei.

2.5 Metode Estimasi

Angka-angka yang disajikan dalam publikasi ini merupakan angka estimasi dengan menggunakan penimbang (*weighted*) yang dihitung berdasarkan angka proyeksi penduduk per kabupaten/kota 2010–2035 yang telah dipublikasikan. Untuk data tahun 2011 dan 2012 juga dilakukan estimasi ulang (*backcasting*) dengan penimbang yang dihitung berdasarkan hasil proyeksi tersebut.

2.6 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis deskriptif dengan penyajian data dalam bentuk tabel ulasan sederhana dan visualisasi berupa gambar/grafik untuk memudahkan pembaca dalam memahaminya. Analisis yang disajikan disertai dengan analisis diferensial untuk melihat perbedaan pola serta gambaran antar daerah perkotaan dan perdesaan serta antar wilayah provinsi. Selain itu disertakan juga analisis tren dalam upaya memperoleh gambaran secara rinci mengenai pemuda selama beberapa periode waktu. Pada bagian akhir publikasi ini dilengkapi dengan lampiran tabel untuk melihat data pada tingkat provinsi.



PROFIL DEMOGRAFI

<http://www.pns.go.id>



Profil Demografi

Pemuda merupakan bagian dari penduduk usia produktif. Selain itu, pemuda menjadi salah satu sumber potensial dalam proses pembangunan bangsa yang memegang peranan penting sebagai sumber kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan. Sejarah telah membuktikan bahwa pemuda adalah salah satu pilar yang memiliki peran besar dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga maju mundurnya suatu negara sedikit banyak ditentukan oleh pemikiran dan kontribusi aktif dari pemuda di negara tersebut (Wahyu Ishardino Satries). Pada generasi sekarang, pemuda merupakan penerus perjuangan generasi terdahulu untuk mewujudkan cita-cita bangsa.

Untuk itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan dalam kerangka hukum nasional. Hal tersebut sesuai dengan nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa,

kemanusiaan, kebangsaan, kebhinekaan, demokratis, keadilan, partisipatif, kebersamaan, kesetaraan, dan kemandirian.

Bab ini memberikan gambaran beberapa aspek penting demografis pemuda di Indonesia, yaitu: jumlah, distribusi, dan struktur/komposisi pemuda yang disajikan pada level nasional dan provinsi. Pembahasan profil pemuda diuraikan lebih rinci menurut jenis kelamin, kelompok umur, status perkawinan, dan hubungan dengan kepala rumah tangga.

3.1 Jumlah Pemuda dan Jumlah Penduduk Indonesia

Jumlah pemuda di Indonesia sekitar 61,83 juta jiwa atau 24,53 persen dari jumlah penduduk Indonesia (lihat Tabel 3.1). Jumlah pemuda yang cukup besar ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sumber daya manusia yang cukup sebagai penggerak/motor pembangunan.

Tabel 3.1
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Tipe Daerah, 2014

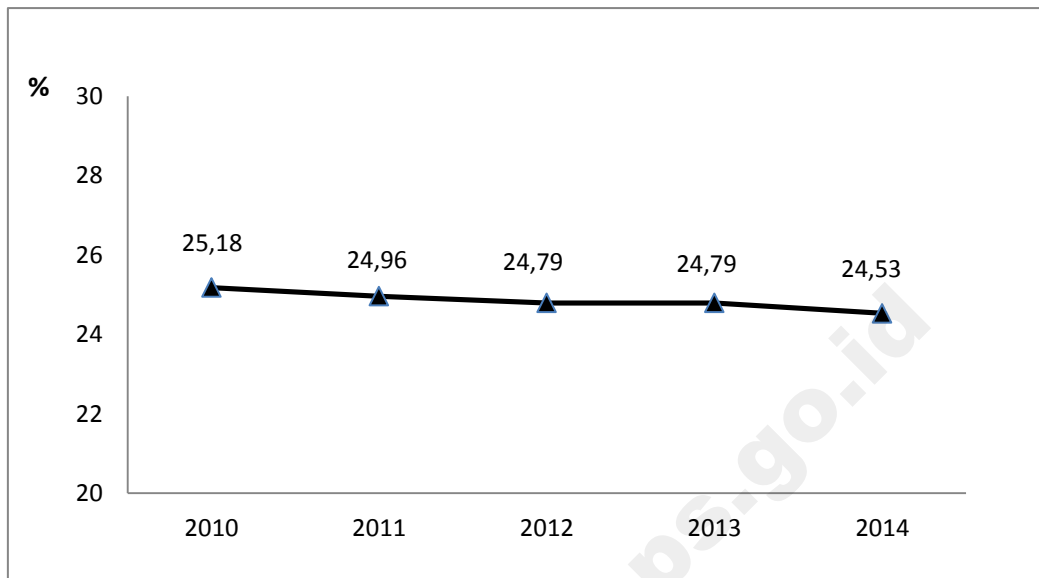
Kelompok Umur (Tahun)	Perkotaan (K)		Perdesaan (D)		K+D	
	Jumlah (000)	Persen	Jumlah (000)	Persen	Jumlah (000)	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
< 16	36 860,72	29,18	39 816,74	31,68	76 677,46	30,42
16 – 30	32 751,57	25,92	29 083,12	23,14	61 834,69	24,53
> 30	56 720,89	44,90	56 802,61	45,19	113 523,50	45,04
Jumlah	126 333,18	100,00	125 702,46	100,00	252 035,65	100,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Jumlah dan persentase pemuda lebih rendah dari jumlah dan persentase penduduk kelompok umur lainnya. Jumlah penduduk pada kelompok umur kurang dari 16 tahun sekitar 76,68 juta atau 30,42 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Sementara itu jumlah penduduk pada kelompok umur lebih dari 30 tahun sekitar 113,52 juta atau 45,04 persen dari jumlah penduduk.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, persentase pemuda terhadap penduduk Indonesia pada tahun 2014 mengalami penurunan. Perkembangan persentase pemuda dalam lima tahun terakhir disajikan pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1
Persentase Pemuda Indonesia, 2010–2014



Sumber: BPS, Susenas Kor 2010–2014

Persentase pemuda di Indonesia pada tahun 2010 hingga tahun 2014 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2010 persentase pemuda Indonesia tercatat sebesar 25,18 persen. Angka tersebut menurun menjadi 24,96 persen di tahun 2011. Pada tahun 2012 dan 2013 persentase pemuda mengalami penurunan lagi menjadi sebesar 24,79 persen dan pada tahun 2014 menjadi sebesar 24,53 persen.

3.2 Pemuda Menurut Jenis Kelamin

Perbandingan antara penduduk laki-laki dan perempuan pada suatu daerah dan pada waktu tertentu dinamakan dengan rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki per 100 perempuan. Angka rasio jenis kelamin yang lebih dari 100 menunjukkan bahwa jumlah pemuda laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan pemuda perempuan.

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa rasio jenis kelamin pemuda pada tahun 2014 sebesar 101,38. Angka ini menunjukkan bahwa terdapat 101 pemuda laki-laki diantara 100 orang pemuda perempuan. Lebih banyaknya komposisi pemuda laki-laki dibanding

pemuda perempuan juga terjadi di perkotaan maupun di perdesaan. Rasio jenis kelamin pemuda di perkotaan tercatat sebesar 100,76 dan di perdesaan sebesar 102,00.

Tabel 3.2
Rasio Jenis Kelamin Pemuda Menurut Tipe Daerah, 2012–2014

Tipe Daerah	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan (K)	100,98	100,60	100,76
Perdesaan (D)	102,39	102,16	102,00
K+D	101,64	101,33	101,38

Sumber: BPS, Susenas Kor 2012–2014

Perkembangan rasio jenis kelamin pemuda mengalami penurunan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 baik di perkotaan maupun perdesaan. Pada tahun 2012 rasio jenis kelamin pemuda tercatat sebesar 101,64 dan tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 101,33. Sedangkan pada tahun 2014 angka tersebut mengalami kenaikan menjadi 101,38. Dari Tabel 3.2 juga terlihat bahwa pada tahun 2012 hingga tahun 2014 rasio jenis kelamin pemuda di wilayah perkotaan lebih rendah dibanding rasio jenis kelamin pemuda di wilayah perdesaan.

3.3 Pemuda Menurut Wilayah

Di Indonesia ada dua tipe daerah, yaitu perkotaan dan perdesaan yang masing-masing memiliki perbedaan pola kehidupan. Pusat kota menjadi daya tarik tersendiri bagi penduduk untuk tinggal di perkotaan karena kemajuan di bidang ekonomi serta anggapan bahwa kota lebih menjanjikan kehidupan yang lebih baik dibandingkan dengan desa. Selain itu, tersedianya lapangan kerja yang lebih luas serta fasilitas pendidikan maupun fasilitas-fasilitas lain yang lebih lengkap menyebabkan banyak penduduk yang melakukan urbanisasi.

Pemuda lebih banyak yang tinggal di perkotaan daripada di perdesaan. Hal ini tercermin pada proporsi pemuda di perkotaan dan perdesaan. Berdasarkan Tabel 3.3, terlihat bahwa proporsi pemuda di perkotaan lebih besar daripada proporsi pemuda di perdesaan. Diantara penduduk yang tinggal di perkotaan sekitar 25,92 persennya

adalah pemuda. Sementara itu, dari total penduduk yang tinggal di perdesaan 23,14 persennya adalah pemuda.

Tabel 3.3
Proporsi Pemuda Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014

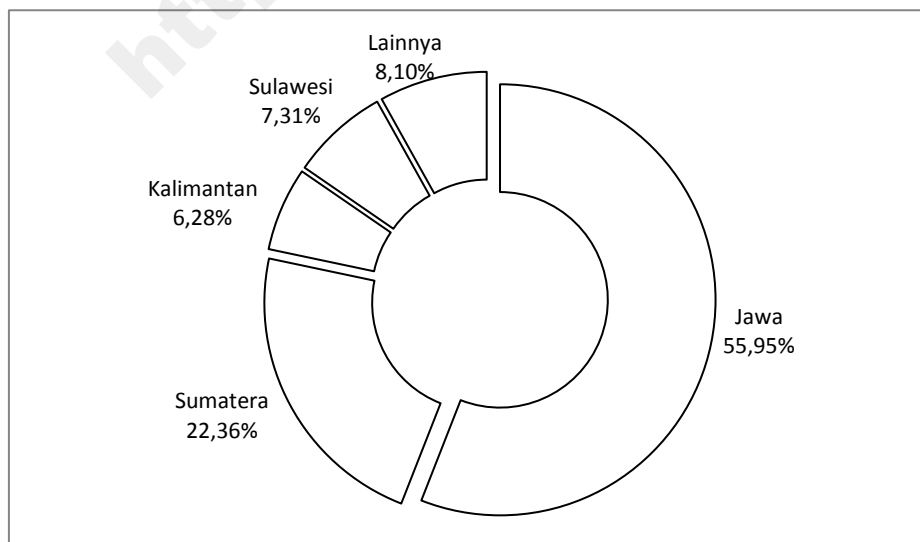
Tipe Daerah	Laki-Laki (L)	Perempuan (P)	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan (K)	25,90	25,95	25,92
Perdesaan (D)	23,24	23,03	23,14
K+D	24,57	24,49	24,53

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Dari Tabel 3.3 terlihat bahwa di perkotaan, perbedaan proporsi pemuda laki-laki sedikit lebih rendah daripada proporsi pemuda perempuan. Sebaliknya di perdesaan proporsi pemuda laki-laki lebih tinggi daripada proporsi pemuda perempuan.

Sementara itu, distribusi pemuda menurut pulau dapat dilihat pada Gambar 3.2. Pada tahun 2014, sebaran pemuda terkonsentrasi di Pulau Jawa dengan persentase sebesar 55,95 persen. Sisanya tersebar di Pulau Sumatera (22,36 persen), Sulawesi (7,31 persen), Kalimantan (6,28 persen) dan sebesar 8,10 persen tersebar di pulau-pulau lainnya seperti Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Gambar 3.2
Persebaran Pemuda Indonesia Menurut Pulau, 2014



Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Dilihat berdasarkan distribusi pemuda menurut provinsi tiga provinsi yang memiliki jumlah pemuda terbanyak berturut-turut adalah Jawa Barat (11,57 juta), Jawa Timur (8,62 juta), dan Jawa Tengah (7,45 juta). Sementara, tiga provinsi yang memiliki jumlah pemuda paling sedikit berturut-turut adalah Papua Barat (0,21 juta), Gorontalo (0,28 juta), dan Maluku Utara (0,29 juta). Hal ini dapat dilihat pada lampiran Tabel 3.1.3.

3.4 Pemuda Menurut Kelompok Umur

Umur pemuda dikelompokkan menjadi 16-20 tahun, 21-25 tahun, dan 26-30 tahun. Tabel 3.4 menyajikan struktur umur pemuda pada tahun 2014. Persentase pemuda tertinggi berada pada kelompok umur 26–30 tahun dengan persentase sebesar 34,69 persen. Sebaliknya, persentase pemuda terendah berada pada kelompok umur 16-20 tahun yaitu sebesar 32,23 persen.

Tabel 3.4
Persentase Pemuda Menurut Kelompok Umur dan Tipe Daerah, 2014

Kelompok Umur (Tahun)	Perkotaan (K)	Perdesaan (D)	K+D	
			%	Jumlah (000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16–20	32,35	32,09	32,23	19 927,62
21–25	33,94	32,11	33,08	20 453,74
26–30	34,72	35,80	34,69	21 453,33
Jumlah	100,00	100,00	100,00	61 834,69

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

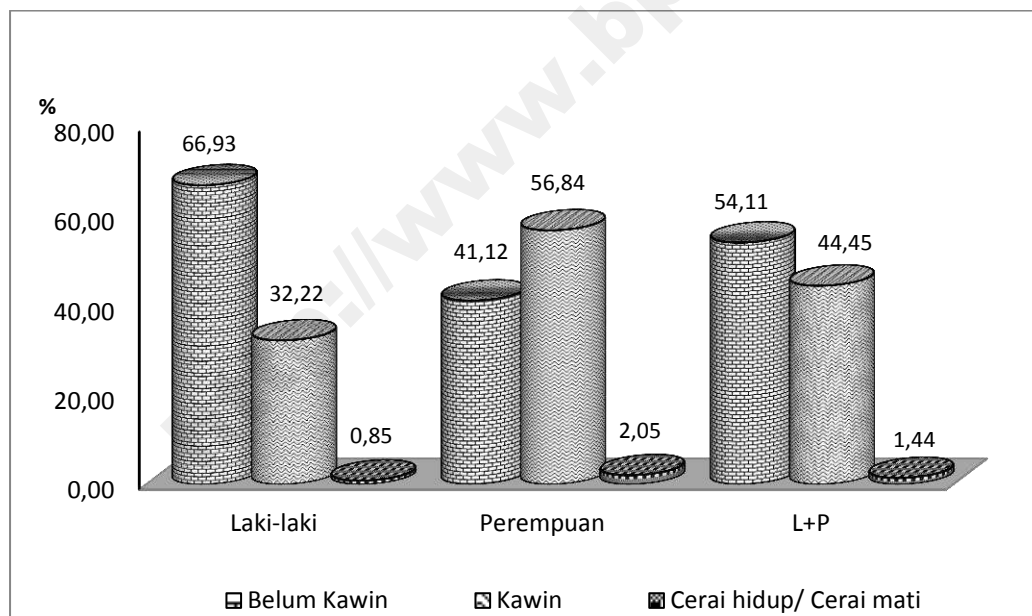
Pada Tabel 3.4 terlihat bahwa terdapat perbedaan struktur pemuda di daerah perkotaan dan perdesaan. Di perkotaan persentase pemuda tertinggi berada pada kelompok umur 21-25 tahun, sementara di perdesaan persentase pemuda tertinggi berada pada kelompok umur 26-30 tahun. Akan tetapi, baik di perkotaan maupun perdesaan persentase pemuda terendah berada pada kelompok umur 16-20 tahun, yaitu masing-masing sebesar 32,35 persen dan 32,09 persen.

3.5 Pemuda Menurut Status Perkawinan

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Bab IV pasal 8 menyatakan bahwa apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon istri belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan.

Gambar 3.3 menunjukkan persentase pemuda menurut status perkawinan dan jenis kelaminnya. Terlihat bahwa sebagian besar pemuda berstatus belum kawin, yaitu sekitar 54,11 persen. Sementara pemuda yang berstatus kawin ada sebesar 44,45 persen dan sisanya adalah mereka yang berstatus cerai hidup/mati.

Gambar 3.3
Persentase Pemuda Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin, 2014



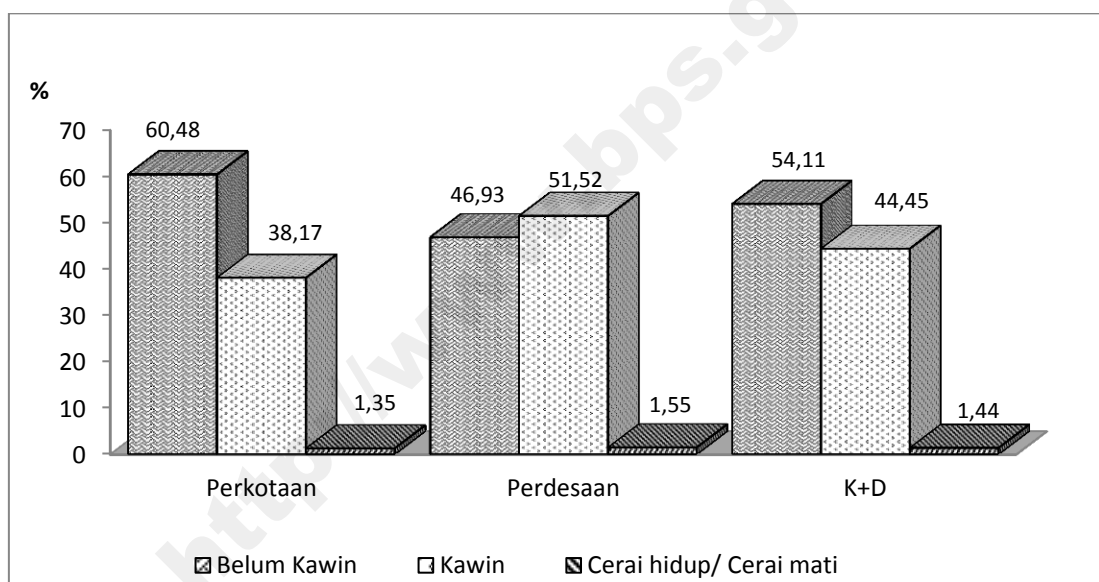
Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Lebih lanjut jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, terlihat adanya perbedaan pola status perkawinan antara pemuda laki-laki dan perempuan. Pemuda laki-laki lebih banyak yang belum kawin, sebaliknya pemuda perempuan lebih banyak yang sudah kawin (lihat Gambar 3.3). Persentase pemuda laki-laki dengan status belum kawin (66,93 persen) adalah sekitar dua kalinya persentase pemuda laki-laki yang

sudah kawin (32,22 persen). Sebaliknya persentase pemuda perempuan yang berstatus belum kawin (41,12 persen) lebih rendah daripada persentase pemuda perempuan yang berstatus kawin (56,84 persen). Perbedaan pola status perkawinan antara laki-laki dan perempuan tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa perempuan pada umumnya menikah di usia lebih muda dibanding laki-laki.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, terlihat ada perbedaan pola status perkawinan antara pemuda perkotaan dan perdesaan. Pemuda di perkotaan lebih banyak yang belum kawin, sebaliknya pemuda di perdesaan lebih banyak yang sudah kawin. Gambar 3.4 menyajikan persentase pemuda menurut status perkawinan yang dibedakan menurut tipe daerah.

Gambar 3.4
Persentase Pemuda Menurut Status Perkawinan dan Tipe Daerah, 2014



Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

Dari Gambar 3.4 terlihat bahwa di perkotaan persentase pemuda yang berstatus belum kawin (60,48 persen) lebih tinggi daripada persentase pemuda yang berstatus kawin (38,17 persen). Sebaliknya di perdesaan pemuda yang berstatus belum kawin (46,93 persen) cenderung lebih sedikit daripada yang berstatus kawin (51,52 persen). Hal ini mengindikasikan bahwa pemuda yang tinggal di perdesaan cenderung menikah di usia yang lebih muda dibandingkan dengan pemuda yang tinggal di perkotaan.

Proporsi pemuda pernah kawin pada kelompok umur 21-25 tahun adalah sebesar 56,59 persen atau hampir 4 kali proporsi pemuda pernah kawin pada kelompok umur 16-20 tahun. Sementara itu, proporsi pemuda pernah kawin pada kelompok umur 26-30 tahun adalah sebesar 83,12 persen atau lima kali proporsi pemuda pernah kawin pada kelompok umur 16-20 tahun.

Tabel 3.5
Proporsi Pemuda yang Pernah Kawin Menurut Kelompok Umur, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2014

Kelompok Umur (Tahun)	Perkotaan			Perdesaan			K+D		
	Laki-laki	Perempuan	L + P	Laki-laki	Perempuan	L + P	Laki-laki	Perempuan	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
16-20	2,62	12,40	7,49	4,57	28,40	16,03	4,57	28,40	16,03
21-25	21,78	52,13	36,72	35,45	78,02	56,59	35,45	78,02	56,59
26-30	60,57	85,33	73,06	72,39	93,58	83,12	72,39	93,58	83,12
Pemuda	28,49	50,62	39,52	38,19	68,25	53,07	38,19	68,25	53,07

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 3.5 menunjukkan bahwa untuk tiap kelompok umur proporsi pemuda perempuan yang pernah kawin selalu lebih tinggi daripada proporsi pemuda laki-laki yang pernah kawin baik di perkotaan maupun di perdesaan. Proporsi pemuda di perdesaan yang pernah kawin, (baik laki-laki maupun perempuan dan untuk tiap kelompok umur) lebih tinggi daripada proporsi pemuda di perkotaan yang pernah kawin. Proporsi pemuda di perdesaan yang pernah kawin pada kelompok umur 16-20 tahun mencapai dua kali lipat proporsi pemuda di perkotaan yang pernah kawin pada kelompok umur yang sama. Sementara itu, pada kelompok umur 21-25 tahun proporsi pemuda perdesaan yang pernah kawin mencapai 56,59 persen sementara proporsi pemuda di perkotaan yang pernah kawin di perkotaan hanya sebesar 36,72 persen.

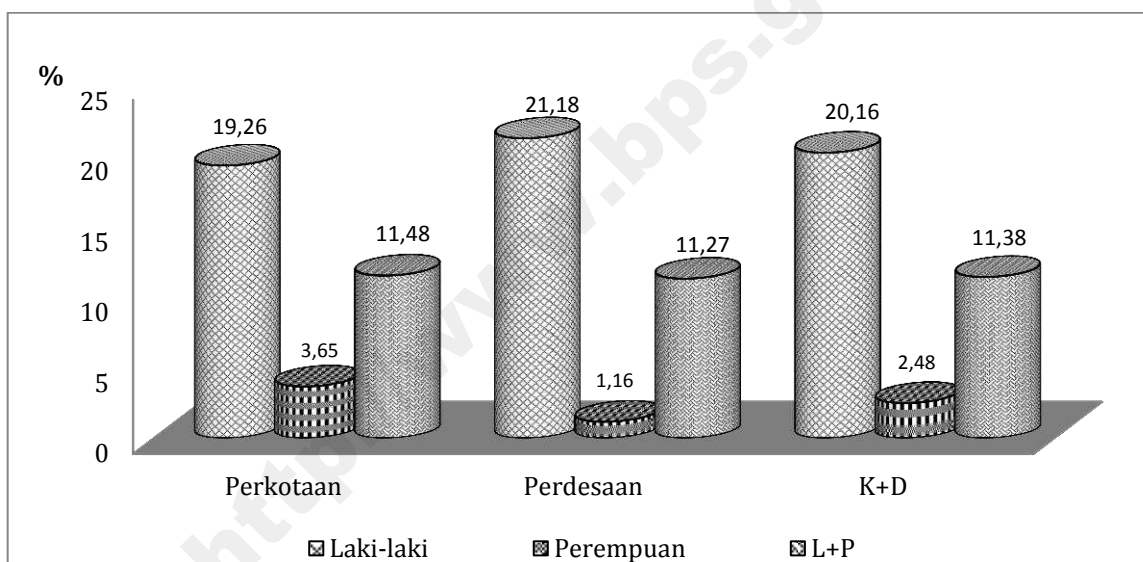
3.6 Pemuda sebagai Kepala Rumah Tangga

Kepala rumah tangga adalah seseorang dari sekelompok anggota rumah tangga (art) yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga, atau orang

yang dianggap/ditunjuk sebagai kepala rumah tangga (www.bps.go.id). Kedudukan kepala rumah tangga sangat penting dalam menentukan kelangsungan dan keberadaan rumah tangga. Selain harus bertanggung jawab secara ekonomis untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggotanya, kepala rumah tangga juga harus mengatur dan memimpin anggota rumah tangganya, serta berperan sebagai pengambil keputusan.

Secara umum, dari seluruh pemuda baik di perkotaan maupun perdesaan sekitar 11,38 persennya berstatus sebagai kepala rumah tangga. Di perkotaan persentase pemuda yang berstatus kepala rumah tangga adalah sebesar 11,48 persen. Sementara itu, persentase pemuda yang tinggal di perdesaan yang berstatus kepala rumah tangga sebesar 11,27 persennya berstatus kepala rumah tangga (lihat Gambar 3.5).

Gambar 3.5
Proporsi Pemuda Kepala Rumah Tangga Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014



Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Dilihat dari jenis kelamin, terlihat bahwa persentase pemuda laki-laki yang menjadi kepala rumah tangga lebih tinggi daripada persentase pemuda perempuan. Persentase pemuda laki-laki sebagai kepala rumah tangga sebesar 20,16 persen jauh lebih tinggi dibandingkan pemuda perempuan yang hanya sebesar 2,48 persen. Pola yang sama juga terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan.

Berdasarkan kelompok umur, seperti yang terlihat pada Tabel 3.6 terlihat adanya peningkatan persentase pemuda yang menjadi kepala rumah tangga seiring dengan meningkatnya umur. Persentase pemuda kelompok umur 16–20 tahun yang

menjadi kepala rumah tangga sebesar 2,19 persen. Pada kelompok umur 21–25 tahun pemuda yang menjadi kepala rumah tangga sebesar 8,71 persen dan pada kelompok umur 26–30 tahun sebesar 22,46 persen.

Tabel 3.6
Proporsi Pemuda Kepala Rumah Tangga Menurut Kelompok Umur, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2014

Kelompok Umur (Tahun)	Perkotaan			Perdesaan			K+D		
	Laki-laki	Perempuan	L + P	Laki-laki	Perempuan	L + P	Laki-laki	Perempuan	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
16–20	3,35	3,51	3,43	1,23	0,31	0,78	2,34	2,04	2,19
21–25	14,41	4,66	9,61	14,13	1,07	7,64	14,28	3,01	8,71
26–30	39,72	2,80	21,10	46,44	1,95	23,91	42,97	2,39	22,46
Pemuda	19,26	3,65	11,48	21,18	1,16	11,27	20,16	2,48	11,38

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Dari Tabel 3.6 terlihat bahwa pada kelompok umur 16-20 tahun, proporsi pemuda laki-laki di perkotaan yang menjadi kepala rumah tangga lebih rendah daripada proporsi pemuda perempuan yang menjadi kepala rumah tangga. Sebaliknya di perdesaan proporsi pemuda laki-laki yang menjadi kepala rumah tangga lebih banyak daripada proporsi pemuda perempuan yang menjadi kepala rumah tangga. Untuk kelompok umur 21-25 tahun dan 26-30 tahun proporsi pemuda laki-laki yang menjadi kepala rumah tangga jauh lebih tinggi daripada perempuan baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan wilayah tempat tinggal, proporsi pemuda perempuan di daerah perkotaan sebagai kepala rumah tangga untuk tiap kelompok umur lebih tinggi daripada proporsi pemuda perempuan di daerah perdesaan. Proporsi pemuda perempuan pada kelompok umur 16-20 tahun yang menjadi kepala rumah tangga di perkotaan sebesar 3,51 persen, sementara di perdesaan sebesar 0,31 persen. Proporsi pemuda perempuan pada kelompok umur 21–25 tahun yang menjadi kepala rumah tangga di perkotaan sebesar 4,66 persen sementara di perdesaan sebesar 1,07 persen. Sedangkan proporsi pemuda perempuan

pada kelompok umur 26-30 tahun yang menjadi kepala rumah tangga di perkotaan sebesar 2,80 persen sementara di perdesaan sebesar 1,95 persen.

3.7 Pemuda Menurut Status Tinggal Bersama dalam Rumah Tangga

Pembentukan perilaku manusia sangat dipengaruhi lingkungan yang ada di sekeliling mereka. Hal ini dikarenakan proses pembelajaran pada setiap manusia berasal dari apa yang sering dilihat, didengar, dan dirasakan. Salah satu bagian dari lingkungan yang berpengaruh besar terhadap pembentukan perilaku manusia adalah pergaulan. Dengan senantiasa bergaul dan melakukan aktivitas bersama-sama, masing-masing orang terus saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya.

Keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat mempunyai peranan yang besar dalam memberikan pengaruh terhadap kehidupan dan perilaku pemuda. Kedudukan dan fungsi keluarga dalam kehidupan manusia bersifat fundamental karena pada hakekatnya keluarga merupakan wadah pembentukan watak dari pemuda. Oleh karena itu, menjadi hal yang penting untuk mengetahui dengan siapakah pemuda tinggal dan menghabiskan sebagian besar waktunya.

Status tinggal pemuda dibedakan menjadi sendiri, bersama pasangan, bersama keluarga, dan lainnya. Pemuda dikatakan tinggal bersama pasangan jika pemuda tinggal bersama istri/suaminya. Pemuda berstatus tinggal bersama keluarga jika pemuda tinggal bersama salah satu anak atau orang tua saja, baik didampingi pasangan maupun tidak didampingi pasangan dan status tinggal lainnya jika pemuda tinggal bersama tiga generasi atau famili lain.

Tabel 3.7 memberikan gambaran tentang pemuda berdasarkan status tinggal bersama dalam rumah tangga. Secara umum sebagian besar pemuda masih tinggal dalam satu rumah tangga bersama dengan keluarga dan lainnya. Persentase pemuda yang tinggal bersama keluarga dalam rumah tangga sebesar 65,51 persen, sedangkan persentase pemuda yang tinggal bersama lainnya ada sebanyak 30,16 persen. Sementara itu, pemuda yang tinggal sendiri dalam rumah tangga tercatat sebesar 1,78 persen.

Baik pemuda laki-laki maupun pemuda perempuan mempunyai persentase tertinggi yang sama dalam hal status tinggal bersama dalam rumah tangga, yaitu tinggal

bersama keluarga (65,23 persen dan 63,78 persen). Sedangkan persentase terendahnya berbeda. Persentase terendah pemuda laki-laki yaitu tinggal bersama pasangan (2,06 persen), sedangkan persentase pemuda perempuan yaitu tinggal sendiri (1,32 persen). Seperti yang disajikan pada Tabel 3.7, pemuda laki-laki sebagian besar tinggal bersama keluarga (65,23 persen), tinggal bersama lainnya (30,48 persen), tinggal sendiri (2,24 persen), dan sisanya tinggal bersama pasangan (2,06 persen). Sedangkan persentase pemuda perempuan yaitu sebagian besar pemuda perempuan tinggal bersama keluarga (63,78 persen), kemudian tinggal bersama lainnya (31,84 persen), tinggal bersama pasangan (3,06 persen), dan tinggal sendiri (1,32 persen).

Tabel 3.7
Persentase Pemuda Menurut Jenis Kelamin dan Status Tinggal Bersama Dalam Rumah Tangga, 2014

Jenis Kelamin	Status Tinggal Bersama				Total
	Sendiri	Bersama Pasangan	Bersama Keluarga	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Laki-laki	2,24	2,06	65,23	30,48	100,00
Perempuan	1,32	3,06	63,78	31,84	100,00
L+P	1,78	2,56	64,51	31,16	100,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014



PENDIDIKAN

<http://www.kbps.go.id>



Pendidikan

Amanat dalam Pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional dalam bidang pendidikan, untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi seluruh lapisan masyarakat. Terutama bagi pemuda, selain sangat diperlukan untuk masa depannya, pemuda juga memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional sebagai agen perubahan. Pendidikan juga merupakan hak setiap warga negara yang wajib dipenuhi oleh pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 28C Ayat (1) bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 31 Ayat (1) juga menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Tokoh nasional Indonesia Ir. Soekarno dan Ki Hajar Dewantara mengatakan, “Bahwa satu-satunya yang dapat mengubah nasib suatu bangsa hanyalah pendidikan”.

Tujuan kedua dari *Millennium Development Goals (MDGs)* adalah mewujudkan pendidikan dasar untuk semua. Kualitas sumber daya manusia akan meningkat jika mereka mengenyam pendidikan paling tidak pendidikan dasar. Hal tersebut menjadi komitmen para pemimpin dunia dalam mempercepat pembangunan manusia. Guna pemenuhan hal tersebut, pemerintah berupaya melakukan peningkatan mutu dan jumlah fasilitas pendidikan bagi masyarakat. Gambaran mengenai pendidikan pemuda Indonesia akan dibahas pada bagian ini. Beberapa indikator yang dapat disajikan untuk menilai pencapaian pembangunan di bidang pendidikan diantaranya adalah partisipasi sekolah, angka buta huruf, rata-rata lama sekolah dan akses pemuda terhadap internet.

4.1 Partisipasi Sekolah

Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan SDM tersebut dapat menentukan keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Indikator partisipasi sekolah merupakan gambaran pemerataan akses dan perluasan pelayanan pendidikan terhadap pemuda. Tingkat partisipasi sekolah menjelaskan status pemuda dalam jenjang pendidikan formal dan nonformal.

Hampir seluruh pemuda telah mengakses pendidikan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebanyak 23,52 persen pemuda berstatus masih bersekolah dan 75,43 persen tidak bersekolah lagi. Namun masih ada juga pemuda yang mengakses pendidikan, yaitu sebesar 1,05 persen pemuda yang tidak pernah bersekolah.

Gambaran partisipasi sekolah pemuda menurut jenis kelamin juga disajikan pada Tabel 4.1. Akses pemuda laki-laki di dalam dunia pendidikan tampak lebih baik dibandingkan perempuan. Persentase pemuda laki-laki yang tidak pernah sekolah dan tidak sekolah lagi lebih rendah dibanding persentase pemuda perempuan yang tidak pernah sekolah dan tidak bersekolah lagi. Sebaliknya persentase pemuda laki-laki yang masih bersekolah (23,94 persen) lebih tinggi dibandingkan dengan pemuda perempuan yang masih bersekolah (23,10 persen).

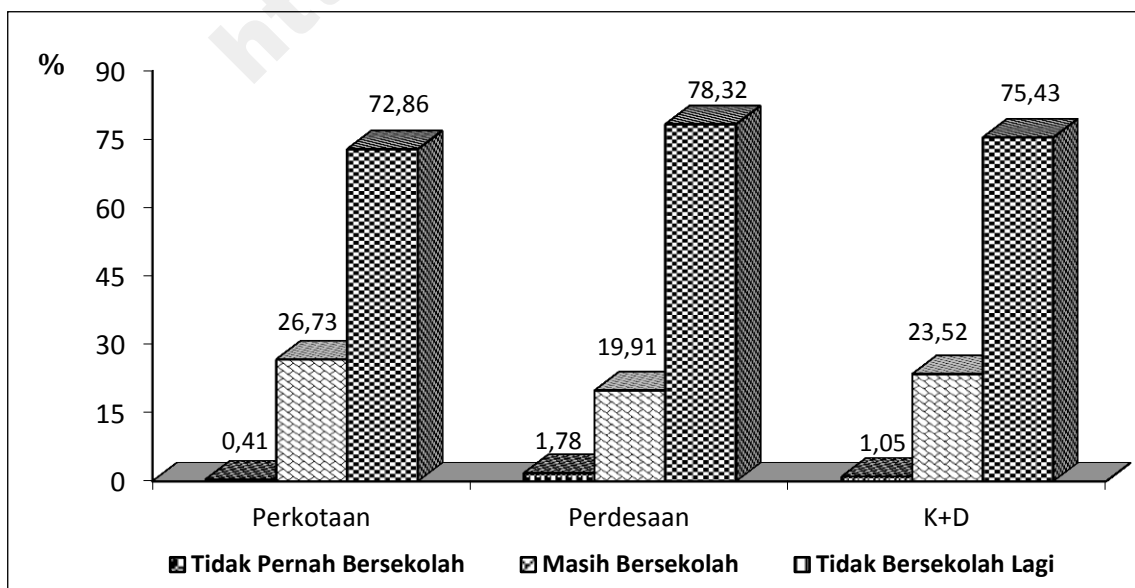
Tabel 4.1
Persentase Pemuda Menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin, 2014

Partisipasi Sekolah	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Pernah Sekolah	0,95	1,16	1,05
Masih Sekolah	23,94	23,10	23,52
Tidak Sekolah Lagi	75,11	75,75	75,43

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Kesenjangan dalam mengakses pendidikan merupakan salah satu kendala pembangunan dalam bidang pendidikan. Salah satu yang menjadi penyebab kesenjangan tersebut adalah adanya perbedaan dalam hal ketersediaan fasilitas pendidikan dan faktor pendukung antara perkotaan dan perdesaan. Selain itu, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat di perdesaan akan pentingnya pendidikan juga menyebabkan tingkat pendidikan di daerah perdesaan relatif lebih tertinggal dibanding dengan perkotaan. Pada umumnya, orang tua di daerah perdesaan lebih memilih mengajak anak-anak mereka berkebun atau bertani untuk memenuhi kebutuhan ekonomi daripada memberi kesempatan pada anak-anaknya untuk bersekolah. Gambaran kesenjangan akses pendidikan antara desa dan kota dapat dilihat pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1
Persentase Pemuda Menurut Tipe Daerah dan Partisipasi Sekolah, 2014



Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Gambar 4.1 memperlihatkan persentase pemuda yang tidak pernah mengakses pendidikan di perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan pemuda di perkotaan. Demikian juga dengan pemuda perdesaan yang tidak bersekolah lagi persentasenya lebih besar (78,32 persen) dibanding persentase pemuda di perkotaan yang tidak bersekolah lagi (72,86 persen). Sementara itu persentase pemuda di perkotaan yang masih bersekolah (26,73 persen) lebih tinggi dibanding pemuda di perdesaan (19,91 persen).

Partisipasi sekolah pemuda juga dibedakan menurut kelompok umur, hal tersebut disajikan pada Tabel 4.2. Dari tabel tersebut terlihat bahwa semakin tua umur pemuda semakin rendah persentase yang masih bersekolah. Pada kelompok umur 16–18 tahun, yaitu kelompok usia pendidikan menengah atas, sebanyak 70,31 persen pemuda masih bersekolah, sementara pemuda yang tidak bersekolah lagi sebesar 28,93 persen serta tidak pernah bersekolah sebesar 0,77 persen. Sementara itu pada kelompok umur 19-24 tahun, atau kelompok usia pendidikan tinggi, banyak pemuda yang tidak bersekolah lagi yaitu sebesar 76,24 persen, dan hanya 22,82 persen pemuda yang masih bersekolah. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan pemuda masih rendah.

Tabel 4.2
Persentase Pemuda Menurut Kelompok Umur dan Partisipasi Sekolah, 2014

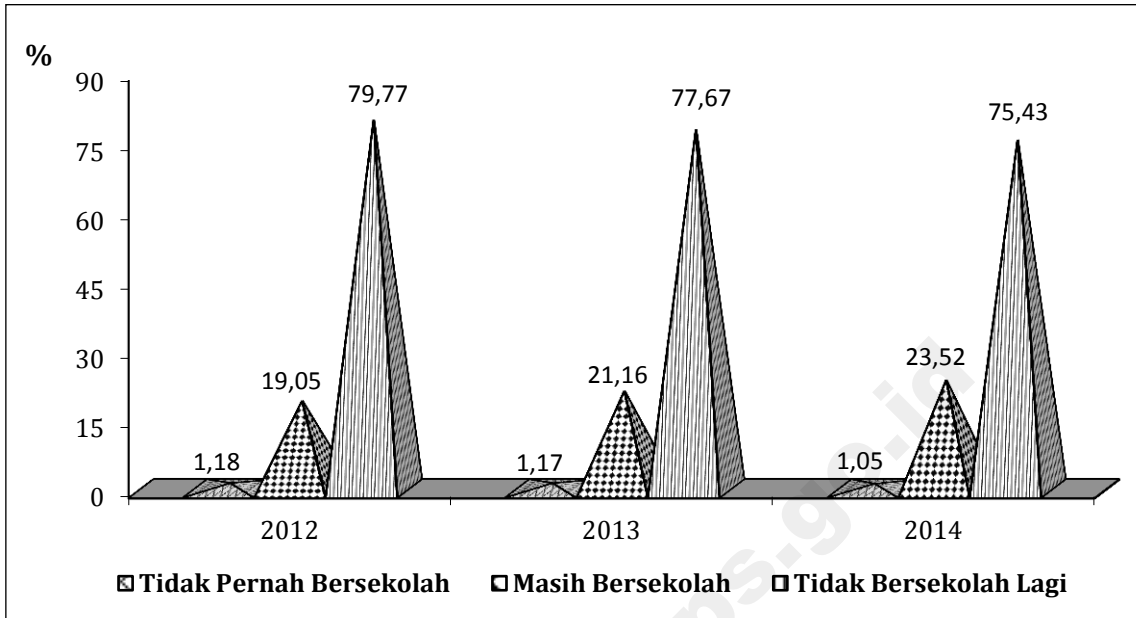
Kelompok Umur (Tahun)	Tidak Pernah Bersekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah Lagi	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16–18	0,77	70,31	28,93	100,00
19–24	0,93	22,82	76,24	100,00
25–30	1,30	1,92	96,78	100,00
Pemuda	1,05	23,52	75,43	100,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Perkembangan partisipasi pendidikan pemuda dari tahun 2012-2014 dapat dilihat pada gambar 4.2. Partisipasi pendidikan pemuda cenderung membaik dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari persentase pemuda yang masih bersekolah pada tahun 2012 sebesar 19,05 persen, naik 2,11 persen di tahun 2013 dan naik sebesar 2,36 persen di tahun 2014. Sebaliknya, persentase pemuda yang tidak pernah

bersekolah dan tidak bersekolah lagi cenderung menurun dalam kurun waktu tiga tahun tersebut.

Gambar 4.2
Persentase Pemuda Menurut Partisipasi Sekolah, 2012- 2014



Sumber: BPS, Susenas Kor 2012-2014

Ada beberapa hal atau alasan yang melatarbelakangi pemuda tidak sekolah (baik tidak pernah bersekolah maupun tidak bersekolah lagi), yaitu dikarenakan alasan tidak ada biaya, bekerja, menikah atau lainnya. Dari Tabel 4.3 terlihat bahwa alasan keterbatasan ekonomi (tidak ada biaya) tampak masih menjadi penyebab tertinggi mengapa pemuda usia sekolah (16–24 tahun) tidak pernah bersekolah atau tidak bersekolah lagi, yaitu sebesar 36,01 persen.

Tabel 4.3 menunjukkan adanya perbedaan yang menonjol antara pemuda laki-laki dan pemuda perempuan terkait alasan mengapa mereka tidak pernah bersekolah atau tidak bersekolah lagi. Penyebab tertinggi yang menjadi alasan pemuda laki-laki dan perempuan adalah sama, yaitu keterbatasan ekonomi 37,08 persen dan 34,90 persen. Alasan lain yang menyebabkan mereka tidak pernah bersekolah atau tidak bersekolah lagi untuk pemuda laki-laki dan perempuan berbeda. Alasan pemuda laki-laki adalah bekerja (31,12 persen), sedangkan pemuda perempuan dikarenakan alasan menikah/mengurus rumah tangga (26,40 persen).

Tabel 4.3
Persentase Pemuda Usia Sekolah (16-24 Tahun) Menurut Jenis Kelamin dan Alasan Tidak/Belum Pernah Bersekolah atau Tidak Bersekolah Lagi, 2014

Jenis Kelamin	Tidak ada biaya	Bekerja	Menikah/ mengurus RT	Lainnya*)	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Laki-laki (L)	37,08	31,12	2,50	29,30	100,00
Perempuan (P)	34,90	16,16	26,40	22,53	100,00
L + P	36,01	23,77	14,25	25,97	100,00

**) Termasuk malu karena ekonomi, sekolah jauh, cacat, menunggu pengumuman, tidak diterima, dan lainnya.*

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Partisipasi pendidikan pemuda Indonesia bervariasi antar provinsi (lihat lampiran Tabel 4.2.3). Rata-rata persentase pemuda Indonesia yang tidak pernah bersekolah sebesar 1,05 persen, sedangkan rata-rata persentase pemuda yang tidak bersekolah lagi sebesar 75,43 persen. Persentase pemuda yang tidak pernah bersekolah tertinggi ada di Provinsi Papua, yaitu sebesar 24,61 persen.

Indikator yang digunakan untuk melihat akses penduduk usia sekolah yang memanfaatkan fasilitas pendidikan adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS pemuda didefinisikan sebagai persentase pemuda yang masih sekolah terhadap jumlah pemuda secara keseluruhan tanpa memperhatikan jenjang atau tingkat pendidikan yang sedang dijalaninya. Meningkatnya APS menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan.

APS pemuda laki-laki dan perempuan pada semua kelompok umur tidak ada perbedaan yang nyata. Seperti yang terlihat pada Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa pada kelompok umur 16–18 tahun, APS pemuda laki-laki (69,91 persen) sedikit lebih rendah dibanding APS pemuda perempuan (70,73 persen). Pada kelompok umur 19–24 tahun, APS pemuda laki-laki (22,98 persen) sedikit lebih tinggi dibanding APS pemuda perempuan (22,66 persen). Sementara itu, pada kelompok umur 25–30 tahun, APS pemuda laki-laki sebesar 2,22 persen, sedikit lebih tinggi dibanding APS pemuda perempuan yang sebesar 1,63 persen.

Tabel 4.4
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pemuda Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Tipe Daerah, 2014

Kelompok Umur	Jenis Kelamin	Perkotaan (K)	Perdesaan (D)	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16-18	Laki-laki (L)	74,28	65,40	69,91
	Perempuan (P)	75,53	65,46	70,73
	L+P	74,90	65,43	70,31
19-24	Laki-laki (L)	28,11	16,62	22,98
	Perempuan (P)	27,90	16,14	22,66
	L+P	28,01	16,38	22,82
25-30	Laki-laki (L)	3,08	1,31	2,22
	Perempuan (P)	1,99	1,25	1,63
	L+P	2,53	1,28	1,92

Sumber: BPR, Susenas Kor 2014

Sementara apabila kita mencermati perbedaan antar wilayah perdesaan dan perkotaan, APS pemuda di perkotaan lebih tinggi dibanding APS pemuda di perdesaan untuk setiap kelompok umur. APS pemuda kelompok umur 16-18 tahun di perkotaan sebesar 74,90 persen, sedangkan di perdesaan sebesar 65,43 persen. Pada kelompok umur di atasnya (19-24 tahun), APS pemuda di perkotaan sebesar 28,01 persen dan di perdesaan sebesar 16,38 persen. Sementara itu, pada kelompok umur 25-30 tahun, perbedaan antara APS pemuda perkotaan dan perdesaan tidak terlihat nyata (2,53 persen dibanding 1,28 persen). Hal tersebut menunjukkan bahwa akses pendidikan di perdesaan masih lebih sulit diperoleh bila dibandingkan dengan wilayah perkotaan.

Berdasarkan Tabel 4.4 juga dapat dilihat bahwa umur mempengaruhi APS pemuda. APS pemuda cenderung menurun seiring dengan meningkatnya umur pemuda baik pada pemuda laki-laki maupun perempuan, serta pemuda di perkotaan maupun di perdesaan.

4.2 Angka Buta Huruf

Program pemerintah terkait pembangunan pendidikan di Indonesia ada tiga hal, yakni wajib belajar pendidikan dasar, rehabilitasi sekolah dan pemberantasan buta aksara. Pasalnya tiga hal tersebut menjadi indikator penting dan bagian dari *Human Development Indeks* (HDI). Buta aksara fungsional adalah sebutan yang digunakan untuk menjelaskan kemampuan membaca dan menulis yang belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini sama dengan buta aksara dalam arti terbatas, yang berarti ketidakmampuan untuk membaca atau menulis kalimat sederhana dalam bahasa apapun.

Masih adanya penduduk yang buta aksara disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu masih ada siswa usia sekolah yang tidak tertampung di sekolah dasar. Kemudian ada juga penduduk yang sejak awal memang tidak sekolah karena berbagai alasan, seperti keadaan ekonomi keluarga dan kondisi geografis. Ada juga penduduk yang pernah mengikuti program pemberantasan buta aksara, namun penduduk itu kembali menjadi buta aksara karena kurang intensif memelihara kemampuan keaksaraannya.

Tabel 4.5 menyajikan angka buta huruf pemuda menurut tipe daerah dan jenis kelamin dari hasil Susenas 2012-2014. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa pada tahun 2014 sebanyak 0,64 persen pemuda di Indonesia tidak bisa membaca dan menulis atau buta huruf. Dilihat perkembangannya dari tahun 2012-2014, angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2013 yang tercatat sebesar 0,92 persen dan pada tahun 2012 tercatat sebesar 1,15 persen.

Tabel 4.5
Angka Buta Huruf Pemuda Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2012-2014

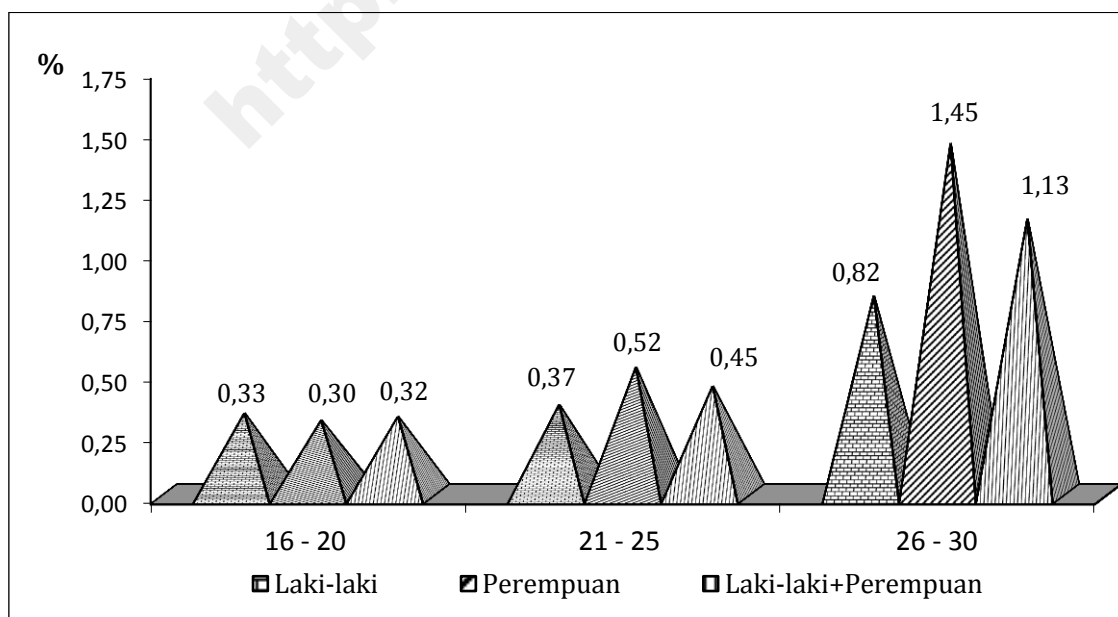
Tipe Daerah	2012			2013			2014		
	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	L+P	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	L+P	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Perkotaan (K)	0,37	0,39	0,38	0,24	0,22	0,23	0,07	0,13	0,10
Perdesaan (D)	1,80	2,21	2,00	1,48	1,89	1,68	1,00	1,52	1,26
K+D	1,05	1,25	1,15	0,83	1,00	0,92	0,51	0,78	0,64

Sumber: BPR RI, Susenas Kor 2012-2014

Angka buta huruf pemuda di perdesaan lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Pada tahun 2014, angka buta huruf pemuda di perdesaan sebesar 1,26 persen (pemuda laki-laki sebesar 1,00 persen dan pemuda perempuan sebesar 1,52 persen) sedangkan di perkotaan sebesar 0,10 persen (pemuda laki-laki sebesar 0,07 persen dan perempuan sebesar 0,13 persen). Apabila kita mencermati perbedaan antara jenis kelamin pemuda, terlihat bahwa angka buta huruf pemuda perempuan (0,78 persen) lebih tinggi dibanding angka buta huruf pemuda laki-laki (0,51 persen). Demikian juga dengan kondisi di perkotaan maupun perdesaan memiliki pola yang sama.

Berbagai kebijakan pemerintah dalam pengentasan buta aksara di Indonesia secara nyata sudah dilaksanakan sejak masa orde baru namun sampai saat ini boleh dikatakan belum tuntas. Hal ini terbukti dengan masih ditemukan penduduk yang belum terbebas dari buta aksara kendati pemerintah telah banyak merealisasikan program untuk membebaskan warga dari buta aksara. Walaupun pemerintah mencanangkan program Wajib Belajar 9 Tahun, ditambah menyelenggarakan pendidikan luar sekolah (PLS) di antaranya Keaksaraan Fungsional (KF), Kejar Paket A pendidikan setara SD, Kejar Paket B setara SMP, dan Kejar Paket C setara SMA; berdasarkan pendataan masih banyak ditemukan penduduk yang belum terbebas dari buta aksara.

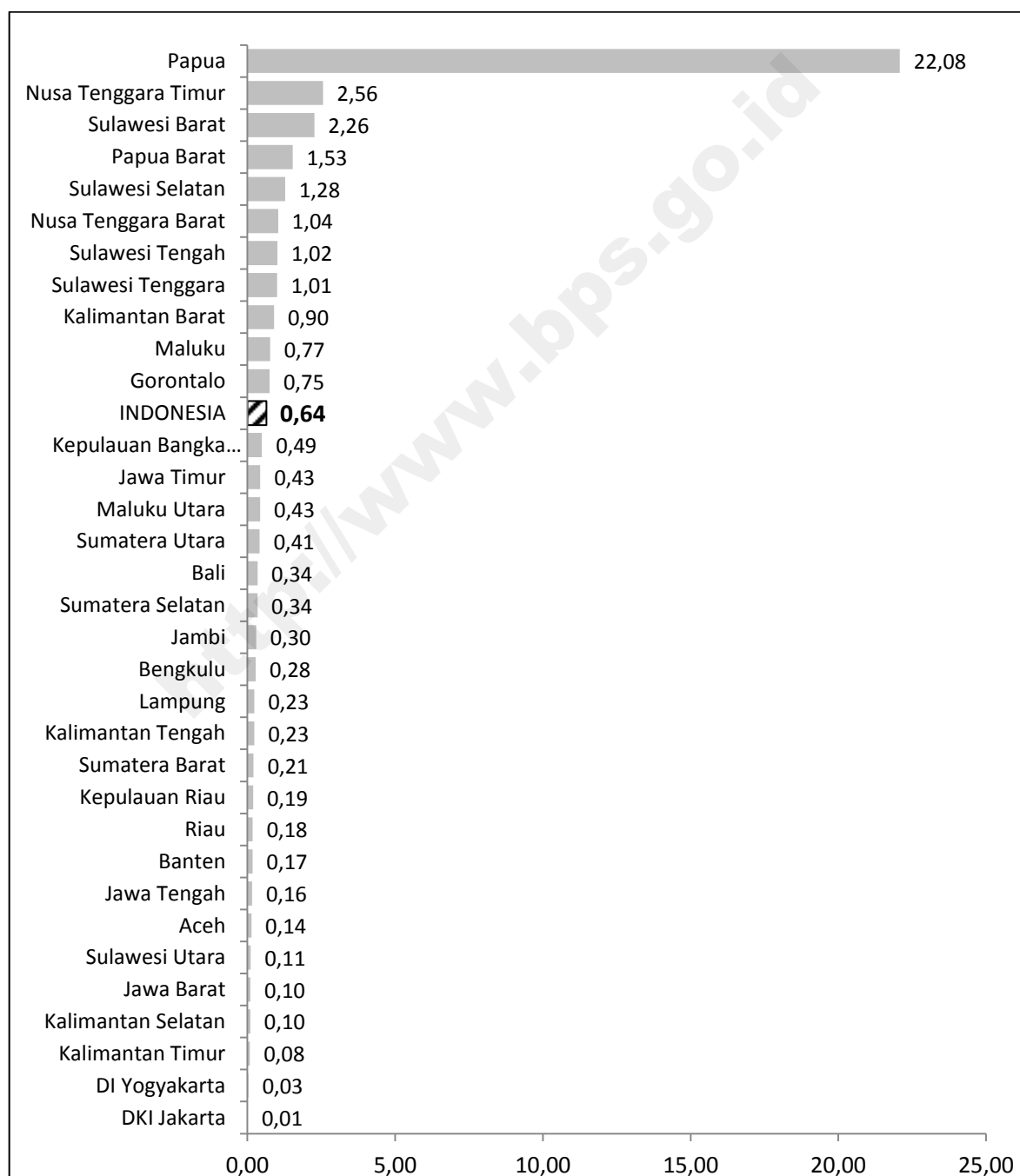
Gambar 4.3
Angka Buta Huruf Pemuda Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2014



Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Umur mempengaruhi kemelekaksanaan seseorang, seperti yang terlihat pada Gambar 4.3, dimana angka buta huruf pemuda cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya umur atau dengan kata lain semakin tinggi umur pemuda maka semakin tinggi angka buta hurufnya. Angka buta huruf pemuda cenderung lebih tinggi pada kelompok umur 26-30 tahun sebesar 1,13 persen, sedangkan pada kelompok umur 16–20 tahun sebesar 0,32 persen dan kelompok umur 21-25 tahun sebesar 0,45 persen. Pola yang sama terjadi baik pada pemuda laki-laki maupun perempuan.

Gambar 4.4
Angka Buta Huruf Pemuda Menurut Provinsi, 2014



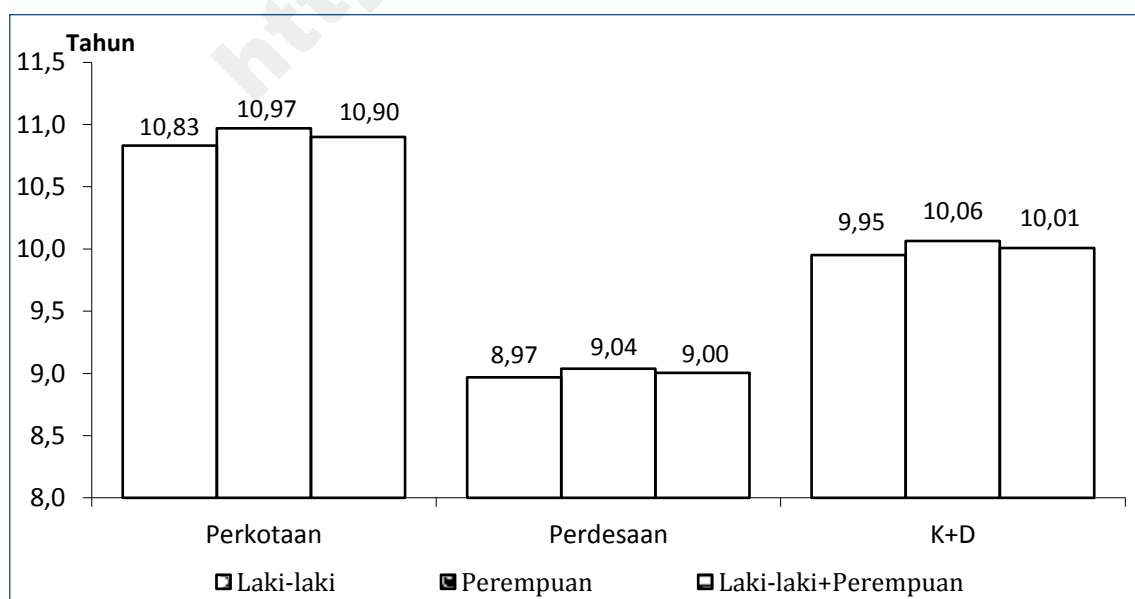
Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Gambar 4.4 menyajikan persentase pemuda yang buta huruf menurut provinsi. Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa persentase pemuda yang buta huruf antara provinsi yang satu dengan yang lain bervariasi. Hasil Susenas 2014 menunjukkan bahwa masih terdapat sebanyak 11 provinsi dengan angka buta huruf pemuda yang melebihi angka buta huruf pemuda secara nasional yang tercatat sebesar 0,64 persen. Provinsi yang memiliki angka buta huruf pemuda tertinggi adalah Papua (22,08 persen), Nusa Tenggara Timur (2,56 persen) dan Sulawesi Barat (2,26 persen). Sementara itu, provinsi dengan angka buta huruf pemuda terendah adalah DKI Jakarta (0,01 persen), DI Yogyakarta (0,03 persen), dan Kalimantan Timur (0,08 persen).

4.3 Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh seseorang di seluruh jenjang pendidikan formal yang diikuti tanpa memperhatikan apakah seseorang tersebut tinggal kelas atau tidak. Rata-rata lama sekolah digunakan sebagai indikator rata-rata tingkat pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti jenjang pendidikan yang dijalani semakin tinggi. Pemerintah Indonesia telah mencanangkan program wajib belajar 9 tahun bagi penduduknya, artinya bahwa setiap penduduk Indonesia harus tuntas belajar hingga tamat SMP.

Gambar 4.5
Rata-rata Lama Sekolah Pemuda Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014



Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Berdasarkan hasil Susenas 2014 yang disajikan pada Gambar 4.5, rata-rata lama sekolah yang berhasil dicapai para pemuda adalah 10,01 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2014, secara umum pemuda telah dapat menyelesaikan pendidikan hingga kelas 1 SM atau melebihi target yang telah ditetapkan yaitu wajib belajar 9 tahun.

Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, maka rata-rata lama sekolah pemuda perempuan (10,06 tahun) lebih tinggi dibanding rata-rata lama sekolah pemuda laki-laki (9,95 tahun). Hal ini menandakan bahwa pemuda perempuan tidak mengalami hambatan untuk mengakses pendidikan tingkat dasar.

Bila dilihat menurut tipe daerah, terlihat bahwa pemuda baik di perkotaan maupun perdesaan memiliki rata-rata lama sekolah yang dapat memenuhi target wajib belajar 9 tahun, yaitu 10,90 tahun dan 9,00 tahun. Kondisi serupa juga terlihat baik untuk pemuda laki-laki (10,83 tahun) maupun pemuda perempuan (10,97 tahun) di perkotaan. Kondisi sebaliknya terlihat pada rata-rata lama sekolah untuk pemuda laki-laki di perdesaan yang masih belum mencapai sasaran program wajib belajar 9 tahun, karena baru mencapai 8,97 tahun.

Tabel 4.6
Rata-rata Lama Sekolah Pemuda Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2012-2014

Tipe Daerah	2012			2013			2014		
	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	L+P	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	L+P	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Perkotaan (K)	10,63	10,72	10,68	10,70	10,82	10,76	10,83	10,97	10,90
Perdesaan (D)	8,59	8,59	8,61	8,80	8,84	8,82	8,97	9,04	9,00
K+D	9,66	9,73	9,70	9,80	9,89	9,84	9,95	10,06	10,01

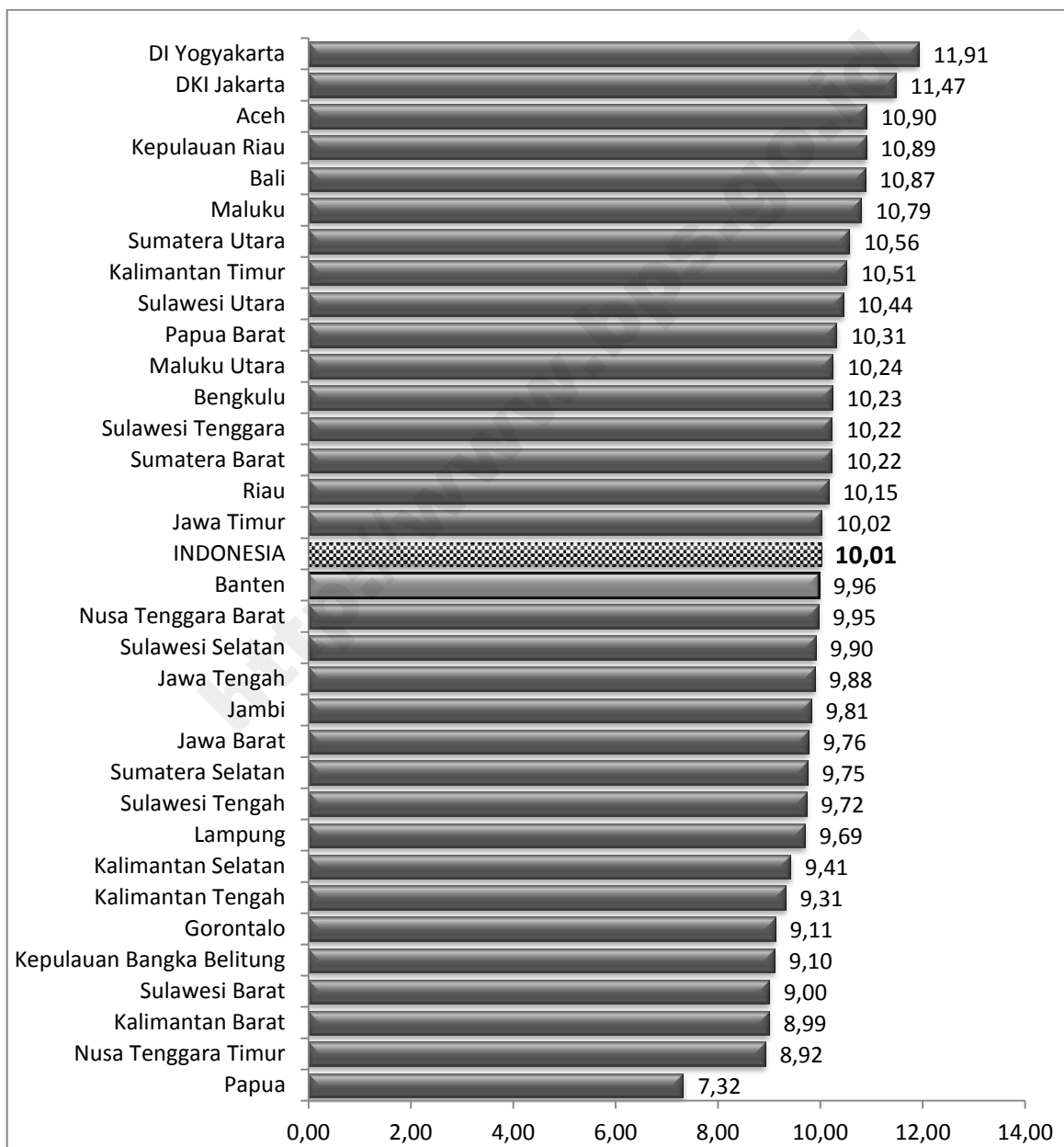
Sumber: BPS, Susenas Kor 2012-2014

Berdasarkan Tabel 4.6 rata-rata lama sekolah pemuda di Indonesia periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 cenderung mengalami peningkatan. Dalam kurun waktu tersebut terlihat, bahwa pada tahun 2012, rata-rata lama sekolah pemuda mencapai 9,70 tahun, meningkat pada tahun 2013 menjadi 9,84 tahun, kemudian pada tahun 2014 rata-

rata lama sekolah pemuda meningkat menjadi sebesar 10,01 tahun. Perkembangan serupa juga terlihat pada rata-rata lama sekolah pemuda laki-laki dan perempuan.

Sementara itu, belum semua wilayah provinsi di Indonesia berhasil menuntaskan program wajib belajar bagi pemudanya. Kesenjangan ketersediaan akses pendidikan tidak hanya antara desa dan kota, namun juga terlihat pada pembangunan pendidikan antar provinsi di Indonesia. Rata-rata lama sekolah pemuda menurut provinsi tahun 2014 disajikan pada Gambar 4.6.

Gambar 4.6
Rata-rata Lama Sekolah Pemuda Menurut Provinsi 2014



Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Gambar 4.6 memperlihatkan bahwa terdapat 3 provinsi yang rata-rata lama sekolah pemudanya di bawah 9 tahun. Provinsi dengan rata-rata lama sekolah pemuda di bawah 9 tahun adalah Papua (7,32 tahun), Nusa Tenggara Timur (8,92 tahun), dan Kalimantan Barat (8,99 tahun). Sementara itu, tiga provinsi dengan rata-rata lama sekolah pemuda yang paling tinggi berturut-turut adalah DI Yogyakarta (11,91 tahun), DKI Jakarta (11,47 tahun) dan Aceh (10,90 tahun).

4.4 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Tingkat pendidikan yang ditamatkan dapat memberikan gambaran mengenai kualitas sumber daya manusia. Sehingga pencapaian pembangunan pendidikan di suatu daerah dapat dilihat melalui data-data tersebut. Selain itu, data mengenai tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan juga berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah.

Tabel 4.7
Persentase Pemuda Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2014

Type Daerah/ Jenis Kelamin	Tidak Pernah Sekolah	Tidak Tamat SD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SM/ Sederajat ke Atas	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perkotaan (K)						
Laki-laki(L)	0,45	3,21	12,01	28,87	55,46	100,00
Perempuan (P)	0,36	2,19	11,66	30,68	55,10	100,00
L + P	0,41	2,70	11,84	29,77	55,28	100,00
Perdesaan (D)						
Laki-laki (L)	1,50	7,67	26,28	33,29	31,26	100,00
Perempuan (P)	2,06	6,10	25,75	35,69	30,40	100,00
L + P	1,78	6,89	26,02	34,48	30,83	100,00
K+D						
Laki-laki (L)	0,95	5,31	18,74	30,95	44,04	100,00
Perempuan (P)	1,16	4,02	18,26	33,03	43,52	100,00
L + P	1,05	4,67	18,51	31,99	43,78	100,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 4.7 memberikan gambaran tentang tingkat pendidikan pemuda Indonesia menurut tipe daerah, jenis kelamin dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa pada tahun 2014, hanya 43,78 persen pemuda di Indonesia yang memiliki ijazah Sekolah Menengah (SM) ke atas. Dari tabel tersebut juga terlihat bahwa persentase pemuda yang tidak/belum tamat SD sebesar 4,67 persen, tamat SD/ sederajat sebesar 18,51 persen, dan tamat SMP/ sederajat sebesar 31,99 persen.

Kondisi pemuda menurut daerah tempat tinggal terlihat adanya perbedaan pola pendidikan yang ditamatkan antara pemuda yang tinggal di perkotaan dan perdesaan. Pemuda yang tinggal di perkotaan pada umumnya cenderung mengenyam pendidikan yang lebih tinggi dibanding dengan mereka yang tinggal di perdesaan. Di perkotaan pemuda yang pendidikan tertingginya tamat SM/ sederajat ke atas (SM dan PT) persentasenya lebih tinggi dibandingkan dengan pemuda di perdesaan yaitu 55,28 persen dibanding 30,83 persen. Sebaliknya, persentase pemuda di perdesaan yang menamatkan pendidikan SMP/ sederajat ke bawah persentasenya lebih tinggi dibandingkan pemuda di perkotaan (lihat Tabel 4.7).

Hal ini secara tidak langsung menunjukkan adanya kesenjangan dalam bidang pendidikan antara masyarakat di perdesaan dan perkotaan. Selain itu faktor lingkungan juga disinyalir menjadi salah satu unsur yang berpengaruh terhadap pendidikan. Masyarakat kota yang setiap hari melihat kapitalis antar sesama, persaingan dalam memenuhi kebutuhan, sehingga muncul pemikiran untuk menekankan pendidikan sebagai hal utama bagi putra-putrinya. Lain dengan masyarakat perdesaan yang mayoritas mata pencaharian masyarakat adalah bertani. Pemikiran tradisional masih melekat, dimana pendidikan tinggi belum tentu akan membawa dampak positif bagi keluarga.

Apabila diperhatikan menurut jenis kelamin, secara umum tampak bahwa tingkat pendidikan pemuda perempuan relatif tidak berbeda dibandingkan dengan pemuda laki-laki pada level SMP ke bawah. Hal ini memperkuat pernyataan sebelumnya, bahwa pemuda perempuan tidak mengalami hambatan untuk mengakses pendidikan dasar.

4.5 Akses Internet

Teknologi informasi dan telekomunikasi merupakan teknologi yang memiliki perkembangan cukup pesat saat ini, sehingga menghadirkan beragam pilihan bentuk teknologi dan kecanggihannya. Salah satunya adalah internet (*interconnection-networking*), yang merupakan bukti nyata dari pesatnya perkembangan teknologi di bidang informasi dan telekomunikasi. Internet membawa pengaruh yang sangat besar dalam pola kehidupan masyarakat dunia. Internet disebut juga dunia tanpa batas karena sifatnya yang benar-benar mendunia. Waktu dan jarak bukan lagi masalah untuk memperoleh informasi maupun memberi informasi.

Penggunaan teknologi internet di dunia semakin meningkat. Setiap orang bisa menikmati layanan internet. Dahulu internet hanya digunakan oleh para pekerja di bidang teknologi komputasi berbasis internet dan yang mengerti teknologi itu saja. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi ini juga mengalami perkembangan ke arah pencapaian kemudahan dan kenyamanan luar biasa dalam melakukan kegiatan sehari-hari yang dianggap tidak mungkin dapat dikerjakan dalam waktu singkat.

Teknologi internet hadir sebagai media multifungsi. Internet sebagai media pendidikan mampu menghadirkan karakteristik sebagai media interpersonal (*e-mail*) dan massa (misal: *mailing list*), bersifat interaktif (misal: *chatting*) dan memungkinkan komunikasi secara sinkron maupun asinkron. Karakteristik ini memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi secara lebih luas dibandingkan dengan media konvensional. Bagi yang masih bersekolah, teknologi internet dapat dimanfaatkan sebagai media pencari literatur/referensi guna menunjang kegiatan belajarnya.

Susenas tahun 2014 menunjukkan bahwa sebesar 62,15 persen pemuda yang masih bersekolah pernah mengakses internet selama 3 bulan terakhir (Tabel 4.8). Pemuda yang tidak bersekolah lagi mengakses internet sebesar 27,03 persen dan tidak pernah bersekolah sebesar 0,96 persen. Hal ini menunjukkan hubungan yang erat antara akses pendidikan dan perilaku pemuda mengakses internet.

Apabila dilihat menurut jenis kelamin, persentase pemuda perempuan yang berstatus masih sekolah dan mengakses internet 3,51 persen lebih tinggi dibandingkan dengan pemuda laki-laki yang masih sekolah (63,95 persen berbanding 60,44 persen).

Perbedaan yang cukup mencolok antara pemuda laki-laki dan perempuan dalam mengakses internet adalah pada mereka yang tidak bersekolah lagi. Persentase pemuda laki-laki yang tidak bersekolah lagi yang mengakses internet tercatat sebesar 29,83 persen, lebih tinggi dibanding persentase pemuda perempuan yang mengakses internet sebesar 24,23 persen.

Tabel 4.8
Proporsi Pemuda yang Mengakses Internet selama Tiga Bulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin, Partisipasi Sekolah, dan Tipe Daerah, 2014

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Tidak Pernah Bersekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah lagi
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan (K)			
Laki-laki (L)	3,14	72,93	42,11
Perempuan (P)	3,01	75,59	35,49
L + P	3,08	74,24	38,80
Perdesaan (D)			
Laki-laki (L)	0,98	41,95	17,05
Perempuan (P)	0,00	45,95	12,34
L + P	0,42	43,87	14,71
K+D			
Laki-laki (L)	1,52	60,44	29,83
Perempuan (P)	0,50	63,95	24,23
L + P	0,96	62,15	27,03

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Perbedaan yang cukup mencolok terlihat apabila dibedakan menurut perkotaan dan perdesaan. Pada Tabel 4.8 terlihat bahwa persentase pemuda di perkotaan yang mengakses internet jauh lebih tinggi dibandingkan dengan persentase pemuda di perdesaan yang mengakses internet, yaitu pemuda perkotaan yang masih sekolah sebesar 74,24 persen sedangkan pemuda perdesaan sebesar 43,87 persen. Demikian juga dengan pemuda yang tidak bersekolah lagi, pemuda perkotaan sebesar 38,80 persen dan pemuda perdesaan sebesar 14,71 persen. Hal ini tidak terlepas dari pembangunan infrastruktur jaringan internet di perkotaan yang cenderung lebih baik dibanding perdesaan.



KESEHATAN



Kesehatan

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Menyadari bahwa tercapainya tujuan pembangunan nasional merupakan kehendak dari seluruh rakyat Indonesia dan dalam rangka menghadapi makin ketatnya persaingan bebas pada era globalisasi, maka upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia harus dilakukan. Salah satu peranan yang sangat menentukan untuk mencapai hal tersebut adalah keberhasilan pembangunan kesehatan.

Penduduk yang sehat bukan saja akan menunjang keberhasilan program pendidikan tetapi juga mendorong peningkatan produktifitas dan pendapatan

penduduk. Untuk mempercepat keberhasilan pembangunan kesehatan tersebut diperlukan kebijakan pembangunan kesehatan yang lebih dinamis dan proaktif dengan melibatkan semua sektor terkait, pemerintah, swasta dan masyarakat. Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh kinerja sektor kesehatan semata, namun juga dipengaruhi oleh interaksi yang dinamis dari pelbagai sektor.

Salah satu misi untuk mencapai visi pembangunan kesehatan 2015, yaitu memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau. Sedangkan tujuan pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat 2015 adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dalam lingkungan dan dengan perilaku yang sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang optimal diseluruh wilayah Republik Indonesia.

Dalam rangka merealisasikan hal tersebut, pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Kesehatan telah menetapkan program jangka pendek 100 hari dan program jangka menengah Kementerian Kesehatan yang disusun dalam sebuah rencana strategis Kementerian Kesehatan periode 2010-2014. Hal ini sebagai upaya nyata dari pemerintah dalam mewujudkan pembangunan kesehatan. Diharapkan dengan terealisasinya program tersebut akan tercapai paradigma yang kini dianggap baru, yaitu “sehat itu indah dan sehat itu gratis”, yang dilakukan dari pendekatan sehat dan bukan dari pendekatan sakit. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan sehat adalah usaha peningkatan kesehatan masyarakat dengan cara mencegah masyarakat agar tidak terserang penyakit. Implikasi dari pendekatan ini adalah program yang dijalankan harus fokus pada kegiatan pencegahan penyakit (preventif) dan peningkatan kesehatan (promotif) dibandingkan dengan pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif).

Kesehatan merupakan modal utama yang sangat diperlukan untuk pembangunan bangsa. Betapa sulitnya melaksanakan berbagai program pembangunan jika para pelaksana teknisnya tidak dalam kondisi sehat. Kesehatan meliputi dua komponen penting, yaitu kesehatan psikis (jiwa) dan kesehatan fisik (raga). Kedua komponen kesehatan ini hendaknya harus diperhatikan sejak usia muda. Upaya yang dapat ditempuh antara lain dengan mengisi jiwa generasi muda dengan nilai-nilai

agama dan pendidikan moral. Sementara untuk menjaga kesehatan raga dengan cara memberi asupan nutrisi yang baik agar dapat tumbuh menjadi generasi muda yang kuat dan sehat.

Peran serta seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung pencapaian pembangunan nasional sangat diperlukan, terutama pemuda sebagai elemen intelektual yang memiliki peran strategis sebagai penerus pembangunan bangsa Indonesia. Para pemuda hendaknya selalu diajak dan dilibatkan dalam menyelesaikan masalah kesehatan bangsa ini dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan pemuda dalam rangka menciptakan sumber daya pemuda yang handal dan terampil. Peran yang dapat dilakukan generasi muda Indonesia dalam rangka menyukseskan program pembangunan kesehatan masyarakat adalah dengan turut berpartisipasi dan ikut berpola hidup sehat.

Pada bab ini akan dibahas beberapa indikator kesehatan seperti keluhan kesehatan, angka kesakitan (*morbidity rate*), rata-rata lama sakit, dan cara berobat dalam rangka memperoleh gambaran rinci mengenai derajat kesehatan pemuda. Selain itu dibahas pula partisipasi pemuda perempuan dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB).

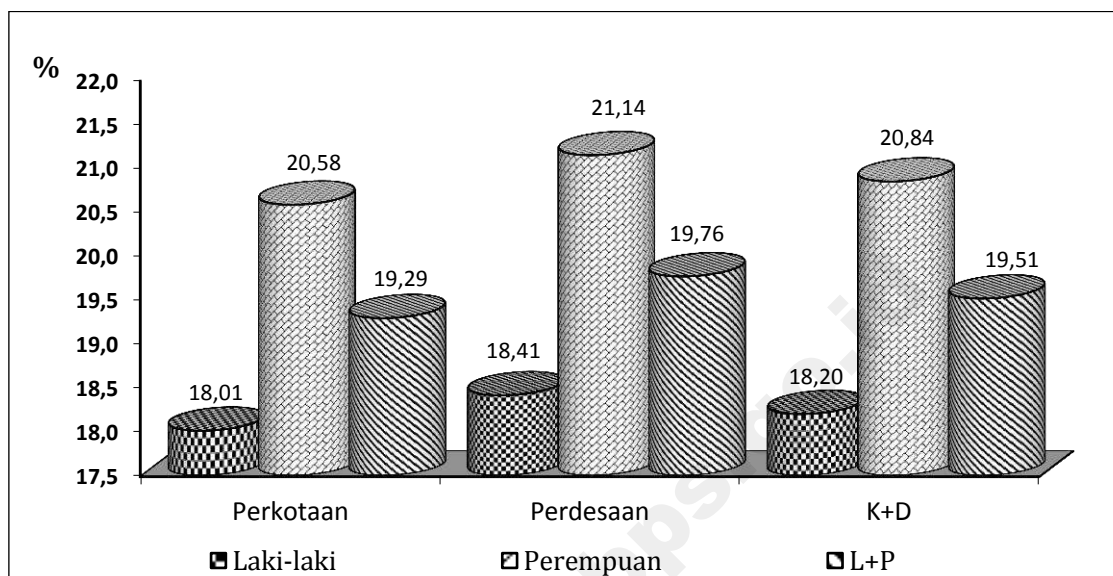
5.1 Keluhan Kesehatan

Hidup sehat merupakan keinginan semua orang, baik orang tua, anak-anak, tidak terkecuali pemuda. Pemuda yang mempunyai peran penggerak pembangunan harus berada dalam kondisi sehat jasmani dan mental, baik intrapersonal maupun sosial. Keadaan tersebut mutlak diperlukan agar pemuda dapat secara proaktif mengembangkan diri dan mengelola berbagai sumber daya pembangunan untuk kepentingan masyarakat dan negara.

Perilaku hidup yang tidak sehat dapat memicu seseorang mengalami gangguan atau mempunyai keluhan kesehatan yang pada akhirnya dapat mengganggu aktivitas seseorang. Salah satu indikator untuk menentukan derajat kesehatan penduduk secara kasar adalah keluhan kesehatan. Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena penyakit akut/kronis, kecelakaan, kriminalitas atau hal lain. Secara umum, jumlah kejadian keluhan kesehatan

yang dialami penduduk pada dasarnya merupakan salah satu indikasi pola perilaku tidak sehat penduduk, antara lain adalah faktor kekurangpedulian dalam menjaga kesehatan, kebugaran tubuh, dan faktor keengganan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.

Gambar 5.1
Proporsi Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan Sebulan Terakhir Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014



Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Gambar 5.1 memperlihatkan proporsi pemuda yang mengalami keluhan kesehatan sebulan terakhir menurut jenis kelamin dan tipe daerah. Pemuda yang mengalami keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir adalah sekitar 19,51 persen. Apabila diperhatikan menurut tipe daerah, tampak bahwa persentase pemuda yang mengalami keluhan kesehatan di perkotaan maupun di perdesaan relatif sama. Pemuda di perkotaan yang mengalami keluhan kesehatan sebesar 19,29 persen, sedangkan di perdesaan sebesar 19,76 persen.

Apabila dilihat menurut jenis kelamin, tampak bahwa pemuda perempuan yang mengalami keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir proporsinya lebih tinggi dibanding pemuda laki-laki. Pemuda perempuan yang mengalami keluhan kesehatan sebesar 20,84 persen, sedangkan pemuda laki-laki sebesar 18,20 persen.

Status kebersamaan tinggal dengan keluarga berpengaruh terhadap keluhan kesehatan pemuda. Tabel 5.1 menunjukkan bahwa pemuda yang tinggal sendiri mengalami keluhan kesehatan yang paling besar dibandingkan dengan pemuda yang tinggal bersama pasangan, bersama keluarga, atau lainnya, yaitu 31,04 persen

berbanding 26,01 persen, 19,98 persen dan 16,69 persen. Demikian pula bila dilihat menurut jenis kelamin, baik pemuda laki-laki maupun perempuan mempunyai pola yang relatif sama.

Tabel 5.1
Proporsi Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan Sebulan Terakhir Menurut Status Tinggal Bersama dalam Rumah Tangga dan Jenis Kelamin, 2014

Status Tinggal Bersama	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
Tinggal Sendiri	27,10	37,80	31,04
Bersama Pasangan	25,51	26,35	26,01
Bersama Keluarga	18,63	21,36	19,98
Lainnya	15,55	17,84	16,69
Jumlah	18,20	20,84	19,51

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Proporsi pemuda yang mengalami keluhan kesehatan untuk setiap provinsi disajikan pada Tabel Lampiran 5.1. Pemuda yang mengalami keluhan kesehatan pada masing-masing provinsi proporsinya bervariasi antara 8,78 persen sampai dengan 34,11 persen. Provinsi dengan proporsi pemuda yang mengalami keluhan kesehatan cukup tinggi adalah Provinsi DI Yogyakarta (34,11 persen), Gorontalo (27,21 persen), dan Nusa Tenggara Barat (26,73 persen). Sebaliknya proporsi pemuda yang mengalami keluhan kesehatan relatif rendah adalah Provinsi Maluku Utara (8,78 persen), Papua (12,07 persen), dan Kalimantan Timur (12,14 persen).

Pola hidup yang kurang sehat dapat mengakibatkan menurunnya daya tahan serta kekebalan tubuh sehingga akan menimbulkan berbagai masalah keluhan kesehatan. Keluhan kesehatan yang dialami oleh pemuda bisa lebih dari satu jenis keluhan, baik dalam waktu yang berbeda maupun waktu yang bersamaan selama satu bulan terakhir. Gambaran mengenai jenis keluhan kesehatan yang sering dialami oleh pemuda dapat dilihat pada Tabel 5.2. Berdasarkan tabel tersebut, keluhan kesehatan yang paling banyak dialami oleh para pemuda adalah batuk, pilek, dan panas dengan persentase masing-masing sebesar 7,96 persen, 7,94 persen, dan 5,80 persen.

Tabel 5.2
Proporsi Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Jenis Keluhan, 2014

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Jenis Keluhan					
	Panas	Batuk	Pilek	Sakit Kepala Berulang	Sakit Gigi	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perkotaan (K)						
Laki-laki (L)	5,68	8,19	7,88	1,99	1,01	6,41
Perempuan (P)	5,66	8,29	8,55	2,91	1,09	8,51
L+P	5,67	8,24	8,21	2,45	1,05	7,46
Perdesaan (D)						
Laki-laki (L)	6,04	7,56	7,24	2,55	1,19	7,38
Perempuan (P)	5,84	7,75	8,01	3,97	1,46	9,11
L+P	5,94	7,66	7,62	3,25	1,32	8,24
K+D						
Laki-laki (L)	5,85	7,89	7,58	2,25	1,10	6,87
Perempuan (P)	5,74	8,04	8,30	3,41	1,26	8,79
L+P	5,80	7,96	7,94	2,83	1,18	7,83

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Dilihat menurut tipe daerah, proporsi pemuda di perdesaan yang mengalami keluhan kesehatan pada setiap jenis keluhan cenderung lebih tinggi dari pemuda di perkotaan, kecuali keluhan batuk dan pilek. Pemuda yang mengalami keluhan batuk dalam satu bulan terakhir di perkotaan sebanyak 8,24 persen dan pemuda di perdesaan sebanyak 7,66 persen. Sedangkan untuk keluhan pilek, persentase pemuda di perkotaan sebanyak 8,21 persen, sedangkan pemuda di perdesaan sebanyak 7,62 persen.

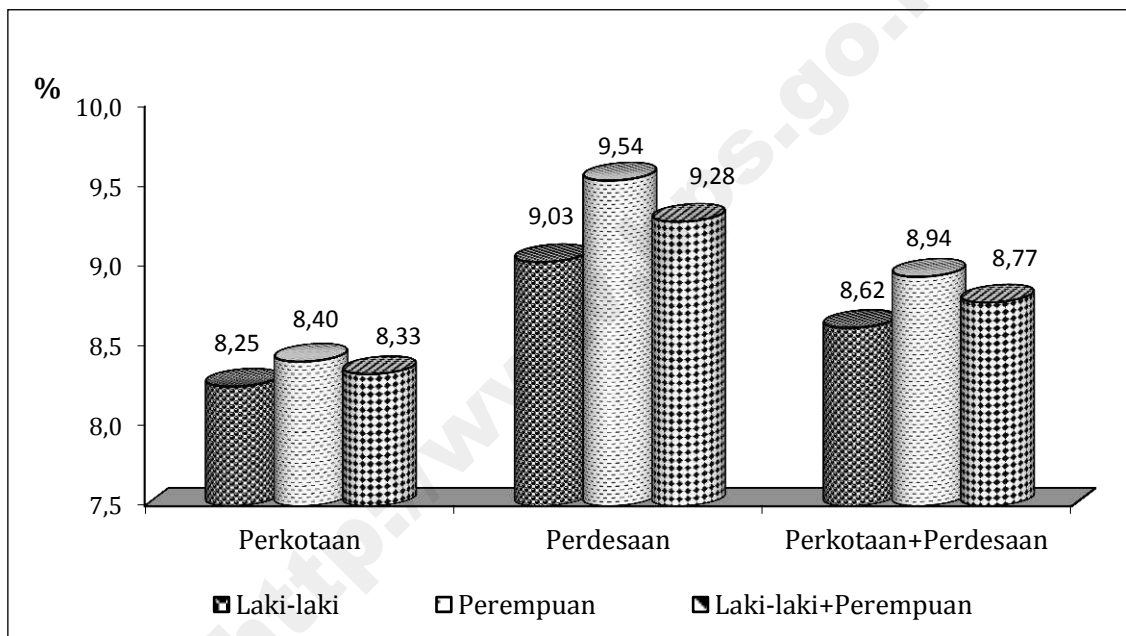
5.2 Angka Kesakitan

Penurunan kondisi kesehatan atau daya tahan tubuh yang dialami oleh seseorang dapat mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari seperti bekerja, sekolah, mengurus rumah tangga atau kegiatan lainnya, sehingga hal ini dapat mempengaruhi mengganggu produktivitas kerja dan akhirnya mengganggu kinerja secara keseluruhan. Apabila kondisi tersebut menyebabkan terganggunya kegiatan yang bersangkutan, maka orang tersebut dapat dikategorikan sakit. Angka kesakitan

(*morbidity rate*) pemuda adalah proporsi pemuda yang mengalami masalah kesehatan sehingga mengganggu kegiatan/aktivitas sehari-hari selama satu bulan terakhir. Semakin tinggi proporsi pemuda yang sakit terhadap populasi pemuda, menunjukkan derajat kesehatan pemuda yang semakin buruk.

Berdasarkan RPJM 2010–2014, salah satu program pembangunan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah menurunkan angka kesakitan. Angka kesakitan merupakan salah satu indikator untuk mengukur derajat kesehatan penduduk. Angka kesakitan tergolong sebagai indikator negatif, sehingga semakin rendah angka kesakitan menunjukkan derajat kesehatan penduduk yang semakin baik.

Gambar 5.2
Angka Kesakitan Pemuda Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014

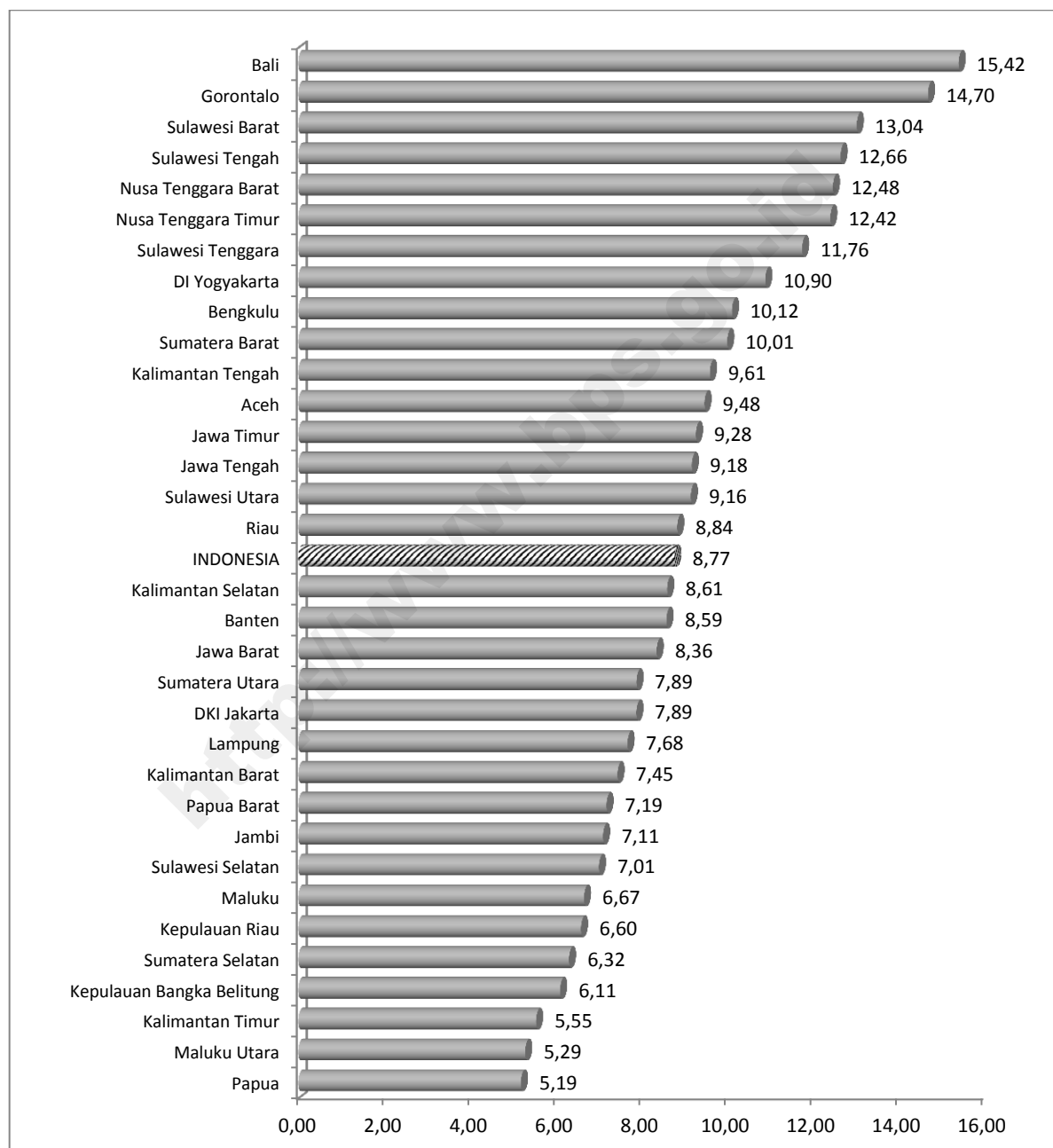


Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Gambar 5.2 memperlihatkan bahwa dalam sebulan terakhir sebesar 8,77 persen pemuda mengalami sakit. Bila diperhatikan menurut jenis kelamin, angka kesakitan pemuda perempuan tercatat lebih tinggi dari pemuda laki-laki (8,94 persen berbanding 8,62 persen). Keadaan yang sama juga terjadi di daerah perkotaan dan perdesaan. Di perkotaan, angka kesakitan pemuda perempuan sebesar 8,40 persen, lebih tinggi dibanding pemuda laki-laki sebesar 8,25 persen. Sementara di perdesaan, angka kesakitan pemuda perempuan sebesar 9,54 persen dan pemuda laki-laki sebesar 9,03 persen.

Bila dilihat menurut tipe daerah, angka kesakitan pemuda di perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotaan, yaitu 9,28 persen berbanding 8,33 persen. Pola yang sama juga terjadi pada pemuda laki-laki maupun perempuan. Kondisi ini secara tidak langsung memperlihatkan bahwa derajat kesehatan pemuda di perkotaan lebih baik dibanding derajat kesehatan pemuda di perdesaan.

Gambar 5.3
Angka Kesakitan Pemuda Menurut Provinsi, 2014



Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Untuk melihat angka kesakitan pemuda pada setiap provinsi disajikan pada Gambar 5.3. Pada masing-masing provinsi, angka kesakitan pemuda memiliki

persentase yang bervariasi, yaitu antara 5,19 persen sampai dengan 15,42 persen. Provinsi dengan angka kesakitan pemuda yang cukup tinggi adalah Provinsi Bali (15,42 persen), Gorontalo (14,70 persen), dan Sulawesi Barat (13,04 persen). Sebaliknya provinsi dengan angka kesakitan yang relatif rendah adalah Provinsi Papua (5,19 persen), Maluku Utara (5,29 persen), dan Kalimantan Timur (5,55 persen).

5.3 Lama Sakit

Seseorang yang mengalami sakit akan mengganggu kegiatannya atau mungkin tidak dapat beraktivitas selama sehari-hari. Lama seseorang menderita sakit secara umum mencerminkan intensitas atau derajat sakit serta bobot penyakit yang diderita seseorang. Semakin lama seseorang menderita sakit menunjukkan bahwa sakit yang dideritanya cukup parah, dan sebaliknya. Pada sisi lain, lama seseorang menderita sakit juga mencerminkan kualitas kesehatan fisik seseorang yang direfleksikan melalui daya tahan tubuh. Semakin lama seseorang menderita sakit menunjukkan daya tahan tubuhnya terhadap serangan berbagai penyakit sangat lemah, dan sebaliknya.

Tabel 5.3
Persentase Pemuda yang Sakit Menurut Lamanya Sakit dan Tipe Daerah, 2014

Lamanya Sakit (Hari)	Perkotaan (K)	Perdesaan (D)	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)
1-3	67,22	60,27	63,76
4-7	24,70	29,02	26,85
8-14	3,69	4,88	4,28
15-21	1,44	2,14	1,79
22-30	2,95	3,68	3,31
Jumlah	100,00	100,00	100,00

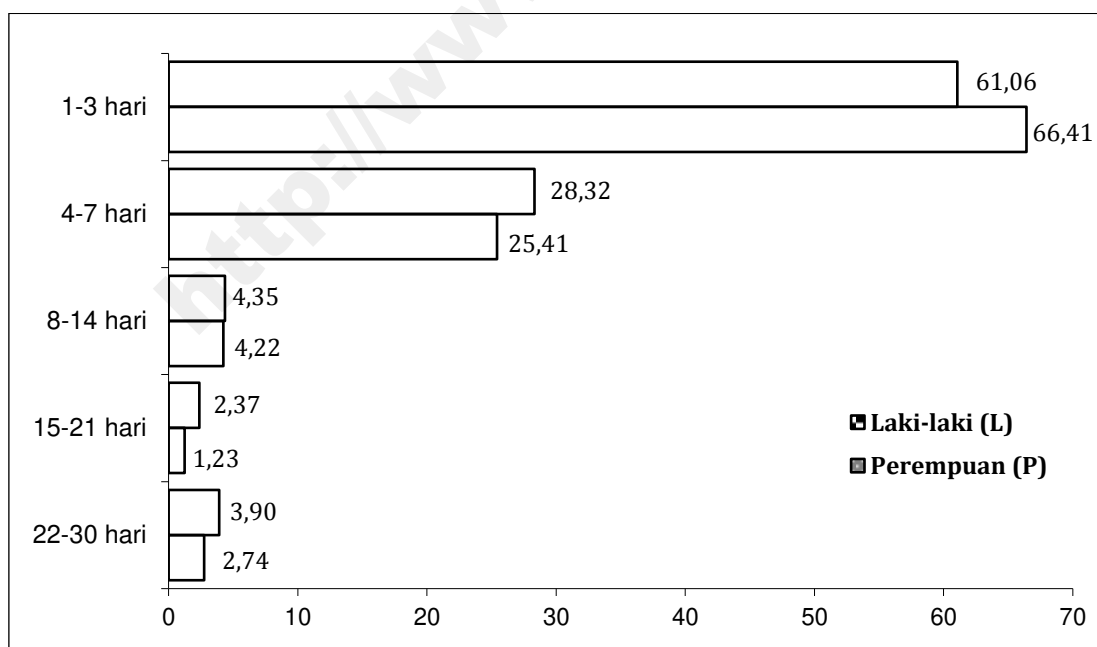
Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Berdasarkan hasil Susenas 2014, lama sakit yang diderita oleh pemuda secara umum adalah kurang dari satu minggu (1-7 hari). Keadaan tersebut dapat terlihat pada Tabel 5.3. Dari keseluruhan pemuda yang mengalami sakit, sebesar 63,76 persen menderita sakit selama 1-3 hari, sebesar 26,85 persen menderita sakit selama 4-7 hari,

dan selebihnya adalah pemuda yang menderita sakit lebih dari 7 hari. Data tersebut memberikan gambaran bahwa dari keseluruhan pemuda yang sakit, sebagian besar mengalami sakit yang tidak begitu berat sehingga hanya memerlukan sedikit waktu untuk penyembuhannya.

Dilihat menurut tipe daerah, terdapat pola yang sama terhadap lamanya sakit pemuda kurang dari satu minggu baik daerah perkotaan maupun perdesaan. Berdasarkan tabel tersebut dapat terlihat juga adanya kecenderungan mengenai pemuda di perdesaan yang menderita sakit lebih lama dibandingkan dengan di perkotaan. Kondisi ini terlihat dari persentase pemuda dengan lama sakit lebih dari satu minggu, dimana persentase pemuda di perdesaan (10,70 persen) lebih tinggi dibanding dengan di perkotaan (8,08 persen). Sedangkan pemuda yang menderita sakit kurang dari satu minggu justru lebih banyak dialami pemuda di perkotaan (91,92 persen) dibandingkan di perdesaan (89,29 persen). Kondisi ini dimungkinkan terjadi karena pemuda di perkotaan cenderung lebih peduli dan lebih mengerti tentang kesehatan, serta ketersediaan sarana kesehatan yang lebih baik di daerah perkotaan dibandingkan di perdesaan.

Gambar 5.4
Persentase Pemuda yang Sakit Menurut Lama Sakit dan Jenis Kelamin, 2014



Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Dilihat menurut jenis kelamin, Gambar 5.4 memperlihatkan persentase pemuda perempuan yang menderita sakit selama 1-3 hari lebih tinggi dibandingkan dengan pemuda laki-laki (66,41 persen berbanding 61,06 persen). Sedangkan pada kelompok

lama sakit 4 hari atau lebih terjadi kondisi sebaliknya, dimana pemuda laki-laki persentasenya lebih tinggi dibanding pemuda perempuan. Persentase pemuda laki-laki yang lama sakitnya 4 sampai 7 hari sebesar 28,32 persen, sedangkan pemuda perempuan sebesar 25,41 persen. Sementara itu pemuda laki-laki yang menderita sakit lebih dari 7 hari sebesar 10,62 persen dan pemuda perempuan sebesar 8,19 persen.

5.4 Cara Berobat

Keluhan kesehatan yang dialami oleh seseorang akan mendorongnya untuk melakukan upaya agar kesehatannya menjadi pulih dan dapat beraktivitas sehari-hari seperti biasa. Perawatan dan pengobatan sedini mungkin merupakan salah satu upaya preventif berhubungan dengan kesehatan. Hal tersebut sesuai dengan perilaku hidup sehat, dimana penderita sakit akan menindaklanjutinya dengan tindakan pengobatan/berobat.

Berbagai cara dapat dilakukan untuk mengobati penyakit yang diderita, diantaranya adalah dengan berobat ke tempat pelayanan kesehatan, mendatangkan petugas kesehatan ke rumah, ataupun dengan mencoba mengobati sendiri. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk mengobati sendiri antara lain dengan menggunakan obat, baik obat modern, tradisional, cara pengobatan lainnya maupun mencoba lebih dari satu jenis obat (campuran).

Tabel 5.4
Persentase Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Mengobati Sendiri Menurut Jenis Obat/Pengobatan yang Digunakan dan Jenis Kelamin, 2014

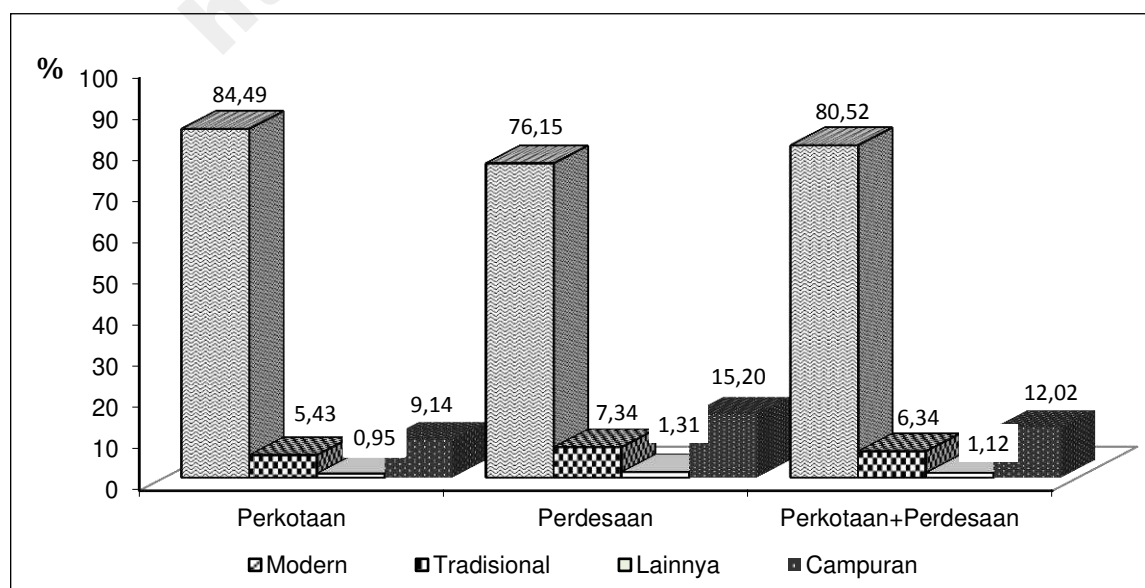
Jenis Obat/Pengobatan yang Digunakan	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)
Modern	81,46	79,62	80,52
Tradisional	6,19	6,49	6,34
Lainnya	1,02	1,22	1,12
Campuran	11,34	12,68	12,02
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 5.4 menyajikan tentang keadaan pemuda yang mengobati sendiri terhadap keluhan kesehatan yang dideritanya. Secara umum tampak bahwa pengobatan modern lebih banyak dipilih oleh pemuda untuk mengobati keluhan kesehatannya. Persentase pemuda yang berobat sendiri dengan menggunakan obat modern mencapai 80,52 persen, obat tradisional sebesar 6,34 persen, dan obat lainnya sebesar 1,12 persen. Hal yang menarik adalah cukup tingginya persentase pemuda yang memilih obat/pengobatan campuran itu sebesar 12,02 persen. Hal ini berarti sebanyak 12,02 persen pemuda yang mengalami keluhan kesehatan mengkonsumsi lebih dari satu jenis obat/pengobatan (baik obat modern, obat tradisional, maupun obat lainnya) untuk mengobati sendiri keluhan kesehatannya.

Dilihat menurut jenis kelamin, baik pemuda laki-laki maupun pemuda perempuan mempunyai preferensi yang relatif sama dalam memilih jenis obat/pengobatan untuk mengobati sendiri keluhan kesehatannya. Hal ini terlihat pada Tabel 5.4, baik pemuda laki-laki maupun perempuan cenderung lebih banyak menggunakan obat/pengobatan modern dibandingkan obat tradisional untuk mengobati sendiri keluhan kesehatannya. Pemuda laki-laki yang menggunakan obat/pengobatan modern persentasenya lebih tinggi dibandingkan dengan pemuda perempuan (81,46 persen berbanding 79,62 persen). Sedangkan pemuda perempuan yang menggunakan obat/pengobatan tradisional persentasenya sedikit lebih tinggi dibanding pemuda laki-laki (6,49 persen berbanding 6,19 persen).

Gambar 5.5
Persentase Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Mengobati Sendiri Menurut Tipe Daerah dan Jenis Obat/Pengobatan, 2014



Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Apabila diperhatikan menurut tipe daerah, jenis pengobatan modern lebih banyak digunakan oleh pemuda di perkotaan dengan persentase sebesar 84,49 persen dibandingkan dengan pemuda di perdesaan yang sebesar 76,15 persen. Keadaan yang sama terjadi dalam penggunaan obat/pengobatan lainnya. Penggunaan obat/pengobatan tradisional dan campuran cenderung lebih banyak digunakan oleh pemuda di daerah perdesaan (7,34 persen dan 15,20 persen) dibandingkan dengan pemuda di daerah perkotaan (5,43 persen dan 9,14 persen), seperti yang disajikan pada Gambar 5.5.

Seseorang yang menderita sakit, selain mengobati sendiri upaya lain yang ditempuh adalah dengan cara berobat jalan. Berobat jalan dapat dilakukan dengan cara mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk juga mendatangkan petugas kesehatan ke rumah. Pada umumnya penggunaan sarana berobat ini berkaitan dengan biaya dan ketersediaan pelayanan. Tabel 5.5 menunjukkan fasilitas pelayanan kesehatan yang dipilih oleh pemuda dalam rangka mengobati sakitnya. Tempat fasilitas pelayanan kesehatan yang paling banyak dikunjungi oleh pemuda yang berobat jalan pada tahun 2014 ini secara berturut-turut adalah praktek dokter (33,55 persen), praktek tenaga kesehatan (30,85 persen) dan puskesmas (27,57 persen).

Tabel 5.5
Proporsi Pemuda Sakit yang Berobat Jalan Menurut Jenis Kelamin dan Tempat Berobat, 2014

Jenis Kelamin	Tempat Berobat					
	Rumah Sakit	Praktek Dokter	Puskesmas	Tenaga Kesehatan	Praktek Batra	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laki-laki	11,06	35,67	26,16	28,63	3,07	2,43
Perempuan	9,65	31,97	28,63	32,50	2,65	2,48
L+P	10,25	33,55	27,57	30,85	2,83	2,46

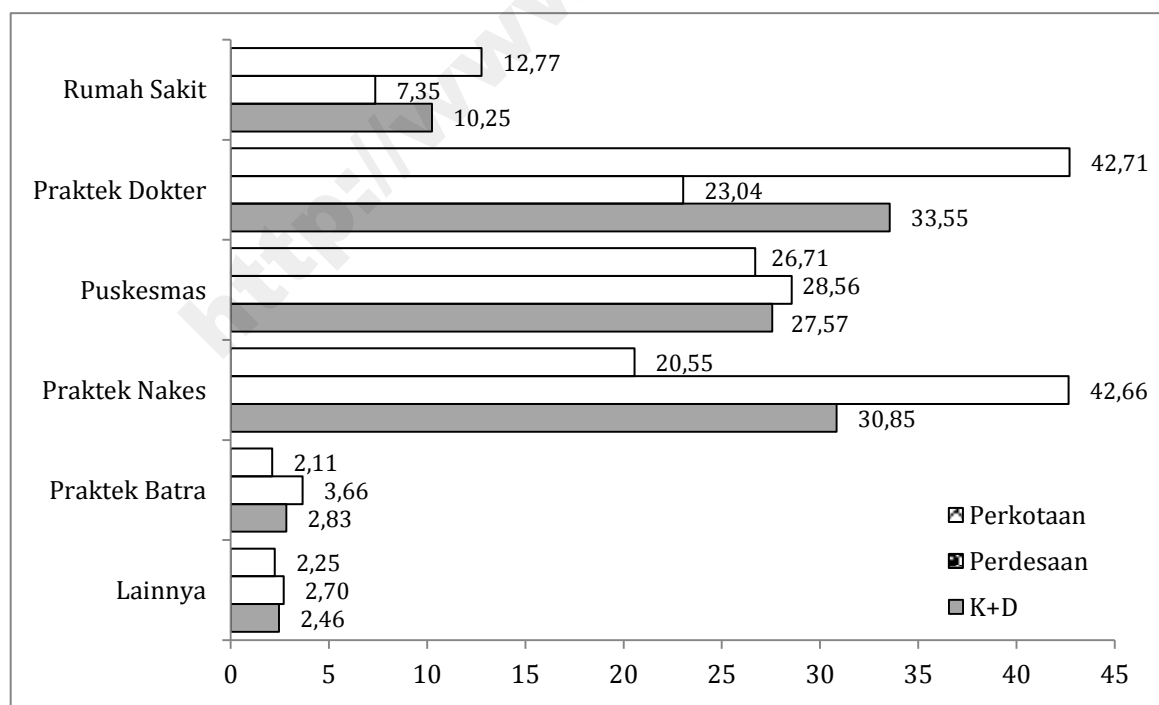
Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Apabila diperhatikan menurut jenis kelamin, terlihat adanya perbedaan pola antara pemuda laki-laki dan perempuan dalam memilih tempat pelayanan kesehatan untuk mengobati sakitnya. Tempat pelayanan yang banyak digunakan oleh pemuda laki-

laki untuk mengobati sakitnya adalah praktek dokter (35,67 persen), tenaga kesehatan (28,63 persen) dan Puskesmas (26,16 persen). Sedangkan pada pemuda perempuan, tempat pelayanan kesehatan yang paling banyak dipilih adalah Tenaga Kesehatan (32,50 persen), praktek dokter (31,97 persen) dan Puskesmas (28,63 persen).

Bila diperhatikan proporsi pemuda yang sakit dan berobat jalan, terlihat adanya perbedaan pola antara pemuda daerah perkotaan dengan perdesaan dalam memilih jenis/tempat berobat jalan. Gambar 5.6 memperlihatkan bahwa pemuda di perkotaan cenderung memilih berobat jalan ke tempat praktek dokter (42,71 persen) dan Puskesmas (26,71 persen), sedangkan pemuda di perdesaan lebih memilih untuk berobat jalan ke praktek tenaga kesehatan (42,66 persen) dan Puskesmas (28,56 persen). Fasilitas yang lebih mudah dijangkau serta biaya berobat yang lebih murah, disinyalir menjadi alasan bagi pemuda di perdesaan untuk lebih memilih berobat ke tempat praktek tenaga kesehatan dibandingkan dengan pemuda di perkotaan yang lebih memilih berobat ke praktek dokter.

Gambar 5.6
Proporsi Pemuda Sakit yang Berobat Jalan Menurut Tipe Daerah dan Tempat Berobat, 2014



Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Kegiatan sehari-hari berpengaruh terhadap pola berobat jalan yang dilakukan oleh pemuda. Tabel 5.6 menampilkan proporsi pemuda sakit yang berobat jalan menurut jenis

kegiatan dan tempat berobat. Pada tabel tersebut terlihat bahwa pemuda yang bekerja, sekolah dan kegiatan lainnya bila mengalami sakit paling banyak lebih memilih jenis/tempat berobat jalannya adalah praktek dokter (36,95 persen, 36,40 persen dan 30,87 persen). Sedangkan pemuda yang mencari pekerjaan paling banyak memilih jenis/tempat berobat jalannya adalah puskesmas (34,45 persen), dan pemuda dengan kegiatan mengurus rumah tangga lebih memilih tempat berobat ke tenaga kesehatan (37,95 persen).

Tabel 5.6
Proporsi Pemuda Sakit yang Berobat Jalan Menurut Jenis Kegiatan dan Tempat Berobat, 2014

Jenis Kegiatan	Tempat Berobat					
	Rumah Sakit	Praktek Dokter	Puskesmas	Tenaga Kesehatan	Praktek Batra	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bekerja	9,06	36,95	25,94	30,04	3,05	2,09
Mencari Pekerjaan	11,37	31,57	34,45	23,69	1,96	2,54
Sekolah	12,80	36,40	27,76	25,56	2,16	1,92
Mengurus Rumah Tangga	8,68	25,33	30,54	37,95	2,42	2,65
Lainnya	19,50	30,87	25,58	27,48	4,78	4,69

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

5.5 Partisipasi Pemuda Perempuan dalam Program Keluarga Berencana (KB)

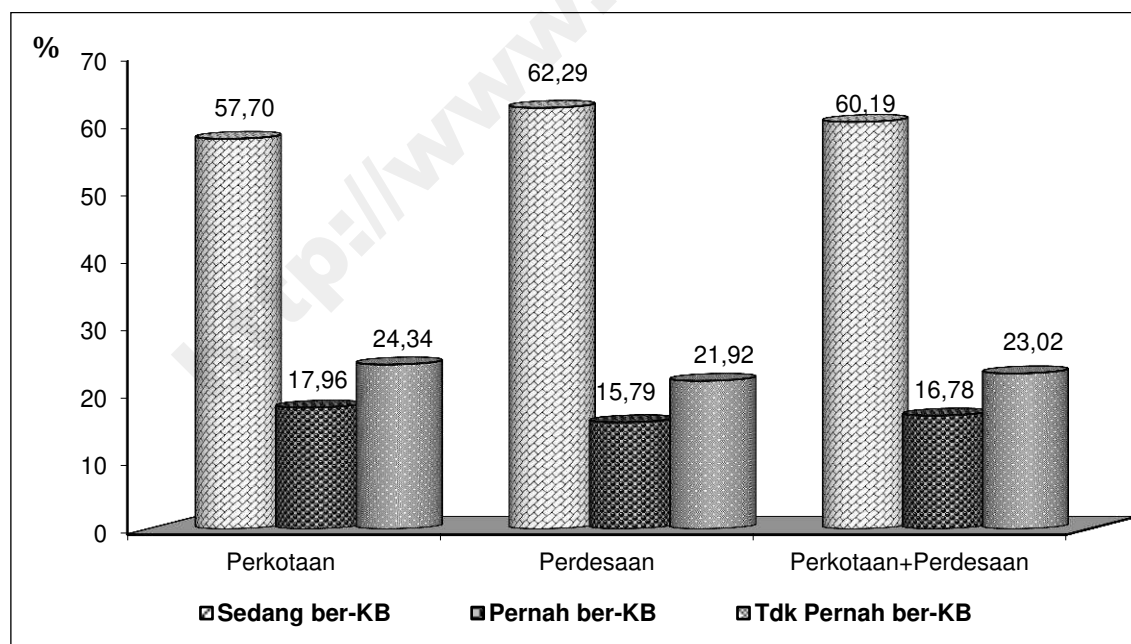
Program Keluarga Berencana (KB) adalah salah satu usaha untuk mencapai kesejahteraan keluarga. Program Keluarga Berencana merupakan bagian terpadu dalam program pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang agar kesejahteraan ekonomi, spiritual, dan sosial budaya penduduk Indonesia dapat tercapai. Target pencapaian *Total Fertility Rate* (TFR) dari program ini adalah 2,2, tetapi target tersebut belum tercapai. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) masih tinggi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,49 persen pertahun dan *Total Fertility Rate* (TFR) sebesar 2,6. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memiliki peran sentral guna mengendalikan kelahiran agar laju pertumbuhan penduduk dapat ditekan sehingga ledakan penduduk

dapat ditangani secara terkoordinasi, antara lain melalui program Revitalisasi Gerakan Nasional Keluarga Berencana.

Alat kontrasepsi yang sangat beragam, seringkali membuat banyak wanita mengalami kesulitan untuk menentukan alat kontrasepsi yang ingin digunakan. Berbagai pertimbangan diperlukan untuk menentukan, tidak hanya terbatasnya jumlah metode yang tersedia, tetapi juga karena metode-metode tertentu mungkin tidak dapat diterima sehubungan dengan kebijakan nasional KB, kesehatan individual, dan seksualitas wanita. Peningkatan dan perluasan pelayanan KB merupakan salah satu usaha untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu yang masih tinggi.

Struktur umur pemuda termasuk usia produktif merupakan sasaran/target program KB yang bertujuan membatasi jumlah kelahiran. Sejalan dengan itu, partisipasi pemuda dalam kegiatan KB merupakan faktor yang menentukan dalam keberhasilan program tersebut.

Gambar 5.7
Persentase Pemuda Perempuan yang Berstatus Pernah Kawin Menurut Tipe Daerah dan Partisipasi KB, 2014



Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Hasil Susenas tahun 2014 memberikan gambaran bahwa pemuda perempuan pernah kawin sedang mengikuti program KB adalah sebesar 60,19 persen, sedangkan pernah ikut KB tetapi sekarang tidak lagi sebesar 16,78 persen, dan sama sekali tidak

pernah mengikuti program KB sebesar 23,02 persen (Gambar 5.7). Partisipasi pemuda perempuan di daerah perkotaan maupun perdesaan dalam program KB mempunyai pola yang relatif sama. Proporsi pemuda perempuan di perdesaan yang sedang mengikuti program KB adalah sebesar 62,29 persen, sedangkan di perkotaan sebesar 57,70 persen. Sementara itu, persentase pemuda perempuan di perkotaan yang pernah ikut KB tetapi sekarang tidak lagi sebesar 17,96 persen dan di perdesaan sebesar 15,79 persen.

Pemuda perempuan dalam ber-KB dapat memilih berbagai macam jenis alat/cara KB yang ada. Jenis alat/cara ber-KB yang banyak digunakan oleh pemuda perempuan pernah kawin adalah suntikan KB, yaitu sebesar 69,78 persen dan pil KB sebesar 18,70 persen (Tabel 5.7). Kedua alat KB tersebut merupakan alat/cara KB yang paling banyak digunakan oleh pemuda perempuan, baik yang tinggal di daerah perkotaan maupun perdesaan. Jenis alat/cara KB yang juga banyak digunakan oleh pemuda perempuan pernah kawin selain suntik dan pil adalah Susuk KB/Norplan/Implanon/Alwalit (4,70 persen) dan AKDR/IUD/Spiral (4,56 persen).

Tabel 5.7
Persentase Pemuda Perempuan Pernah Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB Menurut Alat/Cara KB yang Digunakan dan Tipe Daerah, 2014

Alat/Cara KB yang Digunakan	Perkotaan	Perdesaan	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)
AKDR/IUD/Spiral	6,94	2,70	4,56
Suntikan KB	67,53	71,53	69,78
Susuk KB/Norplan/ Implanon/Alwalit	3,58	5,57	4,70
Pil KB	18,76	18,65	18,70
Cara Tradisional	1,43	0,85	1,11
Lainnya*)	1,76	0,69	1,16
Jumlah	100,00	100,00	100,00

*) Termasuk MOW/tubektomi, MOP/vasektomi, Kondom, Intravag/tisu

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Terdapat perbedaan pola antara pemuda perempuan di perkotaan dan perdesaan dalam penggunaan Susuk KB/Norplan/Implanon/Alwalit dan AKDR/IUD/

Spiral. Susuk KB/Norplan/Implanon/Alwalit lebih banyak digunakan oleh pemuda perempuan di perdesaan daripada di perkotaan (5,57 persen berbanding 3,58 persen). Sebaliknya, AKDR/IUD/Spiral lebih banyak digunakan oleh pemuda perempuan di perkotaan (6,94 persen) daripada di perdesaan (2,70 persen).

Ada berbagai alasan yang menyebabkan pemuda perempuan pernah kawin tidak menggunakan alat KB. Berdasarkan Susenas 2014, dapat diketahui bahwa sebanyak 44,24 persen pemuda perempuan pernah kawin tidak menggunakan alat KB karena alasan lainnya, antara lain baru melahirkan, menyusui, kesehatan, suami merantau, dan lainnya (Tabel 5.8). Sementara itu, sebanyak 31,08 persen pemuda perempuan tidak menggunakan alat KB karena alasan fertilitas dan sebanyak 15,54 persen karena takut efek samping dari alat KB.

Tabel 5.8
Persentase Pemuda Perempuan Pernah Kawin yang Tidak Menggunakan Alat/Cara KB Menurut Alasan Utama dan Tipe Daerah, 2014

Alasan Utama Tidak Menggunakan	Perkotaan	Perdesaan	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)
Faktor Fertilitas*)	28,34	33,69	31,08
Tidak Setuju KB	2,65	3,39	3,03
Tidak Tahu Alat/Cara KB	0,64	1,46	1,06
Takut Efek Samping	18,16	13,05	15,54
Tidak Tahu	3,78	6,26	5,05
Lainnya**)	46,42	42,15	44,24
Jumlah	100,00	100,00	100,00

*) Ingin punya anak, mandul, menopause, dll

**) Baru melahirkan, menyusui, kesehatan, suami merantau, dll.

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

5.6 Umur Perkawinan Pertama Pemuda Perempuan

Perkawinan merupakan sarana untuk melanjutkan keturunan dan hal ini sangat berkaitan dengan pertumbuhan penduduk dalam hal ini fertilitas. Secara teori pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi merupakan beban dalam pembangunan nasional. Wirosuhardjo (1986:70) menyatakan bahwa pendidikan pada dasarnya mempengaruhi fertilitas melalui umur perkawinan dan peubah-peubah lainnya. Dalam

bukunya yang lain, Wirosuhardjo (1981:82) mengemukakan bahwa makin muda seseorang melakukan perkawinan makin panjang masa reproduksinya sehingga makin muda seseorang melangsungkan perkawinannya makin banyak pula anak yang dilahirkan. Rendahnya tingkat usia kawin pertama merupakan permasalahan krusial yang sedang dihadapi di beberapa negara dengan pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, termasuk di Indonesia.

BKKBN melalui program Generasi Berencana (Genre) berupaya untuk mengatasi hal tersebut dengan menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Salah satu upayanya adalah melalui Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Usia minimal pernikahan berdasarkan PUP adalah 20 tahun bagi pemuda perempuan dan 25 tahun bagi pemuda laki-laki. Pendewasaan usia perkawinan bagi remaja tersebut telah dicetuskan pada Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) 1994 di Kairo, Mesir. Hal ini dikarenakan pada usia tersebut pemuda sudah memiliki pengetahuan dan kesadaran dalam pengelolaan kesehatan reproduksi.

Risiko yang ditimbulkan bagi perempuan hamil pada usia di bawah 20 tahun dan di atas 35 tahun adalah risiko kesakitan dan kematian (BKKBN, 2013). Risiko tersebut meliputi risiko pada proses kehamilan dan pada proses persalinan. Pada proses kehamilan, risiko yang ditimbulkan antara lain keguguran, pre eklampsia, anemia, dan bayi meninggal dalam kandungan. Sedangkan pada proses persalinan, risiko yang ditimbulkan antara lain premature, berat bayi lahir rendah, kelainan bawaan, kematian bayi, bahkan hingga kematian ibu. Risiko-risiko tersebut dapat terjadi pada wanita usia di bawah 20 tahun karena masih belum matangnya rahim perempuan usia muda untuk bereproduksi. Masih belum siapnya mental dalam berumah tangga juga menjadi salah satu penyebab munculnya risiko tersebut.

Tabel 5.9 memperlihatkan bahwa sebagian besar pemuda perempuan menikah pada kelompok umur 19–24 tahun dengan persentase sebesar 54,93 persen. Sementara itu, sebesar 31,72 persen pemuda perempuan menikah pada kelompok umur 16–18 tahun dan sebesar 7,96 persen menikah pada kelompok umur 25–30 tahun. Apabila ditinjau menurut daerah tempat tinggal, baik di perkotaan maupun perdesaan sebagian besar pemuda perempuan menikah pada kelompok umur 19–24 tahun dan 16–18 tahun.

Tabel 5.9
Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Kawin Menurut Tipe Daerah dan Kelompok Umur Perkawinan Pertama, 2014

Tipe Daerah	Umur Saat Perkawinan Pertama				Jumlah
	9-15	16-18	19-24	25-30	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan (K)	3,01	24,45	61,33	11,21	100,00
Perdesaan (D)	7,38	37,83	49,55	5,24	100,00
K+D	5,39	31,72	54,93	7,96	100,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Penundaan masa perkawinan dan kehamilan memiliki alasan yang objektif. Jika usia perkawinan perempuan pada usia di bawah 20 tahun, dengan kondisi rahim dan panggul yang belum optimal, maka terjadi kemungkinan resiko medik, dengan keguguran serta kemungkinan kesulitan dalam persalinan.

Hasil Susenas 2014 memperlihatkan bahwa masih ada pemuda perempuan di Indonesia yang perkawinan pertamanya dilakukan ketika mereka berumur kurang dari 16 tahun yaitu sebesar 5,39 persen. Bila dilihat menurut tipe daerah, persentase pemuda perempuan di perdesaan yang usia perkawinannya kurang dari 16 tahun sebesar 7,38 persen, lebih tinggi dibandingkan pemuda perempuan di perkotaan yang sebesar 3,01 persen. Angka tersebut memberikan indikasi bahwa pernikahan di usia muda lebih banyak dilakukan oleh pemuda perempuan di perdesaan dibandingkan dengan pemuda di perkotaan.

Penundaan terhadap perkawinan pada usia muda dapat terjadi dengan semakin meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat dan semakin banyaknya anak-anak perempuan yang bersekolah. Hal tersebut juga disebabkan karena para orang tua menyadari bahwa diperlukan persiapan yang lebih lama untuk menjamin masa depan anak-anak mereka, sehingga menyekolahkan anak menjadi prioritas daripada mengawinkan anak-anak mereka. Kecenderungan ini terutama terjadi pada masyarakat di kota-kota besar atau di kalangan masyarakat dengan kelas sosial ekonomi menengah atas.



KETENAGA- KERJAAN

<http://www.go.id>



Ketenagakerjaan

Tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini telah diungkapkan dalam Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja penting dilakukan mengingat peran sertanya dalam pembangunan nasional. Informasi ketenagakerjaan diperlukan dalam proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Semakin lengkap dan akurat informasi ketenagakerjaan yang tersedia, maka perencanaan pembangunan akan semakin jelas dan tepat sasaran.

Pembangunan ketenagakerjaan tidak terlepas dari pembangunan kepemudaan. Pemuda memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan, termasuk diantaranya memasuki usia kerja. Pemuda memiliki potensi yang lebih besar dalam melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Beberapa kebijakan perlu dikeluarkan untuk tenaga kerja pemuda, diantaranya pemberian pelatihan kerja, perluasan kesempatan kerja, dan penempatan tenaga kerja pemuda pada sektor-sektor penting yang sesuai dengan kondisi pemuda.

Pembahasan kondisi ketenagakerjaan pemuda pada bab ini meliputi partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi, lapangan usaha, status pekerjaan, jam kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan pendapatan/upah/gaji bersih yang diterima oleh tenaga kerja pemuda. Pembahasan kondisi dan situasi ketenagakerjaan pemuda pada bagian ini memberikan gambaran secara makro mengenai peranan dan kontribusi pemuda dalam kegiatan pembangunan ekonomi.

6.1 Partisipasi dalam Kegiatan Ekonomi

Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi cukup besar. Berdasarkan data Sakernas 2014 sebesar 51,03 persen pemuda di Indonesia selama seminggu terakhir melakukan kegiatan bekerja (Tabel 6.1). Selanjutnya apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin, persentase pemuda laki-laki yang bekerja lebih banyak dibandingkan pemuda perempuan (63,32 persen berbanding 38,50 persen). Pola yang sama terjadi baik di perkotaan maupun di perdesaan. Dilihat menurut tipe daerah, pemuda di perdesaan yang bekerja (52,21 persen) sedikit lebih tinggi dibandingkan pemuda di perkotaan (49,96 persen).

Tabel 6.1 juga menunjukkan ada perbedaan yang signifikan antara pemuda laki-laki dan perempuan dalam kegiatan mengurus rumah tangga. Persentase pemuda perempuan yang mengurus rumah tangga tercatat sebesar 32,03 persen, jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan pemuda laki-laki, yaitu hanya sebesar 1,40 persen. Kondisi ini tidak terlepas dari budaya yang umum berlaku di masyarakat bahwa perempuan bertugas mengurus rumah tangga, sementara laki-laki bekerja mencari nafkah.

Tabel 6.1
Persentase Pemuda Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Kegiatan Seminggu Terakhir, 2014

Tipe Daerah/ JenisKelamin	Bekerja	Pengang- guran	Sekolah	Mengurus Rumah tangga	Lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perkotaan (K)						
Laki-laki (L)	59,66	11,85	23,32	1,31	3,86	100,00
Perempuan (P)	40,03	7,83	23,61	26,76	1,77	100,00
L+P	49,96	9,86	23,46	13,89	2,83	100,00
Perdesaan (D)						
Laki-laki (L)	67,37	9,67	16,41	1,50	5,05	100,00
Perempuan (P)	36,82	6,34	16,98	37,83	2,03	100,00
L+P	52,21	8,02	16,69	19,53	3,55	100,00
K+D						
Laki-laki (L)	63,32	10,82	20,04	1,40	4,42	100,00
Perempuan (P)	38,50	7,12	20,45	32,03	1,90	100,00
L+P	51,03	8,99	20,25	16,57	3,17	100,00

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2014

Pemuda yang bekerja dapat dikaitkan dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkannya. Tabel 6.2 memperlihatkan bahwa persentase tertinggi pemuda yang bekerja adalah mereka yang berpendidikan Sekolah Menengah (SM/ sederajat) sebesar 37,67 persen, Sekolah Menengah Pertama (SMP/ sederajat) sebesar 24,46 persen dan Sekolah Dasar (SD/ sederajat) sebesar 20,20 persen. Sedangkan pemuda yang bekerja tetapi tidak pernah mengenyam pendidikan persentasenya hanya sebesar 1,16 persen.

Terdapat perbedaan pola antara jenjang pendidikan yang ditamatkan oleh pemuda yang bekerja di perkotaan dan perdesaan. Di perkotaan, persentase tertinggi pemuda yang bekerja adalah mereka yang berpendidikan SM/ sederajat (48,54 persen), SMP/ sederajat (20,24 persen) dan PT (16,00 persen). Sedangkan di perdesaan, persentase tertinggi pemuda yang bekerja adalah mereka yang berpendidikan SMP/ sederajat (28,94 persen), SD/ sederajat (28,82 persen) dan SM/ sederajat (26,18 persen).

Tabel 6.2
Persentase Pemuda yang Bekerja Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2014

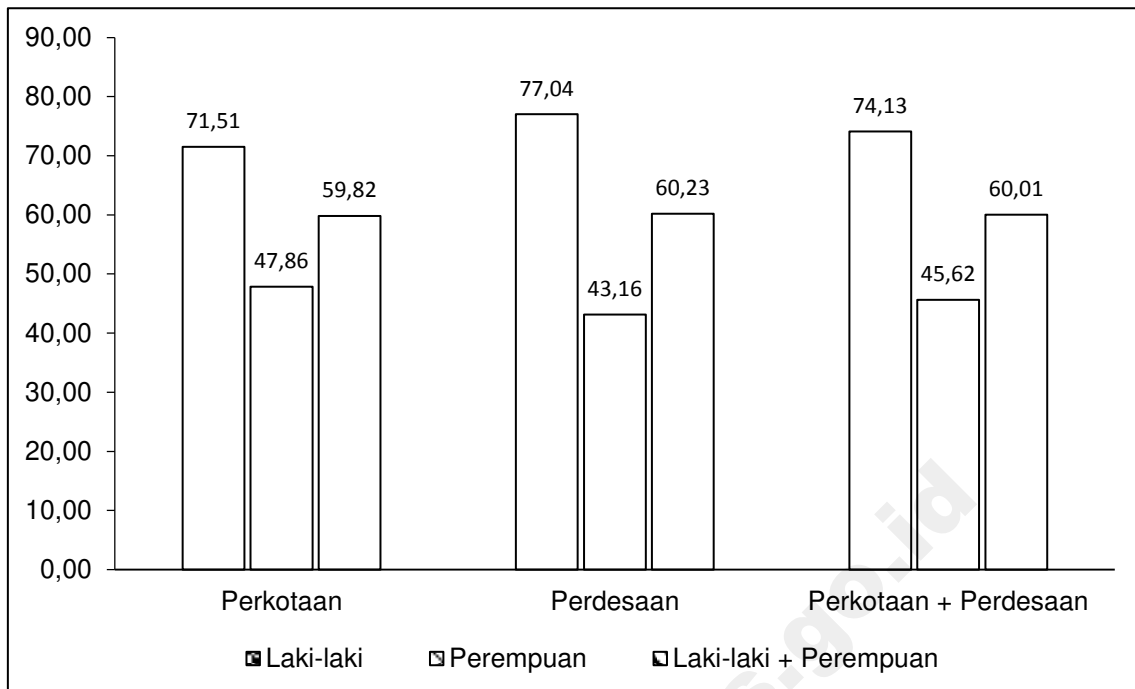
Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Tidak Pernah Sekolah	Tidak Tamat SD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SM/ Sederajat	PT	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Perkotaan (K)							
Laki-laki	0,22	3,71	13,59	21,30	49,30	11,88	100,00
Perempuan	0,15	1,85	9,72	18,61	47,38	22,29	100,00
L+P	0,19	2,98	12,06	20,24	48,54	16,00	100,00
Perdesaan (D)							
Laki-laki	1,49	8,34	30,47	29,04	26,74	3,93	100,00
Perempuan	3,46	7,02	25,75	28,75	25,15	9,86	100,00
L+P	2,18	7,88	28,82	28,94	26,18	6,01	100,00
K+D							
Laki-laki	0,86	6,05	22,10	25,20	37,92	7,87	100,00
Perempuan	1,66	4,20	17,02	23,23	37,26	16,64	100,00
L+P	1,16	5,36	20,20	24,46	37,67	11,15	100,00

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2014

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan salah satu indikator atau ukuran yang sering dipakai untuk melihat partisipasi penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi. TPAK didefinisikan sebagai perbandingan antara penduduk yang terlibat dalam kegiatan ekonomi atau disebut angkatan kerja (bekerja atau menganggur) terhadap seluruh penduduk usia kerja. Pada kelompok pemuda, TPAK merupakan proporsi pemuda (penduduk usia 16-30 tahun) yang bekerja atau menganggur terhadap jumlah pemuda itu sendiri. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Berdasarkan data Sakernas Agustus 2014, pemuda yang terlibat dalam kegiatan ekonomi cukup besar. Hal ini terlihat dari TPAK pemuda sebesar 60,01 persen (Gambar 6.1). TPAK sebesar 60,01 persen menunjukkan bahwa dari 100 pemuda, sekitar 60 orang diantaranya aktif dalam kegiatan ekonomi. TPAK pemuda di daerah perdesaan sebesar 60,23 persen, sedangkan di daerah perkotaan sebesar 59,82 persen, perbedaan angka tersebut menggambarkan partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi di perdesaan sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotaan.

Gambar 6.1
TPAK Pemuda Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014

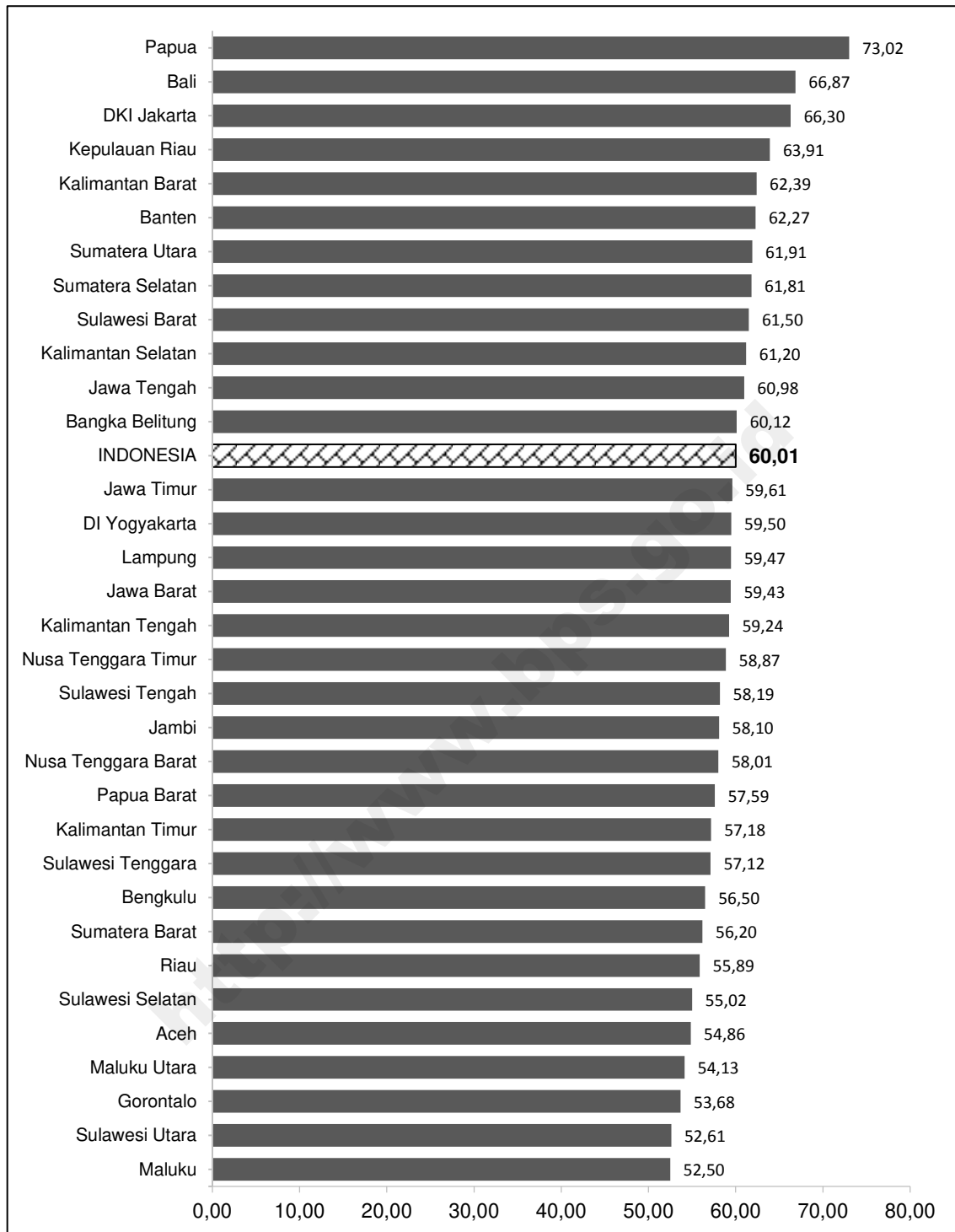


Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2014

Berdasarkan jenis kelamin terlihat bahwa TPAK pemuda laki-laki jauh lebih tinggi dibanding dengan TPAK pemuda perempuan. TPAK pemuda laki-laki pada tahun 2014 sebesar 74,13 persen sedangkan TPAK pemuda perempuan sebesar 45,62 persen. Salah satu faktor yang menyebabkan perbedaan antara TPAK pemuda perempuan dengan laki-laki adalah perempuan lebih banyak yang mengurus keluarga dan rumah tangga sehingga memiliki keterbatasan waktu untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.

Gambaran mengenai TPAK pemuda menurut provinsi disajikan dalam Gambar 6.2. Provinsi yang memiliki TPAK pemuda tertinggi adalah Papua (73,02 persen), kemudian diikuti Bali (66,87), dan DKI Jakarta (66,30 persen). Sedangkan tiga provinsi dengan TPAK pemuda terendah adalah Maluku (52,50 persen), Sulawesi Utara (52,61 persen) dan Gorontalo (53,68 persen).

Gambar 6.2
TPAK Pemuda Menurut Provinsi, 2014



Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2014

Semakin tinggi kelompok umur pemuda, semakin tinggi partisipasinya dalam kegiatan ekonomi. Seperti yang terlihat pada Tabel 6.3, TPAK pemuda pada kelompok umur 26–30 tahun (74,81 persen) paling tinggi dibandingkan kelompok umur lainnya. Pemuda kelompok umur 16–20 tahun memiliki TPAK paling rendah (40,16 persen),

sedangkan TPAK pemuda pada kelompok umur 21–25 tahun sebesar 69,66 persen. Salah satu penyebab rendahnya TPAK kelompok umur 16-20 tahun karena masih merupakan kelompok usia sekolah dan bukan penanggung jawab utama rumah tangga.

Tabel 6.3
TPAK Pemuda Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, 2014

Jenis Kelamin	Kelompok Umur			TPAK Pemuda
	16–20	21–25	26–30	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki (L)	47,36	86,20	96,01	74,13
Perempuan (P)	32,52	53,38	53,53	45,62
L+P	40,16	69,66	74,81	60,01

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2014

6.2 Lapangan Usaha

Komposisi pemuda yang bekerja menurut lapangan usaha merupakan salah satu indikator untuk melihat potensi beberapa sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja pemuda. Selain itu, indikator ini juga digunakan untuk melihat gambaran secara makro struktur perekonomian suatu wilayah serta perkembangannya.

Sektor pertanian masih memegang peran penting bagi ketenagakerjaan pemuda Indonesia, dimana 25,23 persen pemuda Indonesia bekerja pada lapangan usaha pertanian (Tabel 6.4). Selain pertanian, lapangan usaha yang banyak menyerap tenaga kerja pemuda adalah sektor perdagangan (22,86 persen), industri (18,20 persen), dan jasa (16,97 persen). Sementara itu, lapangan usaha yang sedikit menyerap tenaga kerja pemuda adalah sektor listrik, gas, dan air (0,26 persen), pertambangan dan galian (1,62 persen) serta keuangan (3,97 persen).

Struktur lapangan usaha pemuda yang bekerja menjadi berbeda jika dilihat berdasarkan tipe daerah. Lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja pemuda di perkotaan adalah sektor perdagangan (30,54 persen), industri (24,06 persen), dan jasa (20,46 persen). Sementara itu di daerah perdesaan, lapangan usaha yang paling

banyak menyerap tenaga kerja pemuda adalah pertanian (46,51 persen), perdagangan (14,74 persen), dan jasa (13,28 persen).

Tabel 6.4
Persentase Pemuda yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Tipe Daerah, 2014

Lapangan Usaha	Perkotaan (K)	Perdesaan (D)	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian	5,12	46,51	25,23
Perdagangan	30,54	14,74	22,86
Industri	24,06	12,00	18,20
Jasa	20,46	13,28	16,97
Transportasi & Komunikasi	5,92	3,36	4,67
Konstruksi	6,29	6,14	6,22
Keuangan	6,30	1,51	3,97
Pertambangan & Galian	0,96	2,32	1,62
Listrik, Gas, & Air dan lainnya	0,35	0,16	0,26
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2014

Berdasarkan jenis kelamin, seperti yang terlihat pada Tabel 6.5, terdapat perbedaan jenis lapangan usaha yang dipilih antara pemuda laki-laki dan perempuan. Pemuda laki-laki lebih banyak yang bekerja pada lapangan usaha pertanian (27,91 persen), perdagangan (18,31 persen), dan industri (17,18 persen). Sedangkan pemuda perempuan lebih banyak terkonsentrasi pada lapangan usaha perdagangan, jasa pada urutan kedua dan pertanian pada urutan ketiga dengan persentase masing-masing sebesar 30,48 persen, 22,40 persen, dan 20,75 persen.

Persentase pemuda laki-laki yang bekerja pada sektor konstruksi lebih besar dibandingkan persentase pemuda perempuan. Pada pemuda laki-laki sebesar 9,51 persen bekerja pada sektor konstruksi, sedangkan pada pemuda perempuan hanya sebesar 0,70 persen. Sedangkan pada sektor jasa justru terjadi sebaliknya. Pemuda perempuan pada sektor jasa sebesar 22,40 persen, sedangkan pemuda laki-laki hanya sebesar 13,73 persen. Hal ini merupakan gambaran bahwa peran pemuda laki-laki maupun pemuda perempuan berbeda pada beberapa sektor lapangan usaha.

Tabel 6.5
Persentase Pemuda yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin,
2014

Lapangan Usaha	Laki-Laki (L)	Perempuan (P)	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian	27,91	20,75	25,23
Perdagangan	18,31	30,48	22,86
Industri	17,18	19,91	18,20
Jasa	13,73	22,40	16,97
Transportasi & Komunikasi	6,55	1,53	4,67
Konstruksi	9,51	0,70	6,22
Keuangan	4,06	3,82	3,97
Pertambangan & Galian	2,41	0,30	1,62
Listrik, Gas, & Air dan lainnya	0,35	0,11	0,26
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2014

6.3 Status Pekerjaan

Distribusi pemuda yang bekerja menurut status pekerjaan memberikan gambaran tentang kedudukan seseorang dalam pekerjaan. Status pekerjaan dalam pembahasan ini dibagi menjadi lima, yaitu berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh, buruh/karyawan, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tidak dibayar.

Tabel 6.6
Persentase Pemuda yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Tipe Daerah, 2014

Status Pekerjaan	Perkotaan (K)	Perdesaan (D)	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha Sendiri	8,65	12,80	10,67
Berusaha Dibantu Buruh	4,39	10,19	7,21
Buruh/Karyawan	72,79	33,65	53,77
Pekerja Bebas	5,99	12,59	9,20
Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar	8,17	30,77	19,15
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2014

Lebih dari separuh pemuda (53,77 persen) bekerja sebagai buruh/karyawan (Tabel 6.6). Selain sebagai buruh/karyawan, pemuda juga banyak yang bekerja sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar dengan persentase sebesar 19,15 persen. Sementara itu, persentase pemuda yang berusaha sendiri sebesar 10,67 persen. Data ini menunjukkan bahwa masih banyak pemuda yang menggantungkan harapan masa depannya sebagai buruh/karyawan (bekerja kepada orang lain/perusahaan/industri). Sedikitnya pemuda yang berusaha sendiri disebabkan kurangnya kemauan untuk berinovasi dan berkreasi serta kurangnya keberanian untuk mengambil risiko. Keadaan ini juga disebabkan oleh belum kondusifnya iklim untuk berinovasi dan berkreasi yang diciptakan oleh pemerintah.

Pola status pekerjaan pemuda di perkotaan terdapat perbedaan dengan di perdesaan. Pemuda yang bekerja di perkotaan mayoritas bekerja sebagai buruh/karyawan (72,79 persen), berusaha sendiri (8,65 persen) dan pekerja keluarga/tidak dibayar (8,17 persen). Sementara itu pemuda di perdesaan yang bekerja sebagai buruh/karyawan sebesar 33,65 persen, kemudian yang menjadi pekerja keluarga/tidak dibayar ada sebesar 30,77 persen dan yang berusaha sendiri sebesar 12,80 persen.

Tabel 6.7
Persentase Pemuda yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin, 2014

Status Pekerjaan	Laki-Laki (L)	Perempuan (P)	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha Sendiri	11,54	9,21	10,67
Berusaha Dibantu Buruh	8,47	5,10	7,21
Buruh/Karyawan	52,01	56,72	53,77
Pekerja Bebas	12,32	3,97	9,20
Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar	15,66	24,99	19,15
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2014

Gambaran mengenai status pekerjaan antara pemuda laki-laki dan perempuan disajikan dalam Tabel 6.7. Sebagian besar pemuda laki-laki maupun perempuan bekerja sebagai buruh/karyawan. Hasil Sakernas 2014 menunjukkan bahwa sebesar

52,01 persen pemuda laki-laki bekerja sebagai buruh/karyawan, sedangkan pemuda perempuan yang bekerja dengan status buruh/karyawan persentasenya sebesar 56,72 persen. Selain sebagai buruh/karyawan, status pekerjaan lainnya yang juga mempunyai persentase cukup tinggi adalah sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar. Pemuda laki-laki yang bekerja sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar sebesar 15,66 persen, sedangkan pemuda perempuan persentasenya lebih tinggi lagi yaitu sebesar 24,99 persen.

Hal yang patut untuk dicermati adalah pemuda yang bekerja dengan status pekerja bebas. Terlihat adanya perbedaan yang cukup signifikan antara pemuda laki-laki dan perempuan. Pemuda laki-laki yang bekerja sebagai pekerja bebas tercatat sebesar 12,32 persen, lebih tinggi dibanding pemuda perempuan (3,97 persen). Pilihan dalam menjalani pekerjaan dapat dipengaruhi oleh status sosial-ekonomi. Laki-laki tentu memiliki tanggung jawab lebih besar secara sosial untuk mencari nafkah, termasuk dengan bekerja sebagai pekerja bebas.

Tabel 6.8
Persentase Pemuda yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2014

Status Pekerjaan	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Tidak/ Belum Tamat SD	SD/ Sede- rajat	SMP/ Sede- rajat	SM/ Sede- rajat	PT	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Berusaha Sendiri	0,99	7,82	28,65	29,03	29,95	3,56	100,00
Dibantu Buruh	2,39	8,69	28,87	25,85	29,19	5,00	100,00
Buruh/Karyawan	0,18	2,80	11,64	19,23	47,78	18,37	100,00
Pekerja Bebas	0,75	10,65	39,04	32,17	16,83	0,56	100,00
Pekerja Keluarga/ Tidak Dibayar	3,71	7,37	27,21	32,41	26,81	2,49	100,00

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2014

Salah satu faktor yang memengaruhi pilihan pemuda dalam memberikan peran bagi kegiatan perekonomian adalah pendidikan yang dimiliki. Pemuda dengan pendidikan yang lebih tinggi, secara umum mempunyai pilihan yang lebih luas dibandingkan dengan pekerja yang berpendidikan rendah. Pemuda dapat menentukan perannya dalam

pekerjaan dengan kompetensi yang dimiliki. Tabel 6.8 menyajikan gambaran pemuda yang bekerja menurut status pekerjaan dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

Pemuda yang bekerja sebagai buruh/karyawan dengan pendidikan tamat SM/ sederajat (47,78 persen) merupakan persentase yang tertinggi (mayoritas), diikuti pemuda yang tamat SMP/ sederajat dan perguruan tinggi, masing-masing sebesar 19,23 persen dan 18,37 persen. Fenomena ini merupakan sebuah ironi dalam ketenagakerjaan Indonesia. Pemuda yang bekerja sebagai buruh/karyawan pada kenyataannya adalah tenaga kerja terdidik yang mempunyai pendidikan tinggi. Situasi perekonomian dan kebijakan pemerintah belum memberikan daya dukung bagi pemuda untuk berusaha sendiri.

6.4 Jam Kerja

Jam kerja adalah waktu untuk melakukan pekerjaan, dapat dilaksanakan siang hari dan/atau malam hari. Jam kerja bagi para pekerja di sektor swasta diatur dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 77 sampai dengan Pasal 85. Pasal 77 Ayat 1, UU No.13/2003 mewajibkan setiap pengusaha untuk melaksanakan ketentuan jam kerja. Ketentuan jam kerja ini telah diatur dalam 2 sistem yaitu 7 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu; atau 8 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.

Tabel 6.9
Persentase Pemuda yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja selama Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin, 2014

Jumlah Jam Kerja	Laki-laki	Perempuan	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
≤ 7	2,98	3,89	3,32
8-14	3,51	6,03	4,45
15-21	6,20	9,05	7,27
22-28	7,43	8,91	7,98
29-35	9,68	10,45	9,97
>35	70,20	61,66	67,01
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2014

Komposisi pemuda yang bekerja menurut jumlah jam kerja dan jenis kelamin disajikan pada Tabel 6.9. Pemuda yang bekerja mempunyai jam kerja lebih dari 35 jam dalam seminggu sebesar 67,01 persen. Dilihat berdasarkan jenis kelamin, persentase pemuda laki-laki yang bekerja lebih dari 35 jam dalam seminggu tercatat sebesar 70,20 persen, lebih tinggi dibandingkan pemuda perempuan yang sebesar 61,66 persen. Keadaan yang berkebalikan terlihat pada pemuda yang bekerja dengan jam kerja 35 jam atau kurang dalam seminggu. Dimana persentase pemuda perempuan pada setiap kelompok jam kerja lebih tinggi dibanding pemuda laki-laki.

Tabel 6.10
Persentase Pemuda yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jumlah Jam Kerja selama Seminggu Terakhir, 2014

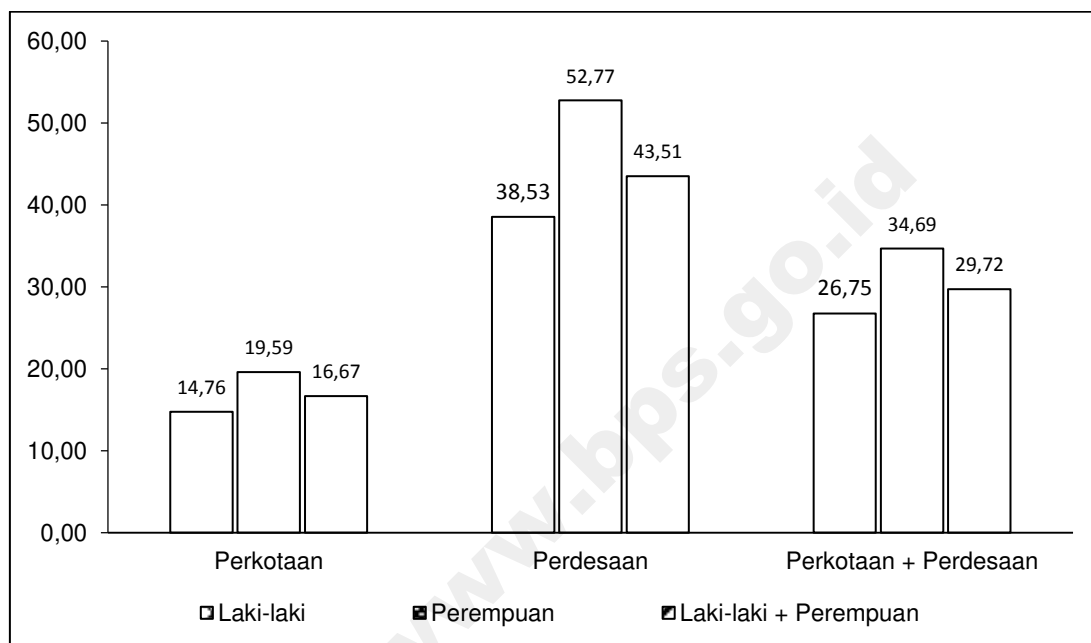
Status Pekerjaan	Jumlah Jam Kerja (Jam)						Jumlah
	≤7	8-14	15-21	22-28	29-35	>35	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Berusaha Sendiri	5,64	3,98	7,26	9,85	13,08	60,18	100,00
Berusaha Dibantu Buruh	5,54	3,50	7,64	9,09	12,88	61,34	100,00
Buruh/Karyawan	2,23	1,10	2,76	3,79	6,73	83,39	100,00
Pekerja Bebas	1,19	3,62	8,30	10,61	13,47	62,81	100,00
Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar	5,26	14,89	19,31	17,02	14,55	28,97	100,00

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2014

Tingginya persentase pemuda yang bekerja dengan jumlah jam kerja lebih dari 35 jam seminggu terkait dengan status pekerjaan pemuda yang sebagian besar adalah buruh/karyawan. Status pekerjaan ini tentunya telah mengikat pekerjaannya untuk memenuhi minimal jam kerja dalam seminggu. Kondisi ini terlihat pada data Sakernas Agustus 2014, dimana sebesar 83,39 persen pemuda yang bekerja sebagai buruh/karyawan mempunyai jam kerja lebih dari 35 jam seminggu (Tabel 6.10). Di sisi lain, persentase terkecil untuk pemuda yang bekerja dengan jam kerja lebih dari 35 jam seminggu adalah pada status pekerja keluarga/tidak dibayar, yaitu sebesar 28,97 persen. Dimana pada status pekerjaan ini tidak ada ketentuan minimal jam kerja yang harus dipenuhi oleh pemuda.

Pemuda yang bekerja dikelompokkan berdasarkan jumlah jam kerja, yaitu mereka yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu dan pemuda yang bekerja 35 jam atau lebih selama seminggu. Pemuda yang bekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 35 jam selama seminggu, dikategorikan sebagai pemuda setengah pengangguran.

Gambar 6.3
Proporsi Pemuda Setengah Pengangguran Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014



Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2014

Berdasarkan Gambar 6.3, sebesar 29,72 persen pemuda bekerja kurang dari 35 jam seminggu atau dikategorikan sebagai pemuda setengah pengangguran. Proporsi pemuda dengan kategori setengah pengangguran di perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotaan yaitu 43,51 persen berbanding 16,67 persen. Sementara itu apabila diperhatikan menurut jenis kelamin, terlihat bahwa pemuda perempuan setengah pengangguran (34,69 persen) proporsinya lebih besar dibandingkan dengan pemuda laki-laki (26,75 persen).

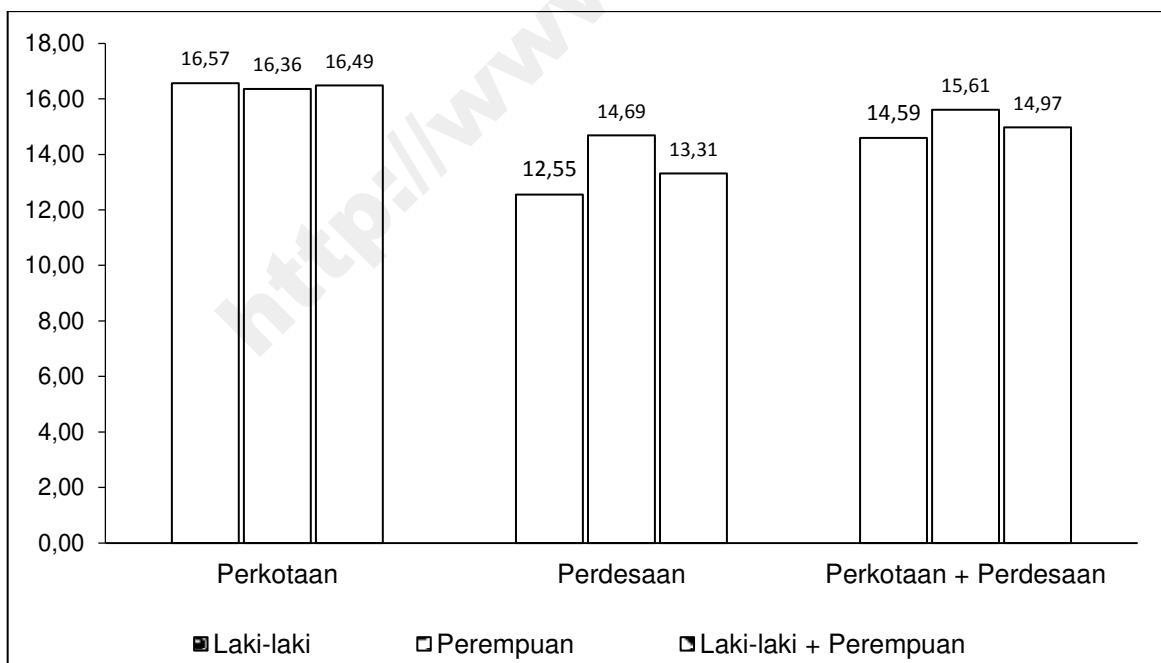
6.5 Tingkat Pengangguran Terbuka

Salah satu masalah ketenagakerjaan di Indonesia adalah pengangguran serta pendapatan pekerja yang relatif rendah dan kurang merata. Pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada. Pengangguran bisa

menjadi sumber utama kemiskinan, dapat mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal, dan dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang. Pengangguran yang terjadi pada pemuda merupakan pukulan bagi perekonomian Indonesia. Pemuda yang seharusnya menjadi tulang punggung dalam pembangunan perekonomian nasional tetapi pada kenyataannya justru menjadi beban bagi keluarga dan masyarakat.

Pembangunan dalam bidang ketenagakerjaan bertujuan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan pengangguran, apalagi yang terjadi pada penduduk pemuda yang merupakan angkatan kerja. Tujuan akhirnya diharapkan besarnya kesempatan kerja sama besar dengan angkatan kerja, sehingga semua angkatan kerja akan mendapatkan pekerjaan. Pada kenyataannya keadaan tersebut masih belum tercapai. Pemerintah belum dapat memenuhi jumlah lapangan kerja yang dibutuhkan, sehingga tidak semua angkatan kerja, khususnya pemuda mendapatkan pekerjaan, sehingga timbul pengangguran.

Gambar 6.4
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014



Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2014

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat pengangguran. TPT pemuda merupakan perbandingan antara

banyaknya pemuda yang tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena tidak mungkin mendapatkan pekerjaan termasuk putus asa, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja terhadap jumlah pemuda angkatan kerja. TPT pemuda mengindikasikan besarnya persentase pemuda angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Indikator TPT pemuda ini diharapkan menjadi acuan penyusunan kebijakan pembangunan ketenagakerjaan dan sekaligus menjadi evaluasi proses pembangunan yang telah berjalan.

Pada tahun 2014, TPT pemuda di Indonesia tercatat sebesar 14,97 persen (Gambar 6.4). Angka tersebut menunjukkan bahwa secara rata-rata dari setiap 100 pemuda angkatan kerja sebanyak 14 sampai 15 pemuda belum mempunyai pekerjaan. Bila dilihat menurut tipe daerah, TPT pemuda di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. TPT pemuda daerah perkotaan sebesar 16,49 persen, sedangkan TPT pemuda di perdesaan sebesar 13,31 persen.

Tabel 6.11
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Tipe daerah, 2014

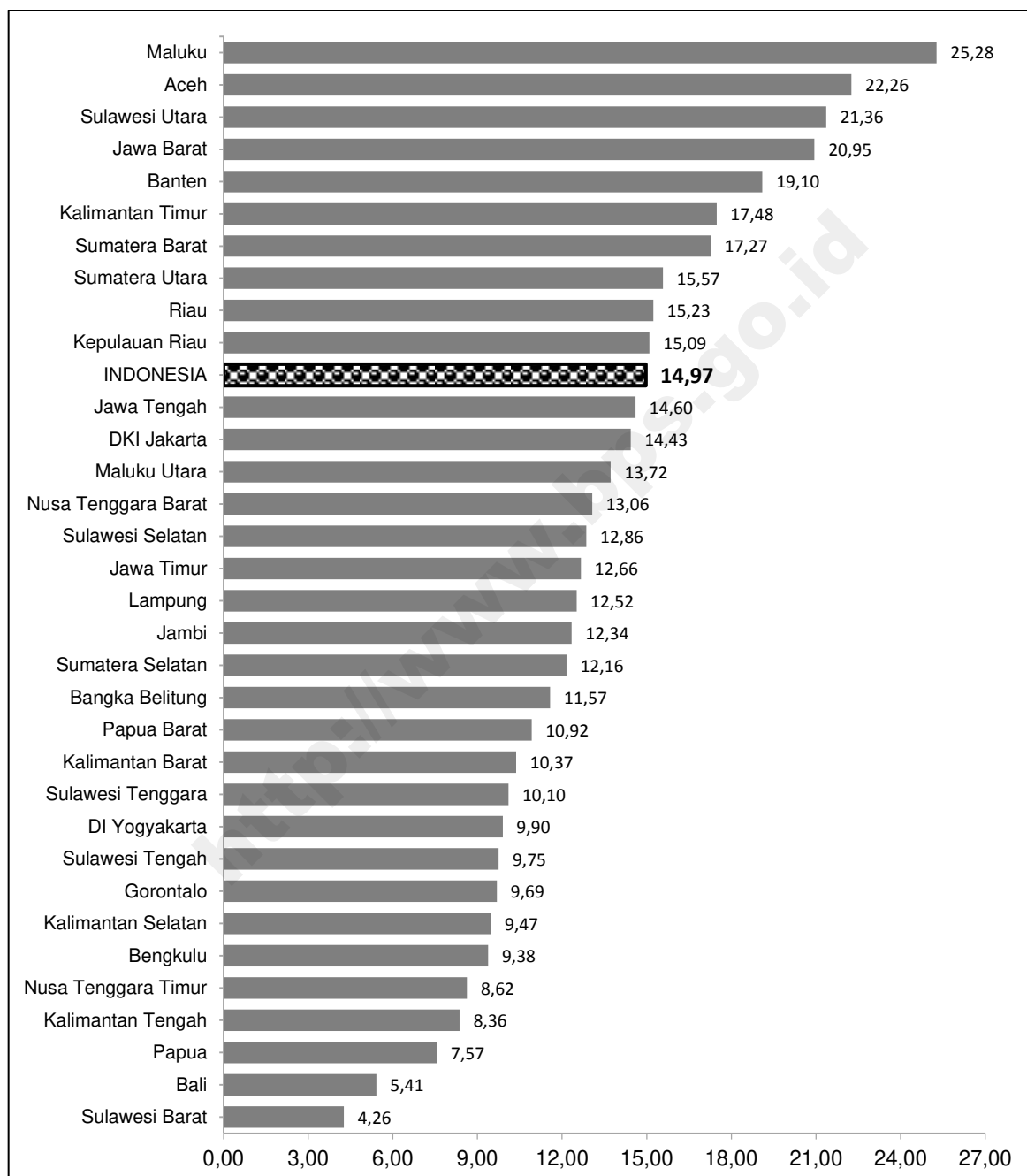
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Perkotaan (K)	Perdesaan (D)	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Pernah sekolah	20,49	2,70	4,51
Tidak Tamat SD	13,81	6,89	8,98
SD/Sederajat	12,93	8,67	10,02
SMP/Sederajat	14,16	13,09	13,55
SM/Sederajat	19,16	20,34	19,56
PT	13,91	13,50	13,80
Jumlah	16,49	13,31	14,97

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2014

TPT pemuda menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tipe daerah disajikan pada Tabel 6.11. TPT pemuda terbesar adalah mereka yang berpendidikan SM/ sederajat (19,56 persen). Sedangkan pemuda yang pendidikan tertingginya adalah perguruan tinggi dan SMP/ sederajat menempati urutan kedua dan ketiga dengan TPT masing-masing sebesar 13,80 persen dan 13,55 persen. Hal ini menjadi ironi mengingat tingkat pengangguran lebih banyak ditemukan di kalangan mereka yang mengenyam

pendidikan tinggi. Gambaran yang serupa juga terlihat pada pemuda pengangguran yang tinggal di perkotaan dan perdesaan. TPT pemuda yang berpendidikan tamat SM/ sederajat menempati urutan pertama baik di perkotaan maupun di perdesaan, yaitu masing-masing sebesar 19,16 persen dan 20,34 persen.

Gambar 6.4
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda Menurut Provinsi, 2014



Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2014

Dilihat sebarannya menurut provinsi, tingkat pengangguran terbuka yang tertinggi terdapat di Maluku (25,28 persen), Aceh (22,26 persen), dan Sumatera Utara

(21,36 persen). Sementara persentase tingkat pengangguran terbuka terendah ada di Sulawesi Barat (4,26 persen), Bali (5,41 persen), dan Papua (7,57 persen).

6.6. Pendapatan/Upah/Gaji Bersih

Pasal 1 ayat 30 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Penghasilan yang rendah atau masih dibawah standar kebutuhan hidup sehari-hari menyebabkan tingkat kesejahteraan para pekerja masih sangat sulit untuk dicapai. Penghasilan yang rendah ini juga dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari. Para pekerja akan terjebak pada pola hidup subsistem dan nantinya akan berujung pada kemiskinan dikarenakan sebagai salah satu konsekuensi atas rendahnya penghasilan yang mereka terima.

Tabel 6.12
Persentase Pemuda yang Bekerja dan Berusaha atau Dibayar Menurut Tipe Daerah dan Pendapatan/Upah/Gaji Bersih Sebulan, 2014

Tipe Daerah	Pendapatan/Upah/Gaji Bersih Sebulan (ribu rupiah)						Jumlah
	<500	500 - 999	1 000 - 1 499	1 500 - 1 999	2 000 - 2 499	≥2 500	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Perkotaan (K)	12,70	24,43	21,03	17,47	10,56	13,81	100,00
Perdesaan (D)	20,37	36,17	20,71	12,02	5,71	5,01	100,00
K+D	15,69	29,00	20,91	15,35	8,67	10,38	100,00

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2014

Tabel 6.12 memperlihatkan persentase pemuda yang bekerja dan berusaha menurut tipe daerah dan pendapatan/upah/gaji bersih yang diterima selama sebulan terakhir. Secara nasional persentase pemuda yang bekerja dengan pendapatan Rp 1.000.000,- keatas (55,31 persen) lebih tinggi dibandingkan dengan yang memiliki

pendapatan kurang dari Rp 1.000.000,-. Namun, pola pendapatan ini belum terjadi secara merata di perkotaan dan perdesaan. Persentase pemuda yang bekerja dengan pendapatan diatas Rp 1.000.000,- di perkotaan lebih tinggi (62,87 persen) dibandingkan pemuda di perdesaan yang bekerja (43,46 persen). Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa rata-rata pendapatan pemuda di perkotaan yang bekerja lebih tinggi dibandingkan pemuda di perdesaan.

<http://www.bps.go.id>



**PROGRAM
PEMBERDAYAAN**

<http://www.pps.go.id>



Program Pemberdayaan

Pemuda sebagai generasi penerus masa depan bangsa memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa. Peran strategis tersebut memang tidak dapat diabaikan, sehingga pemerintah perlu mempersiapkan pemuda agar memiliki kualitas dan daya saing dalam menghadapi tuntutan, kebutuhan, serta tantangan dan persaingan di era globalisasi. Sasaran pembangunan pada bidang kepemudaan menjadi mata rantai tidak terpisahkan dari sasaran pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Salah satu kunci agar peluang terhadap keberhasilan pembangunan di berbagai sektor dapat terlaksana adalah dengan keberhasilan membangun pemuda sebagai sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan memiliki keunggulan daya saing. Pembangunan kepemudaan menjadi satu program penting untuk menyiapkan kehidupan bangsa di masa depan.

Berdasarkan data Susenas Tahun 2014, jumlah pemuda Indonesia (penduduk usia antara 16 sampai dengan 30 tahun) ada sebanyak 61.83 juta jiwa atau sekitar 24,53 persen dari jumlah seluruh penduduk Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pemuda merupakan aset penting dalam pembangunan, bukan hanya dari sisi jumlahnya yang

besar tetapi juga kualitasnya. Oleh karena itu, pembangunan kepemudaan merupakan upaya penting dalam pembangunan sumberdaya manusia.

Strategi dan kebijakan pembangunan kepemudaan berkonsentrasi pada pengembangan wadah pemuda dalam mengorganisasikan dirinya secara bebas, bertanggung jawab, merdeka dan demokratis sekaligus sebagai upaya pendewasaan diri agar kelak menjadi pemimpin bangsa yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, mandiri dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat. Pembangunan kepemudaan dapat dilaksanakan melalui berbagai macam program dan kegiatan yang langsung menyentuh kepentingan pemuda. Beberapa bentuk pembangunan kepemudaan tersebut mencakup beberapa hal, antara lain:

- a. Penyadaran pemuda, yaitu kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
- b. Pemberdayaan pemuda, yaitu kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
- c. Pengembangan kepemimpinan pemuda, yaitu kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
- d. Pengembangan kewirausahaan pemuda, yaitu kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
- e. Pengembangan kepeloporan pemuda, yaitu kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.

Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Beberapa strategi yang dilakukan adalah:

- a. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda;
- b. Pendampingan pemuda;
- c. Perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan
- d. Penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.

Beberapa kegiatan terkait dengan program pembangunan kepemudaan antara lain:

7.1 Program Penyadaran Pemuda

Penyadaran pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1. Beberapa kegiatan yang berhubungan dengan penyadaran pemuda tahun 2014 berdasarkan hasil kunjungan yang dilakukan ke Kementerian/Lembaga terkait, yaitu antara lain:

a. Kementerian Pemuda dan Olahraga, kegiatan yang dilakukan adalah:

- Pelatihan *training of trainer* (TOT) pengembangan kesadaran pemuda terhadap faktor destruktif pornografi dan pornoaksi;
- Pelatihan *training of trainer* (TOT) dan Deklarasi Anti Terorisme yang bertujuan memberikan pemahaman tentang radikalisasi dan antiradikal dikalangan pemuda, memperkuat sikap kepedulian sosial di kalangan pemuda tentang radikalisasi, memperkuat nilai-nilai toleransi dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan;
- Pendidikan peningkatan kesadaran bela negara pemuda tingkat nasional yang bertujuan menjadikan pemuda memiliki sikap demokrasi dan membangkitkan semangat kesatuan dan persatuan dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- *Workshop* peningkatan wawasan pemuda di daerah pasca konflik;
- *Workshop* peningkatan wawasan pemuda di daerah pasca bencana;

b. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), kegiatan yang dilakukan adalah:

- Program Generasi Berencana (GenRe) melalui kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR), serta Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Mahasiswa (PIK R/M).

c. Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

- Gerakan Pramuka sebagai lembaga pendidikan nonformal yang tujuan utamanya adalah membentuk kaum muda yang berakhlak mulia, menanamkan semangat kebangsaan dan meningkatkan keterampilan menjadi penting peranannya.

7.2 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda

1. Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (PSP3)

Salah satu masalah kepemudaan adalah keberadaan kaum muda terdidik belum cukup produktif dan kontributif terhadap masyarakat, khususnya lapisan bawah di perdesaan. Pada umumnya kaum muda di kalangan kelas menengah cenderung memiliki gaya hidup konsumtif. Karenanya, keberhasilan pembangunan kepemudaan terutama dalam menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan memiliki keunggulan daya saing, menjadi salah satu kunci dalam membuka peluang dan kemajuan di berbagai sektor pembangunan dan masa depan Indonesia. Untuk menjawab persoalan yang dipaparkan tersebut dan dalam upaya mendorong, mengembangkan, dan meningkatkan kepeloporan pemuda, pemerintah memfasilitasi potensi pemuda terdidik di perdesaan melalui program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (PSP3). Pelaksanaan program yang dilaksanakan pada tahun 2014 adalah dengan menempatkan 1000 orang sarjana dari berbagai disiplin ilmu untuk ditempatkan lintas Provinsi di 494 Desa, 251 kecamatan pada 33 Provinsi.

2. Jambore Pemuda Indonesia

Pengembangan wawasan pemuda agar dapat meningkatkan kreativitas, perlu direncanakan secara berjenjang dan berkesinambungan, sehingga berbagai potensi pemuda dapat diakomodir untuk lebih dikembangkan. Potensi tersebut dapat dikembangkan antara lain melalui Jambore Pemuda Indonesia (JPI). JPI adalah kegiatan kemah yang diikuti oleh perwakilan pemuda dari seluruh provinsi di Indonesia serta perwakilan dari negara sahabat. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan kreativitas dan sekaligus membuka wawasan kedaerahan yang tidak terpaku pada budaya lokal (provinsi). Dengan melakukan proses pembelajaran melalui JPI, merupakan salah satu bentuk penguatan wawasan kebangsaan pemuda dengan memahami berbagai potensi budaya dan kekayaan alam sebagai sumber utama pembangunan nasional. Pelaksanaan Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Tahun 2014 dilaksanakan di Kompleks Taman Wisata Candi Prambanan, Provinsi Yogyakarta.

3. Pemuda Pelopor

Melihat kondisi yang dihadapi oleh bangsa ini, maka kepeloporan pemuda dituntut untuk dapat melakukan terobosan-terobosan yang dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi upaya mengatasi masalah yang dihadapi. Kepeloporan pemuda difokuskan pada 5 bidang, yaitu:

a. Pendidikan

Kepeloporan bidang pendidikan adalah suatu karya nyata pada bidang pendidikan yang diprakarsai oleh pemuda untuk mengatasi permasalahan pendidikan baik secara kualitas maupun kuantitas, termasuk di dalamnya adalah pengembangan teknologi, metodologi, dan pola managerial yang bermanfaat bagi masyarakat.

b. Sosial Budaya dan Pariwisata

Kepeloporan bidang sosial budaya dan pariwisata adalah karya nyata yang dilakukan oleh pemuda dalam menciptakan dan/atau mengembangkan teknologi atau kegiatan terkait dengan bidang bela negara, kerukunan, seni dan budaya atau kegiatan kemasyarakatan lain yang bertujuan untuk dapat terciptanya kehidupan masyarakat yang damai dan sejahtera, serta melestarikan kekayaan budaya yang dapat mengharumkan nama bangsa.

c. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Kepeloporan bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan adalah karya nyata yang dilakukan oleh pemuda dalam menciptakan, mengembangkan dan melestarikan dengan memanfaatkan teknologi atau kegiatan lainnya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang terkonsentrasi pada pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan meliputi sektor pertanian, kelautan, dan kehutanan.

d. Industri Pangan dan Kesehatan

Kepeloporan bidang industri dan kesehatan pangan adalah karya nyata yang dilakukan oleh pemuda dalam menciptakan dan/atau mengembangkan teknologi pangan dan kegiatan lainnya dalam bidang pengolahan pangan dan makanan sehat yang bertujuan untuk meningkatkan nilai guna dan kemanfaatan bahan pangan, dalam meningkatkan gizi dan derajat kesehatan masyarakat.

e. Komunikasi dan Informasi

Kepeloporan bidang komunikasi dan informasi adalah karya nyata yang dilakukan oleh pemuda dalam menciptakan dan/atau mengembangkan teknologi dan kegiatan lainnya dalam bidang komunikasi dan informasi yang mencakup, sistem, program dan piranti (hardware) yang bertujuan membantu masyarakat dalam memudahkan akses komunikasi informasi.

4. Paskibraka

Paskibraka (Pasukan Pengibar Bendera Pusaka) mempunyai tugas mengibarkan duplikat bendera pusaka dalam upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia baik di tingkat kabupaten/kota hingga tingkat nasional. Anggota Paskibraka berasal dari pelajar sekolah menengah.

Seleksi untuk menjadi anggota Paskibraka harus dijalani dari tingkat kabupaten/kota. Selanjutnya perwakilan dari tiap kabupaten/kota akan mengikuti seleksi tingkat provinsi. Setiap provinsi akan mengirimkan dua orang perwakilan ke tingkat nasional.

5. Kewirausahaan Pemuda

Pembangunan ekonomi berkelanjutan mutlak memerlukan pelaku ekonomi dari angkatan muda yang jumlahnya besar dengan kapasitas kemampuan produktivitas ekonomi yang juga tinggi. Salah satu solusi yang dikedepankan adalah mengembangkan kewirausahaan pemuda. Maksudnya menjadikan pemuda sebagai wirausahawan dan mengembangkan kiprah wirausahawan muda sebagai aktor penggerak tumbuhnya kegiatan ekonomi dan industri di kota dan desa.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menumbuhkan kewirausahaan pemuda Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Pelatihan Kewirausahaan Pemuda. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan minat pemuda untuk terjun ke dunia wirausaha, memperkuat motivasi wirausaha muda dalam upaya pengembangan wirausaha di kalangan pemuda dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dalam berbagai aspek pengembangan dan perluasan skala usaha. Sasaran yang ingin dicapai dari

kegiatan ini adalah wirausaha muda sebanyak 3300 orang yang tersebar di 33 provinsi seluruh Indonesia.

- b. **Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemanfaatan IPTEK (Teknopreneur Muda Pemula/Tekno PMP) bagi Pemuda.** Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknopreneur pemuda, menumbuhkan minat pemuda dalam teknopreneur melalui kreativitas dan inovasi, dan memanfaatkan IPTEK yang bernilai ekonomis untuk dikembangkan pemuda dalam konteks kearifan lokal. Peserta dari kegiatan ini adalah pemuda terseleksi yang mempunyai minat berwirausaha.
- c. **Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Kelompok Wirausaha Pemuda (KWP) Tahun 2014.** Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah memfasilitasi lahirnya wirausaha-wirausaha baru di kalangan pemuda dalam bentuk kelompok, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan KWP menjadi usaha yang tangguh dan mandiri yang mampu memproduksi barang dan jasa yang diterima oleh pasar, meningkatkan peran KWP dalam pembangunan karakter dan budaya wirausaha bagi pemuda di daerah, penciptaan lapangan kerja, dan membantu pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. KWP adalah unit usaha produktif pemuda yang memenuhi kriteria usaha mikro dengan anggota 3-5 orang pemuda.
- d. **Dukungan Fasilitas Bagi Wirausaha Muda Pemula dan Kelompok/Sentra Kewirausahaan Pemuda.** Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan dukungan fasilitas bagi wirausaha muda pemula dan sentra kewirausahaan pemuda agar usaha dan pembinaan yang dilakukan semakin berkembang.

6. Kapal Pemuda Nusantara

Kapal Pemuda Nusantara (KPN) adalah salah satu program dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk anak-anak muda di Indonesia berusia 16-30 Tahun, yang menyukai dan berkiprah di dunia kebaharian, berkeliling Indonesia untuk belajar bersama selama kurang lebih 30 hari di atas Kapal Perang. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan

kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi, kesadaran dan keterampilan di bidang kebaharian, menguatkan kecintaan kepada tanah air, serta menumbuhkan persatuan di kalangan pemuda. Tahun 2014 Kapal Pemuda Nusantara (KPN) atau Lintas Nusantara Remaja dan Pemuda Bahari (LNRPB) bertemakan 'Sail Raja Ampat', yang berlansung pada 22 Juli hingga 23 Agustus 2014. Sebanyak 200 remaja berkegiatan di atas Kapal Republik Indonesia (KRI) Makassar, dengan puncak acara berada di Waisei, Raja Ampat.

7.3 Program Kepemudaan Lainnya

Selain program-program di atas, ada beberapa program kepemudaan lainnya, antara lain seperti lomba industri kreatif (lomba desain motif batik, lomba animasi pemuda, dan lomba cipta lagu Mars dan Pop/poprock pemuda), pelatihan pengurus OSIS, pelatihan kepemimpinan pemuda, pelatihan manajemen kelembagaan organisasi pemuda, bakti pemuda antar provinsi, pertukaran pemuda antar negara, dan pengiriman delegasi pemuda Indonesia ke luar negeri.

Program pertukaran pemuda antar negara merupakan salah satu sarana bagi pengembangan kepemudaan kita. Pengetahuan, kemampuan dan pengalaman negara lain dapat menjadi perbandingan bagi pengembangan kepemudaan di masa mendatang. Selain itu, dengan pertukaran tersebut dapat menjadi jembatan untuk membangun jejaring antar pemuda, meningkatkan kompetensi dan pengalaman para pemuda kita, sekaligus membangun persahabatan antar bangsa. Tahun 2014 telah dilakukan kerjasama luar negeri dibidang kepemudaan dengan beberapa negara, yaitu India, Korea Selatan, Malaysia, Australia, dan Kanada.

Pengiriman delegasi pemuda Indonesia ke luar negeri bertujuan untuk membantu para pemuda dalam mencapai kesetaraan dalam bidang intelektual, spiritual bahkan emosional. Diharapkan setelah melaksanakan program ini pemuda Indonesia dapat memperoleh pengetahuan terutama dalam bidang teknologi, sosial, ekonomi, budaya yang lebih baik dan efektif karena telah mengetahui secara langsung kemajuan-kemajuan di negara-negara lainnya. Pengiriman delegasi pemuda Indonesia telah dilakukan ke berbagai negara, yaitu Kawasan Amerika, Kawasan Asia, Kawasan Eropa, Kawasan Afrika dan Kawasan Asia Pasifik.

DAFTAR PUSTAKA

<http://www.pps.go.id>

Daftar Pustaka

- Al farisyi, M. 2011, *Masalah Pedesaan dan Perkotaan*, <http://alfarisyi15.blogspot.com/2011/11/masalah-pedesaan-dan-perkotaan.html>, 25 November 2011 diakses 8 Oktober 2013
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012*. Jakarta: BKKBN.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 2014. *Pedoman Pengelolaan Bina Keluarga Remaja (BKR)*, Jakarta: BKKBN.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 2014. *Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Mahasiswa (PIK R/M)*, Jakarta: BKKBN
- Badan Pusat Statistik, *Buku IV Survei Sosial Ekonomi Nasional 2012, Pedoman Pencacahan MSBP*, Jakarta, 2012
- Badan Pusat Statistik. 2010. *Statistik Pendidikan 2009*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2013. *Statistik Pendidikan 2012*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2010. *Statistik Pemuda Indonesia 2009*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2011. *Statistik Pemuda Indonesia 2010*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2012. *Statistik Pemuda Indonesia 2011*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2013. *Statistik Pemuda Indonesia 2012*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2014. *Statistik Pemuda Indonesia 2013*. Jakarta: BPS.
- Berbagi Info Kesehatan, 2011. Arah Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, <http://sehat-aja-yuk.blogspot.com/2011/05/arah-tujuan-dan-kebijakan-pembangunan>
- PSIK STIKES Mahardika, 2014. Pembangunan Kesehatan di Indonesia, Indonesia Sehat 2014, dan Millenium Development Goal's, <http://psikstikma.blogspot.com/2014/01/pembangunan-kesehatan-di-indonesia.html>
- Dispورا Jatim, 2014. Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (PSP-3) Tahun 2014, http://dispورا.jatimprov.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=249:program-pemuda-sarjana-penggerak-pembangunan-di-pedesaan-psp-3-tahun-2014&catid=43:aktifitas-pemuda&Itemid=1
- Dispورا Jatim, 2014, Pemuda Pelopor, http://dispورا.jatimprov.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=146&Itemid=145
- Dispورا Jatim, 2014. Paskibraka, http://dispورا.jatimprov.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=141&Itemid=146
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Dan Pemberantasan Buta Aksara
- Kementerian Pemuda dan Olahraga. 2009. *Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2010-2014*. Jakarta: Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- Kementerian Pemuda dan Olahraga. 2014. *Pedoman Pelaksanaan Supervisi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tahun 2014*. Jakarta: Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- Kementerian Pemuda dan Olahraga. 2014. *Panduan Kegiatan Workshop Peningkatan Wawasan Pemuda Di Daerah Pasca Bencana Tahun 2014*. Jakarta: Kementerian Pemuda dan Olahraga.

- Kementerian Pemuda dan Olahraga. 2014. *Panduan Kegiatan Workshop Peningkatan Wawasan Pemuda Di Daerah Pasca Konflik Tahun 2014*. Jakarta: Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- Kementerian Pemuda dan Olahraga. 2014. *Pedoman Training of Trainer Deklarasi Pemuda Anti Terorisme Tahun 2014*. Jakarta: Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- Kementerian Pemuda dan Olahraga. 2014. *Buku Panduan Jambore Pemuda Indonesia Tahun 2014*. Jakarta: Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- Kementerian Pemuda dan Olahraga. 2014. *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Kesadaran Bela Negara Pemuda Tingkat Nasional Tahun 2014*. Jakarta: Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- Kementerian Pemuda dan Olahraga. 2014. *Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemanfaatan IPTEK (Teknopreneur Muda Pemula/Tekno PMP) bagi Pemuda Tahun 2014*. Jakarta: Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- Kementerian Kesehatan, *Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014*, Jakarta, 2009
- Kwartir Nasional Gerakan Pramuka. 2014. *Rencana Strategis Gerakan Pramuka Tahun 2014-2019*. Jakarta: Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
- Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2010. *Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RJPMN) Tahun 2010-2014*. Jakarta: Bappenas.
- Sulistya, Ari. 2012. Pentingnya Peran Pemuda Dan Mahasiswa Terhadap Kemajuan Bangsa, <https://ariesulistya.wordpress.com/2012/04/07/pentingnya-peran-pemuda-dan-mahasiswa-terhadap-kemajuan-bangsa-2/>
- Taufiq, Muslim. 2013. Peran Pemuda Dalam Pembangunan, <http://www.unmabanten.ac.id/index.php/kumpulan-artikel-opini/118-peran-pemuda-dalam-pembangunan>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 tentang Program pembangunan nasional
- Risnasari, N., 2013, *Perkembangan Masyarakat Desa Dan Kota Dibidang Politik, Ekonomi, Dan Pendidikan*, <http://risnasari13.blogspot.com/2013/04/makalah-sosiologi-4.html>, 27 April 2013, diakses 20 Juli 2013
- Rohmah, N., *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Usia Perkawinan Pertama Wanita di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik*, ejournal.unesa.ac.id/article/1486/40/article.pdf
- Soleh, Badrus, 2012, *Memahami Peran Remaja dalam Keluarga*, <http://www.slideshare.net/badrussoleh/memahami-peran-remaja-dalam-keluarga>, diakses 8 Oktober 2013
- Sudaryono, dkk. *Cloud Computing: Teori Dan Implementasinya Dalam Dunia Bisnis Dan Pemasaran*, raharja.ac.id/raharja_file/file_jurnal/file//5020312.pdf
- Wirosuhardjo, K., 1986, *Kebijakan Kependudukan dan Ketenagakerjaan di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Penerbit FE Universitas Indonesia

LAMPIRAN

TABEL

<http://www.kompas.com/id>

Tabel 3.1.1 Perkiraan Jumlah Pemuda Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (ribu), 2014

Provinsi	Laki-laki (000)	Perempuan (000)	Perkotaan
			Laki-laki+Perempuan (000)
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	197,4	199,4	396,8
Sumatera Utara	899,5	895,2	1 794,7
Sumatera Barat	252,9	251,4	504,2
Riau	356,0	323,3	679,4
Jambi	130,1	123,4	253,5
Sumatera Selatan	402,4	392,4	794,7
Bengkulu	79,7	81,9	161,6
Lampung	260,1	265,0	525,1
Kep. Bangka Belitung	90,4	83,0	173,4
Kepulauan Riau	197,0	217,7	414,7
DKI Jakarta	1 413,3	1 447,5	2 860,8
Jawa Barat	4 041,9	3 956,0	7 997,8
Jawa Tengah	1 812,2	1 820,3	3 632,4
DI Yogyakarta	334,7	313,2	647,8
Jawa Timur	2 133,2	2 146,7	4 279,9
Banten	1 117,9	1 112,6	2 230,5
Bali	315,5	303,4	618,8
Nusa Tenggara Barat	252,1	276,8	528,9
Nusa Tenggara Timur	138,1	133,7	271,8
Kalimantan Barat	194,8	206,4	401,3
Kalimantan Tengah	116,3	112,3	228,6
Kalimantan Selatan	216,3	215,4	431,7
Kalimantan Timur	340,1	315,1	655,2
Sulawesi Utara	136,8	125,8	262,6
Sulawesi Tengah	98,6	95,9	194,5
Sulawesi Selatan	431,9	445,5	877,4
Sulawesi Tenggara	93,0	96,8	189,7
Gorontalo	49,4	49,8	99,2
Sulawesi Barat	35,5	36,8	72,3
Maluku	89,7	89,7	179,4
Maluku Utara	45,9	44,4	90,4
Papua Barat	37,6	32,8	70,4
Papua	127,4	104,5	231,9
Indonesia	16 437,8	16 313,8	32 751,6

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 3.1.2 Perkiraan Jumlah Pemuda Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (ribu), 2014

Provinsi	Laki-laki (000)	Perempuan (000)	Perdesaan
			Laki-laki+Perempuan (000)
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	457,5	465,4	922,8
Sumatera Utara	827,6	803,8	1 631,4
Sumatera Barat	354,8	348,7	703,5
Riau	501,0	477,4	978,3
Jambi	310,8	293,3	604,1
Sumatera Selatan	670,8	623,3	1 294,1
Bengkulu	161,0	155,8	316,8
Lampung	732,1	690,6	1 422,6
Kep. Bangka Belitung	96,1	85,4	181,5
Kepulauan Riau	38,4	35,5	73,9
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	1 818,1	1 749,6	3 567,6
Jawa Tengah	1 920,4	1 897,7	3 818,1
DI Yogyakarta	123,1	124,7	247,8
Jawa Timur	2 161,0	2 181,5	4 342,6
Banten	494,7	474,8	969,5
Bali	165,4	157,9	323,3
Nusa Tenggara Barat	315,8	361,7	677,5
Nusa Tenggara Timur	422,7	447,1	869,8
Kalimantan Barat	422,9	396,9	819,9
Kalimantan Tengah	215,6	197,1	412,8
Kalimantan Selatan	273,7	266,1	539,8
Kalimantan Timur	210,6	185,6	396,2
Sulawesi Utara	151,4	135,7	287,1
Sulawesi Tengah	251,4	234,0	485,4
Sulawesi Selatan	599,6	621,5	1 221,1
Sulawesi Tenggara	201,6	203,6	405,1
Gorontalo	90,9	92,3	183,1
Sulawesi Barat	120,9	120,5	241,4
Maluku	119,4	117,1	236,5
Maluku Utara	101,5	100,8	202,3
Papua Barat	75,5	68,1	143,6
Papua	279,2	284,3	563,5
Indonesia	14 685,4	14 397,7	29 083,1

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 3.1.3 Perkiraan Jumlah Pemuda Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (ribu), 2014

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan		
	Laki-laki (000)	Perempuan (000)	Laki-laki+Perempuan (000)
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	654,9	664,8	1 319,7
Sumatera Utara	1 727,1	1 699,0	3 426,1
Sumatera Barat	607,7	600,1	1 207,8
Riau	857,0	800,7	1 657,7
Jambi	440,9	416,7	857,7
Sumatera Selatan	1 073,2	1 015,6	2 088,8
Bengkulu	240,7	237,7	478,4
Lampung	992,2	955,5	1 947,7
Kep. Bangka Belitung	186,5	168,4	354,9
Kepulauan Riau	235,4	253,3	488,7
DKI Jakarta	1 413,3	1 447,5	2 860,8
Jawa Barat	5 859,9	5 705,5	11 565,5
Jawa Tengah	3 732,5	3 718,0	7 450,5
DI Yogyakarta	457,8	437,9	895,6
Jawa Timur	4 294,3	4 328,2	8 622,5
Banten	1 612,6	1 587,4	3 199,9
Bali	480,9	461,2	942,1
Nusa Tenggara Barat	567,9	638,5	1 206,4
Nusa Tenggara Timur	560,8	580,8	1 141,6
Kalimantan Barat	617,8	603,3	1 221,1
Kalimantan Tengah	331,9	309,4	641,3
Kalimantan Selatan	490,0	481,5	971,5
Kalimantan Timur	550,7	500,7	1 051,4
Sulawesi Utara	288,2	261,5	549,7
Sulawesi Tengah	349,9	329,9	679,9
Sulawesi Selatan	1 031,5	1 067,0	2 098,5
Sulawesi Tenggara	294,5	300,3	594,9
Gorontalo	140,3	142,0	282,3
Sulawesi Barat	156,5	157,3	313,7
Maluku	209,2	206,7	415,9
Maluku Utara	147,4	145,2	292,7
Papua Barat	113,1	100,9	214,0
Papua	406,6	388,8	795,5
Indonesia	31 123,2	30 711,5	61 834,7

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 3.2 Rasio Jenis Kelamin Pemuda Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014

Provinsi	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	99,0	98,3	98,7
Sumatera Utara	100,5	103,0	101,7
Sumatera Barat	100,6	101,8	101,2
Riau	110,1	104,9	107,5
Jambi	105,5	106,0	105,7
Sumatera Selatan	102,5	107,6	105,1
Bengkulu	97,4	103,3	100,3
Lampung	98,2	106,0	102,1
Kep. Bangka Belitung	108,9	112,6	110,7
Kepulauan Riau	90,5	107,9	99,2
DKI Jakarta	97,6		97,6
Jawa Barat	102,2	103,9	103,0
Jawa Tengah	99,6	101,2	100,4
DI Yogyakarta	106,9	98,7	102,8
Jawa Timur	99,4	99,1	99,2
Banten	100,5	104,2	102,3
Bali	104,0	104,8	104,4
Nusa Tenggara Barat	91,1	87,3	89,2
Nusa Tenggara Timur	103,3	94,5	98,9
Kalimantan Barat	94,4	106,5	100,5
Kalimantan Tengah	103,5	109,4	106,5
Kalimantan Selatan	100,4	102,9	101,6
Kalimantan Timur	107,9	113,5	110,7
Sulawesi Utara	108,8	111,6	110,2
Sulawesi Tengah	102,8	107,4	105,1
Sulawesi Selatan	96,9	96,5	96,7
Sulawesi Tenggara	96,1	99,0	97,6
Gorontalo	99,4	98,5	98,9
Sulawesi Barat	96,6	100,4	98,5
Maluku	100,0	102,0	101,0
Maluku Utara	103,3	100,7	102,0
Papua Barat	114,8	110,8	112,8
Papua	121,9	98,2	110,0
Indonesia	102,0	103,2	102,6

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 3.3.1 Persentase Pemuda Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2014

Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)			Perkotaan
	16-20	21-25	26-30	Jumlah
	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	32,35	36,31	31,34	100,00
Sumatera Utara	33,72	34,12	32,16	100,00
Sumatera Barat	33,78	32,47	33,74	100,00
Riau	32,80	33,24	33,96	100,00
Jambi	31,02	33,03	35,94	100,00
Sumatera Selatan	35,51	33,31	31,18	100,00
Bengkulu	34,31	34,11	31,58	100,00
Lampung	35,58	32,78	31,65	100,00
Kep. Bangka Belitung	29,98	33,34	36,68	100,00
Kepulauan Riau	23,33	32,07	44,60	100,00
DKI Jakarta	27,84	34,59	37,57	100,00
Jawa Barat	32,91	33,86	33,23	100,00
Jawa Tengah	34,15	32,67	33,18	100,00
DI Yogyakarta	35,38	37,60	27,02	100,00
Jawa Timur	31,16	34,34	34,50	100,00
Banten	30,81	34,83	34,35	100,00
Bali	30,99	33,34	35,67	100,00
Nusa Tenggara Barat	32,91	33,82	33,27	100,00
Nusa Tenggara Timur	37,19	32,49	30,32	100,00
Kalimantan Barat	33,68	31,13	35,19	100,00
Kalimantan Tengah	31,14	34,87	34,00	100,00
Kalimantan Selatan	32,62	34,53	32,86	100,00
Kalimantan Timur	31,03	32,29	36,68	100,00
Sulawesi Utara	35,07	36,56	28,37	100,00
Sulawesi Tengah	35,18	33,96	30,87	100,00
Sulawesi Selatan	34,39	34,72	30,90	100,00
Sulawesi Tenggara	36,66	34,22	29,12	100,00
Gorontalo	35,22	34,08	30,71	100,00
Sulawesi Barat	35,18	30,88	33,93	100,00
Maluku	34,95	35,42	29,63	100,00
Maluku Utara	32,38	36,12	31,49	100,00
Papua Barat	32,15	34,36	33,50	100,00
Papua	31,40	34,65	33,95	100,00
Indonesia	32,35	33,94	33,72	100,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 3.3.2 Persentase Pemuda Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2014

Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)			Perdesaan
	16-20	21-25	26-30	Jumlah
	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	33,13	32,42	34,45	100,00
Sumatera Utara	35,19	30,19	34,62	100,00
Sumatera Barat	33,63	31,53	34,85	100,00
Riau	29,96	31,58	38,46	100,00
Jambi	29,64	34,31	36,06	100,00
Sumatera Selatan	30,66	32,57	36,77	100,00
Bengkulu	31,16	32,66	36,18	100,00
Lampung	30,38	31,52	38,10	100,00
Kep. Bangka Belitung	30,98	33,04	35,99	100,00
Kepulauan Riau	34,05	23,69	42,27	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-
Jawa Barat	32,23	33,29	34,47	100,00
Jawa Tengah	31,35	33,13	35,52	100,00
DI Yogyakarta	32,37	27,56	40,07	100,00
Jawa Timur	32,65	31,81	35,54	100,00
Banten	34,48	31,79	33,73	100,00
Bali	31,22	35,26	33,51	100,00
Nusa Tenggara Barat	30,93	33,52	35,54	100,00
Nusa Tenggara Timur	34,56	29,34	36,10	100,00
Kalimantan Barat	30,15	32,39	37,45	100,00
Kalimantan Tengah	29,73	33,32	36,96	100,00
Kalimantan Selatan	30,27	32,74	36,99	100,00
Kalimantan Timur	30,03	33,62	36,35	100,00
Sulawesi Utara	33,23	32,35	34,42	100,00
Sulawesi Tengah	29,53	32,14	38,33	100,00
Sulawesi Selatan	33,98	31,97	34,05	100,00
Sulawesi Tenggara	32,20	31,65	36,15	100,00
Gorontalo	33,36	36,43	30,21	100,00
Sulawesi Barat	33,49	32,53	33,98	100,00
Maluku	34,25	29,74	36,02	100,00
Maluku Utara	31,84	30,46	37,70	100,00
Papua Barat	29,88	32,41	37,71	100,00
Papua	31,71	26,11	42,18	100,00
Indonesia	32,09	32,11	35,80	100,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 3.3.3 Persentase Pemuda Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2014

Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)			Jumlah
	16-20	21-25	26-30	
	(2)	(3)	(4)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	32,90	33,59	33,52	100,00
Sumatera Utara	34,42	32,25	33,33	100,00
Sumatera Barat	33,69	31,92	34,39	100,00
Riau	31,12	32,26	36,62	100,00
Jambi	30,05	33,93	36,02	100,00
Sumatera Selatan	32,51	32,85	34,64	100,00
Bengkulu	32,22	33,15	34,62	100,00
Lampung	31,78	31,86	36,36	100,00
Kep. Bangka Belitung	30,49	33,19	36,32	100,00
Kepulauan Riau	24,95	30,80	44,25	100,00
DKI Jakarta	27,84	34,59	37,57	100,00
Jawa Barat	32,70	33,68	33,61	100,00
Jawa Tengah	32,71	32,91	34,38	100,00
DI Yogyakarta	34,55	34,82	30,63	100,00
Jawa Timur	31,91	33,07	35,02	100,00
Banten	31,92	33,91	34,16	100,00
Bali	31,07	34,00	34,93	100,00
Nusa Tenggara Barat	31,80	33,65	34,55	100,00
Nusa Tenggara Timur	35,19	30,09	34,72	100,00
Kalimantan Barat	31,31	31,98	36,71	100,00
Kalimantan Tengah	30,23	33,87	35,90	100,00
Kalimantan Selatan	31,31	33,53	35,15	100,00
Kalimantan Timur	30,65	32,79	36,55	100,00
Sulawesi Utara	34,11	34,36	31,53	100,00
Sulawesi Tengah	31,14	32,66	36,20	100,00
Sulawesi Selatan	34,15	33,12	32,73	100,00
Sulawesi Tenggara	33,62	32,47	33,91	100,00
Gorontalo	34,01	35,60	30,39	100,00
Sulawesi Barat	33,88	32,15	33,97	100,00
Maluku	34,55	32,19	33,26	100,00
Maluku Utara	32,01	32,21	35,78	100,00
Papua Barat	30,63	33,05	36,32	100,00
Papua	31,62	28,60	39,78	100,00
Indonesia	32,23	33,08	34,69	100,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 3.4.1 Persentase Pemuda Menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2014

Provinsi	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Perkotaan
					Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	70,54	28,62	0,54	0,30	100,00
Sumatera Utara	68,60	30,08	1,16	0,16	100,00
Sumatera Barat	70,89	28,12	0,93	0,06	100,00
Riau	65,93	33,49	0,57	0,00	100,00
Jambi	60,05	38,93	0,67	0,35	100,00
Sumatera Selatan	65,14	33,87	0,84	0,15	100,00
Bengkulu	64,04	34,85	0,98	0,14	100,00
Lampung	63,81	35,14	0,87	0,18	100,00
Kep. Bangka Belitung	53,33	45,15	1,41	0,11	100,00
Kepulauan Riau	56,68	42,54	0,73	0,05	100,00
DKI Jakarta	65,00	33,82	0,92	0,26	100,00
Jawa Barat	57,71	40,51	1,61	0,17	100,00
Jawa Tengah	59,28	39,50	1,09	0,12	100,00
DI Yogyakarta	71,02	28,58	0,38	0,02	100,00
Jawa Timur	56,25	42,60	0,99	0,16	100,00
Banten	58,26	40,20	1,33	0,21	100,00
Bali	56,29	42,90	0,75	0,05	100,00
Nusa Tenggara Barat	56,60	40,85	2,45	0,10	100,00
Nusa Tenggara Timur	71,78	27,13	0,91	0,19	100,00
Kalimantan Barat	59,12	39,94	0,66	0,27	100,00
Kalimantan Tengah	51,96	46,51	1,52	0,02	100,00
Kalimantan Selatan	54,91	42,81	1,84	0,44	100,00
Kalimantan Timur	57,25	41,51	1,04	0,19	100,00
Sulawesi Utara	60,29	38,28	1,16	0,26	100,00
Sulawesi Tengah	63,73	34,36	1,66	0,24	100,00
Sulawesi Selatan	64,35	34,60	0,97	0,07	100,00
Sulawesi Tenggara	63,65	35,33	0,73	0,29	100,00
Gorontalo	61,28	36,78	1,82	0,12	100,00
Sulawesi Barat	64,68	33,36	1,96	0,00	100,00
Maluku	68,54	30,14	1,15	0,18	100,00
Maluku Utara	63,76	35,30	0,66	0,28	100,00
Papua Barat	63,50	35,54	0,79	0,17	100,00
Papua	64,56	34,00	1,15	0,29	100,00
Indonesia	60,48	38,17	1,18	0,17	100,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 3.4.2 Persentase Pemuda Menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2014

Provinsi	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Perdesaan
					Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	64,87	34,37	0,50	0,26	100,00
Sumatera Utara	56,91	42,02	0,78	0,29	100,00
Sumatera Barat	57,02	41,61	1,17	0,20	100,00
Riau	48,01	51,31	0,62	0,05	100,00
Jambi	46,39	51,67	1,71	0,24	100,00
Sumatera Selatan	46,12	52,73	1,02	0,13	100,00
Bengkulu	45,29	52,74	1,67	0,30	100,00
Lampung	46,58	52,53	0,81	0,08	100,00
Kep. Bangka Belitung	44,51	53,65	1,70	0,14	100,00
Kepulauan Riau	58,13	40,95	0,64	0,27	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	41,94	55,54	2,37	0,14	100,00
Jawa Tengah	44,36	54,67	0,88	0,08	100,00
DI Yogyakarta	47,80	51,70	0,30	0,19	100,00
Jawa Timur	42,69	55,61	1,46	0,25	100,00
Banten	46,39	51,73	1,73	0,14	100,00
Bali	48,20	50,52	1,04	0,24	100,00
Nusa Tenggara Barat	44,16	53,15	2,48	0,21	100,00
Nusa Tenggara Timur	54,73	44,01	1,02	0,24	100,00
Kalimantan Barat	45,54	53,05	1,24	0,17	100,00
Kalimantan Tengah	44,61	53,86	1,26	0,28	100,00
Kalimantan Selatan	43,27	54,60	1,88	0,25	100,00
Kalimantan Timur	50,23	48,57	1,07	0,13	100,00
Sulawesi Utara	48,55	49,91	1,26	0,28	100,00
Sulawesi Tengah	44,28	54,21	1,28	0,23	100,00
Sulawesi Selatan	50,75	46,98	1,98	0,29	100,00
Sulawesi Tenggara	45,92	52,37	1,35	0,35	100,00
Gorontalo	47,16	51,04	1,65	0,16	100,00
Sulawesi Barat	51,25	47,30	1,28	0,18	100,00
Maluku	53,85	44,71	1,08	0,35	100,00
Maluku Utara	46,91	51,26	1,55	0,28	100,00
Papua Barat	49,72	49,08	1,00	0,21	100,00
Papua	43,78	54,31	0,90	1,00	100,00
Indonesia	46,93	51,52	1,35	0,20	100,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 3.4.3 Persentase Pemuda Menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2014

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan				
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	66,58	32,64	0,51	0,27	100,00
Sumatera Utara	63,03	35,77	0,98	0,22	100,00
Sumatera Barat	62,81	35,98	1,07	0,14	100,00
Riau	55,36	44,01	0,60	0,03	100,00
Jambi	50,43	47,90	1,40	0,27	100,00
Sumatera Selatan	53,35	45,55	0,95	0,14	100,00
Bengkulu	51,62	46,70	1,43	0,25	100,00
Lampung	51,23	47,84	0,82	0,10	100,00
Kep. Bangka Belitung	48,82	49,50	1,56	0,13	100,00
Kepulauan Riau	56,90	42,30	0,72	0,08	100,00
DKI Jakarta	65,00	33,82	0,92	0,26	100,00
Jawa Barat	52,85	45,14	1,84	0,16	100,00
Jawa Tengah	51,64	47,28	0,98	0,10	100,00
DI Yogyakarta	64,60	34,98	0,36	0,07	100,00
Jawa Timur	49,42	49,15	1,22	0,21	100,00
Banten	54,67	43,69	1,45	0,19	100,00
Bali	53,52	45,52	0,85	0,12	100,00
Nusa Tenggara Barat	49,61	47,76	2,47	0,16	100,00
Nusa Tenggara Timur	58,79	39,99	0,99	0,23	100,00
Kalimantan Barat	50,00	48,74	1,05	0,21	100,00
Kalimantan Tengah	47,23	51,24	1,35	0,18	100,00
Kalimantan Selatan	48,44	49,36	1,86	0,33	100,00
Kalimantan Timur	54,61	44,17	1,05	0,17	100,00
Sulawesi Utara	54,16	44,36	1,21	0,27	100,00
Sulawesi Tengah	49,84	48,53	1,39	0,24	100,00
Sulawesi Selatan	56,43	41,80	1,56	0,20	100,00
Sulawesi Tenggara	51,58	46,94	1,15	0,33	100,00
Gorontalo	52,12	46,03	1,71	0,15	100,00
Sulawesi Barat	54,35	44,09	1,43	0,14	100,00
Maluku	60,19	38,42	1,11	0,28	100,00
Maluku Utara	52,11	46,33	1,27	0,28	100,00
Papua Barat	54,25	44,63	0,93	0,19	100,00
Papua	49,84	48,39	0,97	0,80	100,00
Indonesia	54,11	44,45	1,26	0,18	100,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 4.1.1 Persentase Pemuda Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur, dan Partisipasi Sekolah, 2014

				Perkotaan
Jenis Kelamin/ Kelompok Umur (Tahun)	Tidak Pernah Sekolah	Masih Sekolah*)	Tidak Sekolah Lagi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki:				
16-18	0,40	74,28	25,32	100,00
19-24	0,52	28,11	71,37	100,00
25-30	0,41	3,08	96,51	100,00
Pemuda	0,45	27,05	72,49	100,00
Perempuan:				
16-18	0,39	75,53	24,09	100,00
19-24	0,30	27,90	71,80	100,00
25-30	0,40	1,99	97,61	100,00
Pemuda	0,36	26,41	73,23	100,00
Laki-laki+Perempuan				
16-18	0,39	74,90	24,71	100,00
19-24	0,41	28,01	71,58	100,00
25-30	0,40	2,53	97,07	100,00
Pemuda	0,41	26,73	72,86	100,00

*) Termasuk pendidikan non formal (paket A setara SD/MI, paket B setara SMP/MTs dan paket C setara SM/SMK/MA)

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 4.1.2 Persentase Pemuda Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur, dan Partisipasi Sekolah, 2014

				Perdesaan
Jenis Kelamin/ Kelompok Umur (Tahun)	Tidak Pernah Sekolah	Masih Sekolah*)	Tidak Sekolah Lagi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki:				
16-18	1,15	65,40	33,45	100,00
19-24	1,47	16,62	81,90	100,00
25-30	1,70	1,31	96,98	100,00
Pemuda	1,50	20,45	78,04	100,00
Perempuan:				
16-18	1,17	65,46	33,37	100,00
19-24	1,68	16,14	82,18	100,00
25-30	2,77	1,25	95,98	100,00
Pemuda	2,06	19,35	78,60	100,00
Laki-laki+Perempuan				
16-18	1,16	65,43	33,41	100,00
19-24	1,58	16,38	82,04	100,00
25-30	2,24	1,28	96,48	100,00
Pemuda	1,78	19,91	78,32	100,00

*) Termasuk pendidikan non formal (paket A setara SD/MI, paket B setara SMP/MTs dan paket C setara SM/SMK/MA)

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 4.1.3 Persentase Pemuda Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur, dan Partisipasi Sekolah, 2014

Perkotaan+Perdesaan				
Jenis Kelamin/ Kelompok Umur (Tahun)	Tidak Pernah Sekolah	Masih Sekolah*)	Tidak Sekolah Lagi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki:				
16-18	0,77	69,91	29,33	100,00
19-24	0,95	22,98	76,07	100,00
25-30	1,04	2,22	96,74	100,00
Pemuda	0,95	23,94	75,11	100,00
Perempuan:				
16-18	0,76	70,73	28,51	100,00
19-24	0,92	22,66	76,42	100,00
25-30	1,55	1,63	96,82	100,00
Pemuda	1,16	23,10	75,75	100,00
Laki-laki+Perempuan				
16-18	0,77	70,31	28,93	100,00
19-24	0,93	22,82	76,24	100,00
25-30	1,30	1,92	96,78	100,00
Pemuda	1,05	23,52	75,43	100,00

*) Termasuk pendidikan non formal (paket A setara SD/MI, paket B setara SMP/MTs dan paket C setara SM/SMK/MA)

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 4.2.1 Persentase Pemuda Menurut Provinsi dan Partisipasi Sekolah, 2014

Provinsi	Perkotaan			
	Tidak Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	0,35	39,13	60,52	100,00
Sumatera Utara	0,34	28,71	70,95	100,00
Sumatera Barat	0,28	38,23	61,48	100,00
Riau	0,30	31,17	68,52	100,00
Jambi	0,72	28,35	70,92	100,00
Sumatera Selatan	0,55	30,43	69,02	100,00
Bengkulu	0,31	38,79	60,91	100,00
Lampung	0,73	30,49	68,78	100,00
Kep. Bangka Belitung	0,77	19,51	79,72	100,00
Kepulauan Riau	0,17	18,49	81,35	100,00
DKI Jakarta	0,33	21,00	78,67	100,00
Jawa Barat	0,39	22,60	77,01	100,00
Jawa Tengah	0,33	25,92	73,75	100,00
DI Yogyakarta	0,07	45,41	54,52	100,00
Jawa Timur	0,34	26,81	72,86	100,00
Banten	0,55	22,60	76,85	100,00
Bali	0,57	26,59	72,84	100,00
Nusa Tenggara Barat	0,57	31,18	68,25	100,00
Nusa Tenggara Timur	0,93	42,54	56,54	100,00
Kalimantan Barat	0,70	30,28	69,02	100,00
Kalimantan Tengah	0,50	28,00	71,50	100,00
Kalimantan Selatan	0,62	29,01	70,37	100,00
Kalimantan Timur	0,19	28,13	71,68	100,00
Sulawesi Utara	0,45	30,67	68,87	100,00
Sulawesi Tengah	0,17	38,22	61,61	100,00
Sulawesi Selatan	0,61	33,90	65,50	100,00
Sulawesi Tenggara	0,52	41,88	57,60	100,00
Gorontalo	0,74	35,54	63,72	100,00
Sulawesi Barat	1,20	33,92	64,87	100,00
Maluku	0,21	41,21	58,57	100,00
Maluku Utara	0,13	40,68	59,20	100,00
Papua Barat	0,40	31,36	68,24	100,00
Papua	1,24	31,61	67,15	100,00
Indonesia	0,41	26,73	72,86	100,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 4.2.2 Persentase Pemuda Menurut Provinsi dan Partisipasi Sekolah, 2014

Provinsi	Perdesaan			
	Tidak Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	0,74	27,32	71,94	100,00
Sumatera Utara	1,34	24,06	74,60	100,00
Sumatera Barat	0,97	26,20	72,83	100,00
Riau	1,02	19,29	79,69	100,00
Jambi	0,62	20,06	79,32	100,00
Sumatera Selatan	0,95	15,05	84,00	100,00
Bengkulu	0,69	22,19	77,11	100,00
Lampung	0,49	18,35	81,16	100,00
Kep. Bangka Belitung	1,32	15,51	83,17	100,00
Kepulauan Riau	3,09	21,91	75,00	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-
Jawa Barat	0,73	17,33	81,94	100,00
Jawa Tengah	0,52	19,10	80,38	100,00
DI Yogyakarta	0,22	30,07	69,71	100,00
Jawa Timur	1,41	18,93	79,66	100,00
Banten	0,53	19,36	80,11	100,00
Bali	1,94	21,66	76,41	100,00
Nusa Tenggara Barat	1,72	22,33	75,95	100,00
Nusa Tenggara Timur	2,98	23,28	73,74	100,00
Kalimantan Barat	1,85	17,70	80,44	100,00
Kalimantan Tengah	0,86	15,86	83,28	100,00
Kalimantan Selatan	1,06	15,40	83,54	100,00
Kalimantan Timur	0,99	22,53	76,49	100,00
Sulawesi Utara	0,74	19,71	79,55	100,00
Sulawesi Tengah	1,73	18,85	79,42	100,00
Sulawesi Selatan	2,08	23,38	74,54	100,00
Sulawesi Tenggara	1,53	21,10	77,38	100,00
Gorontalo	2,04	23,55	74,40	100,00
Sulawesi Barat	2,65	20,59	76,76	100,00
Maluku	2,32	25,54	72,14	100,00
Maluku Utara	0,86	21,49	77,65	100,00
Papua Barat	2,99	25,52	71,49	100,00
Papua	34,22	15,81	49,97	100,00
Indonesia	1,78	19,91	78,32	100,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 4.2.3 Persentase Pemuda Menurut Provinsi dan Partisipasi Sekolah, 2014

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan			
	Tidak Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	0,62	30,87	68,51	100,00
Sumatera Utara	0,81	26,50	72,69	100,00
Sumatera Barat	0,68	31,22	68,09	100,00
Riau	0,72	24,16	75,12	100,00
Jambi	0,65	22,51	76,84	100,00
Sumatera Selatan	0,80	20,90	78,30	100,00
Bengkulu	0,56	27,80	71,64	100,00
Lampung	0,55	21,63	77,82	100,00
Kep. Bangka Belitung	1,05	17,46	81,48	100,00
Kepulauan Riau	0,61	19,00	80,39	100,00
DKI Jakarta	0,33	21,00	78,67	100,00
Jawa Barat	0,49	20,97	78,53	100,00
Jawa Tengah	0,43	22,43	77,15	100,00
DI Yogyakarta	0,11	41,17	58,72	100,00
Jawa Timur	0,88	22,84	76,28	100,00
Banten	0,54	21,62	77,84	100,00
Bali	1,04	24,90	74,07	100,00
Nusa Tenggara Barat	1,22	26,21	72,58	100,00
Nusa Tenggara Timur	2,49	27,86	69,64	100,00
Kalimantan Barat	1,47	21,83	76,69	100,00
Kalimantan Tengah	0,73	20,19	79,08	100,00
Kalimantan Selatan	0,87	21,45	77,69	100,00
Kalimantan Timur	0,49	26,02	73,49	100,00
Sulawesi Utara	0,61	24,95	74,45	100,00
Sulawesi Tengah	1,28	24,39	74,32	100,00
Sulawesi Selatan	1,47	27,77	70,76	100,00
Sulawesi Tenggara	1,21	27,73	71,07	100,00
Gorontalo	1,59	27,77	70,65	100,00
Sulawesi Barat	2,32	23,66	74,02	100,00
Maluku	1,41	32,30	66,29	100,00
Maluku Utara	0,64	27,41	71,95	100,00
Papua Barat	2,14	27,44	70,42	100,00
Papua	24,61	20,41	54,98	100,00
Indonesia	1,05	23,52	75,43	100,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 4.3.1 Persentase Pemuda Masih Bersekolah Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2014

Provinsi	Jenjang Pendidikan				Perkotaan
	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SM/ Sederajat	PT	Total
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	0,00	2,45	36,88	60,67	100,00
Sumatera Utara	0,00	2,76	50,37	46,87	100,00
Sumatera Barat	0,21	4,77	44,92	50,11	100,00
Riau	0,25	3,72	44,42	51,61	100,00
Jambi	0,00	2,81	49,36	47,83	100,00
Sumatera Selatan	0,00	3,39	53,68	42,93	100,00
Bengkulu	0,00	4,13	42,94	52,92	100,00
Lampung	0,00	2,64	49,33	48,04	100,00
Kep. Bangka Belitung	0,00	4,10	67,22	28,68	100,00
Kepulauan Riau	0,04	3,98	55,19	40,79	100,00
DKI Jakarta	0,00	3,43	47,30	49,27	100,00
Jawa Barat	0,00	3,73	54,84	41,43	100,00
Jawa Tengah	0,04	4,32	55,51	40,13	100,00
DI Yogyakarta	0,11	2,23	29,57	68,10	100,00
Jawa Timur	0,06	3,94	51,57	44,42	100,00
Banten	0,06	3,35	54,18	42,40	100,00
Bali	0,00	2,00	48,73	49,27	100,00
Nusa Tenggara Barat	0,00	4,90	47,47	47,63	100,00
Nusa Tenggara Timur	0,00	4,93	43,98	51,09	100,00
Kalimantan Barat	0,00	5,45	48,46	46,08	100,00
Kalimantan Tengah	0,00	2,83	43,08	54,09	100,00
Kalimantan Selatan	0,23	3,34	47,83	48,61	100,00
Kalimantan Timur	0,00	3,68	51,00	45,31	100,00
Sulawesi Utara	0,00	1,68	41,78	56,54	100,00
Sulawesi Tengah	0,00	1,11	39,27	59,62	100,00
Sulawesi Selatan	0,00	2,96	43,29	53,75	100,00
Sulawesi Tenggara	0,11	1,77	35,07	63,05	100,00
Gorontalo	0,00	2,61	36,10	61,29	100,00
Sulawesi Barat	0,00	2,61	53,98	43,41	100,00
Maluku	0,00	1,08	35,06	63,86	100,00
Maluku Utara	0,00	1,85	37,30	60,85	100,00
Papua Barat	0,00	3,75	47,16	49,10	100,00
Papua	0,13	5,61	42,62	51,64	100,00
Indonesia	0,04	3,55	49,80	46,62	100,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 4.3.2 Persentase Pemuda Masih Bersekolah Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2014

Provinsi	Jenjang Pendidikan				Perdesaan
	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SM/ Sederajat	PT	Total
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	0,00	5,96	56,34	37,70	100,00
Sumatera Utara	0,03	7,97	66,91	25,09	100,00
Sumatera Barat	0,13	11,63	58,72	29,52	100,00
Riau	0,00	10,97	66,16	22,87	100,00
Jambi	0,07	7,09	56,07	36,76	100,00
Sumatera Selatan	0,00	7,95	71,53	20,52	100,00
Bengkulu	0,00	10,05	61,06	28,89	100,00
Lampung	0,00	8,30	63,84	27,86	100,00
Kep. Bangka Belitung	0,00	9,23	69,15	21,62	100,00
Kepulauan Riau	1,41	8,43	67,23	22,92	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	0,00	8,38	60,67	30,95	100,00
Jawa Tengah	0,09	7,54	61,94	30,42	100,00
DI Yogyakarta	0,00	5,29	64,58	30,12	100,00
Jawa Timur	0,00	8,09	61,98	29,93	100,00
Banten	0,00	7,65	62,34	30,01	100,00
Bali	0,21	5,34	67,98	26,47	100,00
Nusa Tenggara Barat	0,07	7,57	58,81	33,54	100,00
Nusa Tenggara Timur	0,41	22,37	55,63	21,59	100,00
Kalimantan Barat	0,11	15,36	55,05	29,48	100,00
Kalimantan Tengah	0,00	11,92	53,39	34,69	100,00
Kalimantan Selatan	0,00	11,34	65,63	23,03	100,00
Kalimantan Timur	0,00	9,54	56,28	34,17	100,00
Sulawesi Utara	0,00	4,17	73,14	22,69	100,00
Sulawesi Tengah	0,21	6,57	60,78	32,44	100,00
Sulawesi Selatan	0,10	5,37	58,69	35,85	100,00
Sulawesi Tenggara	0,00	7,03	65,47	27,50	100,00
Gorontalo	0,00	7,84	55,86	36,30	100,00
Sulawesi Barat	0,45	7,49	58,68	33,38	100,00
Maluku	0,10	8,35	59,23	32,32	100,00
Maluku Utara	0,00	7,21	63,58	29,21	100,00
Papua Barat	1,50	9,57	48,42	40,51	100,00
Papua	0,08	21,13	59,54	19,26	100,00
Indonesia	0,07	8,86	61,55	29,53	100,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 4.3.3 Persentase Pemuda Masih Bersekolah Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2014

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan				Total
	Jenjang Pendidikan				
	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SM/ Sederajat	PT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	0,00	4,62	48,92	46,46	100,00
Sumatera Utara	0,02	5,01	57,52	37,45	100,00
Sumatera Barat	0,17	8,12	51,66	40,05	100,00
Riau	0,13	7,14	54,66	38,07	100,00
Jambi	0,05	5,50	53,57	40,88	100,00
Sumatera Selatan	0,00	5,43	61,64	32,94	100,00
Bengkulu	0,00	7,26	52,52	40,22	100,00
Lampung	0,00	6,14	58,32	35,53	100,00
Kep. Bangka Belitung	0,00	6,43	68,10	25,47	100,00
Kepulauan Riau	0,28	4,76	57,29	37,68	100,00
DKI Jakarta	0,00	3,43	47,30	49,27	100,00
Jawa Barat	0,00	4,91	56,33	38,76	100,00
Jawa Tengah	0,06	5,73	58,32	35,89	100,00
DI Yogyakarta	0,09	2,85	36,64	60,42	100,00
Jawa Timur	0,04	5,67	55,91	38,38	100,00
Banten	0,05	4,52	56,40	39,04	100,00
Bali	0,06	3,00	54,48	42,46	100,00
Nusa Tenggara Barat	0,03	6,18	52,90	40,89	100,00
Nusa Tenggara Timur	0,26	16,03	51,39	32,31	100,00
Kalimantan Barat	0,06	10,85	52,05	37,04	100,00
Kalimantan Tengah	0,00	7,43	48,29	44,28	100,00
Kalimantan Selatan	0,14	6,53	54,93	38,40	100,00
Kalimantan Timur	0,00	5,60	52,72	41,68	100,00
Sulawesi Utara	0,00	2,71	54,72	42,57	100,00
Sulawesi Tengah	0,12	4,12	51,13	44,62	100,00
Sulawesi Selatan	0,05	4,14	50,83	44,98	100,00
Sulawesi Tenggara	0,05	4,49	50,82	44,63	100,00
Gorontalo	0,00	5,49	46,98	47,54	100,00
Sulawesi Barat	0,30	5,88	57,13	36,69	100,00
Maluku	0,05	4,35	45,93	49,67	100,00
Maluku Utara	0,00	4,76	51,54	43,70	100,00
Papua Barat	0,94	7,38	47,95	43,73	100,00
Papua	0,10	14,12	51,90	33,88	100,00
Indonesia	0,05	5,66	54,47	39,81	100,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 4.4 Persentase Pemuda yang Buta Huruf Menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Perkotaan (K)			Perdesaan (D)			K+D		
	Laki-laki	Perempuan	L+P	Laki-laki	Perempuan	L+P	Laki-laki	Perempuan	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	0,00	0,00	0,00	0,08	0,30	0,19	0,06	0,21	0,14
Sumatera Utara	0,02	0,04	0,03	0,58	1,10	0,84	0,29	0,54	0,41
Sumatera Barat	0,11	0,00	0,05	0,22	0,41	0,31	0,17	0,24	0,21
Riau	0,00	0,11	0,05	0,21	0,32	0,26	0,12	0,24	0,18
Jambi	0,45	0,22	0,34	0,14	0,43	0,28	0,23	0,37	0,30
Sumatera Selatan	0,00	0,17	0,08	0,51	0,49	0,50	0,32	0,37	0,34
Bengkulu	0,13	0,06	0,10	0,34	0,42	0,38	0,27	0,29	0,28
Lampung	0,00	0,09	0,04	0,45	0,13	0,30	0,34	0,12	0,23
Kep. Bangka Belitung	0,35	0,00	0,18	0,61	0,98	0,78	0,48	0,50	0,49
Kepulauan Riau	0,00	0,10	0,05	0,84	1,13	0,98	0,14	0,24	0,19
DKI Jakarta	0,00	0,03	0,01	-	-	-	0,00	0,03	0,01
Jawa Barat	0,05	0,13	0,09	0,03	0,21	0,12	0,04	0,16	0,10
Jawa Tengah	0,10	0,12	0,11	0,20	0,20	0,20	0,15	0,16	0,16
DI Yogyakarta	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,12	0,06	0,00	0,03
Jawa Timur	0,07	0,10	0,08	0,68	0,86	0,77	0,38	0,48	0,43
Banten	0,02	0,21	0,11	0,26	0,37	0,31	0,09	0,26	0,17
Bali	0,00	0,15	0,07	0,65	1,07	0,86	0,23	0,46	0,34
Nusa Tenggara Barat	0,00	0,40	0,21	0,51	2,71	1,68	0,28	1,71	1,04
Nusa Tenggara Timur	0,18	0,05	0,12	3,78	2,89	3,32	2,89	2,23	2,56
Kalimantan Barat	0,39	0,37	0,38	0,61	1,72	1,15	0,54	1,26	0,90
Kalimantan Tengah	0,19	0,05	0,12	0,23	0,35	0,29	0,22	0,24	0,23
Kalimantan Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,17	0,00	0,20	0,10
Kalimantan Timur	0,00	0,13	0,06	0,12	0,12	0,12	0,04	0,12	0,08
Sulawesi Utara	0,04	0,00	0,02	0,22	0,16	0,19	0,14	0,09	0,11
Sulawesi Tengah	0,00	0,00	0,00	1,56	1,27	1,42	1,12	0,90	1,02
Sulawesi Selatan	0,48	0,45	0,47	2,25	1,49	1,86	1,51	1,05	1,28
Sulawesi Tenggara	0,27	0,21	0,24	1,54	1,19	1,37	1,14	0,88	1,01
Gorontalo	0,23	0,00	0,11	1,35	0,85	1,10	0,95	0,55	0,75
Sulawesi Barat	0,30	0,62	0,46	2,29	3,32	2,80	1,83	2,69	2,26
Maluku	0,07	0,05	0,06	0,92	1,70	1,30	0,55	0,98	0,77
Maluku Utara	0,00	0,00	0,00	0,71	0,53	0,62	0,49	0,37	0,43
Papua Barat	0,00	0,00	0,00	1,20	3,48	2,29	0,80	2,35	1,53
Papua	0,50	0,68	0,58	22,00	39,69	30,92	15,26	29,20	22,08
Indonesia	0,07	0,13	0,10	1,00	1,52	1,26	0,51	0,78	0,64

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 4.5.1 Persentase Pemuda Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2014

Provinsi	Perkotaan					Jumlah
	Tidak Pernah Sekolah	Tidak Tamat SD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SM/ Sederajat ke Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	0,35	0,91	5,94	24,32	68,48	100,00
Sumatera Utara	0,34	1,63	8,18	29,29	60,57	100,00
Sumatera Barat	0,28	3,33	8,47	27,56	60,35	100,00
Riau	0,30	1,96	10,35	26,15	61,23	100,00
Jambi	0,72	2,37	10,13	27,05	59,73	100,00
Sumatera Selatan	0,55	3,54	9,75	26,42	59,75	100,00
Bengkulu	0,31	1,28	8,49	27,19	62,74	100,00
Lampung	0,73	3,16	10,24	30,88	55,00	100,00
Kep. Bangka Belitung	0,77	6,79	12,82	26,61	53,01	100,00
Kepulauan Riau	0,17	2,58	8,18	22,25	66,82	100,00
DKI Jakarta	0,33	1,77	8,46	25,59	63,86	100,00
Jawa Barat	0,39	2,90	15,79	32,85	48,06	100,00
Jawa Tengah	0,33	2,43	13,35	35,20	48,69	100,00
DI Yogyakarta	0,07	0,79	3,44	22,36	73,34	100,00
Jawa Timur	0,34	2,31	11,43	30,44	55,48	100,00
Banten	0,55	3,28	12,30	30,88	52,99	100,00
Bali	0,57	1,41	8,56	26,32	63,14	100,00
Nusa Tenggara Barat	0,57	4,89	16,31	28,05	50,18	100,00
Nusa Tenggara Timur	0,93	3,48	10,48	25,70	59,41	100,00
Kalimantan Barat	0,70	5,79	12,89	25,64	54,98	100,00
Kalimantan Tengah	0,50	3,97	13,80	25,61	56,12	100,00
Kalimantan Selatan	0,62	5,13	14,51	28,82	50,92	100,00
Kalimantan Timur	0,19	2,06	8,78	27,52	61,45	100,00
Sulawesi Utara	0,45	5,83	7,39	24,13	62,20	100,00
Sulawesi Tengah	0,17	2,66	9,32	24,02	63,83	100,00
Sulawesi Selatan	0,61	4,39	12,54	26,13	56,33	100,00
Sulawesi Tenggara	0,52	2,54	6,23	25,18	65,53	100,00
Gorontalo	0,74	7,17	12,87	23,02	56,20	100,00
Sulawesi Barat	1,20	7,50	12,54	30,17	48,58	100,00
Maluku	0,21	1,20	3,83	20,65	74,11	100,00
Maluku Utara	0,13	2,69	7,09	23,33	66,76	100,00
Papua Barat	0,40	2,20	8,29	26,51	62,60	100,00
Papua	1,24	1,93	8,21	25,26	63,36	100,00
Indonesia	0,41	2,70	11,84	29,77	55,28	100,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 4.5.2 Persentase Pemuda Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2014

Provinsi	Perdesaan					Jumlah
	Tidak Pernah Sekolah	Tidak Tamat SD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SM/ Sederajat ke Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	0,74	2,98	15,70	33,40	47,19	100,00
Sumatera Utara	1,34	5,07	17,55	35,96	40,08	100,00
Sumatera Barat	0,97	10,56	20,24	33,17	35,05	100,00
Riau	1,02	6,39	23,34	32,97	36,28	100,00
Jambi	0,62	6,33	26,15	33,02	33,88	100,00
Sumatera Selatan	0,95	9,31	26,90	32,28	30,57	100,00
Bengkulu	0,69	7,39	22,36	35,57	33,98	100,00
Lampung	0,49	4,42	23,77	41,40	29,91	100,00
Kep. Bangka Belitung	1,32	16,46	33,47	25,52	23,23	100,00
Kepulauan Riau	3,09	12,78	24,35	24,50	35,30	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	0,73	6,06	35,47	36,09	21,66	100,00
Jawa Tengah	0,52	2,81	25,96	41,20	29,51	100,00
DI Yogyakarta	0,22	1,94	9,91	42,89	45,04	100,00
Jawa Timur	1,41	5,31	24,41	37,63	31,24	100,00
Banten	0,53	9,32	34,71	34,15	21,28	100,00
Bali	1,94	4,57	19,35	34,26	39,89	100,00
Nusa Tenggara Barat	1,72	7,93	20,11	32,88	37,35	100,00
Nusa Tenggara Timur	2,98	14,43	33,24	24,70	24,64	100,00
Kalimantan Barat	1,85	14,11	31,91	28,38	23,75	100,00
Kalimantan Tengah	0,86	10,10	33,39	28,04	27,61	100,00
Kalimantan Selatan	1,06	10,62	31,96	31,38	24,97	100,00
Kalimantan Timur	0,99	6,67	24,93	27,57	39,85	100,00
Sulawesi Utara	0,74	8,67	17,46	33,02	40,11	100,00
Sulawesi Tengah	1,73	8,40	27,61	30,00	32,26	100,00
Sulawesi Selatan	2,08	9,67	26,09	28,80	33,35	100,00
Sulawesi Tenggara	1,53	8,20	21,80	30,90	37,58	100,00
Gorontalo	2,04	22,74	22,28	23,82	29,11	100,00
Sulawesi Barat	2,65	14,39	27,46	24,85	30,64	100,00
Maluku	2,32	6,35	19,60	28,27	43,47	100,00
Maluku Utara	0,86	9,24	22,40	26,53	40,97	100,00
Papua Barat	2,99	10,68	17,38	26,09	42,87	100,00
Papua	34,22	8,28	21,14	19,03	17,32	100,00
Indonesia	1,78	6,89	26,02	34,48	30,83	100,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 4.5.3 Persentase Pemuda Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2014

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan					Jumlah
	Tidak Pernah Sekolah	Tidak Tamat SD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SM/ Sederajat ke Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	0,62	2,36	12,77	30,67	53,59	100,00
Sumatera Utara	0,81	3,26	12,64	32,46	50,81	100,00
Sumatera Barat	0,68	7,54	15,33	30,83	45,62	100,00
Riau	0,72	4,58	18,02	30,17	46,51	100,00
Jambi	0,65	5,16	21,41	31,25	41,52	100,00
Sumatera Selatan	0,80	7,11	20,37	30,05	41,67	100,00
Bengkulu	0,56	5,33	17,68	32,74	43,69	100,00
Lampung	0,55	4,08	20,12	38,56	36,68	100,00
Kep. Bangka Belitung	1,05	11,73	23,38	26,06	37,78	100,00
Kepulauan Riau	0,61	4,12	10,63	22,59	62,05	100,00
DKI Jakarta	0,33	1,77	8,46	25,59	63,86	100,00
Jawa Barat	0,49	3,88	21,86	33,85	39,92	100,00
Jawa Tengah	0,43	2,62	19,82	38,28	38,86	100,00
DI Yogyakarta	0,11	1,11	5,23	28,04	65,51	100,00
Jawa Timur	0,88	3,82	17,97	34,07	43,27	100,00
Banten	0,54	5,11	19,09	31,87	43,38	100,00
Bali	1,04	2,49	12,26	29,04	55,16	100,00
Nusa Tenggara Barat	1,22	6,60	18,45	30,76	42,98	100,00
Nusa Tenggara Timur	2,49	11,83	27,82	24,94	32,92	100,00
Kalimantan Barat	1,47	11,38	25,66	27,48	34,01	100,00
Kalimantan Tengah	0,73	7,91	26,41	27,18	37,77	100,00
Kalimantan Selatan	0,87	8,18	24,21	30,24	36,50	100,00
Kalimantan Timur	0,49	3,80	14,87	27,53	53,31	100,00
Sulawesi Utara	0,61	7,31	12,65	28,77	50,66	100,00
Sulawesi Tengah	1,28	6,76	22,38	28,29	41,29	100,00
Sulawesi Selatan	1,47	7,46	20,43	27,69	42,96	100,00
Sulawesi Tenggara	1,21	6,39	16,83	29,07	46,49	100,00
Gorontalo	1,59	17,27	18,97	23,54	38,63	100,00
Sulawesi Barat	2,32	12,80	24,02	26,08	34,78	100,00
Maluku	1,41	4,13	12,80	24,98	56,68	100,00
Maluku Utara	0,64	7,22	17,67	25,54	48,93	100,00
Papua Barat	2,14	7,89	14,39	26,23	49,36	100,00
Papua	24,61	6,43	17,37	20,85	30,74	100,00
Indonesia	1,05	4,67	18,51	31,99	43,78	100,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 4.6.1 Persentase Pemuda Usia Sekolah (16-24 Tahun) Menurut Provinsi dan Alasan Tidak/Belum Pernah Bersekolah atau Tidak Bersekolah Lagi, 2014

Provinsi	Tidak Ada Biaya	Bekerja/ Mencari nafkah	Menikah/ Mengurus RT	Lainnya*)	Perkotaan
					Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	31,58	24,73	8,23	35,46	100,00
Sumatera Utara	31,25	26,91	7,65	34,18	100,00
Sumatera Barat	29,87	22,34	8,85	38,94	100,00
Riau	40,10	23,47	6,10	30,33	100,00
Jambi	26,75	34,75	10,31	28,20	100,00
Sumatera Selatan	25,54	28,28	12,14	34,03	100,00
Bengkulu	24,91	31,07	13,27	30,76	100,00
Lampung	37,58	23,67	11,20	27,55	100,00
Kep. Bangka Belitung	23,70	28,10	11,56	36,64	100,00
Kepulauan Riau	10,26	56,47	12,18	21,10	100,00
DKI Jakarta	27,55	43,59	10,52	18,34	100,00
Jawa Barat	37,73	28,12	11,49	22,67	100,00
Jawa Tengah	38,88	28,62	10,32	22,18	100,00
DI Yogyakarta	24,99	38,87	11,84	24,29	100,00
Jawa Timur	27,70	32,57	14,14	25,59	100,00
Banten	35,87	34,86	9,90	19,36	100,00
Bali	28,86	40,89	13,19	17,06	100,00
Nusa Tenggara Barat	45,15	15,21	14,83	24,81	100,00
Nusa Tenggara Timur	29,04	23,28	8,50	39,18	100,00
Kalimantan Barat	26,97	26,77	10,62	35,64	100,00
Kalimantan Tengah	25,66	28,57	20,70	25,06	100,00
Kalimantan Selatan	25,99	30,13	13,96	29,92	100,00
Kalimantan Timur	18,37	35,16	16,67	29,80	100,00
Sulawesi Utara	16,05	27,43	15,22	41,31	100,00
Sulawesi Tengah	24,72	36,37	11,01	27,91	100,00
Sulawesi Selatan	28,00	29,13	11,45	31,42	100,00
Sulawesi Tenggara	24,95	23,80	19,44	31,81	100,00
Gorontalo	22,58	23,13	12,83	41,46	100,00
Sulawesi Barat	36,74	20,74	14,14	28,38	100,00
Maluku	22,06	19,46	9,74	48,74	100,00
Maluku Utara	28,79	22,72	14,41	34,09	100,00
Papua Barat	24,32	26,13	13,06	36,50	100,00
Papua	13,65	26,82	12,95	46,58	100,00
Indonesia	32,49	30,99	11,45	25,06	100,00

*) Termasuk malu karena ekonomi, sekolah jauh, cacat, menunggu pengumuman, tidak diterima, dan lainnya.

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 4.6.2 Persentase Pemuda Usia Sekolah (16-24 Tahun) Menurut Provinsi dan Alasan Tidak/Belum Pernah Bersekolah atau Tidak Bersekolah Lagi, 2014

Provinsi	Tidak Ada Biaya	Bekerja/ Mencari nafkah	Menikah/ Mengurus RT	Lainnya*)	Perdesaan
					Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	46,70	14,14	14,04	25,12	100,00
Sumatera Utara	38,84	16,80	11,56	32,80	100,00
Sumatera Barat	37,88	14,84	11,62	35,67	100,00
Riau	45,55	14,61	13,43	26,40	100,00
Jambi	40,37	12,72	19,43	27,48	100,00
Sumatera Selatan	35,45	18,92	17,20	28,42	100,00
Bengkulu	36,95	10,63	18,50	33,92	100,00
Lampung	49,62	12,15	13,48	24,74	100,00
Kep. Bangka Belitung	25,68	21,14	12,63	40,55	100,00
Kepulauan Riau	24,81	44,20	7,03	23,96	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	47,25	13,29	18,19	21,27	100,00
Jawa Tengah	44,85	16,69	16,20	22,25	100,00
DI Yogyakarta	43,78	18,09	19,03	19,10	100,00
Jawa Timur	33,67	19,28	22,26	24,79	100,00
Banten	54,59	11,21	16,10	18,11	100,00
Bali	43,47	20,21	15,92	20,40	100,00
Nusa Tenggara Barat	51,74	10,84	17,40	20,02	100,00
Nusa Tenggara Timur	36,37	11,78	11,69	40,17	100,00
Kalimantan Barat	29,94	21,84	17,63	30,59	100,00
Kalimantan Tengah	31,85	26,40	17,49	24,26	100,00
Kalimantan Selatan	30,03	22,24	16,57	31,15	100,00
Kalimantan Timur	25,80	26,60	20,64	26,96	100,00
Sulawesi Utara	24,13	17,06	21,69	37,11	100,00
Sulawesi Tengah	36,19	16,48	18,93	28,40	100,00
Sulawesi Selatan	32,33	18,47	15,10	34,10	100,00
Sulawesi Tenggara	32,43	15,69	23,51	28,37	100,00
Gorontalo	23,42	15,14	18,08	43,36	100,00
Sulawesi Barat	41,66	12,91	15,06	30,37	100,00
Maluku	24,37	11,36	15,45	48,82	100,00
Maluku Utara	24,15	15,06	20,41	40,38	100,00
Papua Barat	16,66	19,41	23,26	40,66	100,00
Papua	20,60	20,25	14,42	44,73	100,00
Indonesia	39,57	16,45	17,08	26,90	100,00

*) Termasuk malu karena ekonomi, sekolah jauh, cacat, menunggu pengumuman, tidak diterima, dan lainnya.

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 4.6.3 Persentase Pemuda Usia Sekolah (16-24 Tahun) Menurut Provinsi dan Alasan Tidak/Belum Pernah Bersekolah atau Tidak Bersekolah Lagi, 2014

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan				Jumlah
	Tidak Ada Biaya	Bekerja/ Mencari nafkah	Menikah/ Mengurus RT	Lainnya*)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	43,02	16,72	12,63	27,64	100,00
Sumatera Utara	34,96	21,98	9,56	33,51	100,00
Sumatera Barat	35,15	17,39	10,67	36,78	100,00
Riau	43,53	17,91	10,71	27,86	100,00
Jambi	36,75	18,56	17,01	27,67	100,00
Sumatera Selatan	32,14	22,05	15,51	30,30	100,00
Bengkulu	33,77	16,02	17,12	33,08	100,00
Lampung	46,70	14,95	12,93	25,42	100,00
Kep. Bangka Belitung	24,77	24,32	12,14	38,77	100,00
Kepulauan Riau	12,49	54,59	11,39	21,54	100,00
DKI Jakarta	27,55	43,59	10,52	18,34	100,00
Jawa Barat	40,79	23,35	13,64	22,22	100,00
Jawa Tengah	42,07	22,24	13,46	22,22	100,00
DI Yogyakarta	31,12	32,09	14,19	22,60	100,00
Jawa Timur	30,96	25,32	18,57	25,15	100,00
Banten	41,99	27,14	11,93	18,95	100,00
Bali	34,30	33,19	14,21	18,30	100,00
Nusa Tenggara Barat	49,16	12,55	16,40	21,89	100,00
Nusa Tenggara Timur	35,08	13,79	11,13	39,99	100,00
Kalimantan Barat	29,13	23,19	15,71	31,97	100,00
Kalimantan Tengah	29,93	27,07	18,49	24,51	100,00
Kalimantan Selatan	28,47	25,30	15,56	30,67	100,00
Kalimantan Timur	21,48	31,58	18,33	28,61	100,00
Sulawesi Utara	20,45	21,79	18,74	39,02	100,00
Sulawesi Tengah	33,53	21,08	17,10	28,28	100,00
Sulawesi Selatan	30,74	22,40	13,75	33,11	100,00
Sulawesi Tenggara	30,68	17,59	22,56	29,17	100,00
Gorontalo	23,18	17,46	16,55	42,81	100,00
Sulawesi Barat	40,82	14,25	14,90	30,03	100,00
Maluku	23,50	14,38	13,32	48,79	100,00
Maluku Utara	25,23	16,84	19,01	38,92	100,00
Papua Barat	19,16	21,61	19,93	39,30	100,00
Papua	18,88	21,88	14,05	45,19	100,00
Indonesia	36,01	23,77	14,25	25,97	100,00

**) Termasuk malu karena ekonomi, sekolah jauh, cacat, menunggu pengumuman, tidak diterima, dan lainnya.*

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 4.7 Proporsi Pemuda Masih Bersekolah yang Mengakses Internet selama 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Perkotaan (K)			Perdesaan (D)			K+D		
	Laki-laki	Perempuan	L+P	Laki-laki	Perempuan	L+P	Laki-laki	Perempuan	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	46,54	44,45	45,49	18,02	16,22	17,11	26,62	24,69	25,65
Sumatera Utara	42,72	41,48	42,10	19,91	17,95	18,94	31,79	30,35	31,07
Sumatera Barat	56,93	61,30	59,11	21,12	24,93	23,01	36,02	40,17	38,08
Riau	58,82	54,98	56,99	23,54	19,86	21,74	38,19	34,04	36,19
Jambi	54,94	56,80	55,85	22,76	19,35	21,10	32,25	30,44	31,37
Sumatera Selatan	48,63	49,51	49,06	17,57	14,49	16,09	29,21	28,02	28,63
Bengkulu	55,68	55,36	55,52	17,58	19,73	18,64	30,20	32,00	31,10
Lampung	35,59	36,07	35,83	16,28	15,97	16,13	21,34	21,55	21,44
Kep. Bangka Belitung	42,07	41,08	41,60	19,19	16,88	18,10	30,28	28,81	29,58
Kepulauan Riau	56,53	51,66	53,97	32,23	24,21	28,37	52,57	47,81	50,10
DKI Jakarta	65,24	57,89	61,52	-	-	-	65,24	57,89	61,52
Jawa Barat	47,00	41,62	44,34	23,36	17,65	20,56	39,67	34,27	37,00
Jawa Tengah	46,71	42,98	44,84	29,85	23,56	26,72	38,03	33,06	35,55
DI Yogyakarta	74,69	70,72	72,77	43,50	37,70	40,58	66,30	61,31	63,86
Jawa Timur	49,54	43,60	46,56	27,61	20,68	24,13	38,50	32,05	35,27
Banten	49,24	41,81	45,54	14,32	12,90	13,62	38,53	33,16	35,87
Bali	59,48	51,53	55,59	34,13	28,74	31,50	50,76	43,73	47,32
Nusa Tenggara Barat	39,50	35,06	37,17	15,58	13,38	14,41	26,20	22,78	24,39
Nusa Tenggara Timur	45,53	45,40	45,46	8,99	9,13	9,07	17,99	17,48	17,73
Kalimantan Barat	47,32	45,65	46,46	10,83	8,72	9,81	22,34	21,35	21,85
Kalimantan Tengah	49,48	46,02	47,78	20,74	16,84	18,88	30,81	27,43	29,18
Kalimantan Selatan	54,17	46,48	50,33	27,03	21,59	24,35	39,01	32,73	35,90
Kalimantan Timur	57,23	50,48	53,99	30,20	25,30	27,91	46,89	41,15	44,16
Sulawesi Utara	55,31	55,45	55,38	24,16	30,36	27,09	38,95	42,43	40,60
Sulawesi Tengah	50,22	52,61	51,40	14,39	13,51	13,96	24,48	24,87	24,67
Sulawesi Selatan	48,29	50,49	49,40	20,44	24,38	22,44	32,10	35,28	33,72
Sulawesi Tenggara	51,37	49,37	50,35	18,12	17,56	17,83	28,61	27,81	28,21
Gorontalo	49,35	53,40	51,38	25,62	26,00	25,81	33,98	35,60	34,80
Sulawesi Barat	40,33	37,43	38,86	13,10	15,98	14,54	19,29	21,00	20,15
Maluku	49,73	50,38	50,05	11,62	11,56	11,59	27,97	28,39	28,18
Maluku Utara	37,37	38,97	38,16	7,37	8,30	7,83	16,71	17,69	17,20
Papua Barat	44,18	43,23	43,74	20,18	14,73	17,59	28,16	23,99	26,19
Papua	35,41	34,61	35,05	3,97	2,05	3,00	13,82	10,80	12,35
Indonesia	50,27	45,96	48,13	21,90	18,59	20,26	36,89	33,13	35,02

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 5.1 Proporsi Pemuda yang Mempunyai Keluhan Kesehatan selama Sebulan Terakhir Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014

Provinsi	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	16,38	20,18	19,04
Sumatera Utara	15,59	14,95	15,29
Sumatera Barat	23,49	21,13	22,12
Riau	19,15	18,93	19,02
Jambi	13,68	13,28	13,40
Sumatera Selatan	20,33	16,39	17,89
Bengkulu	17,55	21,45	20,13
Lampung	14,04	20,86	19,02
Kep. Bangka Belitung	19,54	15,16	17,30
Kepulauan Riau	15,46	18,66	15,95
DKI Jakarta	20,47	-	20,47
Jawa Barat	18,31	20,07	18,85
Jawa Tengah	23,13	21,15	22,11
DI Yogyakarta	33,51	35,69	34,11
Jawa Timur	18,90	19,79	19,35
Banten	19,74	22,89	20,69
Bali	22,63	34,25	26,61
Nusa Tenggara Barat	25,73	27,50	26,73
Nusa Tenggara Timur	19,48	25,58	24,12
Kalimantan Barat	16,60	15,36	15,77
Kalimantan Tengah	17,83	18,58	18,31
Kalimantan Selatan	24,61	25,44	25,07
Kalimantan Timur	11,73	12,83	12,14
Sulawesi Utara	15,44	17,58	16,56
Sulawesi Tengah	20,38	22,94	22,21
Sulawesi Selatan	12,98	16,91	15,27
Sulawesi Tenggara	21,56	19,45	20,12
Gorontalo	31,90	24,68	27,21
Sulawesi Barat	22,92	22,19	22,36
Maluku	13,40	13,47	13,44
Maluku Utara	6,88	9,63	8,78
Papua Barat	14,11	11,58	12,41
Papua	12,24	12,00	12,07
Indonesia	19,29	19,76	19,51

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 5.2.1 Proporsi Pemuda yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Provinsi dan Jenis Keluhan, 2014

Provinsi	Panas	Batuk	Pilek	Sakit Kepala Berulang	Perkotaan	
					Sakit Gigi	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	6,78	5,91	6,60	1,63	0,80	6,32
Sumatera Utara	5,95	6,94	6,12	1,59	0,98	4,76
Sumatera Barat	10,43	10,48	10,31	3,25	1,12	6,98
Riau	8,57	10,49	9,62	2,69	1,10	5,62
Jambi	4,95	6,39	6,15	2,99	0,91	3,69
Sumatera Selatan	5,59	9,94	8,81	1,93	1,81	7,64
Bengkulu	6,57	6,86	6,23	1,92	0,99	6,61
Lampung	3,88	5,66	6,28	2,22	0,88	4,99
Kep. Bangka Belitung	5,22	9,01	9,20	2,92	1,71	7,04
Kepulauan Riau	5,84	8,05	8,58	2,09	0,69	4,33
DKI Jakarta	4,33	8,71	8,56	3,27	0,80	8,17
Jawa Barat	4,99	7,18	7,18	1,86	0,85	8,00
Jawa Tengah	5,95	10,51	10,54	3,33	1,16	9,12
DI Yogyakarta	9,12	15,32	15,31	3,26	1,93	11,85
Jawa Timur	5,72	8,40	8,48	2,00	1,21	6,98
Banten	5,62	8,59	8,81	2,98	0,92	8,07
Bali	10,23	10,13	10,25	3,42	1,17	7,03
Nusa Tenggara Barat	10,28	10,87	12,22	4,50	1,49	11,56
Nusa Tenggara Timur	5,40	8,83	10,42	2,36	1,27	7,43
Kalimantan Barat	4,91	5,76	5,31	2,02	1,36	7,26
Kalimantan Tengah	5,57	7,81	8,37	3,51	1,59	5,95
Kalimantan Selatan	6,56	11,15	11,16	2,78	1,56	8,13
Kalimantan Timur	2,30	4,25	4,06	1,63	0,78	4,46
Sulawesi Utara	4,73	4,93	5,73	1,85	0,54	5,22
Sulawesi Tengah	7,28	7,81	7,98	3,33	1,70	8,86
Sulawesi Selatan	3,97	4,25	4,31	2,09	1,07	4,26
Sulawesi Tenggara	5,59	7,15	6,75	2,47	1,89	8,14
Gorontalo	17,72	14,18	11,52	7,70	1,74	11,88
Sulawesi Barat	7,77	7,43	8,82	1,69	1,49	8,31
Maluku	2,13	4,57	5,16	1,26	0,86	5,39
Maluku Utara	2,11	1,03	1,06	0,67	0,31	3,31
Papua Barat	3,57	5,91	5,12	2,63	1,53	5,99
Papua	5,06	5,39	4,98	2,83	0,94	5,01
Indonesia	5,67	8,24	8,21	2,45	1,05	7,46

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 5.2.2 Proporsi Pemuda yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Provinsi dan Jenis Keluhan, 2014

Provinsi	Panas	Batuk	Pilek	Sakit Kepala Berulang	Perdesaan	
					Sakit Gigi	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	7,29	7,11	7,05	3,61	1,67	8,59
Sumatera Utara	5,25	6,33	5,99	1,98	1,06	5,18
Sumatera Barat	8,18	9,19	9,28	3,91	1,56	7,59
Riau	6,37	7,54	7,31	3,69	1,79	7,82
Jambi	4,79	5,93	5,24	1,35	0,96	4,43
Sumatera Selatan	4,14	6,29	6,36	3,22	1,17	5,72
Bengkulu	6,85	8,78	9,67	3,54	1,46	8,17
Lampung	6,03	9,72	9,15	3,30	1,47	8,44
Kep. Bangka Belitung	3,54	4,86	5,65	2,45	0,91	6,44
Kepulauan Riau	5,08	8,03	6,47	4,94	1,57	9,41
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	5,71	6,48	6,97	2,09	1,26	9,54
Jawa Tengah	5,14	8,89	8,84	3,32	1,14	9,07
DI Yogyakarta	7,60	13,04	11,55	2,85	2,22	19,18
Jawa Timur	5,51	7,92	7,91	2,93	1,35	7,91
Banten	6,49	8,43	7,34	5,00	0,90	11,00
Bali	15,67	12,34	12,68	5,05	2,25	12,53
Nusa Tenggara Barat	12,68	11,97	13,75	6,86	1,49	11,06
Nusa Tenggara Timur	8,34	11,52	11,55	5,96	1,55	12,21
Kalimantan Barat	4,10	5,73	5,41	3,14	1,05	6,13
Kalimantan Tengah	6,01	7,60	6,93	4,05	2,00	6,42
Kalimantan Selatan	6,48	10,71	11,43	4,08	2,31	10,19
Kalimantan Timur	2,33	3,45	4,97	2,32	0,91	4,92
Sulawesi Utara	6,10	6,35	6,66	2,53	1,38	6,72
Sulawesi Tengah	8,13	7,28	6,50	5,65	1,85	9,72
Sulawesi Selatan	4,65	4,24	4,88	3,32	1,04	7,40
Sulawesi Tenggara	7,08	6,23	5,28	4,31	1,48	7,20
Gorontalo	15,31	10,61	6,92	3,81	1,62	8,23
Sulawesi Barat	4,90	5,62	5,29	3,92	2,17	11,36
Maluku	3,17	4,25	3,65	1,67	1,56	6,20
Maluku Utara	3,56	3,41	2,58	1,63	0,51	3,56
Papua Barat	3,35	4,08	2,73	1,62	0,73	5,65
Papua	3,49	6,25	6,17	1,66	0,62	3,85
Indonesia	5,94	7,66	7,62	3,25	1,32	8,24

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 5.2.3 Proporsi Pemuda yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Provinsi dan Jenis Keluhan, 2014

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan					
	Panas	Batuk	Pilek	Sakit Kepala Berulang	Sakit Gigi	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	7,14	6,75	6,91	3,02	1,41	7,90
Sumatera Utara	5,61	6,65	6,06	1,78	1,02	4,96
Sumatera Barat	9,12	9,73	9,71	3,63	1,38	7,33
Riau	7,27	8,75	8,26	3,28	1,50	6,92
Jambi	4,84	6,07	5,51	1,83	0,94	4,21
Sumatera Selatan	4,69	7,68	7,29	2,73	1,41	6,45
Bengkulu	6,75	8,13	8,51	3,00	1,30	7,64
Lampung	5,45	8,62	8,38	3,01	1,31	7,51
Kep. Bangka Belitung	4,36	6,89	7,38	2,68	1,30	6,74
Kepulauan Riau	5,73	8,05	8,26	2,52	0,82	5,10
DKI Jakarta	4,33	8,71	8,56	3,27	0,80	8,17
Jawa Barat	5,21	6,96	7,11	1,93	0,97	8,47
Jawa Tengah	5,53	9,68	9,67	3,32	1,15	9,09
DI Yogyakarta	8,70	14,69	14,27	3,15	2,01	13,87
Jawa Timur	5,61	8,16	8,19	2,47	1,28	7,45
Banten	5,89	8,55	8,36	3,59	0,91	8,96
Bali	12,10	10,89	11,09	3,98	1,54	8,91
Nusa Tenggara Barat	11,62	11,49	13,08	5,82	1,49	11,28
Nusa Tenggara Timur	7,64	10,88	11,28	5,10	1,49	11,07
Kalimantan Barat	4,37	5,74	5,38	2,77	1,15	6,50
Kalimantan Tengah	5,85	7,67	7,44	3,86	1,85	6,25
Kalimantan Selatan	6,51	10,91	11,31	3,50	1,97	9,27
Kalimantan Timur	2,31	3,95	4,40	1,89	0,83	4,64
Sulawesi Utara	5,45	5,67	6,22	2,20	0,98	6,00
Sulawesi Tengah	7,88	7,43	6,92	4,99	1,81	9,48
Sulawesi Selatan	4,37	4,24	4,64	2,80	1,05	6,09
Sulawesi Tenggara	6,60	6,52	5,75	3,72	1,61	7,50
Gorontalo	16,16	11,86	8,54	5,18	1,67	9,51
Sulawesi Barat	5,56	6,04	6,10	3,41	2,02	10,66
Maluku	2,72	4,39	4,30	1,49	1,26	5,85
Maluku Utara	3,11	2,68	2,11	1,33	0,45	3,48
Papua Barat	3,42	4,68	3,52	1,95	0,99	5,76
Papua	3,95	6,00	5,83	2,00	0,71	4,19
Indonesia	5,80	7,96	7,94	2,83	1,18	7,83

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 5.3.1 Angka Kesakitan Pemuda Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Perkotaan		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
	(1)	(2)	(3)
Aceh	6,50	8,42	7,46
Sumatera Utara	7,41	7,95	7,68
Sumatera Barat	9,14	9,28	9,21
Riau	7,70	7,73	7,72
Jambi	7,46	6,70	7,09
Sumatera Selatan	5,90	6,06	5,98
Bengkulu	7,59	7,97	7,78
Lampung	7,15	6,03	6,58
Kep. Bangka Belitung	7,62	5,90	6,80
Kepulauan Riau	6,23	6,19	6,21
DKI Jakarta	7,55	8,21	7,89
Jawa Barat	8,45	8,41	8,43
Jawa Tengah	9,46	9,34	9,40
DI Yogyakarta	9,26	10,65	9,93
Jawa Timur	8,69	8,73	8,71
Banten	8,39	8,04	8,22
Bali	11,81	12,19	11,99
Nusa Tenggara Barat	11,97	11,66	11,81
Nusa Tenggara Timur	8,24	7,63	7,94
Kalimantan Barat	8,29	7,73	8,00
Kalimantan Tengah	7,61	10,18	8,87
Kalimantan Selatan	7,43	7,84	7,63
Kalimantan Timur	4,74	5,61	5,16
Sulawesi Utara	8,49	6,91	7,73
Sulawesi Tengah	13,03	10,67	11,87
Sulawesi Selatan	4,86	5,65	5,26
Sulawesi Tenggara	8,89	11,53	10,24
Gorontalo	14,13	18,69	16,42
Sulawesi Barat	10,67	17,14	13,96
Maluku	6,26	6,11	6,18
Maluku Utara	3,01	7,28	5,11
Papua Barat	8,05	9,77	8,85
Papua	6,39	5,73	6,09
Indonesia	8,25	8,40	8,33

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 5.3.2 Angka Kesakitan Pemuda Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	8,94	11,73	10,35
Sumatera Utara	8,22	8,03	8,13
Sumatera Barat	10,32	10,86	10,59
Riau	9,65	9,60	9,63
Jambi	6,70	7,56	7,12
Sumatera Selatan	6,41	6,64	6,52
Bengkulu	11,19	11,44	11,32
Lampung	8,27	7,89	8,09
Kep. Bangka Belitung	6,41	4,37	5,45
Kepulauan Riau	5,96	11,78	8,76
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	7,56	8,89	8,21
Jawa Tengah	8,88	9,07	8,98
DI Yogyakarta	13,95	12,92	13,43
Jawa Timur	10,18	9,51	9,84
Banten	10,15	8,72	9,45
Bali	22,72	21,19	21,97
Nusa Tenggara Barat	11,94	13,94	13,01
Nusa Tenggara Timur	11,64	15,88	13,82
Kalimantan Barat	6,59	7,80	7,18
Kalimantan Tengah	9,69	10,37	10,02
Kalimantan Selatan	9,71	9,05	9,39
Kalimantan Timur	5,24	7,28	6,19
Sulawesi Utara	9,49	11,56	10,47
Sulawesi Tengah	13,34	12,59	12,98
Sulawesi Selatan	7,66	8,86	8,27
Sulawesi Tenggara	11,62	13,32	12,47
Gorontalo	15,13	12,44	13,77
Sulawesi Barat	10,79	14,74	12,76
Maluku	6,22	7,86	7,04
Maluku Utara	4,80	5,96	5,38
Papua Barat	5,31	7,56	6,38
Papua	5,11	4,55	4,82
Indonesia	9,03	9,54	9,28

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 5.3.3 Angka Kesakitan Pemuda Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	8,21	10,73	9,48
Sumatera Utara	7,80	7,99	7,89
Sumatera Barat	9,83	10,20	10,01
Riau	8,84	8,85	8,84
Jambi	6,93	7,31	7,11
Sumatera Selatan	6,22	6,41	6,32
Bengkulu	10,00	10,25	10,12
Lampung	7,98	7,38	7,68
Kep. Bangka Belitung	7,00	5,12	6,11
Kepulauan Riau	6,19	6,98	6,60
DKI Jakarta	7,55	8,21	7,89
Jawa Barat	8,17	8,55	8,36
Jawa Tengah	9,16	9,20	9,18
DI Yogyakarta	10,52	11,30	10,90
Jawa Timur	9,44	9,12	9,28
Banten	8,93	8,24	8,59
Bali	15,56	15,27	15,42
Nusa Tenggara Barat	11,95	12,95	12,48
Nusa Tenggara Timur	10,80	13,98	12,42
Kalimantan Barat	7,13	7,78	7,45
Kalimantan Tengah	8,96	10,30	9,61
Kalimantan Selatan	8,70	8,51	8,61
Kalimantan Timur	4,93	6,23	5,55
Sulawesi Utara	9,01	9,32	9,16
Sulawesi Tengah	13,25	12,03	12,66
Sulawesi Selatan	6,49	7,52	7,01
Sulawesi Tenggara	10,76	12,74	11,76
Gorontalo	14,78	14,63	14,70
Sulawesi Barat	10,76	15,30	13,04
Maluku	6,24	7,10	6,67
Maluku Utara	4,24	6,36	5,29
Papua Barat	6,22	8,27	7,19
Papua	5,51	4,86	5,19
Indonesia	8,62	8,94	8,77

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 5.4.1 Persentase Pemuda yang Sakit selama Sebulan Terakhir Menurut Provinsi dan Lamanya Sakit, 2014

Provinsi	Lamanya Sakit (hari)					Perkotaan
	1 - 3	4 - 7	8 - 14	15 - 21	22 - 30	Jumlah
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	62,10	29,43	2,33	1,46	4,68	100,00
Sumatera Utara	74,16	17,18	2,21	2,41	4,05	100,00
Sumatera Barat	60,66	27,54	5,22	2,58	3,99	100,00
Riau	64,25	28,33	4,67	1,10	1,64	100,00
Jambi	73,24	18,75	3,12	1,25	3,63	100,00
Sumatera Selatan	62,98	27,55	2,75	2,04	4,68	100,00
Bengkulu	57,73	31,57	4,00	1,27	5,44	100,00
Lampung	69,69	20,16	5,90	2,45	1,79	100,00
Kep. Bangka Belitung	69,12	20,57	4,96	2,78	2,58	100,00
Kepulauan Riau	73,59	15,79	7,79	2,07	0,75	100,00
DKI Jakarta	77,09	18,45	2,00	0,73	1,73	100,00
Jawa Barat	63,58	27,90	4,15	1,86	2,52	100,00
Jawa Tengah	66,76	26,17	3,79	0,81	2,47	100,00
DI Yogyakarta	67,24	25,59	2,91	0,25	4,01	100,00
Jawa Timur	66,94	23,29	3,86	2,03	3,88	100,00
Banten	65,64	25,16	3,62	1,48	4,10	100,00
Bali	74,27	21,46	2,95	0,00	1,32	100,00
Nusa Tenggara Barat	65,62	25,94	3,81	1,64	2,98	100,00
Nusa Tenggara Timur	69,51	24,51	2,53	3,20	0,26	100,00
Kalimantan Barat	71,85	19,97	4,03	0,07	4,08	100,00
Kalimantan Tengah	74,22	20,83	3,80	0,00	1,16	100,00
Kalimantan Selatan	74,52	18,27	1,91	0,49	4,81	100,00
Kalimantan Timur	70,99	25,57	2,24	0,00	1,20	100,00
Sulawesi Utara	67,29	25,10	3,85	2,13	1,63	100,00
Sulawesi Tengah	56,86	32,82	2,73	0,96	6,63	100,00
Sulawesi Selatan	61,03	31,93	3,13	0,88	3,02	100,00
Sulawesi Tenggara	69,21	22,89	3,50	0,41	3,99	100,00
Gorontalo	65,82	25,01	7,98	0,00	1,19	100,00
Sulawesi Barat	63,98	17,85	11,45	1,24	5,48	100,00
Maluku	72,44	21,76	4,43	0,67	0,70	100,00
Maluku Utara	60,20	32,65	3,16	1,03	2,96	100,00
Papua Barat	52,83	32,85	9,43	0,78	4,11	100,00
Papua	56,40	33,92	6,50	0,00	3,19	100,00
Indonesia	67,22	24,70	3,69	1,44	2,95	100,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 5.4.2 Persentase Pemuda yang Sakit selama Sebulan Terakhir Menurut Provinsi dan Lamanya Sakit, 2014

Provinsi	Lamanya Sakit (hari)					Perdesaan
	1 - 3	4 - 7	8 - 14	15 - 21	22 - 30	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	57,11	31,49	4,38	2,72	4,30	100,00
Sumatera Utara	62,98	24,75	5,36	2,59	4,33	100,00
Sumatera Barat	56,07	31,42	5,06	3,78	3,67	100,00
Riau	62,41	26,78	3,75	2,53	4,53	100,00
Jambi	68,43	23,37	3,20	1,70	3,30	100,00
Sumatera Selatan	64,57	29,55	0,81	1,28	3,78	100,00
Bengkulu	62,54	31,09	3,00	1,29	2,09	100,00
Lampung	62,33	27,27	4,95	2,69	2,77	100,00
Kep. Bangka Belitung	64,53	23,80	6,87	0,96	3,84	100,00
Kepulauan Riau	61,85	21,82	7,29	3,56	5,48	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	55,63	34,30	5,54	2,03	2,50	100,00
Jawa Tengah	62,78	25,36	4,04	2,52	5,30	100,00
DI Yogyakarta	73,19	8,33	18,48	0,00	0,00	100,00
Jawa Timur	57,86	29,91	5,79	3,76	2,68	100,00
Banten	63,44	27,65	2,51	1,71	4,70	100,00
Bali	68,23	23,44	4,58	1,47	2,28	100,00
Nusa Tenggara Barat	56,05	33,63	5,06	1,13	4,14	100,00
Nusa Tenggara Timur	53,28	36,93	4,92	1,24	3,63	100,00
Kalimantan Barat	68,14	21,78	4,66	0,80	4,61	100,00
Kalimantan Tengah	67,75	24,10	2,37	1,05	4,73	100,00
Kalimantan Selatan	65,92	27,19	3,42	0,00	3,48	100,00
Kalimantan Timur	66,78	25,33	3,46	1,59	2,84	100,00
Sulawesi Utara	52,91	33,95	8,41	0,55	4,17	100,00
Sulawesi Tengah	58,53	31,35	5,06	0,84	4,22	100,00
Sulawesi Selatan	58,97	27,23	6,31	0,96	6,52	100,00
Sulawesi Tenggara	61,59	29,31	4,59	0,90	3,61	100,00
Gorontalo	60,76	31,55	3,18	2,40	2,11	100,00
Sulawesi Barat	64,68	28,70	3,42	1,55	1,66	100,00
Maluku	52,15	37,23	6,22	0,00	4,40	100,00
Maluku Utara	48,05	38,80	5,21	4,01	3,92	100,00
Papua Barat	47,77	44,66	0,80	0,69	6,08	100,00
Papua	54,42	37,10	7,27	0,46	0,75	100,00
Indonesia	60,27	29,02	4,88	2,14	3,68	100,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 5.4.3 Persentase Pemuda yang Sakit selama Sebulan Terakhir Menurut Provinsi dan Lamanya Sakit, 2014

Provinsi	Lamanya Sakit (hari)					Jumlah
	Perkotaan+Perdesaan					
	1 - 3	4 - 7	8 - 14	15 - 21	22 - 30	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	58,29	31,00	3,89	2,42	4,39	100,00
Sumatera Utara	68,68	20,89	3,75	2,50	4,18	100,00
Sumatera Barat	57,84	29,93	5,12	3,32	3,79	100,00
Riau	63,07	27,33	4,08	2,02	3,50	100,00
Jambi	69,85	22,01	3,18	1,57	3,40	100,00
Sumatera Selatan	64,00	28,83	1,51	1,55	4,11	100,00
Bengkulu	61,29	31,22	3,26	1,28	2,96	100,00
Lampung	64,03	25,63	5,17	2,63	2,54	100,00
Kep. Bangka Belitung	67,02	22,05	5,83	1,95	3,15	100,00
Kepulauan Riau	71,23	17,00	7,69	2,37	1,70	100,00
DKI Jakarta	77,09	18,45	2,00	0,73	1,73	100,00
Jawa Barat	61,17	29,84	4,57	1,91	2,51	100,00
Jawa Tengah	64,77	25,76	3,91	1,66	3,89	100,00
DI Yogyakarta	69,27	19,71	8,21	0,17	2,64	100,00
Jawa Timur	62,09	26,82	4,89	2,96	3,24	100,00
Banten	64,91	25,99	3,25	1,55	4,30	100,00
Bali	71,32	22,43	3,74	0,72	1,79	100,00
Nusa Tenggara Barat	60,02	30,44	4,54	1,34	3,66	100,00
Nusa Tenggara Timur	55,75	35,04	4,55	1,54	3,11	100,00
Kalimantan Barat	69,45	21,14	4,44	0,54	4,42	100,00
Kalimantan Tengah	69,88	23,03	2,84	0,71	3,55	100,00
Kalimantan Selatan	69,31	23,67	2,82	0,19	4,00	100,00
Kalimantan Timur	69,22	25,47	2,75	0,67	1,89	100,00
Sulawesi Utara	58,71	30,39	6,57	1,19	3,15	100,00
Sulawesi Tengah	58,08	31,74	4,43	0,88	4,87	100,00
Sulawesi Selatan	59,62	28,70	5,32	0,94	5,42	100,00
Sulawesi Tenggara	63,70	27,53	4,29	0,77	3,71	100,00
Gorontalo	62,75	28,98	5,07	1,46	1,75	100,00
Sulawesi Barat	64,51	26,02	5,40	1,47	2,60	100,00
Maluku	60,27	31,05	5,50	0,27	2,92	100,00
Maluku Utara	51,67	36,97	4,60	3,12	3,64	100,00
Papua Barat	49,82	39,88	4,29	0,73	5,28	100,00
Papua	55,10	36,01	7,00	0,30	1,59	100,00
Indonesia	63,76	26,85	4,28	1,79	3,31	100,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 5.5.1 Persentase Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Mengobati Sendiri Menurut Provinsi dan Jenis Obat/Pengobatan yang Digunakan, 2014

Provinsi	Jenis Obat/Pengobatan yang Digunakan					Laki-laki
	Modern	Tradisional	Lainnya	Campuran	Jumlah	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)
Aceh	75,10	9,76	0,00	15,14	100,00	
Sumatera Utara	78,66	8,98	0,73	11,63	100,00	
Sumatera Barat	70,72	14,12	1,33	13,83	100,00	
Riau	80,37	4,72	0,98	13,92	100,00	
Jambi	76,01	9,60	2,18	12,21	100,00	
Sumatera Selatan	78,63	7,23	1,76	12,37	100,00	
Bengkulu	77,40	3,35	1,38	17,87	100,00	
Lampung	77,32	5,80	1,97	14,92	100,00	
Kep. Bangka Belitung	75,98	5,75	0,98	17,29	100,00	
Kepulauan Riau	80,30	7,69	0,41	11,60	100,00	
DKI Jakarta	85,18	4,58	1,63	8,61	100,00	
Jawa Barat	87,18	3,33	0,49	9,01	100,00	
Jawa Tengah	81,51	5,83	2,00	10,66	100,00	
DI Yogyakarta	84,42	8,02	2,51	5,06	100,00	
Jawa Timur	78,69	7,09	0,61	13,61	100,00	
Banten	82,08	2,86	0,68	14,37	100,00	
Bali	69,47	15,71	0,77	14,05	100,00	
Nusa Tenggara Barat	83,18	5,94	0,00	10,88	100,00	
Nusa Tenggara Timur	73,18	16,14	1,34	9,34	100,00	
Kalimantan Barat	81,13	9,46	1,08	8,33	100,00	
Kalimantan Tengah	84,73	2,82	1,09	11,36	100,00	
Kalimantan Selatan	82,33	2,08	0,79	14,80	100,00	
Kalimantan Timur	83,10	5,30	1,11	10,49	100,00	
Sulawesi Utara	84,10	5,42	1,72	8,76	100,00	
Sulawesi Tengah	83,86	5,23	1,09	9,83	100,00	
Sulawesi Selatan	84,51	5,50	0,12	9,88	100,00	
Sulawesi Tenggara	87,11	4,27	1,20	7,43	100,00	
Gorontalo	90,98	1,75	0,00	7,28	100,00	
Sulawesi Barat	86,49	7,15	0,00	6,36	100,00	
Maluku	79,54	7,23	0,25	12,97	100,00	
Maluku Utara	65,38	11,03	0,00	23,59	100,00	
Papua Barat	74,32	13,43	0,00	12,25	100,00	
Papua	57,51	29,57	1,09	11,83	100,00	
Indonesia	81,46	6,19	1,02	11,34	100,00	

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 5.5.2 Persentase Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Mengobati Sendiri Menurut Provinsi dan Jenis Obat/Pengobatan yang Digunakan, 2014

Provinsi	Jenis Obat/Pengobatan yang Digunakan				Perempuan
	Modern	Tradisional	Lainnya	Campuran	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	70,28	10,33	0,52	18,87	100,00
Sumatera Utara	73,56	8,77	0,54	17,13	100,00
Sumatera Barat	71,66	15,98	1,05	11,32	100,00
Riau	81,18	7,47	0,59	10,75	100,00
Jambi	78,34	7,51	0,05	14,09	100,00
Sumatera Selatan	80,24	5,14	1,14	13,48	100,00
Bengkulu	81,21	6,08	1,15	11,56	100,00
Lampung	75,28	5,10	3,30	16,32	100,00
Kep. Bangka Belitung	79,53	5,96	0,73	13,78	100,00
Kepulauan Riau	81,75	2,55	0,00	15,71	100,00
DKI Jakarta	76,68	6,64	1,31	15,36	100,00
Jawa Barat	83,87	3,71	1,19	11,23	100,00
Jawa Tengah	81,99	5,33	1,53	11,16	100,00
DI Yogyakarta	78,63	6,66	5,55	9,16	100,00
Jawa Timur	77,77	6,29	1,03	14,91	100,00
Banten	86,08	3,13	0,67	10,11	100,00
Bali	66,24	17,19	0,12	16,46	100,00
Nusa Tenggara Barat	83,64	5,79	0,62	9,95	100,00
Nusa Tenggara Timur	70,45	16,64	1,34	11,57	100,00
Kalimantan Barat	75,28	11,90	2,51	10,31	100,00
Kalimantan Tengah	85,97	3,04	1,10	9,89	100,00
Kalimantan Selatan	81,42	2,10	1,03	15,46	100,00
Kalimantan Timur	81,72	7,35	0,00	10,93	100,00
Sulawesi Utara	91,90	4,00	0,12	3,97	100,00
Sulawesi Tengah	81,53	9,02	1,34	8,11	100,00
Sulawesi Selatan	78,14	9,21	0,78	11,86	100,00
Sulawesi Tenggara	82,97	7,61	1,49	7,92	100,00
Gorontalo	84,52	2,95	0,72	11,81	100,00
Sulawesi Barat	78,53	13,43	0,30	7,74	100,00
Maluku	76,98	8,59	1,99	12,44	100,00
Maluku Utara	70,60	9,84	0,47	19,09	100,00
Papua Barat	73,37	14,49	0,00	12,14	100,00
Papua	45,94	26,50	0,76	26,81	100,00
Indonesia	79,62	6,49	1,22	12,68	100,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 5.5.3 Persentase Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Mengobati Sendiri Menurut Provinsi dan Jenis Obat/Pengobatan yang Digunakan, 2014

Provinsi	Laki-laki+Perempuan				
	Jenis Obat/Pengobatan yang Digunakan				
	Modern	Tradisional	Lainnya	Campuran	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	72,45	10,07	0,29	17,19	100,00
Sumatera Utara	75,93	8,86	0,63	14,58	100,00
Sumatera Barat	71,19	15,06	1,19	12,55	100,00
Riau	80,79	6,12	0,79	12,31	100,00
Jambi	77,20	8,54	1,10	13,17	100,00
Sumatera Selatan	79,44	6,18	1,45	12,93	100,00
Bengkulu	79,38	4,76	1,26	14,60	100,00
Lampung	76,26	5,44	2,66	15,65	100,00
Kep. Bangka Belitung	77,57	5,84	0,87	15,72	100,00
Kepulauan Riau	81,13	4,74	0,17	13,96	100,00
DKI Jakarta	80,84	5,63	1,47	12,06	100,00
Jawa Barat	85,51	3,52	0,84	10,13	100,00
Jawa Tengah	81,75	5,58	1,76	10,91	100,00
DI Yogyakarta	81,56	7,34	4,01	7,09	100,00
Jawa Timur	78,22	6,68	0,82	14,27	100,00
Banten	84,18	3,01	0,68	12,14	100,00
Bali	67,95	16,40	0,46	15,18	100,00
Nusa Tenggara Barat	83,42	5,86	0,33	10,38	100,00
Nusa Tenggara Timur	71,69	16,42	1,34	10,56	100,00
Kalimantan Barat	78,19	10,68	1,80	9,32	100,00
Kalimantan Tengah	85,37	2,93	1,10	10,60	100,00
Kalimantan Selatan	81,88	2,09	0,91	15,13	100,00
Kalimantan Timur	82,36	6,40	0,52	10,72	100,00
Sulawesi Utara	87,70	4,77	0,98	6,55	100,00
Sulawesi Tengah	82,74	7,04	1,21	9,00	100,00
Sulawesi Selatan	81,13	7,47	0,47	10,93	100,00
Sulawesi Tenggara	84,87	6,07	1,36	7,70	100,00
Gorontalo	87,72	2,35	0,36	9,56	100,00
Sulawesi Barat	82,07	10,63	0,17	7,13	100,00
Maluku	78,16	7,96	1,19	12,69	100,00
Maluku Utara	68,11	10,41	0,25	21,24	100,00
Papua Barat	73,81	14,00	0,00	12,19	100,00
Papua	51,87	28,07	0,93	19,13	100,00
Indonesia	80,52	6,34	1,12	12,02	100,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 5.6.1 Proporsi Pemuda Sakit yang Berobat Jalan Menurut Provinsi dan Tempat Berobat, 2014

Provinsi	Tempat Berobat					
	Rumah Sakit	Praktek Dokter	Puskesmas	Tenaga Kesehatan	Praktek Batra	Lainnya
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	14,47	13,73	45,78	31,27	2,56	1,75
Sumatera Utara	11,58	23,74	20,07	44,33	5,85	4,81
Sumatera Barat	7,41	16,43	25,88	48,94	11,37	3,45
Riau	6,15	40,45	26,35	26,93	2,31	1,66
Jambi	7,38	31,49	16,86	40,19	4,94	0,00
Sumatera Selatan	10,37	20,66	21,58	44,51	1,93	4,16
Bengkulu	6,93	32,88	22,59	37,46	8,62	1,20
Lampung	5,47	28,34	13,20	53,17	3,39	0,23
Kep. Bangka Belitung	13,60	37,01	25,59	31,94	4,10	2,92
Kepulauan Riau	24,33	27,53	44,70	16,95	6,25	4,59
DKI Jakarta	15,18	55,10	30,13	2,02	1,10	2,72
Jawa Barat	10,33	46,22	28,50	19,60	1,93	3,57
Jawa Tengah	11,57	40,88	20,22	30,22	2,57	1,65
DI Yogyakarta	27,40	39,02	19,57	16,35	0,00	0,00
Jawa Timur	12,13	30,16	20,08	37,80	3,73	1,37
Banten	6,67	49,02	16,83	26,84	1,08	2,71
Bali	8,53	49,06	20,63	23,15	3,16	0,88
Nusa Tenggara Barat	4,48	28,48	22,87	43,39	10,01	0,33
Nusa Tenggara Timur	7,97	10,29	68,37	11,50	0,15	4,25
Kalimantan Barat	12,71	12,54	29,54	36,24	8,48	0,93
Kalimantan Tengah	7,58	22,07	42,19	29,18	4,03	2,34
Kalimantan Selatan	9,55	22,47	25,80	41,92	0,38	3,28
Kalimantan Timur	20,14	34,74	34,67	13,17	0,93	0,26
Sulawesi Utara	12,32	34,85	28,09	26,13	2,59	1,11
Sulawesi Tengah	7,35	15,96	34,19	33,75	10,22	3,22
Sulawesi Selatan	15,64	13,57	40,21	28,97	2,43	4,68
Sulawesi Tenggara	11,15	12,98	53,62	22,94	2,75	5,71
Gorontalo	3,13	29,55	32,42	39,07	4,14	0,44
Sulawesi Barat	2,97	10,49	61,67	23,41	3,74	0,00
Maluku	4,78	39,83	35,38	20,14	0,00	1,61
Maluku Utara	31,79	11,29	48,87	9,32	0,00	4,20
Papua Barat	14,31	20,40	54,95	9,22	0,59	4,39
Papua	19,80	26,01	58,89	2,19	1,46	3,03
Indonesia	11,06	35,67	26,16	28,63	3,07	2,43

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 5.6.2 Proporsi Pemuda Sakit yang Berobat Jalan Menurut Provinsi dan Tempat Berobat, 2014

Provinsi	Perempuan					
	Tempat Berobat					
	Rumah Sakit	Praktek Dokter	Puskesmas	Tenaga Kesehatan	Praktek Batra	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	13,33	11,89	40,45	37,17	3,59	3,43
Sumatera Utara	5,57	20,09	22,92	51,08	2,88	2,15
Sumatera Barat	9,08	16,37	26,44	46,62	8,30	1,90
Riau	11,86	31,89	25,23	33,18	4,34	4,34
Jambi	8,89	22,63	31,00	43,28	5,74	6,67
Sumatera Selatan	11,62	25,19	21,52	45,30	2,55	3,10
Bengkulu	8,57	27,24	27,84	40,96	4,35	,79
Lampung	2,91	18,30	27,89	53,43	1,79	4,75
Kep. Bangka Belitung	14,89	21,74	38,03	31,32	4,66	1,90
Kepulauan Riau	21,76	39,07	25,90	15,70	2,39	0,00
DKI Jakarta	15,17	48,01	31,37	6,62	1,02	2,45
Jawa Barat	9,59	42,30	25,56	26,27	2,46	2,44
Jawa Tengah	5,79	36,08	24,38	37,62	2,08	2,12
DI Yogyakarta	16,67	43,75	22,15	21,22	0,00	1,57
Jawa Timur	10,06	29,47	19,19	43,80	2,03	,85
Banten	10,33	44,02	23,52	25,88	2,71	4,48
Bali	8,95	40,08	17,37	36,79	1,50	,34
Nusa Tenggara Barat	6,20	25,92	41,34	30,56	7,42	1,90
Nusa Tenggara Timur	7,28	12,22	72,49	7,42	1,14	4,67
Kalimantan Barat	12,54	16,00	26,22	42,33	2,40	4,40
Kalimantan Tengah	9,49	18,47	41,12	32,61	3,28	3,23
Kalimantan Selatan	6,85	19,39	35,30	39,05	1,62	1,84
Kalimantan Timur	16,16	32,49	35,87	21,58	1,20	2,01
Sulawesi Utara	10,34	29,79	38,20	25,17	0,00	1,27
Sulawesi Tengah	8,67	10,71	40,00	32,79	9,65	3,33
Sulawesi Selatan	10,68	12,53	51,98	25,96	3,46	4,89
Sulawesi Tenggara	7,22	14,66	61,35	19,49	2,18	2,65
Gorontalo	5,70	37,25	36,02	22,76	6,44	,44
Sulawesi Barat	13,54	17,15	69,09	17,19	4,26	3,14
Maluku	6,71	21,23	48,79	24,60	0,78	3,30
Maluku Utara	28,25	9,45	61,03	11,02	0,00	4,42
Papua Barat	24,44	20,79	55,20	3,92	0,00	0,00
Papua	27,95	17,40	60,98	4,01	2,16	2,69
Indonesia	9,65	31,97	28,63	32,50	2,65	2,48

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 5.6.3 Proporsi Pemuda Sakit yang Berobat Jalan Menurut Provinsi dan Tempat Berobat, 2014

Provinsi	Tempat Berobat					
	Rumah Sakit	Praktek Dokter	Puskesmas	Tenaga Kesehatan	Praktek Batra	Lainnya
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	13,78	12,62	42,56	34,84	3,18	2,76
Sumatera Utara	8,38	21,79	21,58	47,92	4,27	3,39
Sumatera Barat	8,33	16,39	26,19	47,66	9,68	2,59
Riau	9,62	35,24	25,67	30,73	3,54	3,29
Jambi	8,30	26,06	25,52	42,08	5,43	4,09
Sumatera Selatan	11,08	23,22	21,55	44,96	2,28	3,56
Bengkulu	7,84	29,76	25,50	39,40	6,25	0,97
Lampung	4,04	22,70	21,45	53,32	2,49	2,76
Kep. Bangka Belitung	14,29	28,86	32,24	31,61	4,40	2,37
Kepulauan Riau	22,91	33,90	34,32	16,26	4,12	2,06
DKI Jakarta	15,17	50,96	30,86	4,71	1,06	2,56
Jawa Barat	9,92	44,06	26,88	23,28	2,22	2,95
Jawa Tengah	8,19	38,08	22,65	34,55	2,28	1,93
DI Yogyakarta	21,14	41,78	21,07	19,19	0,00	,91
Jawa Timur	10,93	29,76	19,56	41,28	2,75	1,07
Banten	8,68	46,28	20,50	26,31	1,97	3,68
Bali	8,75	44,44	18,95	30,16	2,31	,60
Nusa Tenggara Barat	5,57	26,86	34,60	35,24	8,37	1,33
Nusa Tenggara Timur	7,53	11,52	71,00	8,89	0,78	4,52
Kalimantan Barat	12,61	14,64	27,52	39,94	4,79	3,04
Kalimantan Tengah	8,56	20,22	41,64	30,94	3,65	2,80
Kalimantan Selatan	7,95	20,65	31,42	40,22	1,12	2,42
Kalimantan Timur	17,76	33,39	35,39	18,20	1,09	1,30
Sulawesi Utara	11,33	32,31	33,17	25,65	1,29	1,19
Sulawesi Tengah	8,12	12,89	37,59	33,19	9,89	3,28
Sulawesi Selatan	12,66	12,95	47,27	27,17	3,05	4,81
Sulawesi Tenggara	8,72	14,02	58,41	20,80	2,40	3,82
Gorontalo	4,70	34,25	34,62	29,11	5,54	0,44
Sulawesi Barat	9,38	14,53	66,17	19,64	4,06	1,91
Maluku	5,85	29,52	42,81	22,61	0,43	2,54
Maluku Utara	29,63	10,17	56,28	10,36	0,00	4,34
Papua Barat	20,26	20,63	55,10	6,11	0,24	1,81
Papua	24,06	21,52	59,98	3,14	1,83	2,85
Indonesia	10,25	33,55	27,57	30,85	2,83	2,46

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 5.7.1 Persentase Pemuda Perempuan Pernah Kawin Menurut Provinsi dan Partisipasi dalam Program KB, 2014

Provinsi	Perkotaan		
	Sedang ber-KB	Pernah ber-KB	Tidak Pernah ber-KB
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	51,87	19,53	28,60
Sumatera Utara	48,75	15,06	36,20
Sumatera Barat	46,04	19,96	34,00
Riau	46,51	23,07	30,43
Jambi	56,69	15,51	27,80
Sumatera Selatan	51,52	20,48	28,00
Bengkulu	60,01	14,04	25,95
Lampung	63,90	11,54	24,56
Kep. Bangka Belitung	64,68	11,60	23,72
Kepulauan Riau	39,94	23,34	36,71
DKI Jakarta	51,28	19,16	29,56
Jawa Barat	63,62	19,25	17,13
Jawa Tengah	55,89	17,12	26,99
DI Yogyakarta	51,98	15,48	32,53
Jawa Timur	59,41	15,01	25,58
Banten	62,08	20,86	17,05
Bali	56,81	16,49	26,70
Nusa Tenggara Barat	56,46	22,74	20,80
Nusa Tenggara Timur	50,44	16,91	32,65
Kalimantan Barat	60,89	13,78	25,33
Kalimantan Tengah	64,46	16,67	18,87
Kalimantan Selatan	66,33	19,08	14,60
Kalimantan Timur	55,04	22,55	22,41
Sulawesi Utara	65,28	15,85	18,88
Sulawesi Tengah	56,42	16,99	26,60
Sulawesi Selatan	50,54	13,02	36,45
Sulawesi Tenggara	48,79	18,02	33,19
Gorontalo	60,54	14,47	24,99
Sulawesi Barat	39,52	22,10	38,37
Maluku	41,34	19,67	38,98
Maluku Utara	52,02	18,82	29,16
Papua Barat	48,53	20,20	31,26
Papua	43,26	15,53	41,20
Indonesia	57,70	17,96	24,34

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 5.7.2 Persentase Pemuda Perempuan Pernah Kawin Menurut Provinsi dan Partisipasi dalam Program KB, 2014

Provinsi	Perdesaan		
	Sedang ber-KB	Pernah ber-KB	Tidak Pernah ber-KB
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	56,06	18,15	25,79
Sumatera Utara	46,32	17,90	35,78
Sumatera Barat	55,44	17,45	27,11
Riau	59,42	18,81	21,77
Jambi	69,14	14,98	15,89
Sumatera Selatan	70,23	13,19	16,59
Bengkulu	68,85	15,52	15,63
Lampung	70,95	13,46	15,59
Kep. Bangka Belitung	70,59	17,64	11,77
Kepulauan Riau	63,21	20,75	16,04
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	67,42	18,79	13,78
Jawa Tengah	64,88	13,90	21,22
DI Yogyakarta	60,65	7,77	31,58
Jawa Timur	63,14	15,44	21,42
Banten	68,95	16,44	14,61
Bali	67,41	16,01	16,57
Nusa Tenggara Barat	53,00	25,64	21,36
Nusa Tenggara Timur	44,30	14,68	41,02
Kalimantan Barat	71,19	12,57	16,24
Kalimantan Tengah	71,93	16,30	11,77
Kalimantan Selatan	75,35	17,14	7,51
Kalimantan Timur	66,37	17,53	16,11
Sulawesi Utara	70,77	12,23	17,00
Sulawesi Tengah	61,92	15,37	22,71
Sulawesi Selatan	56,30	15,07	28,63
Sulawesi Tenggara	53,50	18,17	28,33
Gorontalo	69,17	13,70	17,12
Sulawesi Barat	50,13	15,16	34,72
Maluku	40,16	15,37	44,47
Maluku Utara	58,01	12,66	29,33
Papua Barat	39,55	12,25	48,20
Papua	20,21	6,82	72,97
Indonesia	62,29	15,79	21,92

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 5.7.3 Persentase Pemuda Perempuan Pernah Kawin Menurut Provinsi dan Partisipasi dalam Program KB, 2014

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan		
	Sedang ber-KB	Pernah ber-KB	Tidak Pernah ber-KB
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	54,97	18,51	26,53
Sumatera Utara	47,42	16,61	35,97
Sumatera Barat	52,37	18,27	29,35
Riau	55,28	20,17	24,54
Jambi	66,18	15,10	18,72
Sumatera Selatan	64,86	15,28	19,86
Bengkulu	66,61	15,14	18,24
Lampung	69,49	13,06	17,45
Kep. Bangka Belitung	68,00	15,00	17,00
Kepulauan Riau	43,42	22,96	33,63
DKI Jakarta	51,28	19,16	29,56
Jawa Barat	65,06	19,08	15,86
Jawa Tengah	61,18	15,22	23,60
DI Yogyakarta	55,54	12,31	32,14
Jawa Timur	61,54	15,26	23,21
Banten	64,59	19,25	16,16
Bali	60,89	16,31	22,80
Nusa Tenggara Barat	54,33	24,52	21,15
Nusa Tenggara Timur	45,28	15,04	39,68
Kalimantan Barat	68,47	12,89	18,64
Kalimantan Tengah	69,58	16,41	14,00
Kalimantan Selatan	71,87	17,89	10,24
Kalimantan Timur	59,81	20,44	19,76
Sulawesi Utara	68,54	13,70	17,76
Sulawesi Tengah	60,80	15,70	23,50
Sulawesi Selatan	54,33	14,37	31,31
Sulawesi Tenggara	52,40	18,14	29,47
Gorontalo	66,78	13,91	19,30
Sulawesi Barat	48,12	16,47	35,41
Maluku	40,57	16,88	42,55
Maluku Utara	56,58	14,13	29,29
Papua Barat	41,94	14,36	43,70
Papua	24,90	8,59	66,50
Indonesia	60,19	16,78	23,02

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 5.8.1 Persentase Pemuda Perempuan Pernah Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB Menurut Provinsi dan Jenis Alat/Cara KB yang Digunakan, 2014

Provinsi	AKDR/ IUD/ Spiral	Suntik KB	Susuk KB/ Implant	Pil KB	Tradi- sional	Lainnya	Perkotaan
							Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	4,45	65,10	1,24	23,78	2,45	2,98	100,00
Sumatera Utara	3,00	55,97	8,13	27,84	3,31	1,75	100,00
Sumatera Barat	11,81	57,16	7,08	18,48	1,62	3,86	100,00
Riau	6,55	59,86	4,74	22,97	1,41	4,47	100,00
Jambi	4,80	69,42	4,43	18,33	0,00	3,01	100,00
Sumatera Selatan	0,79	77,44	4,51	10,80	2,81	3,65	100,00
Bengkulu	6,05	68,23	4,70	13,86	2,11	5,04	100,00
Lampung	4,13	71,46	5,21	15,62	0,76	2,82	100,00
Kep. Bangka Belitung	4,05	62,74	2,75	28,07	1,76	0,63	100,00
Kepulauan Riau	6,50	56,89	1,93	27,48	3,78	3,41	100,00
DKI Jakarta	10,89	67,57	2,60	14,13	2,13	2,68	100,00
Jawa Barat	6,05	70,80	1,59	20,15	0,42	1,00	100,00
Jawa Tengah	8,22	71,52	6,58	10,70	1,73	1,24	100,00
DI Yogyakarta	32,98	41,55	6,26	6,66	6,05	6,50	100,00
Jawa Timur	7,31	66,43	3,75	18,75	1,57	2,19	100,00
Banten	4,54	75,00	2,72	15,56	1,34	0,84	100,00
Bali	17,17	59,19	1,71	15,03	2,45	4,45	100,00
Nusa Tenggara Barat	7,36	76,97	7,08	7,88	0,23	0,49	100,00
Nusa Tenggara Timur	14,59	52,13	13,08	10,75	8,22	1,22	100,00
Kalimantan Barat	6,67	59,80	0,43	30,69	1,08	1,32	100,00
Kalimantan Tengah	1,06	69,24	1,93	25,28	0,00	2,48	100,00
Kalimantan Selatan	1,51	53,64	1,67	41,39	0,16	1,64	100,00
Kalimantan Timur	6,72	57,15	2,44	30,88	1,34	1,47	100,00
Sulawesi Utara	4,55	62,00	7,54	22,92	1,31	1,67	100,00
Sulawesi Tengah	8,36	38,57	2,10	43,95	4,56	2,47	100,00
Sulawesi Selatan	5,19	68,14	3,97	19,67	1,42	1,62	100,00
Sulawesi Tenggara	3,20	46,69	6,26	37,71	4,95	1,20	100,00
Gorontalo	5,13	45,89	12,59	34,75	1,18	0,47	100,00
Sulawesi Barat	3,45	58,94	4,21	33,40	0,00	0,00	100,00
Maluku	2,99	67,38	8,55	17,33	2,15	1,60	100,00
Maluku Utara	4,79	71,32	11,43	12,46	0,00	0,00	100,00
Papua Barat	1,19	72,71	5,75	16,76	3,59	0,00	100,00
Papua	2,47	61,92	5,17	26,96	1,86	1,62	100,00
Indonesia	6,94	67,53	3,58	18,76	1,43	1,76	100,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 5.8.2 Persentase Pemuda Perempuan Pernah Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB Menurut Provinsi dan Jenis Alat/Cara KB yang Digunakan, 2014

Provinsi	Perdesaan						Jumlah
	AKDR/ IUD/ Spiral	Suntik KB	Susuk KB/ Implant	PilKB	Tradi- sional	Lainnya	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	0,97	74,69	1,56	21,87	0,19	0,72	100,00
Sumatera Utara	1,56	56,13	5,96	29,59	4,20	2,56	100,00
Sumatera Barat	3,47	70,72	10,77	13,35	0,38	1,31	100,00
Riau	0,86	65,95	6,33	25,53	0,79	0,55	100,00
Jambi	1,14	73,09	5,03	20,18	0,24	0,32	100,00
Sumatera Selatan	0,71	79,32	8,78	10,48	0,43	0,29	100,00
Bengkulu	2,61	70,11	10,35	15,75	0,46	0,72	100,00
Lampung	1,41	76,95	4,51	15,85	0,99	0,29	100,00
Kep. Bangka Belitung	0,74	60,96	2,27	34,43	0,00	1,61	100,00
Kepulauan Riau	0,00	71,69	4,36	19,66	1,01	3,27	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	1,54	77,07	1,80	19,52	0,00	0,08	100,00
Jawa Tengah	4,73	75,29	8,95	9,85	0,06	1,11	100,00
DI Yogyakarta	10,11	64,87	8,15	11,96	2,61	2,31	100,00
Jawa Timur	3,86	72,37	3,93	18,85	0,24	0,75	100,00
Banten	1,51	86,56	2,15	9,32	0,22	0,24	100,00
Bali	19,13	61,47	3,15	14,86	0,31	1,10	100,00
Nusa Tenggara Barat	2,63	81,78	8,08	6,81	0,00	0,69	100,00
Nusa Tenggara Timur	8,97	59,91	15,63	11,16	2,93	1,41	100,00
Kalimantan Barat	0,81	76,71	1,54	20,05	0,07	0,82	100,00
Kalimantan Tengah	0,15	67,42	3,02	29,02	0,17	0,22	100,00
Kalimantan Selatan	0,90	55,30	1,85	41,44	0,38	0,12	100,00
Kalimantan Timur	2,08	52,34	4,78	39,90	0,01	0,90	100,00
Sulawesi Utara	4,20	54,30	13,78	26,17	0,26	1,29	100,00
Sulawesi Tengah	3,25	50,04	7,27	38,08	0,86	0,51	100,00
Sulawesi Selatan	0,71	67,15	5,36	25,19	0,98	0,61	100,00
Sulawesi Tenggara	0,43	58,20	11,49	27,25	2,26	0,37	100,00
Gorontalo	2,53	47,41	18,03	31,32	0,48	0,24	100,00
Sulawesi Barat	0,55	51,09	8,82	38,04	1,25	0,24	100,00
Maluku	0,42	80,71	7,32	9,71	1,84	0,00	100,00
Maluku Utara	0,88	75,32	11,48	10,52	1,37	0,44	100,00
Papua Barat	0,23	72,15	7,18	16,60	3,01	0,82	100,00
Papua	0,12	28,94	6,98	11,98	50,96	1,01	100,00
Indonesia	2,70	71,53	5,57	18,65	0,85	0,69	100,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 5.8.3 Persentase Pemuda Perempuan Pernah Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB Menurut Provinsi dan Jenis Alat/Cara KB yang Digunakan, 2014

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan						Jumlah
	AKDR/ IUD/ Spiral	Suntik KB	Susuk KB/ Implant	PilKB	Tradi- sional	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	1,83	72,33	1,48	22,34	0,75	1,28	100,00
Sumatera Utara	2,23	56,05	6,98	28,77	3,78	2,18	100,00
Sumatera Barat	5,86	66,83	9,71	14,82	0,73	2,04	100,00
Riau	2,39	64,31	5,90	24,84	0,96	1,61	100,00
Jambi	1,88	72,35	4,91	19,81	0,19	0,87	100,00
Sumatera Selatan	0,73	78,89	7,80	10,55	0,97	1,05	100,00
Bengkulu	3,39	69,68	9,06	15,32	0,84	1,71	100,00
Lampung	1,93	75,90	4,64	15,81	0,94	0,77	100,00
Kep. Bangka Belitung	2,12	61,70	2,47	31,79	0,73	1,20	100,00
Kepulauan Riau	5,09	60,11	2,46	25,78	3,18	3,38	100,00
DKI Jakarta	10,89	67,57	2,60	14,13	2,13	2,68	100,00
Jawa Barat	4,28	73,26	1,67	19,90	0,25	0,64	100,00
Jawa Tengah	6,04	73,88	8,06	10,17	0,69	1,15	100,00
DI Yogyakarta	22,73	52,01	7,11	9,04	4,51	4,62	100,00
Jawa Timur	5,29	69,91	3,86	18,81	0,79	1,34	100,00
Banten	3,36	79,50	2,50	13,13	0,91	0,60	100,00
Bali	18,00	60,16	2,32	14,95	1,54	3,03	100,00
Nusa Tenggara Barat	4,53	79,85	7,68	7,24	0,09	0,61	100,00
Nusa Tenggara Timur	9,97	58,52	15,17	11,09	3,88	1,37	100,00
Kalimantan Barat	2,19	72,74	1,28	22,55	0,30	0,94	100,00
Kalimantan Tengah	0,41	67,95	2,71	27,93	0,12	0,88	100,00
Kalimantan Selatan	1,12	54,71	1,79	41,42	0,30	0,66	100,00
Kalimantan Timur	4,55	54,90	3,54	35,09	0,72	1,20	100,00
Sulawesi Utara	4,34	57,28	11,37	24,92	0,66	1,44	100,00
Sulawesi Tengah	4,21	47,87	6,29	39,19	1,55	0,88	100,00
Sulawesi Selatan	2,13	67,46	4,92	23,44	1,12	0,93	100,00
Sulawesi Tenggara	1,03	55,69	10,35	29,53	2,85	0,55	100,00
Gorontalo	3,18	47,03	16,66	32,18	0,65	0,30	100,00
Sulawesi Barat	1,00	52,31	8,10	37,32	1,06	0,20	100,00
Maluku	1,34	75,96	7,76	12,43	1,95	0,57	100,00
Maluku Utara	1,74	74,44	11,47	10,94	1,07	0,34	100,00
Papua Barat	0,52	72,32	6,74	16,65	3,19	0,57	100,00
Papua	0,95	40,61	6,34	17,28	33,59	1,23	100,00
Indonesia	4,56	69,78	4,70	18,70	1,11	1,16	100,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 5.9.1 Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Kawin Menurut Provinsi dan Kelompok Umur saat Perkawinan Pertama, 2014

Provinsi	Umur Perkawinan Pertama (Tahun)				Perkotaan
	9-15	16-18	19-24	25-30	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	2,69	18,24	66,63	12,43	100,00
Sumatera Utara	0,97	17,90	65,62	15,51	100,00
Sumatera Barat	0,53	10,57	64,99	23,91	100,00
Riau	2,20	18,41	64,06	15,33	100,00
Jambi	2,62	17,48	66,25	13,65	100,00
Sumatera Selatan	2,63	21,79	61,40	14,18	100,00
Bengkulu	1,68	19,70	60,44	18,18	100,00
Lampung	1,52	20,10	69,78	8,61	100,00
Kep. Bangka Belitung	3,29	33,32	53,81	9,58	100,00
Kepulauan Riau	0,61	10,96	64,85	23,58	100,00
DKI Jakarta	1,72	16,61	63,65	18,02	100,00
Jawa Barat	4,07	32,00	55,94	7,99	100,00
Jawa Tengah	1,66	20,71	65,93	11,70	100,00
DI Yogyakarta	0,57	14,06	70,49	14,88	100,00
Jawa Timur	3,30	24,29	63,09	9,33	100,00
Banten	3,26	21,86	66,17	8,70	100,00
Bali	1,96	21,23	61,46	15,35	100,00
Nusa Tenggara Barat	3,98	30,86	56,95	8,21	100,00
Nusa Tenggara Timur	2,67	20,30	60,56	16,47	100,00
Kalimantan Barat	3,74	20,83	65,34	10,09	100,00
Kalimantan Tengah	7,11	31,47	52,44	8,97	100,00
Kalimantan Selatan	6,83	33,99	52,80	6,39	100,00
Kalimantan Timur	2,40	25,72	61,58	10,29	100,00
Sulawesi Utara	2,92	29,07	56,90	11,11	100,00
Sulawesi Tengah	7,20	24,36	54,26	14,19	100,00
Sulawesi Selatan	5,09	29,09	53,45	12,36	100,00
Sulawesi Tenggara	2,47	27,18	58,73	11,61	100,00
Gorontalo	3,22	26,99	56,84	12,95	100,00
Sulawesi Barat	8,38	28,40	49,78	13,43	100,00
Maluku	1,68	18,75	65,79	13,78	100,00
Maluku Utara	3,38	25,04	62,82	8,76	100,00
Papua Barat	4,76	22,89	63,45	8,90	100,00
Papua	3,31	27,48	54,88	14,33	100,00
Indonesia	3,01	24,45	61,33	11,21	100,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 5.9.2 Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Kawin Menurut Provinsi dan Kelompok Umur saat Perkawinan Pertama, 2014

Provinsi	Umur Perkawinan Pertama (Tahun)				Perdesaan
	9-15	16-18	19-24	25-30	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	5,15	28,20	57,46	9,19	100,00
Sumatera Utara	1,85	24,61	65,03	8,51	100,00
Sumatera Barat	2,97	27,67	59,72	9,64	100,00
Riau	5,17	28,99	57,82	8,02	100,00
Jambi	8,13	42,06	45,88	3,92	100,00
Sumatera Selatan	8,85	37,26	49,47	4,42	100,00
Bengkulu	7,89	37,39	48,07	6,65	100,00
Lampung	3,51	32,46	58,55	5,48	100,00
Kep. Bangka Belitung	7,72	45,30	42,36	4,62	100,00
Kepulauan Riau	2,31	30,14	58,84	8,72	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	11,86	47,25	38,73	2,15	100,00
Jawa Tengah	3,50	37,09	54,26	5,14	100,00
DI Yogyakarta	1,48	22,94	61,88	13,70	100,00
Jawa Timur	9,12	41,01	45,72	4,15	100,00
Banten	8,85	43,44	44,61	3,10	100,00
Bali	4,83	29,07	60,24	5,85	100,00
Nusa Tenggara Barat	5,54	37,06	51,19	6,21	100,00
Nusa Tenggara Timur	2,55	30,26	57,39	9,80	100,00
Kalimantan Barat	8,24	41,41	45,65	4,71	100,00
Kalimantan Tengah	12,43	45,63	39,62	2,32	100,00
Kalimantan Selatan	13,53	40,12	42,69	3,66	100,00
Kalimantan Timur	7,78	38,46	49,19	4,57	100,00
Sulawesi Utara	6,36	35,71	52,11	5,82	100,00
Sulawesi Tengah	9,36	39,93	45,57	5,15	100,00
Sulawesi Selatan	9,08	35,04	48,08	7,80	100,00
Sulawesi Tenggara	11,48	37,77	45,10	5,65	100,00
Gorontalo	12,87	42,20	41,54	3,40	100,00
Sulawesi Barat	12,55	36,80	45,18	5,47	100,00
Maluku	5,19	30,13	56,36	8,32	100,00
Maluku Utara	6,01	37,34	50,69	5,96	100,00
Papua Barat	9,51	35,35	47,75	7,39	100,00
Papua	7,10	32,64	52,83	7,43	100,00
Indonesia	7,38	37,83	49,55	5,24	100,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 5.9.3 Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Kawin Menurut Provinsi dan Kelompok Umur saat Perkawinan Pertama, 2014

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan				Jumlah
	Umur Perkawinan Pertama (Tahun)				
	9-15	16-18	19-24	25-30	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	4,51	25,60	59,85	10,04	100,00
Sumatera Utara	1,45	21,56	65,30	11,69	100,00
Sumatera Barat	2,18	22,09	61,44	14,29	100,00
Riau	4,22	25,60	59,82	10,36	100,00
Jambi	6,82	36,22	50,72	6,24	100,00
Sumatera Selatan	7,07	32,83	52,89	7,22	100,00
Bengkulu	6,32	32,91	51,21	9,57	100,00
Lampung	3,09	29,89	60,88	6,13	100,00
Kep. Bangka Belitung	5,78	40,06	47,37	6,79	100,00
Kepulauan Riau	0,86	13,83	63,95	21,36	100,00
DKI Jakarta	1,72	16,61	63,65	18,02	100,00
Jawa Barat	7,03	37,78	49,42	5,77	100,00
Jawa Tengah	2,74	30,36	59,06	7,84	100,00
DI Yogyakarta	0,94	17,71	66,96	14,40	100,00
Jawa Timur	6,62	33,83	53,18	6,37	100,00
Banten	5,30	29,73	58,31	6,66	100,00
Bali	3,06	24,25	60,99	11,70	100,00
Nusa Tenggara Barat	4,94	34,66	53,41	6,98	100,00
Nusa Tenggara Timur	2,57	28,67	57,90	10,87	100,00
Kalimantan Barat	7,05	35,97	50,85	6,13	100,00
Kalimantan Tengah	10,75	41,17	43,66	4,42	100,00
Kalimantan Selatan	10,95	37,76	46,58	4,71	100,00
Kalimantan Timur	4,67	31,09	56,36	7,88	100,00
Sulawesi Utara	4,97	33,02	54,05	7,96	100,00
Sulawesi Tengah	8,92	36,76	47,34	6,99	100,00
Sulawesi Selatan	7,72	33,00	49,92	9,36	100,00
Sulawesi Tenggara	9,37	35,29	48,29	7,04	100,00
Gorontalo	10,20	37,99	45,77	6,04	100,00
Sulawesi Barat	11,76	35,21	46,05	6,98	100,00
Maluku	3,96	26,15	59,65	10,23	100,00
Maluku Utara	5,38	34,40	53,59	6,63	100,00
Papua Barat	8,25	32,05	51,92	7,79	100,00
Papua	6,33	31,59	53,25	8,84	100,00
Indonesia	5,39	31,72	54,93	7,96	100,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 6.1.1 Persentase Pemuda Menurut Provinsi dan Kegiatan Utama selama Seminggu Terakhir, 2014

Provinsi	Perkotaan					Jumlah
	Angkatan Kerja		Bukan Angkatan Kerja			
	Bekerja	Pengangguran	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	40,83	11,12	31,76	13,34	2,94	100,00
Sumatera Utara	47,89	11,07	24,05	14,31	2,69	100,00
Sumatera Barat	43,45	11,75	33,19	9,41	2,21	100,00
Riau	44,04	11,01	27,15	15,08	2,72	100,00
Jambi	49,38	10,31	24,55	13,03	2,74	100,00
Sumatera Selatan	48,68	10,88	23,75	14,45	2,24	100,00
Bengkulu	48,59	5,87	30,05	12,57	2,92	100,00
Lampung	45,90	9,25	29,60	13,55	1,71	100,00
Kep. Bangka Belitung	52,32	8,02	18,81	19,22	1,62	100,00
Kepulauan Riau	55,07	9,90	14,44	17,49	3,10	100,00
DKI Jakarta	56,73	9,57	21,44	11,04	1,22	100,00
Jawa Barat	48,93	11,62	21,18	14,98	3,29	100,00
Jawa Tengah	52,98	9,46	21,84	12,75	2,97	100,00
DI Yogyakarta	51,62	5,73	28,80	11,50	2,35	100,00
Jawa Timur	51,31	8,23	23,74	13,94	2,78	100,00
Banten	52,50	10,63	18,46	14,63	3,78	100,00
Bali	59,64	3,53	25,25	9,64	1,94	100,00
Nusa Tenggara Barat	48,17	8,99	22,69	16,52	3,62	100,00
Nusa Tenggara Timur	38,41	8,51	37,82	12,80	2,45	100,00
Kalimantan Barat	49,29	8,21	25,98	13,36	3,16	100,00
Kalimantan Tengah	46,37	5,88	28,01	17,33	2,41	100,00
Kalimantan Selatan	51,25	6,99	21,34	17,92	2,50	100,00
Kalimantan Timur	46,21	10,06	25,80	15,29	2,63	100,00
Sulawesi Utara	40,53	13,91	26,65	13,28	5,62	100,00
Sulawesi Tengah	50,41	6,48	26,12	13,95	3,04	100,00
Sulawesi Selatan	42,08	9,45	32,09	13,73	2,64	100,00
Sulawesi Tenggara	41,51	7,99	30,90	17,79	1,81	100,00
Gorontalo	45,74	8,05	28,34	13,97	3,90	100,00
Sulawesi Barat	55,54	2,62	20,64	20,01	1,19	100,00
Maluku	35,11	14,44	35,07	12,19	3,19	100,00
Maluku Utara	42,01	8,90	30,66	13,46	4,97	100,00
Papua Barat	43,64	7,89	30,24	13,57	4,66	100,00
Papua	43,83	9,55	31,32	12,17	3,13	100,00
Indonesia	49,96	9,86	23,46	13,89	2,83	100,00

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2014

Tabel 6.1.2 Persentase Pemuda Menurut Provinsi dan Kegiatan Utama selama Seminggu Terakhir, 2014

Provinsi	Perdesaan					Jumlah
	Angkatan Kerja		Bukan Angkatan Kerja			
	Bekerja	Pengangguran	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	43,41	12,67	25,77	14,89	3,26	100,00
Sumatera Utara	57,04	8,08	18,60	13,30	2,97	100,00
Sumatera Barat	48,83	8,14	23,71	15,03	4,30	100,00
Riau	49,71	6,76	18,49	22,09	2,95	100,00
Jambi	51,61	5,79	16,68	23,22	2,70	100,00
Sumatera Selatan	57,63	5,51	14,43	19,50	2,92	100,00
Bengkulu	52,59	4,99	20,11	18,17	4,13	100,00
Lampung	54,38	6,76	13,76	22,28	2,83	100,00
Kep. Bangka Belitung	53,96	5,96	13,65	24,62	1,82	100,00
Kepulauan Riau	48,97	8,02	16,62	23,82	2,57	100,00
DKI Jakarta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Jawa Barat	42,73	14,27	13,86	23,60	5,54	100,00
Jawa Tengah	51,24	8,39	15,90	20,61	3,87	100,00
DI Yogyakarta	59,01	6,32	23,00	9,57	2,09	100,00
Jawa Timur	52,80	6,88	16,44	20,41	3,46	100,00
Banten	45,44	14,83	12,30	22,16	5,26	100,00
Bali	69,99	3,79	14,19	10,05	1,98	100,00
Nusa Tenggara Barat	52,25	6,44	17,26	20,26	3,79	100,00
Nusa Tenggara Timur	58,45	4,04	20,85	14,86	1,80	100,00
Kalimantan Barat	58,96	5,68	17,47	15,83	2,06	100,00
Kalimantan Tengah	58,59	4,45	16,05	18,58	2,33	100,00
Kalimantan Selatan	58,69	4,85	15,30	18,82	2,33	100,00
Kalimantan Timur	48,79	9,89	20,74	18,55	2,04	100,00
Sulawesi Utara	42,17	8,70	20,38	22,78	5,98	100,00
Sulawesi Tengah	53,32	5,37	13,94	24,63	2,74	100,00
Sulawesi Selatan	52,33	5,29	18,20	19,98	4,19	100,00
Sulawesi Tenggara	55,96	4,73	15,71	21,04	2,56	100,00
Gorontalo	50,06	3,55	18,81	24,31	3,27	100,00
Sulawesi Barat	59,90	2,62	17,52	17,47	2,50	100,00
Maluku	42,42	12,36	23,08	18,31	3,83	100,00
Maluku Utara	48,90	6,74	19,13	20,48	4,74	100,00
Papua Barat	54,26	5,67	21,86	16,72	1,48	100,00
Papua	76,52	3,99	10,40	6,61	2,48	100,00
Indonesia	52,21	8,02	16,69	19,53	3,55	100,00

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2014

Tabel 6.1.3 Persentase Pemuda Menurut Provinsi dan Kegiatan Utama selama Seminggu Terakhir, 2014

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan					Jumlah
	Angkatan Kerja		Bukan Angkatan Kerja			
	Bekerja	Pengangguran	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	42,65	12,21	27,55	14,43	3,16	100,00
Sumatera Utara	52,27	9,64	21,44	13,82	2,82	100,00
Sumatera Barat	46,49	9,70	27,82	12,59	3,39	100,00
Riau	47,38	8,51	22,06	19,20	2,85	100,00
Jambi	50,93	7,17	19,07	20,12	2,71	100,00
Sumatera Selatan	54,29	7,51	17,91	17,61	2,67	100,00
Bengkulu	51,21	5,30	23,55	16,23	3,72	100,00
Lampung	52,03	7,44	18,15	19,86	2,52	100,00
Kep. Bangka Belitung	53,17	6,96	16,15	22,00	1,73	100,00
Kepulauan Riau	54,27	9,65	14,73	18,33	3,03	100,00
DKI Jakarta	56,73	9,57	21,44	11,04	1,22	100,00
Jawa Barat	46,99	12,45	18,89	17,68	3,99	100,00
Jawa Tengah	52,07	8,90	18,74	16,84	3,44	100,00
DI Yogyakarta	53,61	5,89	27,25	10,98	2,28	100,00
Jawa Timur	52,07	7,55	20,05	17,21	3,13	100,00
Banten	50,38	11,89	16,61	16,90	4,22	100,00
Bali	63,25	3,62	21,39	9,78	1,95	100,00
Nusa Tenggara Barat	50,44	7,58	19,68	18,59	3,71	100,00
Nusa Tenggara Timur	53,79	5,08	24,79	14,38	1,95	100,00
Kalimantan Barat	55,92	6,47	20,15	15,05	2,41	100,00
Kalimantan Tengah	54,29	4,95	20,26	18,14	2,36	100,00
Kalimantan Selatan	55,40	5,80	17,98	18,42	2,41	100,00
Kalimantan Timur	47,19	9,99	23,88	16,53	2,41	100,00
Sulawesi Utara	41,37	11,24	23,44	18,15	5,80	100,00
Sulawesi Tengah	52,52	5,68	17,29	21,70	2,82	100,00
Sulawesi Selatan	47,94	7,07	24,14	17,31	3,53	100,00
Sulawesi Tenggara	51,35	5,77	20,56	20,00	2,32	100,00
Gorontalo	48,48	5,20	22,30	20,52	3,50	100,00
Sulawesi Barat	58,88	2,62	18,25	18,06	2,19	100,00
Maluku	39,23	13,27	28,31	15,64	3,55	100,00
Maluku Utara	46,70	7,43	22,81	18,24	4,82	100,00
Papua Barat	51,30	6,29	24,20	15,84	2,37	100,00
Papua	67,49	5,52	16,18	8,15	2,66	100,00
Indonesia	51,03	8,99	20,25	16,57	3,17	100,00

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2014

Tabel 6.2.1 Persentase Angkatan Kerja Pemuda Menurut Provinsi dan Kegiatan Utama selama Seminggu Terakhir, 2014

Provinsi	Bekerja	Pengangguran	Perkotaan
			Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	78,59	21,41	100,00
Sumatera Utara	81,23	18,77	100,00
Sumatera Barat	78,72	21,28	100,00
Riau	80,00	20,00	100,00
Jambi	82,72	17,28	100,00
Sumatera Selatan	81,74	18,26	100,00
Bengkulu	89,22	10,78	100,00
Lampung	83,23	16,77	100,00
Kep. Bangka Belitung	86,71	13,29	100,00
Kepulauan Riau	84,77	15,23	100,00
DKI Jakarta	85,57	14,43	100,00
Jawa Barat	80,81	19,19	100,00
Jawa Tengah	84,85	15,15	100,00
DI Yogyakarta	90,01	9,99	100,00
Jawa Timur	86,18	13,82	100,00
Banten	83,17	16,83	100,00
Bali	94,42	5,58	100,00
Nusa Tenggara Barat	84,27	15,73	100,00
Nusa Tenggara Timur	81,86	18,14	100,00
Kalimantan Barat	85,72	14,28	100,00
Kalimantan Tengah	88,74	11,26	100,00
Kalimantan Selatan	88,00	12,00	100,00
Kalimantan Timur	82,12	17,88	100,00
Sulawesi Utara	74,44	25,56	100,00
Sulawesi Tengah	88,61	11,39	100,00
Sulawesi Selatan	81,66	18,34	100,00
Sulawesi Tenggara	83,86	16,14	100,00
Gorontalo	85,03	14,97	100,00
Sulawesi Barat	95,50	4,50	100,00
Maluku	70,86	29,14	100,00
Maluku Utara	82,53	17,47	100,00
Papua Barat	84,69	15,31	100,00
Papua	82,12	17,88	100,00
Indonesia	83,51	16,49	100,00

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2014

Tabel 6.2.2 Persentase Angkatan Kerja Pemuda Menurut Provinsi dan Kegiatan Utama selama Seminggu Terakhir, 2014

Provinsi	Bekerja	Pengangguran	Perdesaan
			Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	77,41	22,59	100,00
Sumatera Utara	87,59	12,41	100,00
Sumatera Barat	85,71	14,29	100,00
Riau	88,02	11,98	100,00
Jambi	89,91	10,09	100,00
Sumatera Selatan	91,27	8,73	100,00
Bengkulu	91,33	8,67	100,00
Lampung	88,95	11,05	100,00
Kep. Bangka Belitung	90,06	9,94	100,00
Kepulauan Riau	85,93	14,07	100,00
DKI Jakarta	0,00	0,00	-
Jawa Barat	74,97	25,03	100,00
Jawa Tengah	85,93	14,07	100,00
DI Yogyakarta	90,32	9,68	100,00
Jawa Timur	88,47	11,53	100,00
Banten	75,39	24,61	100,00
Bali	94,86	5,14	100,00
Nusa Tenggara Barat	89,02	10,98	100,00
Nusa Tenggara Timur	93,54	6,46	100,00
Kalimantan Barat	91,22	8,78	100,00
Kalimantan Tengah	92,94	7,06	100,00
Kalimantan Selatan	92,37	7,63	100,00
Kalimantan Timur	83,15	16,85	100,00
Sulawesi Utara	82,90	17,10	100,00
Sulawesi Tengah	90,85	9,15	100,00
Sulawesi Selatan	90,81	9,19	100,00
Sulawesi Tenggara	92,21	7,79	100,00
Gorontalo	93,38	6,62	100,00
Sulawesi Barat	95,81	4,19	100,00
Maluku	77,43	22,57	100,00
Maluku Utara	87,88	12,12	100,00
Papua Barat	90,53	9,47	100,00
Papua	95,04	4,96	100,00
Indonesia	86,69	13,31	100,00

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2014

Tabel 6.2.3 Persentase Angkatan Kerja Pemuda Menurut Provinsi dan Kegiatan Utama selama Seminggu Terakhir, 2014

Perkotaan+Perdesaan			
Provinsi	Bekerja	Pengangguran	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	77,74	22,26	100,00
Sumatera Utara	84,43	15,57	100,00
Sumatera Barat	82,73	17,27	100,00
Riau	84,77	15,23	100,00
Jambi	87,66	12,34	100,00
Sumatera Selatan	87,84	12,16	100,00
Bengkulu	90,62	9,38	100,00
Lampung	87,48	12,52	100,00
Kep. Bangka Belitung	88,43	11,57	100,00
Kepulauan Riau	84,91	15,09	100,00
DKI Jakarta	85,57	14,43	100,00
Jawa Barat	79,05	20,95	100,00
Jawa Tengah	85,40	14,60	100,00
DI Yogyakarta	90,10	9,90	100,00
Jawa Timur	87,34	12,66	100,00
Banten	80,90	19,10	100,00
Bali	94,59	5,41	100,00
Nusa Tenggara Barat	86,94	13,06	100,00
Nusa Tenggara Timur	91,38	8,62	100,00
Kalimantan Barat	89,63	10,37	100,00
Kalimantan Tengah	91,64	8,36	100,00
Kalimantan Selatan	90,53	9,47	100,00
Kalimantan Timur	82,52	17,48	100,00
Sulawesi Utara	78,64	21,36	100,00
Sulawesi Tengah	90,25	9,75	100,00
Sulawesi Selatan	87,14	12,86	100,00
Sulawesi Tenggara	89,90	10,10	100,00
Gorontalo	90,31	9,69	100,00
Sulawesi Barat	95,74	4,26	100,00
Maluku	74,72	25,28	100,00
Maluku Utara	86,28	13,72	100,00
Papua Barat	89,08	10,92	100,00
Papua	92,43	7,57	100,00
Indonesia	85,03	14,97	100,00

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2014

Tabel 6.3.1 Persentase Pemuda Bukan Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Kegiatan Utama selama Seminggu Terakhir, 2014

Provinsi	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Perkotaan
				Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	66,11	27,77	6,12	100,00
Sumatera Utara	58,59	34,86	6,56	100,00
Sumatera Barat	74,08	21,00	4,93	100,00
Riau	60,40	33,55	6,05	100,00
Jambi	60,90	32,32	6,79	100,00
Sumatera Selatan	58,73	35,74	5,54	100,00
Bengkulu	65,99	27,59	6,42	100,00
Lampung	66,00	30,20	3,80	100,00
Kep. Bangka Belitung	47,44	48,47	4,09	100,00
Kepulauan Riau	41,22	49,93	8,84	100,00
DKI Jakarta	63,62	32,77	3,61	100,00
Jawa Barat	53,69	37,97	8,33	100,00
Jawa Tengah	58,14	33,96	7,90	100,00
DI Yogyakarta	67,54	26,96	5,50	100,00
Jawa Timur	58,68	34,45	6,88	100,00
Banten	50,06	39,69	10,24	100,00
Bali	68,56	26,18	5,26	100,00
Nusa Tenggara Barat	52,98	38,56	8,46	100,00
Nusa Tenggara Timur	71,27	24,12	4,61	100,00
Kalimantan Barat	61,14	31,43	7,43	100,00
Kalimantan Tengah	58,67	36,29	5,04	100,00
Kalimantan Selatan	51,12	42,90	5,98	100,00
Kalimantan Timur	59,00	34,97	6,02	100,00
Sulawesi Utara	58,51	29,16	12,33	100,00
Sulawesi Tengah	60,59	32,36	7,04	100,00
Sulawesi Selatan	66,21	28,33	5,46	100,00
Sulawesi Tenggara	61,19	35,22	3,59	100,00
Gorontalo	61,33	30,24	8,43	100,00
Sulawesi Barat	49,33	47,82	2,85	100,00
Maluku	69,51	24,17	6,32	100,00
Maluku Utara	62,46	27,41	10,13	100,00
Papua Barat	62,38	28,00	9,61	100,00
Papua	67,18	26,11	6,71	100,00
Indonesia	58,40	34,57	7,03	100,00

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2014

Tabel 6.3.2 Persentase Pemuda Bukan Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Kegiatan Utama selama Seminggu Terakhir, 2014

Provinsi	Perdesaan			
	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	58,69	33,90	7,42	100,00
Sumatera Utara	53,34	38,14	8,52	100,00
Sumatera Barat	55,09	34,92	9,99	100,00
Riau	42,48	50,75	6,77	100,00
Jambi	39,15	54,52	6,33	100,00
Sumatera Selatan	39,17	52,90	7,94	100,00
Bengkulu	47,42	42,83	9,75	100,00
Lampung	35,40	57,31	7,29	100,00
Kep. Bangka Belitung	34,04	61,41	4,54	100,00
Kepulauan Riau	38,65	55,39	5,96	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-
Jawa Barat	32,23	54,88	12,88	100,00
Jawa Tengah	39,37	51,05	9,58	100,00
DI Yogyakarta	66,35	27,61	6,04	100,00
Jawa Timur	40,79	50,63	8,58	100,00
Banten	30,97	55,80	13,23	100,00
Bali	54,12	38,34	7,54	100,00
Nusa Tenggara Barat	41,78	49,06	9,17	100,00
Nusa Tenggara Timur	55,57	39,62	4,81	100,00
Kalimantan Barat	49,41	44,75	5,84	100,00
Kalimantan Tengah	43,43	50,25	6,32	100,00
Kalimantan Selatan	41,97	51,63	6,39	100,00
Kalimantan Timur	50,18	44,90	4,93	100,00
Sulawesi Utara	41,47	46,36	12,17	100,00
Sulawesi Tengah	33,74	59,61	6,64	100,00
Sulawesi Selatan	42,94	47,16	9,90	100,00
Sulawesi Tenggara	39,97	53,52	6,51	100,00
Gorontalo	40,54	52,41	7,05	100,00
Sulawesi Barat	46,74	46,60	6,66	100,00
Maluku	51,05	40,48	8,47	100,00
Maluku Utara	43,13	46,17	10,69	100,00
Papua Barat	54,57	41,73	3,70	100,00
Papua	53,37	33,92	12,71	100,00
Indonesia	41,97	49,10	8,94	100,00

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2014

Tabel 6.3.3 Persentase Pemuda Bukan Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Kegiatan Utama selama Seminggu Terakhir, 2014

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan			
	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	61,03	31,96	7,01	100,00
Sumatera Utara	56,29	36,29	7,42	100,00
Sumatera Barat	63,51	28,74	7,75	100,00
Riau	50,00	43,53	6,47	100,00
Jambi	45,51	48,02	6,47	100,00
Sumatera Selatan	46,90	46,12	6,99	100,00
Bengkulu	54,15	37,31	8,54	100,00
Lampung	44,77	49,01	6,22	100,00
Kep. Bangka Belitung	40,51	55,16	4,33	100,00
Kepulauan Riau	40,82	50,79	8,39	100,00
DKI Jakarta	63,62	32,77	3,61	100,00
Jawa Barat	46,56	43,59	9,85	100,00
Jawa Tengah	48,03	43,16	8,81	100,00
DI Yogyakarta	67,27	27,11	5,63	100,00
Jawa Timur	49,65	42,62	7,74	100,00
Banten	44,01	44,80	11,19	100,00
Bali	64,57	29,53	5,89	100,00
Nusa Tenggara Barat	46,87	44,29	8,85	100,00
Nusa Tenggara Timur	60,28	34,97	4,75	100,00
Kalimantan Barat	53,58	40,02	6,40	100,00
Kalimantan Tengah	49,71	44,50	5,79	100,00
Kalimantan Selatan	46,33	47,47	6,20	100,00
Kalimantan Timur	55,78	38,60	5,62	100,00
Sulawesi Utara	49,46	38,30	12,24	100,00
Sulawesi Tengah	41,35	51,90	6,76	100,00
Sulawesi Selatan	53,67	38,48	7,85	100,00
Sulawesi Tenggara	47,94	46,65	5,41	100,00
Gorontalo	48,14	44,31	7,56	100,00
Sulawesi Barat	47,40	46,91	5,69	100,00
Maluku	59,60	32,92	7,48	100,00
Maluku Utara	49,73	39,77	10,50	100,00
Papua Barat	57,06	37,36	5,58	100,00
Papua	59,96	30,20	9,85	100,00
Indonesia	50,63	41,43	7,93	100,00

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2014

Tabel 6.4.1 Persentase Pemuda yang Bekerja selama Seminggu Terakhir Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Provinsi	Tdk Prnah Sekolah	Tdk Tmt SD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SM/ Sederajat	PT	Perkotaan
							Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	0,09	2,64	6,95	13,59	51,44	25,28	100,00
Sumatera Utara	0,34	2,29	7,38	18,98	57,62	13,38	100,00
Sumatera Barat	0,13	3,87	8,91	16,79	49,46	20,84	100,00
Riau	0,09	2,85	11,08	14,85	55,00	16,13	100,00
Jambi	0,17	2,02	11,09	15,45	49,50	21,78	100,00
Sumatera Selatan	0,06	5,22	11,06	13,75	46,34	23,56	100,00
Bengkulu	0,09	2,02	7,81	18,45	46,23	25,39	100,00
Lampung	0,00	2,41	10,04	18,73	48,05	20,77	100,00
Kep. Bangka Belitung	0,12	8,29	10,69	17,01	44,56	19,33	100,00
Kepulauan Riau	0,10	1,30	5,87	20,59	63,26	8,88	100,00
DKI Jakarta	0,00	1,77	7,98	15,57	51,21	23,46	-
Jawa Barat	0,06	3,09	17,13	23,70	44,22	11,80	100,00
Jawa Tengah	0,07	3,44	12,46	26,04	46,04	11,95	100,00
DI Yogyakarta	0,00	1,51	3,11	17,32	53,67	24,39	100,00
Jawa Timur	0,29	2,04	11,98	21,14	51,12	13,44	100,00
Banten	0,62	1,98	9,91	21,08	51,50	14,90	100,00
Bali	0,15	2,19	6,79	16,08	50,94	23,86	100,00
Nusa Tenggara Barat	0,48	5,05	20,78	19,72	38,23	15,74	100,00
Nusa Tenggara Timur	0,94	4,49	12,29	16,10	43,84	22,35	100,00
Kalimantan Barat	0,26	7,81	11,46	14,25	46,44	19,78	100,00
Kalimantan Tengah	0,00	5,67	17,06	18,57	41,37	17,33	100,00
Kalimantan Selatan	0,33	5,42	19,60	17,75	39,93	16,97	100,00
Kalimantan Timur	0,11	4,58	9,12	17,59	53,93	14,67	100,00
Sulawesi Utara	0,00	3,19	7,49	14,35	58,55	16,42	100,00
Sulawesi Tengah	0,14	3,91	10,54	15,04	43,39	26,98	100,00
Sulawesi Selatan	0,81	4,97	13,24	14,01	42,80	24,17	100,00
Sulawesi Tenggara	0,27	4,73	8,64	13,06	45,53	27,77	100,00
Gorontalo	0,56	6,12	19,30	15,43	35,14	23,45	100,00
Sulawesi Barat	1,48	12,57	17,62	17,93	33,70	16,69	100,00
Maluku	0,11	2,60	5,38	12,82	48,82	30,26	100,00
Maluku Utara	0,43	0,94	5,67	16,68	52,69	23,59	100,00
Papua Barat	0,00	4,30	11,26	8,75	46,48	29,21	100,00
Papua	0,35	3,03	7,03	16,00	55,16	18,43	100,00
Indonesia	0,19	2,98	12,06	20,24	48,54	16,00	100,00

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2014

Tabel 6.4.2 Persentase Pemuda yang Bekerja selama Seminggu Terakhir Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Provinsi	Tdk Prnah Sekolah	Tdk Tmt SD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SM/ Sederajat	PT	Perdesaan
							Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	0,34	4,68	16,67	24,96	39,02	14,33	100,00
Sumatera Utara	1,31	5,64	20,36	31,76	35,25	5,68	100,00
Sumatera Barat	0,90	12,17	20,94	24,84	29,98	11,18	100,00
Riau	0,43	7,77	27,19	25,79	31,95	6,88	100,00
Jambi	0,30	6,30	29,75	27,22	29,99	6,45	100,00
Sumatera Selatan	0,27	9,77	32,38	27,66	25,11	4,81	100,00
Bengkulu	0,09	7,09	24,68	28,48	31,81	7,85	100,00
Lampung	0,34	5,35	24,04	39,02	26,37	4,86	100,00
Kep. Bangka Belitung	1,19	17,07	35,04	20,51	21,71	4,47	100,00
Kepulauan Riau	3,16	16,43	24,10	18,57	30,84	6,91	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	0,28	6,28	40,30	30,28	19,05	3,80	100,00
Jawa Tengah	0,36	4,08	27,59	38,63	24,29	5,06	100,00
DI Yogyakarta	0,00	1,44	7,49	36,01	48,61	6,44	100,00
Jawa Timur	0,95	6,41	28,93	30,08	28,45	5,19	100,00
Banten	0,78	9,42	38,37	27,34	19,86	4,24	100,00
Bali	1,14	6,43	19,65	24,97	37,95	9,86	100,00
Nusa Tenggara Barat	3,99	9,33	21,94	26,58	27,98	10,19	100,00
Nusa Tenggara Timur	2,38	16,56	36,51	19,31	18,22	7,03	100,00
Kalimantan Barat	1,48	12,22	37,95	23,78	20,49	4,08	100,00
Kalimantan Tengah	0,69	10,60	34,89	26,28	22,79	4,75	100,00
Kalimantan Selatan	0,02	9,56	35,75	27,04	23,45	4,17	100,00
Kalimantan Timur	0,54	10,88	25,64	21,39	34,33	7,23	100,00
Sulawesi Utara	0,06	10,35	22,19	25,13	33,69	8,58	100,00
Sulawesi Tengah	3,64	10,94	31,77	22,14	25,72	5,79	100,00
Sulawesi Selatan	2,49	10,11	28,50	24,65	24,12	10,13	100,00
Sulawesi Tenggara	0,60	8,69	23,81	25,86	30,96	10,07	100,00
Gorontalo	1,58	25,47	36,73	12,70	17,84	5,67	100,00
Sulawesi Barat	2,53	14,96	28,07	21,31	25,41	7,71	100,00
Maluku	0,96	7,43	31,80	20,36	30,11	9,34	100,00
Maluku Utara	1,46	6,63	24,17	24,83	33,84	9,07	100,00
Papua Barat	5,49	15,16	19,05	21,17	29,05	10,09	100,00
Papua	40,00	9,89	18,95	18,47	11,58	1,11	100,00
Indonesia	2,18	7,88	28,82	28,94	26,18	6,01	100,00

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2014

Tabel 6.4.3 Persentase Pemuda yang Bekerja selama Seminggu Terakhir Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan						Jumlah
	Tdk Prnah Sekolah	Tdk Tmt SD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SM/ Sederajat	PT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	0,27	4,10	13,91	21,74	42,54	17,44	100,00
Sumatera Utara	0,85	4,04	14,16	25,65	45,95	9,36	100,00
Sumatera Barat	0,59	8,81	16,07	21,58	37,87	15,09	100,00
Riau	0,30	5,88	21,02	21,60	40,77	10,42	100,00
Jambi	0,26	5,04	24,25	23,75	35,74	10,97	100,00
Sumatera Selatan	0,20	8,25	25,25	23,00	32,21	11,09	100,00
Bengkulu	0,09	5,43	19,14	25,18	36,55	13,61	100,00
Lampung	0,26	4,63	20,62	34,07	31,67	8,75	100,00
Kep. Bangka Belitung	0,68	12,88	23,41	18,84	32,63	11,57	100,00
Kepulauan Riau	0,46	3,11	8,04	20,35	59,39	8,65	100,00
DKI Jakarta	0,00	1,77	7,98	15,57	51,21	23,46	100,00
Jawa Barat	0,13	4,00	23,74	25,58	37,05	9,52	100,00
Jawa Tengah	0,21	3,77	20,21	32,49	34,90	8,42	100,00
DI Yogyakarta	0,00	1,49	4,40	22,85	52,17	19,08	100,00
Jawa Timur	0,63	4,28	20,68	25,72	39,49	9,21	100,00
Banten	0,66	4,00	17,64	22,78	42,91	12,01	100,00
Bali	0,53	3,82	11,75	19,51	45,93	18,46	100,00
Nusa Tenggara Barat	2,50	7,51	21,45	23,66	32,34	12,55	100,00
Nusa Tenggara Timur	2,14	14,55	32,49	18,78	22,47	9,57	100,00
Kalimantan Barat	1,14	11,00	30,61	21,14	27,68	8,43	100,00
Kalimantan Tengah	0,49	9,12	29,53	23,96	28,38	8,53	100,00
Kalimantan Selatan	0,15	7,87	29,14	23,24	30,20	9,41	100,00
Kalimantan Timur	0,28	7,05	15,59	19,07	46,25	11,75	100,00
Sulawesi Utara	0,03	6,93	15,17	19,98	45,56	12,32	100,00
Sulawesi Tengah	2,72	9,09	26,17	20,26	30,38	11,38	100,00
Sulawesi Selatan	1,86	8,18	22,77	20,66	31,14	15,40	100,00
Sulawesi Tenggara	0,52	7,67	19,90	22,56	34,72	14,64	100,00
Gorontalo	1,23	18,78	30,70	13,65	23,82	11,82	100,00
Sulawesi Barat	2,30	14,43	25,77	20,57	27,24	9,69	100,00
Maluku	0,63	5,54	21,48	17,41	37,42	17,52	100,00
Maluku Utara	1,16	5,00	18,86	22,49	39,25	13,23	100,00
Papua Barat	4,19	12,59	17,21	18,22	33,18	14,62	100,00
Papua	32,89	8,66	16,81	18,03	19,39	4,22	100,00
Indonesia	1,16	5,36	20,20	24,46	37,67	11,15	100,00

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2014

Tabel 6.5.1 Persentase Pemuda yang Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha, 2014

Provinsi	Pertanian	Perdagangan	Industri	Jasa	Transportasi dan Komunikasi	Konstruksi	Keuangan	Perkotaan		Jumlah
								Pertambangan dan Galian	Listrik, Gas, dan Air	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	14,26	27,87	6,09	34,30	5,88	7,54	3,11	0,75	0,20	100,00
Sumatera Utara	13,95	30,15	12,09	21,72	7,96	9,50	3,77	0,38	0,48	100,00
Sumatera Barat	15,15	31,98	8,49	25,21	6,43	7,38	3,83	1,11	0,41	100,00
Riau	10,29	34,23	8,78	24,61	6,09	8,15	4,52	2,77	0,56	100,00
Jambi	14,61	31,76	4,64	27,48	7,17	8,07	4,28	1,41	0,58	100,00
Sumatera Selatan	10,32	30,54	8,49	27,00	8,53	8,83	4,25	1,66	0,39	100,00
Bengkulu	12,88	28,56	2,94	36,41	5,29	7,94	3,45	1,60	0,91	100,00
Lampung	11,41	32,85	8,51	27,05	7,68	7,55	4,21	0,24	0,50	100,00
Kep. Bangka Belitung	9,87	29,90	7,74	23,97	4,48	8,40	3,74	11,54	0,36	100,00
Kepulauan Riau	3,27	31,07	27,67	17,55	7,57	7,16	3,97	1,24	0,48	100,00
DKI Jakarta	0,58	34,92	14,44	25,30	9,40	4,73	9,97	0,29	0,36	100,00
Jawa Barat	9,00	28,93	23,64	19,40	5,89	7,72	4,28	0,72	0,41	100,00
Jawa Tengah	12,76	29,68	24,11	17,94	4,53	7,29	3,07	0,38	0,24	100,00
DI Yogyakarta	10,94	31,73	15,45	24,34	4,32	7,64	4,91	0,53	0,15	100,00
Jawa Timur	16,14	28,46	18,99	19,80	5,20	7,09	3,69	0,36	0,29	100,00
Banten	3,08	25,49	30,65	20,39	7,58	5,21	6,53	0,49	0,58	100,00
Bali	8,98	35,76	15,70	21,41	4,45	8,53	4,55	0,19	0,43	100,00
Nusa Tenggara Barat	23,92	29,90	9,39	21,80	4,91	5,89	2,60	1,32	0,27	100,00
Nusa Tenggara Timur	10,04	26,17	5,11	37,07	9,17	6,37	4,68	0,76	0,62	100,00
Kalimantan Barat	14,03	30,69	7,46	26,25	5,15	10,32	4,88	0,47	0,74	100,00
Kalimantan Tengah	15,45	31,47	3,13	29,06	5,17	8,78	3,36	3,06	0,52	100,00
Kalimantan Selatan	7,31	36,71	7,47	26,23	7,68	7,19	3,35	3,56	0,50	100,00
Kalimantan Timur	10,47	27,93	7,53	23,56	6,12	7,42	4,69	12,00	0,28	100,00
Sulawesi Utara	14,12	26,98	7,10	25,72	10,97	9,16	4,64	0,88	0,43	100,00
Sulawesi Tengah	11,43	27,49	6,44	36,70	5,82	7,02	3,70	0,99	0,42	100,00
Sulawesi Selatan	9,38	31,85	6,32	31,44	6,40	8,48	5,02	0,60	0,52	100,00
Sulawesi Tenggara	7,28	29,40	4,88	35,25	7,04	8,92	3,65	3,02	0,56	100,00
Gorontalo	9,57	28,23	6,68	30,22	9,95	8,01	5,41	1,00	0,92	100,00
Sulawesi Barat	24,39	22,23	5,96	33,35	4,66	5,84	1,77	1,63	0,16	100,00
Maluku	14,67	21,50	2,59	36,16	14,25	6,34	3,76	0,39	0,35	100,00
Maluku Utara	9,98	29,15	4,34	32,67	12,75	7,05	2,52	1,07	0,48	100,00
Papua Barat	8,59	29,81	6,35	27,73	11,32	8,16	4,10	3,41	0,54	100,00
Papua	10,14	27,65	2,56	30,87	12,60	7,66	4,37	3,63	0,52	100,00
Indonesia	10,55	29,91	17,97	22,02	6,33	7,29	4,58	0,96	0,39	100,00

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2014

Tabel 6.5.2 Persentase Pemuda yang Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha, 2014

Provinsi	Perdesaan									Jumlah
	Pertanian	Perdagangan	Industri	Jasa	Transportasi dan Komunikasi	Konstruksi	Keuangan	Pertambangan dan Galian	Listrik, Gas, dan Air	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	55,28	13,33	4,20	16,28	2,97	6,14	0,75	0,87	0,19	100,00
Sumatera Utara	67,63	11,23	4,11	9,83	2,13	3,68	0,56	0,71	0,13	100,00
Sumatera Barat	51,00	16,55	5,87	15,62	3,22	4,03	1,14	2,33	0,23	100,00
Riau	64,84	13,09	5,13	8,92	2,28	3,15	0,87	1,33	0,39	100,00
Jambi	63,95	10,65	3,05	14,14	2,28	2,50	0,63	2,63	0,17	100,00
Sumatera Selatan	74,39	9,92	3,37	6,62	1,94	2,42	0,57	0,71	0,07	100,00
Bengkulu	66,80	12,31	3,18	10,23	2,30	3,43	0,69	0,93	0,13	100,00
Lampung	60,50	13,45	7,78	10,33	2,70	4,18	0,58	0,47	0,01	100,00
Kep. Bangka Belitung	51,22	11,77	4,16	5,50	1,37	2,17	0,76	22,98	0,07	100,00
Kepulauan Riau	48,04	14,59	7,54	13,42	2,99	8,24	1,75	3,16	0,27	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	41,21	19,12	13,72	12,63	3,85	7,72	0,85	0,78	0,12	100,00
Jawa Tengah	46,41	16,53	15,13	9,42	2,75	7,98	1,03	0,65	0,11	100,00
DI Yogyakarta	50,05	15,88	11,46	10,28	2,16	7,21	1,79	1,03	0,15	100,00
Jawa Timur	55,80	14,42	10,48	9,01	2,17	6,04	0,91	1,06	0,10	100,00
Banten	33,79	19,97	16,17	13,35	5,40	6,86	0,72	3,45	0,28	100,00
Bali	43,62	19,27	11,41	11,43	1,20	9,77	2,31	0,76	0,24	100,00
Nusa Tenggara Barat	56,59	13,39	8,53	11,11	3,20	4,39	0,55	2,21	0,02	100,00
Nusa Tenggara Timur	70,76	4,62	8,14	8,75	3,19	3,11	0,37	0,90	0,16	100,00
Kalimantan Barat	73,45	8,00	2,30	6,02	1,26	3,53	0,38	4,99	0,07	100,00
Kalimantan Tengah	70,43	8,14	2,11	7,99	1,16	2,28	0,35	7,43	0,12	100,00
Kalimantan Selatan	60,82	14,60	5,12	7,83	2,06	4,19	0,60	4,58	0,20	100,00
Kalimantan Timur	54,42	13,54	4,00	11,96	2,95	3,89	1,17	7,94	0,13	100,00
Sulawesi Utara	47,64	14,35	7,40	12,52	5,74	7,22	1,74	3,11	0,29	100,00
Sulawesi Tengah	59,19	12,27	4,43	14,35	2,70	5,10	0,54	1,32	0,11	100,00
Sulawesi Selatan	58,98	12,35	5,41	13,88	3,42	4,66	0,71	0,45	0,14	100,00
Sulawesi Tenggara	54,55	15,02	5,24	13,36	3,50	4,88	0,93	2,36	0,15	100,00
Gorontalo	54,28	12,16	9,56	11,44	4,10	4,27	0,81	3,31	0,07	100,00
Sulawesi Barat	65,93	11,58	5,70	10,09	1,85	3,64	0,68	0,47	0,08	100,00
Maluku	68,93	8,29	3,85	10,62	3,78	1,84	0,14	2,38	0,18	100,00
Maluku Utara	68,23	6,99	2,22	13,28	3,09	4,21	0,21	1,59	0,18	100,00
Papua Barat	57,92	11,79	3,74	14,18	3,92	4,25	1,91	1,85	0,43	100,00
Papua	85,72	2,11	0,60	9,11	0,74	0,88	0,18	0,65	0,02	100,00
Indonesia	56,12	13,88	8,91	10,46	2,70	5,46	0,82	1,53	0,13	100,00

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2014

Tabel 6.5.3 Persentase Pemuda yang Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha, 2014

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan									Jumlah
	Pertanian	Perdagangan	Industri	Jasa	Transportasi dan Komunikasi	Konstruksi	Keuangan	Pertambangan dan Galian	Listrik, Gas, dan Air	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	44,09	17,30	4,72	21,19	3,76	6,53	1,39	0,84	0,19	100,00
Sumatera Utara	42,52	20,08	7,84	15,39	4,85	6,40	2,06	0,55	0,29	100,00
Sumatera Barat	37,55	22,34	6,86	19,22	4,43	5,28	2,15	1,88	0,30	100,00
Riau	44,28	21,05	6,51	14,83	3,71	5,04	2,25	1,87	0,45	100,00
Jambi	49,38	16,89	3,52	18,08	3,72	4,15	1,71	2,27	0,29	100,00
Sumatera Selatan	53,37	16,69	5,05	13,30	4,10	4,52	1,78	1,02	0,17	100,00
Bengkulu	50,62	17,19	3,11	18,08	3,20	4,79	1,52	1,14	0,36	100,00
Lampung	48,87	18,04	7,96	14,29	3,88	4,98	1,44	0,41	0,12	100,00
Kep. Bangka Belitung	31,41	20,45	5,88	14,35	2,86	5,16	2,19	17,50	0,21	100,00
Kepulauan Riau	10,21	28,52	24,55	16,91	6,86	7,33	3,63	1,54	0,45	100,00
DKI Jakarta	0,58	34,92	14,44	25,30	9,40	4,73	9,97	0,29	0,36	100,00
Jawa Barat	19,87	25,62	20,29	17,12	5,20	7,72	3,12	0,74	0,31	100,00
Jawa Tengah	31,26	22,45	19,17	13,26	3,55	7,67	1,95	0,53	0,17	100,00
DI Yogyakarta	25,41	25,86	13,97	19,14	3,52	7,48	3,75	0,71	0,15	100,00
Jawa Timur	37,61	20,86	14,38	13,96	3,56	6,52	2,18	0,74	0,19	100,00
Banten	12,46	23,80	26,23	18,24	6,91	5,72	4,75	1,40	0,49	100,00
Bali	23,26	28,97	13,93	17,30	3,11	9,04	3,63	0,43	0,35	100,00
Nusa Tenggara Barat	43,13	20,20	8,89	15,51	3,90	5,01	1,40	1,84	0,12	100,00
Nusa Tenggara Timur	60,77	8,17	7,64	13,40	4,18	3,65	1,08	0,88	0,23	100,00
Kalimantan Barat	57,76	13,99	3,66	11,36	2,29	5,32	1,57	3,80	0,24	100,00
Kalimantan Tengah	53,11	15,49	2,43	14,62	2,42	4,32	1,30	6,06	0,25	100,00
Kalimantan Selatan	39,81	23,28	6,04	15,05	4,27	5,36	1,68	4,18	0,32	100,00
Kalimantan Timur	27,84	22,24	6,13	18,98	4,87	6,02	3,30	10,40	0,22	100,00
Sulawesi Utara	32,73	19,97	7,27	18,39	8,07	8,08	3,03	2,12	0,35	100,00
Sulawesi Tengah	47,68	15,94	4,92	19,73	3,45	5,56	1,30	1,24	0,18	100,00
Sulawesi Selatan	41,81	19,10	5,73	19,96	4,45	5,98	2,20	0,50	0,27	100,00
Sulawesi Tenggara	42,62	18,65	5,15	18,89	4,40	5,90	1,62	2,53	0,26	100,00
Gorontalo	39,24	17,56	8,59	17,76	6,07	5,53	2,36	2,53	0,36	100,00
Sulawesi Barat	56,84	13,91	5,75	15,18	2,46	4,12	0,92	0,72	0,09	100,00
Maluku	48,09	13,36	3,37	20,43	7,80	3,57	1,53	1,61	0,24	100,00
Maluku Utara	52,51	12,97	2,79	18,51	5,69	4,97	0,83	1,45	0,26	100,00
Papua Barat	45,28	16,41	4,41	17,65	5,82	5,25	2,47	2,25	0,46	100,00
Papua	70,59	7,22	,99	13,47	3,12	2,23	1,02	1,25	0,12	100,00
Indonesia	34,00	21,66	13,31	16,07	4,46	6,35	2,64	1,25	0,25	100,00

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2014

Tabel 6.6.1 Persentase Pemuda yang Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2014

Provinsi	Berusaha Sendiri	Berusaha Dibantu Buruh	Buruh/ Karyawan	Pekerja Bebas	Pekerja Keluarga	Perkotaan
						Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	9,55	5,56	64,64	7,65	12,60	100,00
Sumatera Utara	7,93	4,04	72,30	5,34	10,39	100,00
Sumatera Barat	11,61	6,78	63,12	7,33	11,16	100,00
Riau	10,15	4,24	71,53	4,46	9,63	100,00
Jambi	10,45	4,48	61,35	7,99	15,73	100,00
Sumatera Selatan	10,10	4,12	74,16	4,08	7,54	100,00
Bengkulu	9,20	4,70	67,95	8,51	9,64	100,00
Lampung	9,00	5,24	68,30	6,52	10,94	100,00
Kep. Bangka Belitung	9,73	5,13	67,51	6,83	10,81	100,00
Kepulauan Riau	6,38	3,34	84,44	1,74	4,10	100,00
DKI Jakarta	5,51	2,69	86,14	1,13	4,53	100,00
Jawa Barat	8,86	4,40	73,28	7,16	6,30	100,00
Jawa Tengah	9,59	6,18	66,98	8,06	9,19	100,00
DI Yogyakarta	5,51	5,25	80,61	3,00	5,63	100,00
Jawa Timur	7,97	4,86	68,67	8,65	9,84	100,00
Banten	6,19	2,18	83,87	3,60	4,16	100,00
Bali	8,47	4,29	77,32	2,89	7,03	100,00
Nusa Tenggara Barat	13,95	5,14	49,22	15,80	15,89	100,00
Nusa Tenggara Timur	17,75	6,32	60,99	3,30	11,65	100,00
Kalimantan Barat	8,60	4,85	73,55	2,45	10,55	100,00
Kalimantan Tengah	13,13	4,35	65,95	2,72	13,85	100,00
Kalimantan Selatan	9,72	6,03	65,73	6,83	11,69	100,00
Kalimantan Timur	7,71	5,31	73,28	3,64	10,06	100,00
Sulawesi Utara	11,72	2,73	74,06	5,95	5,55	100,00
Sulawesi Tengah	7,40	3,26	72,41	4,66	12,28	100,00
Sulawesi Selatan	8,64	3,52	71,00	4,96	11,88	100,00
Sulawesi Tenggara	14,54	4,43	64,25	5,29	11,49	100,00
Gorontalo	17,45	1,81	66,18	8,86	5,71	100,00
Sulawesi Barat	14,16	6,39	42,81	7,47	29,17	100,00
Maluku	24,53	3,27	59,01	4,37	8,83	100,00
Maluku Utara	20,27	3,73	54,60	3,46	17,94	100,00
Papua Barat	13,13	3,90	74,33	1,06	7,58	100,00
Papua	17,63	3,54	58,97	3,85	16,01	100,00
Indonesia	8,65	4,39	72,79	5,99	8,17	100,00

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2014

Tabel 6.6.2 Persentase Pemuda yang Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2014

Provinsi	Berusaha Sendiri	Berusaha Dibantu Buruh	Buruh/ Karyawan	Pekerja Bebas	Pekerja Keluarga	Perdesaan
						Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	12,65	7,46	42,03	9,38	28,48	100,00
Sumatera Utara	11,41	10,61	29,98	7,49	40,51	100,00
Sumatera Barat	17,88	11,31	37,84	12,31	20,66	100,00
Riau	17,25	6,08	42,31	11,78	22,59	100,00
Jambi	14,63	10,61	39,91	7,04	27,80	100,00
Sumatera Selatan	13,96	8,75	33,94	5,84	37,51	100,00
Bengkulu	14,70	12,68	31,85	7,63	33,14	100,00
Lampung	13,17	10,47	27,26	16,64	32,46	100,00
Kep. Bangka Belitung	16,45	9,85	45,29	11,48	16,93	100,00
Kepulauan Riau	25,44	1,90	49,93	11,71	11,02	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	15,50	9,35	40,08	21,37	13,70	100,00
Jawa Tengah	10,80	9,75	36,78	16,19	26,48	100,00
DI Yogyakarta	8,70	10,00	50,02	7,78	23,50	100,00
Jawa Timur	9,72	11,12	31,49	14,98	32,69	100,00
Banten	16,53	4,44	48,26	19,51	11,26	100,00
Bali	6,93	10,35	48,66	10,33	23,73	100,00
Nusa Tenggara Barat	15,04	9,13	21,16	24,21	30,46	100,00
Nusa Tenggara Timur	14,69	13,22	17,06	5,20	49,83	100,00
Kalimantan Barat	11,70	10,21	31,64	7,59	38,86	100,00
Kalimantan Tengah	16,51	8,99	43,14	3,71	27,65	100,00
Kalimantan Selatan	17,56	7,95	36,22	6,55	31,72	100,00
Kalimantan Timur	12,40	5,47	56,57	6,22	19,34	100,00
Sulawesi Utara	18,05	3,33	40,16	21,11	17,35	100,00
Sulawesi Tengah	14,26	8,81	29,02	11,90	36,01	100,00
Sulawesi Selatan	8,96	13,29	31,13	9,84	36,79	100,00
Sulawesi Tenggara	12,83	11,97	25,86	7,84	41,49	100,00
Gorontalo	15,80	10,97	29,27	20,00	23,96	100,00
Sulawesi Barat	8,66	12,25	30,40	9,88	38,80	100,00
Maluku	24,98	9,87	23,25	4,13	37,77	100,00
Maluku Utara	14,68	13,29	23,39	7,24	41,40	100,00
Papua Barat	14,06	14,06	30,20	5,35	36,33	100,00
Papua	9,67	18,28	6,05	1,25	64,75	100,00
Indonesia	12,80	10,19	33,65	12,59	30,77	100,00

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2014

Tabel 6.6.3 Persentase Pemuda yang Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2014

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan					
	Berusaha Sendiri	Berusaha Dibantu Buruh	Buruh/ Karyawan	Pekerja Bebas	Pekerja Keluarga	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	11,77	6,92	48,45	8,89	23,97	100,00
Sumatera Utara	9,75	7,47	50,21	6,46	26,11	100,00
Sumatera Barat	15,34	9,47	48,08	10,29	16,81	100,00
Riau	14,53	5,38	53,50	8,97	17,63	100,00
Jambi	13,40	8,80	46,23	7,32	24,24	100,00
Sumatera Selatan	12,67	7,20	47,40	5,25	27,48	100,00
Bengkulu	12,89	10,06	43,71	7,92	25,42	100,00
Lampung	12,15	9,20	37,28	14,17	27,20	100,00
Kep. Bangka Belitung	13,24	7,60	55,90	9,26	14,00	100,00
Kepulauan Riau	8,66	3,17	80,32	2,93	4,93	100,00
DKI Jakarta	5,51	2,69	86,14	1,13	4,53	100,00
Jawa Barat	10,75	5,81	63,81	11,21	8,41	100,00
Jawa Tengah	10,21	8,01	51,51	12,23	18,05	100,00
DI Yogyakarta	6,45	6,65	71,57	4,42	10,92	100,00
Jawa Timur	8,87	8,07	49,60	11,90	21,56	100,00
Banten	8,99	2,79	74,21	7,92	6,08	100,00
Bali	7,87	6,63	66,27	5,76	13,47	100,00
Nusa Tenggara Barat	14,58	7,44	33,09	20,63	24,26	100,00
Nusa Tenggara Timur	15,19	12,08	24,35	4,89	43,49	100,00
Kalimantan Barat	10,84	8,73	43,25	6,17	31,02	100,00
Kalimantan Tengah	15,50	7,59	50,00	3,41	23,50	100,00
Kalimantan Selatan	14,35	7,16	48,30	6,67	23,52	100,00
Kalimantan Timur	9,54	5,37	66,74	4,65	13,70	100,00
Sulawesi Utara	15,03	3,04	56,35	13,86	11,71	100,00
Sulawesi Tengah	12,45	7,35	40,46	9,99	29,75	100,00
Sulawesi Selatan	8,84	9,62	46,11	8,01	27,43	100,00
Sulawesi Tenggara	13,27	10,03	35,76	7,19	33,76	100,00
Gorontalo	16,37	7,80	42,03	16,15	17,65	100,00
Sulawesi Barat	9,88	10,96	33,14	9,35	36,68	100,00
Maluku	24,80	7,29	37,22	4,23	26,46	100,00
Maluku Utara	16,28	10,54	32,34	6,16	34,67	100,00
Papua Barat	13,84	11,65	40,65	4,34	29,52	100,00
Papua	11,09	15,63	15,54	1,72	56,01	100,00
Indonesia	10,67	7,21	53,77	9,20	19,15	100,00

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2014

Tabel 6.7.1 Persentase Pemuda yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja Seminggu Terakhir, 2014

Provinsi	Jumlah Jam Kerja (Jam)						Perkotaan
	≤7	8-14	15-21	22-28	29-35	>35	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	4,50	5,03	7,98	10,28	12,38	59,83	100,00
Sumatera Utara	1,79	2,33	4,20	4,90	6,47	80,30	100,00
Sumatera Barat	4,10	2,70	7,70	8,63	11,64	65,24	100,00
Riau	3,98	3,70	4,20	4,56	7,47	76,10	100,00
Jambi	2,06	2,84	4,07	8,63	8,93	73,48	100,00
Sumatera Selatan	2,77	2,62	4,18	4,52	7,64	78,27	100,00
Bengkulu	3,47	2,79	6,15	6,37	10,70	70,52	100,00
Lampung	1,77	2,16	5,70	5,66	8,16	76,55	100,00
Kep. Bangka Belitung	3,12	2,57	3,64	4,18	11,98	74,51	100,00
Kepulauan Riau	1,11	1,11	2,19	1,56	3,46	90,57	100,00
DKI Jakarta	,90	,96	1,37	2,31	3,14	91,31	100,00
Jawa Barat	1,53	1,78	3,10	3,52	5,92	84,14	100,00
Jawa Tengah	3,43	3,15	3,76	4,03	6,85	78,77	100,00
DI Yogyakarta	5,30	2,79	3,28	3,87	4,47	80,29	100,00
Jawa Timur	2,62	2,40	4,52	4,47	6,68	79,31	100,00
Banten	2,86	1,63	2,67	3,38	4,48	84,98	100,00
Bali	2,99	2,42	2,86	4,64	4,66	82,43	100,00
Nusa Tenggara Barat	5,10	6,46	8,70	8,82	9,55	61,36	100,00
Nusa Tenggara Timur	4,63	3,83	4,21	5,60	8,02	73,71	100,00
Kalimantan Barat	2,29	3,12	5,41	5,56	5,62	78,01	100,00
Kalimantan Tengah	4,18	4,19	6,21	7,93	12,38	65,11	100,00
Kalimantan Selatan	4,51	5,63	4,56	9,20	10,75	65,35	100,00
Kalimantan Timur	2,77	1,97	2,96	4,00	6,46	81,84	100,00
Sulawesi Utara	2,76	1,63	3,85	4,33	5,48	81,96	100,00
Sulawesi Tengah	4,66	5,18	4,91	4,87	11,24	69,15	100,00
Sulawesi Selatan	3,14	2,76	4,57	5,71	9,01	74,80	100,00
Sulawesi Tenggara	1,56	5,15	7,94	7,03	10,06	68,27	100,00
Gorontalo	3,25	2,88	3,58	4,84	7,15	78,30	100,00
Sulawesi Barat	9,25	12,03	10,74	9,58	14,69	43,72	100,00
Maluku	3,40	3,09	2,49	5,62	15,07	70,33	100,00
Maluku Utara	2,03	6,21	8,99	8,14	9,28	65,35	100,00
Papua Barat	3,93	2,11	,59	7,81	7,87	77,69	100,00
Papua	1,32	,96	3,63	3,68	8,39	82,01	100,00
Indonesia	2,49	2,39	3,71	4,30	6,43	80,69	100,00

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2014

Tabel 6.7.2 Persentase Pemuda yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja Seminggu Terakhir, 2014

Provinsi	Jumlah Jam Kerja (Jam)						Perdesaan
	≤7	8-14	15-21	22-28	29-35	>35	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	4,78	9,24	16,88	13,27	16,34	39,48	100,00
Sumatera Utara	3,92	7,79	12,20	12,63	14,14	49,32	100,00
Sumatera Barat	6,55	9,08	10,27	12,88	15,16	46,06	100,00
Riau	4,41	5,02	9,84	12,99	17,15	50,59	100,00
Jambi	3,77	7,11	15,16	16,41	16,96	40,60	100,00
Sumatera Selatan	3,21	4,15	17,02	18,68	17,45	39,50	100,00
Bengkulu	4,48	6,47	11,56	12,88	15,79	48,83	100,00
Lampung	3,64	5,51	13,06	14,39	12,42	50,98	100,00
Kep. Bangka Belitung	4,41	2,70	11,29	11,05	12,68	57,87	100,00
Kepulauan Riau	3,78	4,69	10,88	10,41	11,93	58,30	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	4,28	3,52	8,21	9,36	11,47	63,15	100,00
Jawa Tengah	4,94	5,99	7,67	8,64	10,60	62,16	100,00
DI Yogyakarta	4,79	8,84	5,67	4,26	10,24	66,19	100,00
Jawa Timur	3,57	8,17	10,87	11,08	12,75	53,56	100,00
Banten	1,98	3,26	8,08	5,84	12,09	68,76	100,00
Bali	3,11	7,31	5,29	8,29	7,48	68,52	100,00
Nusa Tenggara Barat	4,55	10,65	13,94	13,43	14,32	43,11	100,00
Nusa Tenggara Timur	6,54	11,67	12,94	15,37	16,60	36,88	100,00
Kalimantan Barat	2,21	5,72	12,87	14,68	13,68	50,84	100,00
Kalimantan Tengah	3,49	4,14	10,81	10,43	13,75	57,38	100,00
Kalimantan Selatan	5,12	5,29	12,38	13,14	13,11	50,96	100,00
Kalimantan Timur	1,18	3,45	8,00	9,51	13,72	64,14	100,00
Sulawesi Utara	3,38	3,32	7,08	8,80	14,89	62,52	100,00
Sulawesi Tengah	6,48	7,81	9,98	13,91	16,55	45,27	100,00
Sulawesi Selatan	5,81	9,44	11,29	11,79	13,35	48,33	100,00
Sulawesi Tenggara	7,68	10,36	13,41	11,28	12,45	44,83	100,00
Gorontalo	5,31	4,65	11,74	7,75	13,81	56,75	100,00
Sulawesi Barat	8,70	13,62	15,24	11,58	15,57	35,29	100,00
Maluku	3,16	5,98	14,02	11,48	19,01	46,36	100,00
Maluku Utara	5,78	7,30	11,65	14,19	19,93	41,16	100,00
Papua Barat	4,24	6,28	11,32	13,97	14,08	50,09	100,00
Papua	,54	4,39	12,77	17,32	22,86	42,12	100,00
Indonesia	4,20	6,63	11,03	11,88	13,71	52,54	100,00

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2014

Tabel 6.7.3 Persentase Pemuda yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja Seminggu Terakhir, 2014

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan						Jumlah
	Jumlah Jam Kerja (Jam)						
	≤7	8-14	15-21	22-28	29-35	>35	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	4,70	8,05	14,35	12,43	15,22	45,26	100,00
Sumatera Utara	2,90	5,18	8,38	8,94	10,47	64,13	100,00
Sumatera Barat	5,56	6,49	9,23	11,16	13,73	53,83	100,00
Riau	4,24	4,51	7,68	9,76	13,44	60,36	100,00
Jambi	3,26	5,85	11,89	14,11	14,59	50,29	100,00
Sumatera Selatan	3,06	3,64	12,73	13,94	14,17	52,47	100,00
Bengkulu	4,15	5,26	9,78	10,74	14,12	55,96	100,00
Lampung	3,18	4,70	11,27	12,25	11,38	57,22	100,00
Kep. Bangka Belitung	3,79	2,64	7,63	7,77	12,34	65,82	100,00
Kepulauan Riau	1,43	1,53	3,23	2,62	4,48	86,72	100,00
DKI Jakarta	0,90	,96	1,37	2,31	3,14	91,31	100,00
Jawa Barat	2,32	2,28	4,56	5,18	7,50	78,16	100,00
Jawa Tengah	4,21	4,61	5,77	6,39	8,77	70,26	100,00
DI Yogyakarta	5,15	4,58	3,99	3,99	6,18	76,12	100,00
Jawa Timur	3,11	5,36	7,78	7,86	9,79	66,10	100,00
Banten	2,62	2,07	4,14	4,04	6,55	80,57	100,00
Bali	3,04	4,31	3,80	6,05	5,75	77,07	100,00
Nusa Tenggara Barat	4,79	8,87	11,71	11,47	12,29	50,87	100,00
Nusa Tenggara Timur	6,23	10,37	11,49	13,75	15,18	42,99	100,00
Kalimantan Barat	2,23	5,00	10,80	12,15	11,45	58,37	100,00
Kalimantan Tengah	3,70	4,16	9,42	9,68	13,34	59,70	100,00
Kalimantan Selatan	4,87	5,43	9,18	11,52	12,14	56,85	100,00
Kalimantan Timur	2,15	2,55	4,94	6,16	9,30	74,91	100,00
Sulawesi Utara	3,08	2,51	5,53	6,67	10,39	71,80	100,00
Sulawesi Tengah	6,00	7,12	8,64	11,53	15,15	51,57	100,00
Sulawesi Selatan	4,81	6,93	8,77	9,51	11,72	58,27	100,00
Sulawesi Tenggara	6,10	9,01	12,00	10,18	11,83	50,87	100,00
Gorontalo	4,60	4,04	8,91	6,75	11,51	64,20	100,00
Sulawesi Barat	8,82	13,27	14,24	11,14	15,38	37,15	100,00
Maluku	3,25	4,85	9,51	9,19	17,47	55,73	100,00
Maluku Utara	4,71	6,99	10,88	12,45	16,88	48,10	100,00
Papua Barat	4,17	5,30	8,78	12,51	12,61	56,63	100,00
Papua	0,68	3,77	11,13	14,88	20,26	49,28	100,00
Indonesia	3,32	4,45	7,27	7,98	9,97	67,01	100,00

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2014

Tabel 6.8.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Pemuda Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Perkotaan		
	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	L+P
	(1)	(2)	(3)
Aceh	18,58	26,21	21,41
Sumatera Utara	15,35	24,14	18,77
Sumatera Barat	21,49	20,99	21,28
Riau	19,63	20,61	20,00
Jambi	14,42	21,84	17,28
Sumatera Selatan	19,60	16,11	18,26
Bengkulu	9,23	13,19	10,78
Lampung	15,44	19,07	16,77
Kep. Bangka Belitung	11,64	16,13	13,29
Kepulauan Riau	14,13	16,72	15,23
DKI Jakarta	15,23	13,31	14,43
Jawa Barat	19,62	18,49	19,19
Jawa Tengah	15,66	14,45	15,15
DI Yogyakarta	11,12	8,51	9,99
Jawa Timur	13,71	13,99	13,82
Banten	18,03	14,97	16,83
Bali	7,35	3,45	5,58
Nusa Tenggara Barat	18,88	11,72	15,73
Nusa Tenggara Timur	18,87	17,01	18,14
Kalimantan Barat	15,18	12,90	14,28
Kalimantan Tengah	11,56	10,70	11,26
Kalimantan Selatan	13,31	9,68	12,00
Kalimantan Timur	15,73	22,27	17,88
Sulawesi Utara	24,02	28,11	25,56
Sulawesi Tengah	12,34	10,09	11,39
Sulawesi Selatan	15,31	22,57	18,34
Sulawesi Tenggara	13,47	20,21	16,14
Gorontalo	15,35	14,42	14,97
Sulawesi Barat	3,48	5,98	4,50
Maluku	27,33	31,75	29,14
Maluku Utara	16,49	18,89	17,47
Papua Barat	16,80	12,51	15,31
Papua	16,76	19,94	17,88
Indonesia	16,57	16,36	16,49

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2014

Tabel 6.8.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Pemuda Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	Perdesaan
			L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	19,75	27,72	22,59
Sumatera Utara	11,06	14,51	12,41
Sumatera Barat	11,64	18,86	14,29
Riau	9,05	18,87	11,98
Jambi	7,77	15,35	10,09
Sumatera Selatan	9,02	8,17	8,73
Bengkulu	7,17	11,55	8,67
Lampung	8,62	16,60	11,05
Kep. Bangka Belitung	7,39	16,62	9,94
Kepulauan Riau	11,38	19,65	14,07
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	23,80	27,63	25,03
Jawa Tengah	14,34	13,61	14,07
DI Yogyakarta	10,48	8,63	9,68
Jawa Timur	11,50	11,59	11,53
Banten	24,65	24,53	24,61
Bali	5,50	4,70	5,14
Nusa Tenggara Barat	12,78	8,45	10,98
Nusa Tenggara Timur	5,95	7,17	6,46
Kalimantan Barat	7,58	10,96	8,78
Kalimantan Tengah	6,58	8,05	7,06
Kalimantan Selatan	6,59	9,40	7,63
Kalimantan Timur	14,58	22,10	16,85
Sulawesi Utara	11,76	31,39	17,10
Sulawesi Tengah	6,85	14,57	9,15
Sulawesi Selatan	7,73	11,94	9,19
Sulawesi Tenggara	7,46	8,37	7,79
Gorontalo	5,19	10,01	6,62
Sulawesi Barat	2,86	6,43	4,19
Maluku	18,93	29,19	22,57
Maluku Utara	9,57	16,98	12,12
Papua Barat	7,75	12,37	9,47
Papua	6,10	3,75	4,96
Indonesia	12,55	14,69	13,31

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2014

Tabel 6.8.3 Tingkat Pengangguran Terbuka Pemuda Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Perkotaan+Perdesaan			
Provinsi	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	19,43	27,29	22,26
Sumatera Utara	13,19	19,28	15,57
Sumatera Barat	15,66	19,83	17,27
Riau	13,02	19,68	15,23
Jambi	9,68	17,71	12,34
Sumatera Selatan	12,68	11,22	12,16
Bengkulu	7,82	12,15	9,38
Lampung	10,25	17,32	12,52
Kep. Bangka Belitung	9,32	16,35	11,57
Kepulauan Riau	13,76	16,99	15,09
DKI Jakarta	15,23	13,31	14,43
Jawa Barat	20,96	20,93	20,95
Jawa Tengah	14,96	14,05	14,60
DI Yogyakarta	10,94	8,54	9,90
Jawa Timur	12,56	12,83	12,66
Banten	20,07	17,49	19,10
Bali	6,65	3,93	5,41
Nusa Tenggara Barat	15,39	9,93	13,06
Nusa Tenggara Timur	8,44	8,89	8,62
Kalimantan Barat	9,68	11,57	10,37
Kalimantan Tengah	8,09	8,90	8,36
Kalimantan Selatan	9,44	9,52	9,47
Kalimantan Timur	15,27	22,21	17,48
Sulawesi Utara	17,48	29,47	21,36
Sulawesi Tengah	8,12	13,04	9,75
Sulawesi Selatan	10,56	16,69	12,86
Sulawesi Tenggara	9,07	11,81	10,10
Gorontalo	8,52	11,97	9,69
Sulawesi Barat	2,99	6,32	4,26
Maluku	22,21	30,34	25,28
Maluku Utara	11,49	17,62	13,72
Papua Barat	10,07	12,40	10,92
Papua	8,67	6,27	7,57
Indonesia	14,59	15,61	14,97

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2014

Tabel 6.9.1 Persentase Pemuda yang Bekerja dan Berusaha atau Dibayar Menurut Provinsi dan Pendapatan/Upah/Gaji Bersih Sebulan, 2014

Provinsi	Pendapatan/Upah/Gaji Bersih Sebulan (ribu rupiah)					Perkotaan
	<500	500–999	1 000–1 499	1 500–2 499	>2 500	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	12,82	30,54	16,96	26,35	13,33	100,00
Sumatera Utara	9,60	24,36	30,01	28,61	7,43	100,00
Sumatera Barat	10,79	28,53	26,98	23,58	10,13	100,00
Riau	11,03	20,11	27,06	25,28	16,52	100,00
Jambi	6,41	26,50	23,06	28,92	15,12	100,00
Sumatera Selatan	8,19	21,91	21,57	34,30	14,03	100,00
Bengkulu	15,61	23,20	29,56	21,14	10,49	100,00
Lampung	14,99	31,49	22,72	20,63	10,17	100,00
Kep. Bangka Belitung	4,91	17,16	25,89	31,81	20,24	100,00
Kepulauan Riau	0,40	7,16	10,26	45,29	36,89	100,00
DKI Jakarta	3,40	11,07	11,52	43,35	30,66	100,00
Jawa Barat	14,47	23,62	21,25	27,83	12,83	100,00
Jawa Tengah	15,13	40,00	29,86	10,74	4,26	100,00
DI Yogyakarta	12,40	39,83	22,86	14,02	10,89	100,00
Jawa Timur	19,51	29,49	20,39	23,99	6,63	100,00
Banten	8,92	13,57	14,35	46,70	16,46	100,00
Bali	6,98	17,05	27,87	32,97	15,12	100,00
Nusa Tenggara Barat	20,21	42,73	16,81	14,74	5,51	100,00
Nusa Tenggara Timur	20,87	34,02	18,07	14,88	12,17	100,00
Kalimantan Barat	10,13	21,45	28,15	26,32	13,94	100,00
Kalimantan Tengah	12,53	24,77	18,25	28,12	16,33	100,00
Kalimantan Selatan	18,49	25,61	22,74	19,16	14,00	100,00
Kalimantan Timur	5,72	13,24	18,70	29,58	32,76	100,00
Sulawesi Utara	4,34	17,15	14,53	48,93	15,05	100,00
Sulawesi Tengah	5,61	39,00	17,91	23,53	13,95	100,00
Sulawesi Selatan	25,47	21,81	22,25	17,20	13,26	100,00
Sulawesi Tenggara	18,82	29,94	18,92	21,32	11,01	100,00
Gorontalo	30,67	38,42	9,09	16,06	5,75	100,00
Sulawesi Barat	44,24	29,66	7,69	8,64	9,76	100,00
Maluku	8,60	25,25	18,66	25,89	21,60	100,00
Maluku Utara	14,54	21,48	13,28	36,76	13,94	100,00
Papua Barat	1,45	13,59	15,98	45,85	23,14	100,00
Papua	3,48	10,17	12,99	36,84	36,52	100,00
Indonesia	12,70	24,43	21,03	28,03	13,81	100,00

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2014

Tabel 6.9.2 Persentase Pemuda yang Bekerja dan Berusaha atau Dibayar Menurut Provinsi dan Pendapatan/Upah/Gaji Bersih Sebulan, 2014

Provinsi	Pendapatan/Upah/Gaji Bersih Sebulan (ribu rupiah)					Perdesaan
	<500	500-999	1 000-1 499	1 500-2 499	>2 500	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	22,31	37,37	19,11	16,58	4,64	100,00
Sumatera Utara	16,18	33,27	23,09	24,48	2,98	100,00
Sumatera Barat	23,22	35,63	17,19	18,12	5,85	100,00
Riau	7,53	31,42	26,28	28,12	6,65	100,00
Jambi	17,13	31,39	24,45	20,65	6,39	100,00
Sumatera Selatan	18,13	38,29	21,30	17,31	4,98	100,00
Bengkulu	24,34	33,30	17,21	18,28	6,87	100,00
Lampung	29,83	40,04	16,01	11,50	2,62	100,00
Kep. Bangka Belitung	7,67	17,50	29,61	34,16	11,05	100,00
Kepulauan Riau	16,91	18,23	21,55	29,52	13,80	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	18,73	36,88	22,93	17,25	4,21	100,00
Jawa Tengah	19,92	45,50	23,79	8,80	1,99	100,00
DI Yogyakarta	15,68	43,47	23,58	9,97	7,30	100,00
Jawa Timur	23,82	38,08	20,61	14,94	2,55	100,00
Banten	15,81	33,80	15,00	31,73	3,66	100,00
Bali	16,30	32,94	28,53	18,53	3,70	100,00
Nusa Tenggara Barat	38,02	41,36	12,77	5,36	2,49	100,00
Nusa Tenggara Timur	40,16	42,29	7,16	6,78	3,61	100,00
Kalimantan Barat	11,98	29,71	21,44	28,53	8,34	100,00
Kalimantan Tengah	10,03	19,44	17,60	35,77	17,16	100,00
Kalimantan Selatan	8,64	25,51	19,99	33,55	12,31	100,00
Kalimantan Timur	10,06	17,07	23,35	24,95	24,58	100,00
Sulawesi Utara	8,40	30,27	26,51	25,95	8,87	100,00
Sulawesi Tengah	22,96	41,37	18,45	13,15	4,07	100,00
Sulawesi Selatan	35,83	26,59	17,68	14,85	5,05	100,00
Sulawesi Tenggara	27,13	30,04	16,63	17,13	9,07	100,00
Gorontalo	19,51	47,20	19,30	11,33	2,66	100,00
Sulawesi Barat	36,86	28,32	16,68	10,31	7,82	100,00
Maluku	16,85	35,92	15,65	21,72	9,86	100,00
Maluku Utara	8,85	43,80	20,17	18,24	8,94	100,00
Papua Barat	3,58	18,47	18,52	41,23	18,21	100,00
Papua	9,21	27,70	18,18	30,00	14,90	100,00
Indonesia	20,37	36,17	20,71	17,73	5,01	100,00

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2014

Tabel 6.9.3 Persentase Pemuda yang Bekerja dan Berusaha atau Dibayar Menurut Provinsi dan Pendapatan/Upah/Gaji Bersih Sebulan, 2014

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan					Jumlah
	Pendapatan/Upah/Gaji Bersih Sebulan (ribu rupiah)					
	<500	500-999	1 000-1 499	1 500-2 499	>2 500	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	19,12	35,07	18,39	19,86	7,56	100,00
Sumatera Utara	12,13	27,78	27,35	27,02	5,72	100,00
Sumatera Barat	17,61	32,42	21,60	20,59	7,78	100,00
Riau	9,03	26,58	26,62	26,90	10,88	100,00
Jambi	13,36	29,67	23,96	23,55	9,45	100,00
Sumatera Selatan	13,63	30,87	21,42	25,00	9,08	100,00
Bengkulu	20,53	28,90	22,60	19,52	8,45	100,00
Lampung	25,05	37,29	18,17	14,44	5,05	100,00
Kep. Bangka Belitung	6,26	17,33	27,70	32,96	15,76	100,00
Kepulauan Riau	2,27	8,41	11,54	43,50	34,28	100,00
DKI Jakarta	3,40	11,07	11,52	43,35	30,66	100,00
Jawa Barat	15,56	27,01	21,68	25,13	10,63	100,00
Jawa Tengah	17,25	42,43	27,18	9,88	3,26	100,00
DI Yogyakarta	13,18	40,70	23,03	13,05	10,04	100,00
Jawa Timur	21,27	33,01	20,48	20,29	4,96	100,00
Banten	10,65	18,65	14,52	42,94	13,24	100,00
Bali	9,95	22,11	28,08	28,37	11,49	100,00
Nusa Tenggara Barat	29,26	42,04	14,76	9,97	3,97	100,00
Nusa Tenggara Timur	34,25	39,76	10,50	9,26	6,23	100,00
Kalimantan Barat	11,26	26,50	24,05	27,67	10,52	100,00
Kalimantan Tengah	10,92	21,34	17,83	33,04	16,87	100,00
Kalimantan Selatan	13,42	25,56	21,32	26,56	13,13	100,00
Kalimantan Timur	7,30	14,63	20,39	27,90	29,78	100,00
Sulawesi Utara	6,32	23,53	20,35	37,76	12,05	100,00
Sulawesi Tengah	16,82	40,53	18,26	16,83	7,57	100,00
Sulawesi Selatan	30,60	24,18	19,99	16,04	9,20	100,00
Sulawesi Tenggara	23,92	30,00	17,51	18,74	9,82	100,00
Gorontalo	24,30	43,43	14,92	13,36	3,99	100,00
Sulawesi Barat	38,87	28,69	14,24	9,86	8,35	100,00
Maluku	12,57	30,39	17,21	23,88	15,95	100,00
Maluku Utara	11,19	34,65	17,34	25,84	10,99	100,00
Papua Barat	2,82	16,73	17,61	42,87	19,97	100,00
Papua	6,30	18,78	15,54	33,48	25,90	100,00
Indonesia	15,69	29,00	20,91	24,02	10,38	100,00

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2014

**PENGHITUNGAN
TINGKAT
KESALAHAN
PENARIKAN SAMPEL**

**PENGHITUNGAN
TINGKAT KESALAHAN PENARIKAN SAMPEL
(*SAMPLING ERROR ESTIMATES*)**

Nilai-nilai indikator yang diestimasi dari hasil Susenas 2014 dipengaruhi oleh dua jenis kesalahan (*error*), yaitu *non sampling error* dan *sampling error*. *Non sampling error* adalah kesalahan yang terjadi ketika proses pengumpulan maupun pengolahan data. Misalnya kesalahan dalam menginterpretasikan pertanyaan-pertanyaan di kuesioner, maupun kesalahan dalam melakukan *input* data ke komputer.

Sampling error adalah kesalahan yang terjadi sebagai akibat dari penggunaan teknik sampling tertentu dalam suatu survei. Secara statistik, besarnya *sampling error* hasil Susenas 2014 ditunjukkan oleh nilai *standard error* (galat baku) dari suatu nilai indikator (rata-rata, persentase, atau jumlah). Untuk mengukur presisi suatu indikator digunakan nilai *relative standard error* (RSE), yaitu perbandingan nilai *standard error* terhadap estimasi indikatornya, yang dinyatakan dalam persen. *Standard error* juga digunakan untuk menghitung besaran selang kepercayaan (*confidence interval*), yaitu interval nilai yang dapat menggambarkan populasi. Dengan tingkat kepercayaan 95 persen, dapat disajikan selang kepercayaan (*interval estimation*) dengan batas bawah sebesar nilai estimasi dikurangi dua *standard error* dan batas atas sebesar nilai estimasi ditambah dua *standard error*. Semakin rendah nilai RSE atau semakin pendek selang kepercayaan menunjukkan nilai indikator yang semakin baik.

Penghitungan tingkat *sampling error* untuk indikator-indikator yang disajikan dalam publikasi Statistik Pemuda Indonesia 2014 menggunakan software STATA 12.0 for Windows. Indikator kepemudaan yang dihitung *sampling error*nya meliputi indikator pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. *Sampling error* disajikan dalam 11 tabel lampiran menurut provinsi dan tipe daerah (perkotaan dan perdesaan). Tingkat *sampling error* yang disajikan meliputi nilai-nilai estimasi dari *standard error*, RSE, selang kepercayaan 95 persen, dan *design effect* (*deff*).

Tabel 7.1 Sampling Error Persentase Pemuda Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014

Provinsi	Perkotaan							Perdesaan						Perkotaan + Perdesaan							
	Esti- masi	Stan- dard Error	RSE	Selang Kepercayaan		Efek Ran- cangan	Jumlah Sampel	Esti- masi	Stan- dard Error	RSE	Selang Kepercayaan		Efek Ran- cangan	Jumlah Sampel	Esti- masi	Stan- dard Error	RSE	Selang Kepercayaan		Efek Ran- cangan	Jumlah Sampel
				Batas Bawah	Batas Atas						Batas Bawah	Batas Atas						Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Aceh	28,53	0,77	2,70	27,02	30,04	1,76	12 590	26,23	0,33	1,25	25,58	26,87	0,85	30 512	26,88	0,32	1,19	26,25	27,51	1,12	43 102
Sumatera Utara	26,46	0,49	1,85	25,50	27,42	3,63	32 661	23,37	0,33	1,39	22,73	24,01	1,80	40 933	24,89	0,30	1,19	24,32	25,47	2,79	73 594
Sumatera Barat	25,10	0,66	2,62	23,80	26,39	2,02	15 984	22,44	0,38	1,71	21,69	23,20	1,15	23 193	23,48	0,35	1,48	22,80	24,16	1,51	39 177
Riau	28,05	0,70	2,51	26,67	29,43	2,60	10 731	26,03	0,43	1,64	25,19	26,86	1,55	17 960	26,82	0,38	1,41	26,07	27,56	1,98	28 691
Jambi	24,88	0,76	3,06	23,39	26,37	1,38	6 407	26,00	0,40	1,52	25,23	26,78	0,83	16 108	25,66	0,36	1,41	24,95	26,37	0,99	22 515
Sumatera Selatan	27,84	0,67	2,39	26,53	29,15	2,75	11 812	25,44	0,35	1,37	24,76	26,12	1,41	24 136	26,30	0,33	1,26	25,65	26,95	1,95	35 948
Bengkulu	28,04	0,86	3,05	26,36	29,72	0,91	5 676	25,01	0,46	1,85	24,10	25,92	0,63	13 024	25,96	0,42	1,62	25,14	26,78	0,73	18 700
Lampung	25,10	0,65	2,59	23,83	26,37	2,05	9 009	23,99	0,32	1,35	23,35	24,62	1,50	24 861	24,28	0,29	1,21	23,70	24,85	1,65	33 870
Kep. Bangka Belitung	26,16	0,69	2,64	24,80	27,51	0,71	6 361	26,59	0,65	2,44	25,32	27,86	0,64	6 443	26,38	0,47	1,79	25,45	27,30	0,68	12 804
Kepulauan Riau	25,83	1,12	4,32	23,64	28,01	4,54	9 278	23,64	1,25	5,29	21,19	26,10	1,18	3 358	25,47	0,96	3,76	23,60	27,35	4,03	12 636
DKI Jakarta	28,39	0,45	1,59	27,51	29,28	4,39	18 171	-	-	-	-	-	-	-	28,39	0,45	1,59	27,51	29,28	4,39	18 171
Jawa Barat	26,19	0,27	1,01	25,67	26,71	4,85	52 272	23,09	0,34	1,49	22,42	23,77	4,49	26 850	25,15	0,21	0,84	24,74	25,56	4,73	79 122
Jawa Tengah	23,64	0,26	1,10	23,13	24,15	2,51	50 506	21,05	0,24	1,13	20,59	21,52	2,71	43 944	22,24	0,18	0,79	21,89	22,58	2,61	94 450
DI Yogyakarta	26,80	0,84	3,13	25,16	28,44	3,78	7 815	19,84	0,86	4,36	18,14	21,53	2,56	3 961	24,43	0,61	2,50	23,23	25,62	3,22	11 776
Jawa Timur	23,22	0,26	1,11	22,72	23,73	2,97	54 887	21,53	0,23	1,08	21,07	21,98	2,81	47 953	22,34	0,17	0,77	22,00	22,68	2,89	102 840
Banten	27,96	0,48	1,73	27,02	28,91	4,03	17 521	26,19	0,63	2,42	24,95	27,44	3,36	8 971	27,40	0,39	1,41	26,65	28,16	3,81	26 492
Bali	24,75	0,60	2,42	23,58	25,92	2,09	12 678	19,95	0,66	3,29	18,66	21,24	1,91	8 097	22,86	0,45	1,95	21,99	23,74	2,02	20 775
Nusa Tenggara Barat	26,41	0,65	2,45	25,14	27,68	1,88	9 409	24,47	0,50	2,03	23,50	25,44	1,61	12 666	25,28	0,39	1,56	24,51	26,06	1,71	22 075
Nusa Tenggara Timur	27,43	0,83	3,01	25,81	29,05	1,48	8 358	21,48	0,29	1,35	20,92	22,05	0,88	39 716	22,65	0,28	1,25	22,10	23,21	1,00	48 074
Kalimantan Barat	27,89	0,68	2,44	26,55	29,23	1,45	8 681	24,97	0,41	1,65	24,16	25,78	1,30	20 919	25,86	0,36	1,37	25,16	26,56	1,35	29 600
Kalimantan Tengah	27,62	0,67	2,42	26,31	28,93	0,80	8 411	25,59	0,44	1,71	24,74	26,45	0,70	16 603	26,28	0,37	1,40	25,56	27,00	0,74	25 014
Kalimantan Selatan	26,08	0,62	2,38	24,86	27,30	1,44	10 105	23,83	0,41	1,70	23,04	24,63	0,90	14 975	24,78	0,35	1,42	24,09	25,47	1,14	25 080
Kalimantan Timur	26,69	0,56	2,10	25,59	27,79	1,71	15 541	26,16	0,60	2,28	24,99	27,32	1,21	11 069	26,49	0,41	1,56	25,68	27,30	1,52	26 610
Sulawesi Utara	24,42	0,75	3,06	22,96	25,89	1,42	10 302	21,90	0,45	2,07	21,01	22,78	0,68	15 799	23,04	0,42	1,81	22,22	23,85	1,02	26 101
Sulawesi Tengah	28,03	0,83	2,96	26,40	29,66	1,03	5 566	22,67	0,40	1,77	21,88	23,46	0,86	18 167	23,98	0,36	1,52	23,27	24,70	0,90	23 733
Sulawesi Selatan	28,09	0,68	2,41	26,77	29,42	3,08	18 613	23,00	0,29	1,24	22,44	23,56	1,06	36 044	24,89	0,32	1,30	24,25	25,52	2,06	54 657
Sulawesi Tenggara	27,67	0,97	3,52	25,76	29,57	1,41	6 269	23,00	0,44	1,93	22,13	23,87	0,85	17 325	24,31	0,42	1,72	23,49	25,12	1,01	23 594
Gorontalo	25,87	0,89	3,45	24,12	27,62	0,69	4 011	24,96	0,62	2,48	23,75	26,18	0,66	7 805	25,27	0,51	2,01	24,28	26,27	0,67	11 816
Sulawesi Barat	25,24	1,15	4,54	22,99	27,48	0,87	2 635	24,87	0,76	3,04	23,39	26,35	1,29	8 354	24,95	0,64	2,56	23,70	26,20	1,19	10 989
Maluku	27,94	0,94	3,35	26,10	29,77	1,22	7 335	23,31	0,57	2,43	22,20	24,42	0,79	14 481	25,10	0,51	2,03	24,11	26,10	1,00	21 816
Maluku Utara	28,56	1,02	3,56	26,57	30,56	0,70	4 306	24,41	0,54	2,19	23,36	25,46	0,56	12 276	25,56	0,48	1,87	24,62	26,49	0,60	16 582
Papua Barat	29,01	0,88	3,02	27,29	30,73	0,40	5 586	27,75	0,72	2,60	26,33	29,16	0,59	10 341	28,15	0,56	1,99	27,05	29,25	0,52	15 927
Papua	29,22	0,84	2,87	27,57	30,86	1,18	8 218	24,51	0,42	1,70	23,69	25,32	0,94	33 731	25,72	0,38	1,49	24,97	26,46	1,03	41 949
Indonesia	25,92	0,11	0,42	25,71	26,14	3,38	467 705	23,14	0,08	0,36	22,97	23,30	2,12	630 575	24,53	0,07	0,28	24,40	24,67	2,80	1098 280

Tabel 7.2 Sampling Error Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pemuda Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014

Provinsi	Perkotaan							Perdesaan							Perkotaan + Perdesaan						
	Esti- masi	Stan- dard Error	RSE	Selang Kepercayaan		Efek Ran- cangan	Jumlah Sampel	Esti- masi	Stan- dard Error	RSE	Selang Kepercayaan		Efek Ran- cangan	Jumlah Sampel	Esti- masi	Stan- dard Error	RSE	Selang Kepercayaan		Efek Ran- cangan	Jumlah Sampel
				Batas Bawah	Batas Atas						Batas Bawah	Batas Atas						Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Aceh	39,13	1,61	4,11	35,98	42,28	2,00	3 157	27,32	0,80	2,91	25,76	28,88	1,13	7 239	30,87	0,75	2,42	29,41	32,34	1,32	10 396
Sumatera Utara	28,71	0,99	3,44	26,78	30,65	3,99	7 440	24,06	0,71	2,95	22,67	25,45	1,73	8 415	26,50	0,62	2,35	25,28	27,72	2,60	15 855
Sumatera Barat	38,23	1,46	3,82	35,37	41,09	2,12	3 423	26,20	0,90	3,45	24,43	27,97	1,14	4 422	31,22	0,83	2,65	29,60	32,85	1,48	7 845
Riau	31,17	1,47	4,72	28,29	34,06	3,19	2 648	19,29	0,86	4,47	17,60	20,98	1,80	4 046	24,16	0,82	3,40	22,55	25,77	2,33	6 694
Jambi	28,35	1,80	6,35	24,82	31,89	1,88	1 447	20,06	0,98	4,88	18,14	21,98	1,39	3 746	22,51	0,87	3,87	20,80	24,22	1,43	5 193
Sumatera Selatan	30,43	1,41	4,63	27,67	33,19	3,46	2 879	15,05	0,60	3,96	13,88	16,22	1,39	5 519	20,90	0,68	3,25	19,57	22,23	2,23	8 398
Bengkulu	38,79	1,98	5,10	34,91	42,66	1,24	1 382	22,19	1,08	4,86	20,08	24,31	0,82	2 992	27,80	1,02	3,65	25,81	29,79	0,94	4 374
Lampung	30,49	1,75	5,72	27,07	33,91	3,51	2 031	18,35	0,74	4,04	16,90	19,81	2,01	5 386	21,63	0,72	3,32	20,22	23,03	2,27	7 417
Kep. Bangka Belitung	19,51	1,25	6,42	17,06	21,96	0,80	1 421	15,51	1,25	8,07	13,06	17,96	0,83	1 548	17,46	0,88	5,05	15,74	19,19	0,73	2 969
Kepulauan Riau	18,49	1,59	8,62	15,36	21,61	3,25	1 989	21,91	2,68	12,23	16,66	27,17	1,19	728	19,00	1,42	7,45	16,23	21,78	2,44	2 717
DKI Jakarta	21,00	0,82	3,92	19,39	22,61	5,44	4 422	-	-	-	-	-	-	-	21,00	0,82	3,92	19,39	22,61	4,47	4 422
Jawa Barat	22,60	0,60	2,63	21,43	23,77	7,54	11 514	17,33	0,76	4,40	15,83	18,82	5,58	5 063	20,97	0,47	2,25	20,05	21,90	5,96	16 577
Jawa Tengah	25,92	0,66	2,56	24,62	27,22	3,87	10 432	19,10	0,60	3,14	17,93	20,27	3,41	7 749	22,43	0,45	1,99	21,55	23,30	3,27	18 181
DI Yogyakarta	45,41	2,06	4,54	41,37	49,46	5,18	1 790	30,07	2,97	9,86	24,26	35,89	3,99	633	41,17	1,69	4,09	37,86	44,47	4,02	2 423
Jawa Timur	26,81	0,66	2,47	25,51	28,10	4,45	10 852	18,93	0,53	2,81	17,89	19,97	3,09	8 687	22,84	0,43	1,87	22,00	23,68	3,41	19 539
Banten	22,60	0,99	4,38	20,66	24,54	5,81	4 372	19,36	1,40	7,25	16,61	22,11	4,71	2 101	21,62	0,80	3,71	20,05	23,19	4,65	6 473
Bali	26,59	1,36	5,12	23,92	29,26	2,74	2 593	21,66	1,40	6,47	18,91	24,40	1,44	1 326	24,90	1,02	4,09	22,90	26,89	2,00	3 919
Nusa Tenggara Barat	31,18	1,65	5,31	27,93	34,42	3,14	2 220	22,33	1,21	5,40	19,97	24,70	2,19	2 761	26,21	1,00	3,80	24,25	28,16	2,37	4 981
Nusa Tenggara Timur	42,54	1,67	3,92	39,27	45,80	1,44	2 255	23,28	0,77	3,31	21,77	24,78	1,11	7 266	27,86	0,73	2,63	26,43	29,30	1,17	9 521
Kalimantan Barat	30,28	1,61	5,33	27,12	33,45	2,30	2 121	17,70	0,81	4,58	16,11	19,29	1,42	4 715	21,83	0,78	3,55	20,31	23,35	1,65	6 836
Kalimantan Tengah	28,00	1,45	5,19	25,15	30,85	1,11	1 985	15,86	0,99	6,25	13,92	17,81	1,17	3 720	20,19	0,84	4,15	18,55	21,83	1,07	5 705
Kalimantan Selatan	29,01	1,54	5,31	25,99	32,02	2,31	2 372	15,40	0,74	4,82	13,94	16,85	0,88	3 228	21,45	0,82	3,83	19,84	23,06	1,49	5 600
Kalimantan Timur	28,13	1,16	4,13	25,86	30,41	2,04	3 659	22,53	1,51	6,71	19,56	25,49	2,00	2 378	26,02	0,92	3,52	24,22	27,82	1,76	6 037
Sulawesi Utara	30,67	1,81	5,91	27,12	34,23	1,89	2 190	19,71	1,05	5,34	17,65	21,77	0,77	2 903	24,95	1,06	4,26	22,86	27,03	1,27	5 093
Sulawesi Tengah	38,22	1,81	4,73	34,68	41,77	1,25	1 478	18,85	0,83	4,40	17,22	20,48	0,84	3 520	24,39	0,82	3,37	22,78	26,00	0,95	4 998
Sulawesi Selatan	33,90	1,39	4,11	31,17	36,63	3,53	4 451	23,38	0,69	2,94	22,03	24,72	1,24	7 187	27,77	0,72	2,59	26,37	29,18	2,07	11 638
Sulawesi Tenggara	41,88	2,54	6,06	36,90	46,86	2,34	1 603	21,10	1,02	4,85	19,09	23,10	0,98	3 669	27,73	1,11	4,01	25,55	29,91	1,40	5 272
Gorontalo	35,54	1,98	5,57	31,66	39,42	0,79	955	23,55	1,71	7,26	20,20	26,91	1,15	1 692	27,77	1,33	4,77	25,17	30,36	0,95	2 647
Sulawesi Barat	33,92	2,37	6,97	29,29	38,56	0,84	673	20,59	1,51	7,31	17,64	23,54	1,29	1 828	23,66	1,30	5,51	21,11	26,22	1,13	2 501
Maluku	41,21	1,89	4,58	37,52	44,91	1,23	1 905	25,54	1,40	5,49	22,80	28,29	0,94	2 837	32,30	1,21	3,75	29,93	34,68	1,07	4 742
Maluku Utara	40,68	2,62	6,45	35,53	45,82	1,20	1 137	21,49	1,20	5,58	19,14	23,84	0,66	2 640	27,41	1,22	4,45	25,02	29,80	0,84	3 777
Papua Barat	31,36	1,93	6,17	27,57	35,15	0,57	1 422	25,52	2,40	9,41	20,82	30,23	1,68	2 335	27,44	1,70	6,19	24,12	30,77	1,18	3 757
Papua	31,61	1,73	5,47	28,22	34,99	1,49	2 165	15,81	0,73	4,63	14,37	17,24	0,87	7 891	20,41	0,73	3,56	18,99	21,84	0,99	10 056
Indonesia	26,73	0,25	0,93	26,25	27,22	3,92	106 383	19,91	0,19	0,95	19,53	20,28	2,51	130 170	23,52	0,16	0,67	23,21	23,83	3,28	236 553

Tabel 7.3 Sampling Error Angka Buta Huruf (ABH) Pemuda Menurut Provinsi, 2014

Provinsi	Estimasi	Standard Error	RSE	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan	Jumlah Sampel
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	0,14	0,04	26,62	0,06	0,21	0,49	10 396
Sumatera Utara	0,41	0,08	19,13	0,26	0,57	1,99	15 855
Sumatera Barat	0,21	0,06	26,86	0,10	0,31	0,69	7 845
Riau	0,18	0,05	30,81	0,07	0,29	1,07	6 694
Jambi	0,30	0,08	27,63	0,14	0,46	0,74	5 193
Sumatera Selatan	0,34	0,08	22,50	0,19	0,49	1,39	8 398
Bengkulu	0,28	0,08	28,08	0,13	0,44	0,41	4 374
Lampung	0,23	0,07	28,62	0,10	0,36	1,41	7 417
Kep. Bangka Belitung	0,49	0,15	29,58	0,21	0,77	0,59	2 969
Kepulauan Riau	0,19	0,08	43,26	0,03	0,36	0,67	2 717
DKI Jakarta	0,01	0,01	100,04	-0,01	0,04	1,55	4 422
Jawa Barat	0,10	0,03	26,42	0,05	0,15	3,05	16 577
Jawa Tengah	0,16	0,03	19,21	0,10	0,22	1,66	18 181
DI Yogyakarta	0,03	0,03	99,98	-0,03	0,10	1,10	2 423
Jawa Timur	0,43	0,07	15,42	0,30	0,56	3,40	19 539
Banten	0,17	0,05	31,33	0,07	0,28	2,09	6 473
Bali	0,34	0,10	28,44	0,15	0,53	1,00	3 919
Nusa Tenggara Barat	1,04	0,18	17,61	0,68	1,40	1,50	4 981
Nusa Tenggara Timur	2,56	0,24	9,39	2,09	3,03	1,01	9 521
Kalimantan Barat	0,90	0,14	16,09	0,61	1,18	1,09	6 836
Kalimantan Tengah	0,23	0,07	31,15	0,09	0,37	0,55	5 705
Kalimantan Selatan	0,10	0,05	51,70	0,00	0,19	0,96	5 600
Kalimantan Timur	0,08	0,03	39,41	0,02	0,15	0,52	6 037
Sulawesi Utara	0,11	0,05	47,69	0,01	0,22	0,54	5 093
Sulawesi Tengah	1,02	0,18	17,93	0,66	1,37	0,86	4 998
Sulawesi Selatan	1,28	0,14	10,69	1,01	1,55	1,19	11 638
Sulawesi Tenggara	1,01	0,16	15,95	0,69	1,32	0,59	5 272
Gorontalo	0,75	0,21	27,78	0,34	1,16	0,63	2 647
Sulawesi Barat	2,26	0,42	18,54	1,44	3,08	0,96	2 501
Maluku	0,77	0,23	30,11	0,31	1,22	1,11	4 742
Maluku Utara	0,43	0,14	33,08	0,15	0,71	0,53	3 777
Papua Barat	1,53	0,35	22,50	0,86	2,21	0,65	3 757
Papua	22,08	1,01	4,59	20,09	24,06	1,82	10 056
Indonesia	0,64	0,02	3,27	0,60	0,69	1,64	236 553

Tabel 7.4 Sampling Error Rata-rata Lama Sekolah (MYS) Pemuda Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014

Provinsi	Perkotaan							Perdesaan							Perkotaan + Perdesaan						
	Esti- masi	Stan- dard Error	RSE	Selang Kepercayaan		Efek Ran- cangan	Jumlah Sampel	Esti- masi	Stan- dard Error	RSE	Selang Kepercayaan		Efek Ran- cangan	Jumlah Sampel	Esti- masi	Stan- dard Error	RSE	Selang Kepercayaan		Efek Ran- cangan	Jumlah Sampel
				Batas Bawah	Batas Atas						Batas Bawah	Batas Atas						Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Aceh	11,99	0,10	0,88	11,78	12,19	2,55	3 157	10,43	0,07	0,65	10,29	10,56	1,63	7 239	10,90	0,06	0,54	10,78	11,01	1,79	10 396
Sumatera Utara	11,26	0,08	0,69	11,11	11,42	6,62	7 440	9,79	0,07	0,67	9,66	9,92	2,67	8 415	10,56	0,06	0,53	10,45	10,67	4,37	15 855
Sumatera Barat	11,49	0,12	1,03	11,26	11,72	3,29	3 423	9,32	0,09	0,94	9,14	9,49	1,72	4 422	10,22	0,08	0,79	10,07	10,38	2,41	7 845
Riau	11,28	0,11	0,95	11,07	11,49	4,09	2 648	9,36	0,10	1,07	9,17	9,56	3,50	4 046	10,15	0,08	0,79	9,99	10,31	3,78	6 694
Jambi	11,19	0,14	1,23	10,92	11,46	2,28	1 447	9,24	0,09	0,99	9,06	9,41	1,81	3 746	9,81	0,08	0,84	9,65	9,98	1,96	5 193
Sumatera Selatan	11,19	0,13	1,15	10,94	11,44	5,90	2 879	8,86	0,08	0,94	8,70	9,02	3,02	5 519	9,75	0,08	0,83	9,59	9,90	4,22	8 398
Bengkulu	11,90	0,18	1,50	11,55	12,25	2,40	1 382	9,38	0,10	1,06	9,18	9,57	1,10	2 992	10,23	0,10	0,97	10,03	10,43	1,52	4 374
Lampung	10,90	0,15	1,36	10,61	11,19	5,63	2 031	9,24	0,06	0,70	9,12	9,37	2,71	5 386	9,69	0,06	0,65	9,57	9,82	3,21	7 417
Kep. Bangka Belitung	10,39	0,17	1,62	10,06	10,72	1,95	1 421	7,87	0,15	1,85	7,58	8,15	1,18	1 548	9,10	0,11	1,23	8,88	9,32	1,23	2 969
Kepulauan Riau	11,28	0,15	1,34	10,98	11,57	5,58	1 989	8,69	0,36	4,15	7,98	9,39	2,41	728	10,89	0,15	1,41	10,59	11,19	4,48	2 717
DKI Jakarta	11,47	0,08	0,72	11,30	11,63	9,95	4 422	-	-	-	-	-	-	-	11,47	0,08	0,72	11,30	11,63	8,19	4 422
Jawa Barat	10,36	0,06	0,59	10,24	10,48	14,57	11 514	8,43	0,08	0,98	8,27	8,59	10,57	5 063	9,76	0,05	0,53	9,66	9,86	11,58	16 577
Jawa Tengah	10,54	0,06	0,55	10,43	10,65	6,39	10 432	9,26	0,06	0,60	9,15	9,37	5,56	7 749	9,88	0,04	0,41	9,80	9,96	5,25	18 181
DI Yogyakarta	12,45	0,12	0,98	12,21	12,69	5,61	1 790	10,51	0,17	1,65	10,17	10,86	4,21	633	11,91	0,11	0,90	11,70	12,12	4,73	2 423
Jawa Timur	10,91	0,06	0,53	10,80	11,02	7,32	10 852	9,14	0,06	0,69	9,02	9,27	6,54	8 687	10,02	0,05	0,45	9,93	10,11	6,46	19 539
Banten	10,67	0,11	1,06	10,45	10,89	13,74	4 372	8,34	0,13	1,52	8,09	8,59	6,54	2 101	9,96	0,09	0,86	9,80	10,13	8,38	6 473
Bali	11,49	0,10	0,84	11,30	11,68	2,86	2 593	9,69	0,21	2,21	9,27	10,11	5,15	1 326	10,87	0,09	0,87	10,69	11,06	3,00	3 919
Nusa Tenggara Barat	10,55	0,13	1,27	10,29	10,81	3,75	2 220	9,49	0,12	1,24	9,26	9,72	2,77	2 761	9,95	0,09	0,89	9,78	10,13	2,87	4 981
Nusa Tenggara Timur	11,28	0,13	1,15	11,02	11,53	1,85	2 255	8,18	0,09	1,09	8,00	8,35	1,84	7 266	8,92	0,08	0,90	8,76	9,07	1,81	9 521
Kalimantan Barat	10,79	0,16	1,44	10,48	11,09	3,76	2 121	8,11	0,09	1,10	7,93	8,28	2,12	4 715	8,99	0,09	0,95	8,82	9,16	2,53	6 836
Kalimantan Tengah	10,79	0,15	1,39	10,50	11,09	2,21	1 985	8,49	0,12	1,39	8,26	8,72	1,97	3 720	9,31	0,10	1,08	9,11	9,51	2,04	5 705
Kalimantan Selatan	10,59	0,14	1,34	10,31	10,86	3,40	2 372	8,47	0,10	1,21	8,27	8,67	1,92	3 228	9,41	0,09	0,96	9,23	9,59	2,38	5 600
Kalimantan Timur	11,18	0,08	0,73	11,02	11,34	2,58	3 659	9,40	0,14	1,53	9,11	9,68	2,78	2 378	10,51	0,08	0,74	10,36	10,66	2,45	6 037
Sulawesi Utara	11,19	0,13	1,17	10,93	11,44	1,97	2 190	9,75	0,10	1,07	9,55	9,96	1,11	2 903	10,44	0,09	0,84	10,27	10,61	1,44	5 093
Sulawesi Tengah	11,64	0,17	1,46	11,31	11,97	2,52	1 478	8,95	0,11	1,18	8,74	9,16	1,66	3 520	9,72	0,10	1,02	9,53	9,91	1,90	4 998
Sulawesi Selatan	11,15	0,17	1,48	10,82	11,47	8,53	4 451	9,01	0,08	0,87	8,85	9,16	1,99	7 187	9,90	0,09	0,91	9,73	10,08	4,33	11 638
Sulawesi Tenggara	11,80	0,15	1,24	11,51	12,09	1,94	1 603	9,48	0,11	1,18	9,26	9,71	1,50	3 669	10,22	0,09	0,91	10,04	10,41	1,50	5 272
Gorontalo	10,83	0,20	1,87	10,43	11,23	1,41	955	8,18	0,23	2,78	7,74	8,63	2,14	1 692	9,11	0,17	1,88	8,78	9,45	1,82	2 647
Sulawesi Barat	10,72	0,27	2,51	10,19	11,25	1,70	673	8,48	0,20	2,36	8,09	8,87	2,38	1 828	9,00	0,17	1,94	8,65	9,34	2,27	2 501
Maluku	12,18	0,11	0,88	11,97	12,39	1,44	1 905	9,74	0,15	1,49	9,45	10,02	1,53	2 837	10,79	0,11	1,03	10,57	11,01	1,71	4 742
Maluku Utara	11,73	0,17	1,43	11,40	12,06	1,44	1 137	9,57	0,16	1,67	9,26	9,89	1,53	2 640	10,24	0,13	1,22	9,99	10,48	1,40	3 777
Papua Barat	11,50	0,15	1,29	11,21	11,80	0,80	1 422	9,72	0,25	2,58	9,23	10,22	2,07	2 335	10,31	0,16	1,60	9,99	10,63	1,48	3 757
Papua	11,37	0,13	1,11	11,12	11,62	1,78	2 165	5,65	0,15	2,70	5,35	5,95	2,11	7 891	7,32	0,13	1,73	7,07	7,56	1,83	10 056
Indonesia	10,90	0,02	0,22	10,85	10,95	7,30	106 383	9,00	0,02	0,23	8,96	9,04	4,17	130 170	10,01	0,02	0,16	9,98	10,04	5,64	236 553

Tabel 7.5 Sampling Error Persentase Pemuda Pengguna Internet Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014

Provinsi	Perkotaan							Perdesaan							Perkotaan + Perdesaan						
	Esti- masi	Stan- dard Error	RSE	Selang Kepercayaan		Efek Ran- cangan	Jumlah Sampel	Esti- masi	Stan- dard Error	RSE	Selang Kepercayaan		Efek Ran- cangan	Jumlah Sampel	Esti- masi	Stan- dard Error	RSE	Selang Kepercayaan		Efek Ran- cangan	Jumlah Sampel
				Batas Bawah	Batas Atas						Batas Bawah	Batas Atas						Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Aceh	45,49	2,10	4,63	41,36	49,61	3,29	3 157	17,11	0,82	4,79	15,51	18,72	1,68	7 239	25,65	0,90	3,51	23,88	27,41	2,15	10 396
Sumatera Utara	42,10	1,43	3,39	39,31	44,90	6,96	7 440	18,94	0,82	4,31	17,34	20,54	2,73	8 415	31,07	0,91	2,92	29,29	32,86	5,05	15 855
Sumatera Barat	59,11	1,98	3,36	55,22	63,00	3,82	3 423	23,01	1,01	4,38	21,04	24,98	1,55	4 422	38,08	1,15	3,03	35,82	40,34	2,61	7 845
Riau	56,99	1,93	3,38	53,21	60,77	4,79	2 648	21,74	1,08	4,99	19,62	23,87	2,60	4 046	36,19	1,19	3,29	33,85	38,52	3,90	6 694
Jambi	55,85	2,62	4,69	50,71	60,98	3,28	1 447	21,10	1,06	5,04	19,02	23,19	1,58	3 746	31,37	1,23	3,91	28,97	33,78	2,30	5 193
Sumatera Selatan	49,06	2,20	4,48	44,75	53,37	7,15	2 879	16,09	0,80	4,97	14,52	17,66	2,36	5 519	28,63	1,08	3,79	26,51	30,76	4,60	8 398
Bengkulu	55,52	2,80	5,05	50,02	61,02	2,39	1 382	18,64	1,18	6,32	16,33	20,95	1,12	2 992	31,10	1,37	4,40	28,42	33,78	1,60	4 374
Lampung	35,83	2,20	6,14	31,52	40,14	5,14	2 031	16,13	0,93	5,77	14,31	17,95	3,50	5 386	21,44	0,90	4,20	19,68	23,20	3,59	7 417
Kep. Bangka Belitung	41,60	2,41	5,79	36,88	46,32	1,92	1 421	18,10	1,65	9,14	14,86	21,35	1,29	1 548	29,58	1,48	5,00	26,69	32,48	1,42	2 969
Kepulauan Riau	53,97	3,32	6,14	47,48	60,47	8,53	1 989	28,37	3,82	13,45	20,89	35,85	2,04	728	50,10	2,92	5,83	44,38	55,83	6,38	2 717
DKI Jakarta	61,52	1,23	2,00	59,11	63,93	8,51	4 422	-	-	-	-	-	-	-	61,52	1,23	2,00	59,11	63,93	7,00	4 422
Jawa Barat	44,34	0,95	2,14	42,48	46,19	13,52	11 514	20,56	0,96	4,68	18,68	22,45	7,79	5 063	37,00	0,73	1,98	35,57	38,44	10,17	16 577
Jawa Tengah	44,84	0,94	2,10	42,99	46,68	6,03	10 432	26,72	0,79	2,97	25,17	28,28	4,73	7 749	35,55	0,62	1,75	34,33	36,78	4,82	18 181
DI Yogyakarta	72,77	1,88	2,59	69,08	76,46	5,38	1 790	40,58	3,80	9,36	33,14	48,02	5,70	633	63,86	2,00	3,14	59,94	67,79	5,96	2 423
Jawa Timur	46,56	0,96	2,07	44,68	48,45	7,41	10 852	24,13	0,70	2,90	22,76	25,50	4,47	8 687	35,27	0,62	1,76	34,05	36,48	5,54	19 539
Banten	45,54	1,72	3,78	42,16	48,91	12,37	4 372	13,62	1,32	9,71	11,03	16,22	5,55	2 101	35,87	1,31	3,66	33,30	38,44	9,15	6 473
Bali	55,59	1,81	3,25	52,04	59,13	3,81	2 593	31,50	2,03	6,45	27,51	35,48	2,38	1 326	47,32	1,42	3,00	44,54	50,10	2,91	3 919
Nusa Tenggara Barat	37,17	2,05	5,50	33,16	41,18	4,40	2 220	14,41	1,12	7,80	12,20	16,61	2,67	2 761	24,39	1,13	4,65	22,17	26,61	3,21	4 981
Nusa Tenggara Timur	45,46	2,00	4,41	41,54	49,39	2,05	2 255	9,07	0,71	7,80	7,68	10,45	2,03	7 266	17,73	0,80	4,54	16,16	19,31	1,94	9 521
Kalimantan Barat	46,46	2,43	5,22	41,70	51,21	4,41	2 121	9,81	0,83	8,51	8,17	11,44	2,48	4 715	21,85	1,09	5,01	19,70	24,00	3,28	6 836
Kalimantan Tengah	47,78	2,24	4,68	43,40	52,16	2,13	1 985	18,88	1,26	6,68	16,41	21,35	1,65	3 720	29,18	1,22	4,18	26,79	31,57	1,77	5 705
Kalimantan Selatan	50,33	2,03	4,04	46,34	54,32	3,32	2 372	24,35	1,14	4,67	22,12	26,58	1,46	3 228	35,90	1,15	3,21	33,63	38,16	2,15	5 600
Kalimantan Timur	53,99	1,71	3,17	50,63	57,34	3,60	3 659	27,91	2,12	7,59	23,76	32,06	3,40	2 378	44,16	1,36	3,08	41,49	46,83	3,02	6 037
Sulawesi Utara	55,38	2,25	4,06	50,97	59,79	2,50	2 190	27,09	1,80	6,63	23,57	30,61	1,80	2 903	40,60	1,53	3,78	37,60	43,61	2,05	5 093
Sulawesi Tengah	51,40	3,00	5,83	45,52	57,27	3,25	1 478	13,96	1,01	7,23	11,99	15,94	1,58	3 520	24,67	1,24	5,03	22,24	27,10	2,15	4 998
Sulawesi Selatan	49,40	2,05	4,15	45,39	53,42	6,87	4 451	22,44	0,87	3,87	20,74	24,14	2,03	7 187	33,72	1,09	3,22	31,59	35,85	4,24	11 638
Sulawesi Tenggara	50,35	2,73	5,42	45,00	55,70	2,63	1 603	17,83	1,14	6,41	15,60	20,07	1,39	3 669	28,21	1,25	4,43	25,75	30,66	1,76	5 272
Gorontalo	51,38	2,83	5,52	45,83	56,94	1,48	955	25,81	2,14	8,31	21,61	30,01	1,69	1 692	34,80	1,77	5,07	31,34	38,26	1,48	2 647
Sulawesi Barat	38,86	3,44	8,85	32,12	45,60	1,67	673	14,54	1,64	11,25	11,33	17,75	2,00	1 828	20,15	1,55	7,68	17,11	23,18	1,79	2 501
Maluku	50,05	2,99	5,97	44,20	55,91	2,98	1 905	11,59	1,92	16,59	7,82	15,36	3,28	2 837	28,18	2,05	7,28	24,16	32,20	3,30	4 742
Maluku Utara	38,16	2,98	7,81	32,32	44,00	1,58	1 137	7,83	1,17	14,94	5,54	10,13	1,48	2 640	17,20	1,29	7,50	14,67	19,72	1,31	3 777
Papua Barat	43,74	3,17	7,26	37,52	49,96	1,34	1 422	17,59	2,79	15,85	12,13	23,06	2,96	2 335	26,19	2,04	7,79	22,19	30,19	1,76	3 757
Papua	35,05	1,86	5,31	31,40	38,70	1,64	2 165	3,00	0,47	15,57	2,09	3,92	1,63	7 891	12,35	0,68	5,52	11,01	13,68	1,31	10 056
Indonesia	48,13	0,37	0,77	47,40	48,85	6,89	106 383	20,26	0,23	1,16	19,80	20,72	3,78	130 170	35,02	0,23	0,67	34,56	35,48	5,67	236 553

Tabel 7.6 Sampling Error Persentase Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014

Provinsi	Perkotaan							Perdesaan							Perkotaan + Perdesaan						
	Esti- masi	Stan- dard Error	RSE	Selang Kepercayaan		Efek Ran- cangan	Jumlah Sampel	Esti- masi	Stan- dard Error	RSE	Selang Kepercayaan		Efek Ran- cangan	Jumlah Sampel	Esti- masi	Stan- dard Error	RSE	Selang Kepercayaan		Efek Ran- cangan	Jumlah Sampel
				Batas Bawah	Batas Atas						Batas Bawah	Batas Atas						Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Aceh	16,38	1,14	6,95	14,15	18,61	1,75	3 157	20,18	0,84	4,17	18,53	21,83	1,56	7 239	19,04	0,68	3,60	17,70	20,38	1,53	10 396
Sumatera Utara	15,59	1,00	6,41	13,63	17,55	6,33	7 440	14,95	0,72	4,82	13,54	16,37	2,56	8 415	15,29	0,63	4,09	14,06	16,51	3,96	15 855
Sumatera Barat	23,49	1,51	6,42	20,53	26,45	2,97	3 423	21,13	1,01	4,77	19,16	23,11	1,65	4 422	22,12	0,86	3,89	20,43	23,81	1,99	7 845
Riau	19,15	1,18	6,17	16,83	21,46	2,85	2 648	18,93	1,11	5,86	16,76	21,11	3,02	4 046	19,02	0,81	4,28	17,42	20,62	2,73	6 694
Jambi	13,68	1,81	13,25	10,13	17,23	3,28	1 447	13,28	0,88	6,64	11,55	15,01	1,57	3 746	13,40	0,82	6,12	11,79	15,00	1,90	5 193
Sumatera Selatan	20,33	1,47	7,24	17,44	23,22	4,95	2 879	16,39	0,78	4,74	14,86	17,91	2,19	5 519	17,89	0,74	4,15	16,43	19,34	3,00	8 398
Bengkulu	17,55	1,57	8,92	14,48	20,61	1,27	1 382	21,45	1,33	6,21	18,84	24,07	1,28	2 992	20,13	1,04	5,16	18,10	22,17	1,23	4 374
Lampung	14,04	1,28	9,11	11,54	16,55	3,31	2 031	20,86	0,97	4,63	18,97	22,76	3,09	5 386	19,02	0,79	4,16	17,47	20,58	3,03	7 417
Kep. Bangka Belitung	19,54	2,02	10,32	15,59	23,49	2,09	1 421	15,16	1,52	10,00	12,19	18,13	1,25	1 548	17,30	1,26	7,26	14,84	19,76	1,50	2 969
Kepulauan Riau	15,46	1,96	12,66	11,63	19,30	5,65	1 989	18,66	2,49	13,36	13,78	23,55	1,16	728	15,95	1,70	10,66	12,62	19,28	4,03	2 717
DKI Jakarta	20,47	0,94	4,61	18,62	22,32	7,29	4 422	-	-	-	-	-	-	-	20,47	0,94	4,61	18,62	22,32	5,99	4 422
Jawa Barat	18,31	0,65	3,54	17,04	19,58	10,43	11 514	20,07	0,97	4,81	18,18	21,96	7,97	5 063	18,85	0,54	2,85	17,80	19,91	8,36	16 577
Jawa Tengah	23,13	0,72	3,10	21,72	24,53	4,89	10 432	21,15	0,72	3,40	19,74	22,56	4,55	7 749	22,11	0,51	2,30	21,12	23,11	4,27	18 181
DI Yogyakarta	33,51	1,72	5,12	30,15	36,87	3,98	1 790	35,69	3,89	10,89	28,07	43,31	6,27	633	34,11	1,65	4,83	30,88	37,34	4,15	2 423
Jawa Timur	18,90	0,62	3,27	17,69	20,11	4,97	10 852	19,79	0,65	3,28	18,52	21,07	4,43	8 687	19,35	0,45	2,32	18,47	20,23	4,25	19 539
Banten	19,74	1,12	5,69	17,54	21,94	8,26	4 372	22,89	1,51	6,58	19,93	25,84	4,79	2 101	20,69	0,91	4,38	18,92	22,47	6,13	6 473
Bali	22,63	1,25	5,53	20,17	25,08	2,57	2 593	34,25	2,10	6,14	30,12	38,37	2,44	1 326	26,61	1,09	4,10	24,47	28,76	2,20	3 919
Nusa Tenggara Barat	25,73	1,64	6,37	22,52	28,94	3,46	2 220	27,50	1,68	6,11	24,21	30,80	3,69	2 761	26,73	1,19	4,44	24,40	29,05	3,32	4 981
Nusa Tenggara Timur	19,48	1,47	7,55	16,59	22,36	1,74	2 255	25,58	0,87	3,38	23,88	27,27	1,32	7 266	24,12	0,75	3,11	22,65	25,59	1,34	9 521
Kalimantan Barat	16,60	1,40	8,46	13,85	19,35	2,65	2 121	15,36	0,95	6,21	13,49	17,23	2,21	4 715	15,77	0,79	5,01	14,22	17,31	2,19	6 836
Kalimantan Tengah	17,83	1,50	8,41	14,89	20,76	1,63	1 985	18,58	1,26	6,80	16,11	21,06	1,67	3 720	18,31	0,97	5,31	16,41	20,22	1,55	5 705
Kalimantan Selatan	24,61	1,58	6,41	21,51	27,70	2,70	2 372	25,44	1,30	5,11	22,90	27,99	1,85	3 228	25,07	1,01	4,02	23,10	27,05	2,01	5 600
Kalimantan Timur	11,73	0,84	7,18	10,08	13,38	2,09	3 659	12,83	1,30	10,13	10,28	15,38	2,30	2 378	12,14	0,72	5,90	10,74	13,55	1,93	6 037
Sulawesi Utara	15,44	1,45	9,41	12,59	18,29	1,98	2 190	17,58	1,21	6,90	15,20	19,95	1,12	2 903	16,56	0,94	5,67	14,72	18,39	1,34	5 093
Sulawesi Tengah	20,38	2,00	9,80	16,47	24,30	2,22	1 478	22,94	1,18	5,16	20,62	25,26	1,48	3 520	22,21	1,02	4,59	20,21	24,21	1,56	4 998
Sulawesi Selatan	12,98	1,00	7,70	11,02	14,94	3,61	4 451	16,91	0,73	4,34	15,47	18,34	1,80	7 187	15,27	0,61	3,99	14,07	16,46	2,30	11 638
Sulawesi Tenggara	21,56	1,87	8,65	17,91	25,22	1,81	1 603	19,45	1,24	6,38	17,02	21,88	1,53	3 669	20,12	1,04	5,15	18,09	22,16	1,52	5 272
Gorontalo	31,90	2,61	8,18	26,78	37,01	1,45	955	24,68	1,72	6,97	21,30	28,05	1,12	1 692	27,21	1,46	5,36	24,35	30,07	1,16	2 647
Sulawesi Barat	22,92	2,57	11,20	17,89	27,94	1,25	673	22,19	1,83	8,25	18,60	25,78	1,80	1 828	22,36	1,53	6,84	19,36	25,35	1,62	2 501
Maluku	13,40	1,52	11,35	10,42	16,39	1,66	1 905	13,47	1,17	8,68	11,18	15,77	1,07	2 837	13,44	0,93	6,95	11,61	15,28	1,19	4 742
Maluku Utara	6,88	1,27	18,39	4,40	9,36	1,05	1 137	9,63	1,11	11,56	7,45	11,82	1,11	2 640	8,78	0,87	9,88	7,08	10,48	1,05	3 777
Papua Barat	14,11	1,39	9,82	11,39	16,83	0,52	1 422	11,58	1,33	11,46	8,98	14,18	0,95	2 335	12,41	1,01	8,13	10,43	14,39	0,77	3 757
Papua	12,24	1,14	9,29	10,01	14,47	1,30	2 165	12,00	0,72	6,02	10,58	13,41	1,07	7 891	12,07	0,61	5,05	10,87	13,26	1,07	10 056
Indonesia	19,29	0,25	1,30	18,80	19,78	5,08	106 383	19,76	0,23	1,16	19,31	20,21	3,67	130 170	19,51	0,17	0,88	19,18	19,85	4,41	236 553

Tabel 7.7 Sampling Error Angka Kesakitan Pemuda Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014

Provinsi	Perkotaan							Perdesaan						Perkotaan + Perdesaan							
	Estimasi	Standard Error	RSE	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan	Jumlah Sampel	Estimasi	Standard Error	RSE	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan	Jumlah Sampel	Estimasi	Standard Error	RSE	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan	Jumlah Sampel
				Batas Bawah	Batas Atas						Batas Bawah	Batas Atas						Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Aceh	7,46	0,72	9,62	6,06	8,87	1,38	3 157	10,35	0,59	5,70	9,19	11,50	1,33	7 239	9,48	0,47	4,95	8,56	10,40	1,29	10 396
Sumatera Utara	7,68	0,68	8,90	6,34	9,02	5,50	7 440	8,13	0,51	6,28	7,13	9,13	2,19	8 415	7,89	0,43	5,49	7,04	8,74	3,38	15 855
Sumatera Barat	9,21	0,76	8,29	7,71	10,71	1,64	3 423	10,59	0,69	6,48	9,24	11,93	1,34	4 422	10,01	0,51	5,12	9,01	11,02	1,35	7 845
Riau	7,72	0,80	10,37	6,15	9,28	2,84	2 648	9,63	0,76	7,87	8,14	11,11	2,48	4 046	8,84	0,56	6,28	7,75	9,93	2,43	6 694
Jambi	7,09	1,04	14,66	5,05	9,13	1,93	1 447	7,12	0,59	8,28	5,96	8,27	1,22	3 746	7,11	0,52	7,26	6,10	8,12	1,33	5 193
Sumatera Selatan	5,98	0,66	11,07	4,68	7,28	2,88	2 879	6,52	0,48	7,35	5,58	7,46	1,87	5 519	6,32	0,39	6,16	5,55	7,08	2,04	8 398
Bengkulu	7,78	0,96	12,36	5,90	9,67	0,97	1 382	11,32	0,92	8,12	9,51	13,12	1,03	2 992	10,12	0,70	6,88	8,76	11,49	0,98	4 374
Lampung	6,58	1,11	16,83	4,41	8,76	4,87	2 031	8,09	0,50	6,22	7,10	9,07	1,87	5 386	7,68	0,47	6,17	6,75	8,61	2,36	7 417
Kep. Bangka Belitung	6,80	0,99	14,59	4,85	8,74	1,25	1 421	5,45	0,89	16,38	3,70	7,20	1,08	1 548	6,11	0,67	10,91	4,80	7,42	1,05	2 969
Kepulauan Riau	6,21	0,99	15,99	4,26	8,16	3,26	1 989	8,76	1,60	18,23	5,63	11,89	0,91	728	6,60	0,88	13,34	4,87	8,32	2,35	2 717
DKI Jakarta	7,89	0,61	7,74	6,69	9,08	6,83	4 422	-	-	-	-	-	-	-	7,89	0,61	7,74	6,69	9,08	5,62	4 422
Jawa Barat	8,43	0,41	4,87	7,62	9,23	8,13	11 514	8,21	0,55	6,67	7,14	9,29	5,47	5 063	8,36	0,33	3,95	7,71	9,01	6,31	16 577
Jawa Tengah	9,40	0,45	4,76	8,52	10,28	3,96	10 432	8,98	0,46	5,09	8,08	9,87	3,76	7 749	9,18	0,32	3,48	8,56	9,81	3,50	18 181
DI Yogyakarta	9,93	0,87	8,80	8,22	11,65	2,57	1 790	13,43	2,83	21,07	7,88	18,98	6,57	633	10,90	1,03	9,46	8,88	12,92	3,75	2 423
Jawa Timur	8,71	0,40	4,61	7,92	9,49	4,03	10 852	9,84	0,46	4,65	8,95	10,74	3,94	8 687	9,28	0,30	3,28	8,68	9,88	3,64	19 539
Banten	8,22	0,66	8,03	6,92	9,51	6,00	4 372	9,45	0,99	10,51	7,50	11,40	4,30	2 101	8,59	0,55	6,41	7,51	9,67	4,72	6 473
Bali	11,99	0,85	7,10	10,32	13,66	1,98	2 593	21,97	1,72	7,84	18,59	25,35	2,15	1 326	15,42	0,83	5,36	13,80	17,04	1,89	3 919
Nusa Tenggara Barat	11,81	1,07	9,06	9,71	13,90	2,70	2 220	13,01	1,06	8,12	10,94	15,08	2,57	2 761	12,48	0,76	6,06	11,00	13,96	2,42	4 981
Nusa Tenggara Timur	7,94	0,88	11,05	6,22	9,66	1,33	2 255	13,82	0,61	4,39	12,63	15,01	1,03	7 266	12,42	0,51	4,11	11,42	13,42	1,05	9 521
Kalimantan Barat	8,00	0,94	11,70	6,17	9,84	2,22	2 121	7,18	0,63	8,73	5,95	8,41	1,86	4 715	7,45	0,52	7,00	6,43	8,47	1,84	6 836
Kalimantan Tengah	8,87	1,14	12,86	6,63	11,11	1,71	1 985	10,02	0,87	8,68	8,31	11,72	1,33	3 720	9,61	0,69	7,20	8,25	10,96	1,35	5 705
Kalimantan Selatan	7,63	0,88	11,53	5,91	9,36	2,21	2 372	9,39	0,80	8,51	7,82	10,95	1,56	3 228	8,61	0,59	6,87	7,45	9,77	1,65	5 600
Kalimantan Timur	5,16	0,53	10,19	4,13	6,19	1,72	3 659	6,19	0,88	14,28	4,46	7,93	2,05	2 378	5,55	0,47	8,43	4,63	6,46	1,68	6 037
Sulawesi Utara	7,73	0,82	10,63	6,12	9,34	1,16	2 190	10,47	0,89	8,47	8,73	12,21	0,93	2 903	9,16	0,61	6,61	7,97	10,35	0,93	5 093
Sulawesi Tengah	11,87	1,66	13,96	8,62	15,12	2,38	1 478	12,98	0,81	6,26	11,38	14,57	1,09	3 520	12,66	0,75	5,91	11,19	14,13	1,32	4 998
Sulawesi Selatan	5,26	0,54	10,32	4,20	6,32	2,41	4 451	8,27	0,48	5,76	7,34	9,21	1,41	7 187	7,01	0,37	5,22	6,30	7,73	1,65	11 638
Sulawesi Tenggara	10,24	1,29	12,62	7,71	12,77	1,60	1 603	12,47	0,99	7,91	10,54	14,41	1,39	3 669	11,76	0,79	6,68	10,22	13,30	1,35	5 272
Gorontalo	16,42	1,84	11,23	12,80	20,03	1,14	955	13,77	1,28	9,32	11,26	16,29	0,98	1 692	14,70	1,06	7,20	12,63	16,78	0,97	2 647
Sulawesi Barat	13,96	2,31	16,55	9,43	18,49	1,50	673	12,76	1,31	10,27	10,19	15,33	1,43	1 828	13,04	1,14	8,76	10,80	15,28	1,38	2 501
Maluku	6,18	0,87	14,06	4,48	7,88	1,09	1 905	7,04	0,71	10,14	5,64	8,43	0,71	2 837	6,67	0,55	8,28	5,59	7,75	0,78	4 742
Maluku Utara	5,11	1,10	21,52	2,95	7,27	1,05	1 137	5,38	0,73	13,56	3,95	6,80	0,81	2 640	5,29	0,61	11,47	4,10	6,48	0,82	3 777
Papua Barat	8,85	1,14	12,92	6,61	11,09	0,53	1 422	6,38	0,85	13,28	4,72	8,04	0,66	2 335	7,19	0,69	9,54	5,85	8,54	0,58	3 757
Papua	6,09	0,82	13,53	4,48	7,70	1,28	2 165	4,83	0,41	8,58	4,01	5,64	0,81	7 891	5,19	0,38	7,31	4,45	5,94	0,89	10 056
Indonesia	8,33	0,16	1,89	8,02	8,63	4,08	106 383	9,28	0,15	1,58	8,99	9,57	2,83	130 170	8,77	0,11	1,23	8,56	8,99	3,46	236 553

Tabel 7.8 Sampling Error Persentase Pemuda Perempuan yang Menggunakan KB Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014

Provinsi	Perkotaan							Perdesaan							Perkotaan + Perdesaan						
	Esti- masi	Stan- dard Error	RSE	Selang Kepercayaan		Efek Ran- cangan	Jumlah Sampel	Esti- masi	Stan- dard Error	RSE	Selang Kepercayaan		Efek Ran- cangan	Jumlah Sampel	Esti- masi	Stan- dard Error	RSE	Selang Kepercayaan		Efek Ran- cangan	Jumlah Sampel
				Batas Bawah	Batas Atas						Batas Bawah	Batas Atas						Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Aceh	51,87	2,42	4,67	47,12	56,62	0,93	572	56,06	1,54	2,74	53,05	59,07	0,82	1 630	54,97	1,30	2,36	52,42	57,51	0,74	2 202
Sumatera Utara	48,75	1,96	4,03	44,90	52,60	2,72	1 321	46,32	1,57	3,40	43,24	49,41	1,61	1 924	47,42	1,24	2,61	45,00	49,85	1,72	3 245
Sumatera Barat	46,04	2,43	5,29	41,27	50,81	1,12	609	55,44	1,73	3,12	52,05	58,84	0,90	1 133	52,37	1,43	2,73	49,58	55,17	0,85	1 742
Riau	46,51	2,46	5,30	41,68	51,33	1,79	567	59,42	1,63	2,74	56,23	62,61	1,31	1 223	55,28	1,37	2,48	52,60	57,97	1,26	1 790
Jambi	56,69	3,24	5,72	50,34	63,05	1,34	319	69,14	1,48	2,13	66,24	72,03	0,78	1 208	66,18	1,38	2,09	63,47	68,89	0,81	1 527
Sumatera Selatan	51,52	3,04	5,89	45,57	57,47	3,10	614	70,23	1,24	1,76	67,80	72,65	1,17	1 707	64,86	1,31	2,02	62,29	67,44	1,60	2 321
Bengkulu	60,01	3,34	5,56	53,47	66,55	0,83	284	68,85	1,71	2,49	65,49	72,21	0,55	985	66,61	1,54	2,32	63,58	69,64	0,55	1 269
Lampung	63,90	2,67	4,18	58,67	69,14	1,90	425	70,95	1,31	1,84	68,38	73,51	1,49	1 791	69,49	1,17	1,69	67,18	71,79	1,40	2 216
Kep. Bangka Belitung	64,68	2,81	4,35	59,16	70,19	0,81	364	70,59	2,12	3,01	66,42	74,75	0,50	520	68,00	1,71	2,52	64,64	71,36	0,52	884
Kepulauan Riau	39,94	3,41	8,53	33,27	46,62	2,67	479	63,21	8,13	12,86	47,28	79,14	2,10	184	43,42	3,18	7,32	37,19	49,65	1,93	663
DKI Jakarta	51,28	2,04	3,98	47,28	55,29	5,19	825	-	-	-	-	-	-	-	51,28	2,04	3,98	47,28	55,29	3,75	825
Jawa Barat	63,62	1,10	1,73	61,47	65,77	5,50	2 639	67,42	1,35	2,00	64,78	70,07	4,07	1 833	65,06	0,85	1,31	63,39	66,73	3,92	4 472
Jawa Tengah	55,89	1,19	2,13	53,55	58,22	2,71	2 585	64,88	1,03	1,59	62,86	66,89	2,39	2 822	61,18	0,78	1,28	59,65	62,71	2,12	5 407
DI Yogyakarta	51,98	3,40	6,53	45,33	58,64	2,66	284	60,65	5,90	9,73	49,09	72,22	4,47	195	55,54	3,09	5,56	49,49	61,60	2,73	479
Jawa Timur	59,41	1,16	1,96	57,13	61,69	3,30	2 819	63,14	1,01	1,61	61,15	65,13	2,64	3 151	61,54	0,77	1,24	60,04	63,04	2,45	5 970
Banten	62,08	1,94	3,12	58,29	65,88	4,65	1 011	68,95	2,29	3,32	64,46	73,43	3,13	741	64,59	1,49	2,30	61,68	67,50	3,20	1 752
Bali	56,81	2,21	3,90	52,47	61,15	1,61	663	67,41	2,54	3,76	62,44	72,39	1,13	415	60,89	1,70	2,79	57,56	64,21	1,15	1 078
Nusa Tenggara Barat	56,46	2,72	4,82	51,12	61,79	2,24	555	53,00	2,28	4,30	48,53	57,47	1,89	901	54,33	1,76	3,24	50,89	57,78	1,74	1 456
Nusa Tenggara Timur	50,44	3,35	6,64	43,88	57,01	1,05	350	44,30	1,41	3,19	41,53	47,07	0,75	1 973	45,28	1,30	2,87	42,74	47,83	0,72	2 323
Kalimantan Barat	60,89	2,36	3,88	56,25	65,52	1,14	466	71,19	1,41	1,98	68,44	73,95	1,00	1 456	68,47	1,21	1,76	66,11	70,84	0,90	1 922
Kalimantan Tengah	64,46	2,53	3,92	59,51	69,42	0,91	561	71,93	1,50	2,09	68,99	74,87	0,60	1 278	69,58	1,30	1,86	67,04	72,12	0,60	1 839
Kalimantan Selatan	66,33	2,41	3,63	61,61	71,05	1,55	645	75,35	1,32	1,75	72,76	77,93	0,68	1 119	71,87	1,25	1,74	69,42	74,33	0,87	1 764
Kalimantan Timur	55,04	1,91	3,47	51,29	58,78	1,26	915	66,37	2,62	3,95	61,22	71,51	1,46	716	59,81	1,59	2,65	56,70	62,92	1,12	1 631
Sulawesi Utara	65,28	2,52	3,85	60,34	70,21	0,84	465	70,77	2,00	2,83	66,85	74,69	0,65	847	68,54	1,57	2,29	65,46	71,62	0,62	1 312
Sulawesi Tengah	56,42	3,05	5,41	50,44	62,39	0,79	322	61,92	1,74	2,81	58,50	65,33	0,80	1 153	60,80	1,52	2,50	57,82	63,78	0,72	1 475
Sulawesi Selatan	50,54	2,51	4,98	45,61	55,47	2,40	963	56,30	1,39	2,47	53,57	59,03	1,10	2 040	54,33	1,26	2,32	51,86	56,80	1,28	3 003
Sulawesi Tenggara	48,79	3,23	6,61	42,46	55,11	0,87	329	53,50	1,88	3,52	49,81	57,19	0,74	1 192	52,40	1,63	3,12	49,20	55,60	0,69	1 521
Gorontalo	60,54	3,54	5,86	53,59	67,49	0,58	205	69,17	2,05	2,96	65,16	73,19	0,43	519	66,78	1,79	2,68	63,27	70,29	0,42	724
Sulawesi Barat	39,52	4,23	10,71	31,23	47,82	0,63	156	50,13	2,67	5,33	44,89	55,37	0,78	526	48,12	2,31	4,80	43,60	52,65	0,68	682
Maluku	41,34	3,31	8,00	34,86	47,83	0,78	353	40,16	2,64	6,57	34,99	45,33	0,71	744	40,57	2,07	5,10	36,52	44,63	0,63	1 097
Maluku Utara	52,02	3,83	7,37	44,50	59,54	0,59	248	58,01	2,42	4,17	53,28	62,75	0,58	794	56,58	2,05	3,63	52,56	60,60	0,52	1 042
Papua Barat	48,53	4,19	8,62	40,33	56,74	0,54	309	39,55	2,83	7,17	34,00	45,11	0,55	735	41,94	2,37	5,65	37,29	46,58	0,49	1 044
Papua	43,26	2,78	6,43	37,81	48,72	0,77	480	20,21	1,36	6,72	17,55	22,87	0,83	2 677	24,90	1,25	5,04	22,44	27,36	0,73	3 157
Indonesia	57,70	0,47	0,81	56,79	58,61	2,59	23 702	62,29	0,36	0,57	61,59	62,98	1,87	40 132	60,19	0,29	0,48	59,63	60,76	2,20	63 834

Tabel 7.9 Sampling Error Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pemuda Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014

Provinsi	Perkotaan							Perdesaan							Perkotaan + Perdesaan						
	Esti- masi	Stan- dard Error	RSE	Selang Kepercayaan		Efek Ran- gangan	Jumlah Sampel	Esti- masi	Stan- dard Error	RSE	Selang Kepercayaan		Efek Ran- gangan	Jumlah Sampel	Esti- masi	Stan- dard Error	RSE	Selang Kepercayaan		Efek Ran- gangan	Jumlah Sampel
				Batas Bawah	Batas Atas						Batas Bawah	Batas Atas						Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Aceh	51,95	1,36	2,61	49,29	54,61	0,79	2 554	56,08	1,11	1,99	53,90	58,26	1,27	4 273	54,86	0,88	1,61	53,13	56,59	1,13	6 827
Sumatera Utara	58,96	1,00	1,70	56,99	60,92	1,97	4 523	65,13	0,91	1,40	63,33	66,92	1,60	5 618	61,91	0,68	1,10	60,58	63,24	1,78	10 141
Sumatera Barat	55,19	1,41	2,56	52,42	57,97	1,16	2 555	56,97	1,19	2,09	54,63	59,30	1,08	2 559	56,20	0,91	1,63	54,41	57,99	1,12	5 114
Riau	55,05	2,56	4,65	50,03	60,07	4,84	1 949	56,47	1,33	2,36	53,87	59,08	1,88	2 268	55,89	1,33	2,37	53,29	58,49	3,17	4 217
Jambi	59,69	2,13	3,58	55,50	63,87	1,34	1 109	57,40	1,23	2,14	54,99	59,82	1,00	1 984	58,10	1,07	1,85	55,99	60,20	1,10	3 093
Sumatera Selatan	59,56	1,60	2,69	56,42	62,70	2,19	2 177	63,14	1,01	1,60	61,16	65,12	1,51	3 198	61,81	0,87	1,41	60,09	63,52	1,77	5 375
Bengkulu	54,46	2,17	3,98	50,21	58,71	0,86	977	57,59	1,34	2,33	54,96	60,21	0,63	1 874	56,50	1,16	2,05	54,23	58,78	0,71	2 851
Lampung	55,14	1,63	2,95	51,95	58,34	1,56	1 753	61,13	1,03	1,69	59,11	63,16	1,71	2 956	59,47	0,87	1,47	57,76	61,19	1,67	4 709
Kep. Bangka Belitung	60,35	1,65	2,73	57,12	63,57	0,51	864	59,92	1,86	3,10	56,27	63,56	0,68	954	60,12	1,25	2,07	57,68	62,57	0,60	1 818
Kepulauan Riau	64,97	2,06	3,17	60,94	69,00	2,05	919	56,99	2,32	4,07	52,45	61,54	0,37	661	63,91	1,83	2,86	60,34	67,49	1,84	1 580
DKI Jakarta	66,30	1,04	1,57	64,26	68,34	3,59	2 631	-	-	-	-	-	-	-	66,30	1,04	1,57	64,26	68,34	3,59	2 631
Jawa Barat	60,55	0,78	1,28	59,02	62,07	5,27	7 110	57,00	0,96	1,69	55,11	58,89	3,59	3 492	59,43	0,61	1,03	58,23	60,64	4,74	10 602
Jawa Tengah	62,44	0,75	1,19	60,98	63,90	2,27	6 978	59,63	0,79	1,33	58,07	61,19	2,73	5 076	60,98	0,55	0,90	59,90	62,05	2,52	12 054
DI Yogyakarta	57,35	1,98	3,46	53,47	61,24	2,59	987	65,33	2,52	3,86	60,39	70,27	1,66	503	59,50	1,59	2,68	56,37	62,62	2,32	1 490
Jawa Timur	59,54	0,78	1,31	58,01	61,07	2,87	6 923	59,69	0,77	1,29	58,18	61,19	2,85	5 187	59,61	0,55	0,92	58,54	60,69	2,86	12 110
Banten	63,13	1,14	1,81	60,89	65,37	3,35	2 673	60,28	1,75	2,91	56,84	63,72	3,31	1 281	62,27	0,96	1,54	60,39	64,15	3,35	3 954
Bali	63,17	1,47	2,32	60,30	66,05	1,48	1 602	73,78	1,65	2,24	70,54	77,02	1,21	1 008	66,87	1,13	1,68	64,66	69,08	1,41	2 610
Nusa Tenggara Barat	57,17	1,51	2,64	54,20	60,13	1,35	1 469	58,70	1,56	2,67	55,63	61,76	1,82	1 682	58,01	1,10	1,90	55,86	60,17	1,61	3 151
Nusa Tenggara Timur	46,93	1,80	3,84	43,39	50,47	0,97	1 948	62,48	1,16	1,85	60,21	64,75	1,40	4 175	58,87	1,01	1,71	56,89	60,84	1,34	6 123
Kalimantan Barat	57,50	1,55	2,70	54,46	60,54	1,01	1 714	64,64	1,18	1,83	62,32	66,95	1,36	2 746	62,39	0,95	1,52	60,54	64,25	1,24	4 460
Kalimantan Tengah	52,26	1,96	3,76	48,41	56,10	0,95	1 358	63,04	1,34	2,13	60,40	65,67	0,87	2 183	59,24	1,13	1,90	57,04	61,45	0,91	3 541
Kalimantan Selatan	58,24	1,67	2,87	54,97	61,52	1,31	1 429	63,54	1,35	2,12	60,90	66,18	1,13	1 825	61,20	1,06	1,74	59,11	63,28	1,23	3 254
Kalimantan Timur	56,27	1,46	2,59	53,41	59,13	1,47	1 916	58,67	1,57	2,67	55,61	61,74	1,05	1 612	57,18	1,09	1,90	55,05	59,31	1,32	3 528
Sulawesi Utara	54,45	1,93	3,54	50,67	58,23	1,10	1 230	50,87	1,40	2,75	48,12	53,61	0,60	1 921	52,61	1,18	2,25	50,30	54,93	0,84	3 151
Sulawesi Tengah	56,89	2,59	4,56	51,80	61,97	1,42	1 051	58,69	1,32	2,24	56,11	61,27	0,97	2 005	58,19	1,19	2,05	55,86	60,53	1,10	3 056
Sulawesi Selatan	51,53	1,73	3,35	48,15	54,92	2,92	3 094	57,63	0,95	1,66	55,75	59,50	1,22	4 265	55,02	0,94	1,71	53,18	56,86	2,03	7 359
Sulawesi Tenggara	49,50	2,36	4,76	44,88	54,11	1,17	1 275	60,69	1,44	2,38	57,86	63,52	0,98	2 198	57,12	1,29	2,25	54,60	59,64	1,11	3 473
Gorontalo	53,79	2,69	5,00	48,52	59,06	0,81	529	53,61	1,77	3,29	50,15	57,08	0,61	1 038	53,68	1,49	2,78	50,76	56,60	0,68	1 567
Sulawesi Barat	58,16	2,70	4,65	52,86	63,46	0,60	440	62,52	1,76	2,82	59,06	65,97	0,86	1 038	61,50	1,49	2,43	58,57	64,42	0,80	1 478
Maluku	49,55	2,93	5,90	43,81	55,28	1,74	1 170	54,78	1,72	3,14	51,41	58,15	0,78	1 630	52,50	1,61	3,06	49,35	55,64	1,20	2 800
Maluku Utara	50,91	3,03	5,96	44,97	56,85	0,91	915	55,64	1,79	3,21	52,14	59,14	0,68	1 366	54,13	1,56	2,88	51,07	57,19	0,76	2 281
Papua Barat	51,53	2,91	5,66	45,82	57,24	0,62	553	59,93	2,09	3,49	55,84	64,03	0,85	1 466	57,59	1,72	2,99	54,22	60,97	0,79	2 019
Papua	53,38	1,94	3,64	49,57	57,19	0,96	1 381	80,51	1,07	1,33	78,41	82,61	1,22	4 454	73,02	1,01	1,38	71,04	74,99	1,19	5 835
Indonesia	59,82	0,30	0,50	59,24	60,40	3,17	69 756	60,23	0,25	0,42	59,73	60,72	2,06	78 496	60,01	0,20	0,33	59,63	60,40	2,64	148 252

Tabel 7.10 Sampling Error Persentase Pemuda yang Bekerja Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014

Provinsi	Perkotaan							Perdesaan							Perkotaan + Perdesaan						
	Esti- masi	Stan- dard Error	RSE	Selang Kepercayaan		Efek Ran- cangan	Jumlah Sampel	Esti- masi	Stan- dard Error	RSE	Selang Kepercayaan		Efek Ran- cangan	Jumlah Sampel	Esti- masi	Stan- dard Error	RSE	Selang Kepercayaan		Efek Ran- cangan	Jumlah Sampel
				Batas Bawah	Batas Atas						Batas Bawah	Batas Atas						Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Aceh	40,83	1,28	3,14	38,31	43,34	0,72	2 554	43,41	1,16	2,67	41,14	45,68	1,38	4 273	42,65	0,90	2,10	40,89	44,40	1,18	6 827
Sumatera Utara	47,89	1,14	2,38	45,65	50,13	2,48	4 523	57,04	1,02	1,79	55,05	59,04	1,84	5 618	52,27	0,77	1,47	50,76	53,77	2,15	10 141
Sumatera Barat	43,45	1,54	3,54	40,43	46,46	1,38	2 555	48,83	1,28	2,62	46,32	51,33	1,22	2 559	46,49	1,00	2,15	44,53	48,45	1,33	5 114
Riau	44,04	2,62	5,95	38,90	49,18	5,09	1 949	49,71	1,41	2,84	46,95	52,48	2,08	2 268	47,38	1,42	3,00	44,59	50,16	3,58	4 217
Jambi	49,38	2,41	4,89	44,64	54,11	1,65	1 109	51,61	1,23	2,38	49,20	54,02	0,98	1 984	50,93	1,13	2,22	48,71	53,15	1,19	3 093
Sumatera Selatan	48,68	1,62	3,32	45,51	51,85	2,15	2 177	57,63	1,13	1,96	55,42	59,84	1,79	3 198	54,29	0,95	1,74	52,44	56,15	1,98	5 375
Bengkulu	48,59	2,13	4,39	44,41	52,77	0,82	977	52,59	1,35	2,57	49,95	55,24	0,62	1 874	51,21	1,16	2,26	48,93	53,48	0,70	2 851
Lampung	45,90	1,68	3,66	42,61	49,19	1,66	1 753	54,38	1,11	2,05	52,20	56,56	1,90	2 956	52,03	0,93	1,79	50,20	53,86	1,84	4 709
Kep. Bangka Belitung	52,32	1,96	3,74	48,48	56,16	0,69	864	53,96	1,96	3,63	50,12	57,80	0,74	954	53,17	1,39	2,61	50,45	55,88	0,71	1 818
Kepulauan Riau	55,07	2,38	4,32	50,41	59,74	2,53	919	48,97	2,15	4,39	44,76	53,19	0,31	661	54,27	2,10	3,86	50,16	58,38	2,25	1 580
DKI Jakarta	56,73	1,11	1,96	54,54	58,91	3,75	2 631	-	-	-	-	-	-	-	56,73	1,11	1,96	54,54	58,91	3,75	2 631
Jawa Barat	48,93	0,81	1,65	47,34	50,51	5,44	7 110	42,73	0,99	2,31	40,80	44,67	3,78	3 492	46,99	0,64	1,36	45,73	48,24	4,97	10 602
Jawa Tengah	52,98	0,78	1,47	51,45	54,51	2,34	6 978	51,24	0,84	1,64	49,58	52,89	2,95	5 076	52,07	0,58	1,11	50,94	53,20	2,66	12 054
DI Yogyakarta	51,62	2,13	4,13	47,45	55,80	2,93	987	59,01	2,61	4,42	53,90	64,11	1,66	503	53,61	1,70	3,18	50,27	56,95	2,57	1 490
Jawa Timur	51,31	0,81	1,58	49,72	52,90	2,98	6 923	52,80	0,83	1,58	51,17	54,44	3,25	5 187	52,07	0,58	1,12	50,93	53,20	3,11	12 110
Banten	52,50	1,20	2,28	50,16	54,85	3,44	2 673	45,44	1,99	4,37	41,55	49,33	4,10	1 281	50,38	1,04	2,06	48,34	52,41	3,69	3 954
Bali	59,64	1,52	2,54	56,67	62,62	1,53	1 602	69,99	1,74	2,48	66,58	73,40	1,23	1 008	63,25	1,16	1,84	60,97	65,53	1,43	2 610
Nusa Tenggara Barat	48,17	1,59	3,29	45,06	51,28	1,46	1 469	52,25	1,66	3,18	49,00	55,51	2,00	1 682	50,44	1,17	2,31	48,15	52,72	1,77	3 151
Nusa Tenggara Timur	38,41	1,77	4,60	34,95	41,88	0,98	1 948	58,45	1,23	2,10	56,04	60,85	1,51	4 175	53,79	1,07	2,00	51,69	55,90	1,47	6 123
Kalimantan Barat	49,29	1,45	2,95	46,44	52,14	0,86	1 714	58,96	1,30	2,21	56,41	61,52	1,56	2 746	55,92	1,01	1,80	53,95	57,89	1,33	4 460
Kalimantan Tengah	46,37	1,91	4,12	42,63	50,12	0,90	1 358	58,59	1,44	2,46	55,76	61,42	0,97	2 183	54,29	1,17	2,15	52,00	56,58	0,96	3 541
Kalimantan Selatan	51,25	1,88	3,67	47,56	54,95	1,62	1 429	58,69	1,43	2,43	55,89	61,49	1,21	1 825	55,40	1,16	2,10	53,12	57,68	1,41	3 254
Kalimantan Timur	46,21	1,43	3,09	43,41	49,01	1,40	1 916	48,79	1,70	3,49	45,45	52,13	1,21	1 612	47,19	1,10	2,34	45,03	49,35	1,34	3 528
Sulawesi Utara	40,53	1,97	4,86	36,67	44,39	1,18	1 230	42,17	1,37	3,25	39,49	44,86	0,59	1 921	41,37	1,19	2,88	39,04	43,70	0,88	3 151
Sulawesi Tengah	50,41	2,59	5,13	45,34	55,48	1,38	1 051	53,32	1,42	2,66	50,53	56,10	1,10	2 005	52,52	1,25	2,39	50,06	54,98	1,19	3 056
Sulawesi Selatan	42,08	1,80	4,28	38,55	45,61	3,25	3 094	52,33	1,01	1,92	50,36	54,30	1,32	4 265	47,94	1,02	2,12	45,95	49,94	2,37	7 359
Sulawesi Tenggara	41,51	2,40	5,78	36,81	46,21	1,24	1 275	55,96	1,58	2,82	52,86	59,06	1,14	2 198	51,35	1,40	2,73	48,60	54,10	1,30	3 473
Gorontalo	45,74	2,23	4,87	41,37	50,10	0,56	529	50,06	1,92	3,84	46,30	53,83	0,71	1 038	48,48	1,47	3,03	45,60	51,36	0,66	1 567
Sulawesi Barat	55,54	2,76	4,97	50,13	60,95	0,61	440	59,90	1,81	3,02	56,35	63,44	0,89	1 038	58,88	1,53	2,60	55,87	61,88	0,82	1 478
Maluku	35,11	2,61	7,44	29,99	40,23	1,52	1 170	42,42	1,99	4,69	38,52	46,32	1,06	1 630	39,23	1,60	4,08	36,09	42,37	1,25	2 800
Maluku Utara	42,01	2,96	7,05	36,21	47,82	0,89	915	48,90	1,91	3,90	45,16	52,63	0,77	1 366	46,70	1,62	3,46	43,53	49,87	0,82	2 281
Papua Barat	43,64	2,71	6,21	38,33	48,95	0,54	553	54,26	2,39	4,40	49,58	58,94	1,08	1 466	51,30	1,88	3,66	47,62	54,99	0,92	2 019
Papua	43,83	2,03	4,62	39,86	47,81	1,06	1 381	76,52	1,23	1,60	74,11	78,92	1,40	4 454	67,49	1,15	1,70	65,24	69,74	1,38	5 835
Indonesia	49,96	0,31	0,62	49,35	50,57	3,35	69 756	52,21	0,27	0,52	51,68	52,74	2,29	78 496	51,03	0,21	0,41	50,62	51,43	2,84	148 252

Tabel 7.11 Sampling Error Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014

Provinsi	Perkotaan							Perdesaan						Perkotaan + Perdesaan							
	Esti- masi	Stan- dard Error	RSE	Selang Kepercayaan		Efek Ran- cangan	Jumlah Sampel	Esti- masi	Stan- dard Error	RSE	Selang Kepercayaan		Efek Ran- cangan	Jumlah Sampel	Esti- masi	Stan- dard Error	RSE	Selang Kepercayaan		Efek Ran- cangan	Jumlah Sampel
				Batas Bawah	Batas Atas						Batas Bawah	Batas Atas						Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Aceh	21,41	1,46	6,82	18,55	24,27	0,70	1 335	22,59	1,49	6,59	19,67	25,51	1,79	2 343	22,26	1,15	5,16	20,01	24,51	1,50	3 678
Sumatera Utara	18,77	1,45	7,74	15,92	21,62	3,88	2 664	12,41	0,84	6,74	10,77	14,05	1,82	3 890	15,57	0,84	5,40	13,92	17,22	3,03	6 554
Sumatera Barat	21,28	1,77	8,31	17,81	24,75	1,47	1 403	14,29	1,27	8,91	11,79	16,78	1,41	1 444	17,27	1,07	6,20	15,17	19,37	1,49	2 847
Riau	20,00	1,79	8,97	16,49	23,52	2,02	1 065	11,98	1,22	10,20	9,58	14,37	2,08	1 310	15,23	1,06	6,95	13,16	17,31	2,15	2 375
Jambi	17,28	2,30	13,30	12,77	21,78	1,56	648	10,09	1,09	10,82	7,95	12,23	1,22	1 135	12,34	1,06	8,55	10,27	14,41	1,39	1 783
Sumatera Selatan	18,26	1,48	8,09	15,36	21,16	1,79	1 284	8,73	0,94	10,74	6,89	10,56	2,40	2 054	12,16	0,83	6,82	10,53	13,78	2,19	3 338
Bengkulu	10,78	1,80	16,73	7,25	14,32	0,83	543	8,67	0,99	11,38	6,74	10,61	0,60	1 061	9,38	0,90	9,55	7,62	11,13	0,70	1 604
Lampung	16,77	2,00	11,95	12,84	20,69	2,32	946	11,05	0,94	8,49	9,21	12,89	2,09	1 805	12,52	0,87	6,98	10,81	14,23	2,19	2 751
Kep. Bangka Belitung	13,29	1,96	14,72	9,46	17,13	0,90	531	9,94	1,96	19,70	6,10	13,78	1,22	588	11,57	1,39	11,99	8,85	14,29	1,05	1 119
Kepulauan Riau	15,23	2,33	15,27	10,67	19,79	3,01	566	14,07	2,43	17,26	9,31	18,83	0,47	374	15,09	2,07	13,72	11,04	19,15	2,72	940
DKI Jakarta	14,43	0,96	6,63	12,56	16,31	3,64	1 700	-	-	-	-	-	-	-	14,43	0,96	6,63	12,56	16,31	3,64	1 700
Jawa Barat	19,19	0,77	4,03	17,67	20,70	4,86	4 205	25,03	1,35	5,38	22,39	27,68	5,24	1 975	20,95	0,68	3,26	19,61	22,28	5,07	6 180
Jawa Tengah	15,15	0,68	4,49	13,82	16,49	2,15	4 383	14,07	0,81	5,74	12,49	15,66	3,34	3 053	14,60	0,53	3,63	13,57	15,64	2,74	7 436
DI Yogyakarta	9,99	1,48	14,78	7,09	12,88	2,24	561	9,68	1,83	18,88	6,09	13,26	1,48	332	9,90	1,17	11,84	7,60	12,19	2,02	893
Jawa Timur	13,82	0,70	5,09	12,44	15,20	2,81	4 068	11,53	0,81	7,00	9,95	13,12	4,44	3 099	12,66	0,54	4,23	11,61	13,71	3,56	7 167
Banten	16,83	1,15	6,80	14,59	19,08	3,54	1 634	24,61	2,29	9,29	20,13	29,09	4,38	735	19,10	1,06	5,56	17,02	21,18	3,89	2 369
Bali	5,58	0,80	14,24	4,02	7,14	1,21	1 005	5,14	0,97	18,93	3,23	7,04	1,22	740	5,41	0,62	11,37	4,21	6,62	1,21	1 745
Nusa Tenggara Barat	15,73	1,62	10,30	12,56	18,91	1,64	848	10,98	1,40	12,72	8,24	13,71	2,11	955	13,06	1,07	8,16	10,97	15,15	1,89	1 803
Nusa Tenggara Timur	18,14	1,92	10,56	14,39	21,90	0,86	946	6,46	0,69	10,61	5,12	7,80	1,19	2 592	8,62	0,69	8,01	7,27	9,98	1,14	3 538
Kalimantan Barat	14,28	1,32	9,23	11,69	16,86	0,83	962	8,78	0,93	10,61	6,96	10,61	1,56	1 791	10,37	0,77	7,45	8,86	11,89	1,30	2 753
Kalimantan Tengah	11,26	1,61	14,28	8,11	14,41	0,83	721	7,06	0,97	13,69	5,16	8,95	1,01	1 358	8,36	0,84	10,02	6,72	10,00	0,94	2 079
Kalimantan Selatan	12,00	1,65	13,78	8,76	15,24	1,72	831	7,63	0,93	12,17	5,81	9,45	1,12	1 163	9,47	0,88	9,29	7,75	11,20	1,42	1 994
Kalimantan Timur	17,88	1,46	8,16	15,02	20,73	1,39	1 079	16,85	2,04	12,08	12,86	20,84	1,80	930	17,48	1,19	6,83	15,14	19,82	1,55	2 009
Sulawesi Utara	25,56	2,07	8,10	21,50	29,61	0,90	671	17,10	1,57	9,16	14,03	20,16	0,68	971	21,36	1,29	6,06	18,83	23,90	0,79	1 642
Sulawesi Tengah	11,39	1,81	15,87	7,85	14,94	0,95	612	9,15	1,07	11,71	7,05	11,25	1,10	1 176	9,75	0,92	9,46	7,94	11,56	1,06	1 788
Sulawesi Selatan	18,34	2,07	11,26	14,29	22,39	3,58	1 646	9,19	0,76	8,32	7,69	10,69	1,31	2 453	12,86	0,99	7,73	10,91	14,81	2,76	4 099
Sulawesi Tenggara	16,14	2,18	13,52	11,86	20,41	0,91	679	7,79	1,01	12,90	5,82	9,76	0,96	1 321	10,10	0,99	9,78	8,16	12,03	1,01	2 000
Gorontalo	14,97	2,65	17,71	9,77	20,17	0,83	279	6,62	1,33	20,09	4,01	9,23	0,74	565	9,69	1,34	13,85	7,06	12,32	0,84	844
Sulawesi Barat	4,50	1,34	29,78	1,88	7,13	0,48	256	4,19	0,83	19,89	2,56	5,83	0,70	650	4,26	0,71	16,75	2,86	5,66	0,65	906
Maluku	29,14	3,48	11,95	22,31	35,97	1,48	532	22,57	2,71	12,02	17,25	27,88	1,51	912	25,28	2,15	8,52	21,06	29,50	1,50	1 444
Maluku Utara	17,47	2,58	14,79	12,41	22,54	0,58	463	12,12	1,64	13,55	8,90	15,33	0,74	751	13,72	1,39	10,14	10,99	16,45	0,69	1 214
Papua Barat	15,31	1,84	12,04	11,70	18,92	0,25	285	9,47	2,09	22,09	5,37	13,57	1,44	838	10,92	1,63	14,91	7,73	14,12	1,02	1 123
Papua	17,88	2,09	11,70	13,78	21,98	1,01	747	4,96	0,54	10,87	3,90	6,01	0,82	3 537	7,57	0,64	8,40	6,32	8,81	0,97	4 284
Indonesia	16,49	0,29	1,77	15,91	17,06	3,21	40 098	13,31	0,28	2,09	12,77	13,86	3,18	47 901	14,97	0,20	1,35	14,58	15,37	3,18	87 999

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://www.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710
Telp.: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax.: (021) 3857046
Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpsHQ@bps.go.id

